BAB III
HASIL PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN YANG MENJADI KEWENANGAN DAERAH

Capaian penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dapat dilihat dari hasil capaian indikator makro/indikator tujuan, indikator sasaran, indikator program dan kegiatan. Capaian indikator makro dan atau indikator tujuan Pemerintah Kota Mojokerto tahun 2021 dapat dijelaskan sebagai berikut :

3.1 CAPAIAN INDIKATOR MAKRO

Penyelenggaraan pemerintahan Pemerintah Kota Mojokerto dilengkapi dengan indikator kinerja yang terukur sebagai parameter keberhasilan kinerja pembangunan daerah. Untuk menggambarkan kemajuan pembangunan daerah digunakan indikator makro pembangunan yang terdiri dari indeks pembangunan manusia, angka kemiskinan, angka pengangguran, pertumbuhan ekonomi, pendapatan per kapita, dan ketimpangan pendapatan *(gini rasio)*. Indikator tersebut merupakan indikator yang bersifat dampak *(impact)* dari pelaksanaan program/kegiatan yang bersifat lokal, regional, dan nasional. Oleh karena itu, diperlukan sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten/kota serta pelaku pembangunan lainnya. Capaian Indikator Makro Kota Mojokerto pada Tahun 2021 disajikan pada Tabel 3.1.

Tabel 3. 1 Capaian Indikator Makro Kota Mojokerto Tahun 2021

No	Indikator Kinerja Makro	Capaian Kinerja Tahun 2020	Capaian Kinerja Tahun 2021	Perubahan
1.	Indeks Pembangunan Manusia	78,04	78,43	0,39
2.	Angka Kemsikinan	6,24	6,39	0,15%
3.	Angka Pengangguran	6,74	6,87	0,13%
4.	Pertumbuhan Ekonomi	-3,69	3,65	7,34%
5.	Pendapatan Per Kapita	49.840.000	52.041.000	4,42%
6.	Ketimpangan Pendapatan (Gini Ratio)	0,355	0,334	(5,92)

Sumber: BPS Kota Mojokerto, 2022

3.1.1 INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) adalah indeks komposit yang dibuat lebih dari satu indeks yang digabung menjadi indeks tunggal. Indeks ini penting untuk melihat

sampai seberapa jauh pertumbuhan dan pemerataan hasil pembangunan mampu secara nyata memberikan output berupa peningkatan kebutuhan fisik dasar manusia dan perluasan kemampuan manusia untuk melakukan pilihan-pilihan. Agak berbeda dengan Indeks Mutu Hidup (IMH) yang berfungsi sebagai indikator fisik (mengukur tingkat kemajuan), maka IPM cenderung berfungsi sebagai indikator posisi (membandingkan keberhasilan pembangunan antar waktu atau wilayah). Sebagai ukuran kemajuan pembangunan manusia, IPM dapat digunakan untuk mengkaji kemajuan pembangunan manusia dalam dua aspek:

1. Untuk perbandingan antar wilayah yang memperlihatkan posisi suatu wilayah relatif terhadap wilayah yang lain berdasarkan besaran IPM yang disusun dalam suatu peringkat dari kemajuan pembangunan manusia di berbagai wilayah dalam kawasan yang sama.
2. Untuk mengkaji kemajuan dari pencapaian setelah berbagai program diimplementasikan dalam suatu periode.

Indek Pembangunan Manusia (IPM) disusun dari tiga komponen yaitu :

1. Umur Panjang dan Hidup Sehat, diukur dengan indeks kesehatan;
2. Pengetahuan, diukur dengan kombinasi antara harapan lama sekolah dan rata-rata lamanya sekolah yang kemudian dinilai dengan indeks pendidikan; dan
3. Standar Hidup Layak, diukur dengan pengeluaran per kapita yang telah disesuaikan (PPP rupiah).

Pada penghitungan IPM dengan metode baru, bahwa untuk mengukur tingkat kemajuan dan pencapaian pembangunan manusia terhadap sasaran ideal (IPM=100) dapat dilihat dari indikator pertumbuhan IPM. Laju pertumbuhan IPM menunjukan seberapa besar peningkatan keberhasilan pembangunan sumber daya manusia pada suatu wilayah dibandingkan tahun sebelumnya. Dalam pengertian sehari-hari pertumbuhan IPM bisa dikatakan sebagai suatu kepekaan terhadap perlakuan yang diberikan berkaitan dengan pembangunan manusia. Semakin tinggi nilai pertumbuhan IPM pada suatu wilayah, maka semakin cepat kenaikan IPM yang berhasil diraih dalam periode satu tahun tersebut.

Capaian pembangunan manusia di suatu wilayah pada waktu tertentu dapat dikelompokkan ke dalam empat kelompok. Pengelompokan ini bertujuan untuk mengorganisasikan wilayah menjadi kelompok-kelompok yang sama dalam hal pembangunan manusia. Untuk itu *UNDP* memberikan kriteria sebagai berikut :

Tabel 3. 2 Kelompok Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Tingkatan Status	Kelompok
Rendah	IPM < 60
Sedang	60 ≤ IPM < 70
Tinggi	70 ≤ IPM < 80
Sangat Tinggi	IPM ≥ 80

Sumber: UNDP

Penyajian Indeks Pembangunan Manusia antar waktu, sangat bermakna karena mampu memperlihatkan kemajuan maupun kemunduran dari status capaian IPM itu sendiri. Sementara, untuk melihat sejauh mana tingkat kemajuan IPM dapat digunakan indikator pertumbuhan IPM yang menunjukan perubahan antar waktu.

Tabel 3. 3 IPM Nasional, Jawa Timur, dan Wilayah Gerbangkertosusila Tahun 2017 - 2021

Wilayah	Tahun				
	2017	2018	2019	2020	2021
Kabupaten Sidoarjo	78,70	79,50	80,05	80,29	80,65
Kabupaten Mojokerto	72,36	72,64	73,53	73,83	74,15
Kabupaten Lamongan	71,11	71,97	72,57	72,58	73,12
Kabupaten Gresik	74,84	75,28	76,10	76,11	76,50
Kabupaten Bangkalan	62,30	62,87	63,79	64,11	64,36
Kota Mojokerto	76,77	77,14	77,96	78,04	78,43
Kota Surabaya	81,07	81,74	82,22	82,23	82,31
Prov Jawa Timur	**70,27**	**70,77**	**71,50**	**71,71**	**72,14**
Indonesia	**70,81**	**71,39**	**71,92**	**71,94**	**72,29**

Sumber: BPS Kota Mojokerto, 2022

Pembangunan manusia di Kota Mojokerto dari tahun ke tahun terus mengalami kemajuan. Tahun 2017 IPM Kota Mojokerto sebesar 76,77 dan meningkat menjadi 78,43 di pada 2021. Selama kurun waktu lima tahun, IPM Kota Mojokerto selalu dalam kategori Tinggi. Hal ini mengindikasikan bahwa pembangunan yang terkait sumber daya manusia oleh pemerintah daerah Kota Mojokerto tetap konsisten bahkan semakin baik, terbukti dari tahun ke tahun mampu meningkatkan kualitas dari sumber daya manusia di Kota Mojokerto.

3.1.2 ANGKA KEMISKINAN

Salah satu aspek penting untuk mendukung strategi penanggulangan kemiskinan adalah tersedianya data kemiskinan yang akurat. Pengukuran kemiskinan yang dapat dipercaya dapat menjadi instrumen tangguh bagi pengambil kebijakan dalam memfokuskan perhatian pada kondisi hidup orang miskin. Data kemiskinan yang baik dapat digunakan untuk mengevaluasi kebijakan pemerintah terhadap kemiskinan, membandingkan kemiskinan antar waktu dan daerah, serta menentukan target penduduk miskin dengan tujuan untuk memperbaiki kondisi mereka.

Tabel di bawah ini memperlihatkan perkembangan jumlah dan persentase penduduk miskin wilayah Gerbangkertosusila, Jawa Timur, dan Nasional tahun 2017 – 2021. Pada tahun 2017 – 2019 angka kemiskinan Kota Mojokerto menurun, namun sejak tahun 2020 hingga 2021 meningkat tajam. Hal ini dikarenakan Pandemi Covid-19 yang menyebabkan pembatasan kegiatan masyarakat sehingga menghambat roda perekonomian. Kelompok paling rentan yang terjun di bawah garis kemiskinan ialah pekerja informal. Hal ini terjadi karena pekerja informal berbeda dengan kelompok formal yang dapat bekerja di rumah.

Tabel 3. 4 Jumlah Penduduk Miskin Nasional, Jawa Timur, dan Wilayah Gerbangkertosusila Tahun 2017 – 2021 (000 jiwa)

Wilayah	2017		2018		2019		2020		2021	
	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%
Kabupaten Sidoarjo	135,4	6,23	125,75	5,69	119,29	5,32	127,05	5,59	137,15	5,93
Kabupaten Mojokerto	111,79	10,19	111,55	10,08	108,81	9,75	118,80	10,57	120,54	10,62
Kabupaten Lamongan	171,38	14,42	164,00	13,80	157,11	13,21	164,68	13,85	166,82	13,86
Kabupaten Gresik	164,08	12,80	154,02	11,89	148,61	11,35	164,05	12,40	166,35	12,42
Kabupaten Bangkalan	206,53	21,32	191,33	19,59	186,11	18,90	204,00	20,56	215,97	21,57
Kota Mojokerto	7,28	5,73	7,04	5,50	6,63	5,15	8,09	6,24	8,37	6,39
Kota Surabaya	154,71	5,39	140,81	4,88	130,55	4,51	145,67	5,02	152,49	5,23
Prov Jawa Timur	**4.617**	**11,77**	**4.332**	**10,98**	**4.112**	**10,37**	**4.419**	**11,09**	**4.259**	**10,59**
Indonesia	**27.771**	**10,64**	**25.950**	**9,82**	**25.145**	**9,41**	**26.424**	**9,78**	**26.503**	**9,71**

Sumber: BPS Kota Mojokerto, 2022

Pandemi Covid-19 tidak hanya menjadi isu regional, melainkan telah menjadi isu global. Presiden telah menetapkan kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan

Masyarakat (PPKM) untuk menekan angka penyebaran Covid-19. Namun di sisi lain, pemberlakuan PPKM menghambat giat ekonomi masyarakat. Pemerintah Kota Mojokerto melakukan kolaborasi dan sinergitas yang kuat antar sektor. Banyak penduduk Kota Mojokerto di sektor perdagangan dan jasa, serta tenaga kerja yang mengalami Pemutusan Hubungan Kerja (PHK). Sejak tahun 2020 lalu Pemerintah Kota Mojokerto secara masif telah mengadakan program Inkubasi Wirausaha sebagai salah satu upaya pemulihan ekonomi. Minimnya sektor pertanian di Kota Mojokerto, membuat pemerintah melakukan upaya intervensi melalui program-program pada sektor perdagangan, sektor jasa, serta konstruksi.

3.1.3 ANGKA PENGANGGURAN

Indikator utama ketenagakerjaan yang sering digunakan sebagai ukuran keberhasilan dalam menangani permasalahan ketenagakerjaan adalah Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) dan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT). Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) merupakan rasio antara jumlah angkatan kerja dengan jumlah penduduk usia kerja/usia produktif 15 tahun ke atas. Selain TPAK, dalam analisis angkatan kerja dikenal pula indikator untuk mengukur pengangguran yaitu Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT). Pengangguran terbuka didefinisikan sebagai orang yang mencari pekerjaan atau yang sedang mempersiapkan usaha atau yang tidak mencari pekerjaan karena merasa tidak mungkin lagi mendapatkan pekerjaan, termasuk mereka yang baru mendapat kerja tetapi belum mulai bekerja.

Angka TPAK dan TPT bisa mengindikasikan besarnya persentase penduduk usia kerja yang aktif secara ekonomi di suatu negara/wilayah, serta besarnya persentase angkatan kerja yang masuk dalam kategori pengangguran. Idealnya capaian hasil pembangunan suatu wilayah dikatakan tinggi apabila angka TPAK tinggi dan TPT yang rendah.

Tabel 3. 5 TPT dan TPAK Nasional, Jawa Timur, dan Wilayah Gerbangkertosusila Tahun 2017 - 2021

Wilayah	2017		2018		2019		2020		2021	
	TPT	TPAK	TPT	TPAK	TPT	TPAK	TPT	TPAK	TPT	TPAK
Kabupaten Sidoarjo	4,97	64,54	4,73	64,53	4,72	66,82	10,97	67,17	10,87	66,47
Kabupaten Mojokerto	5,00	73,23	4,27	71,91	3,68	69,35	5,75	69,79	5,54	70,47
Kabupaten Lamongan	4,12	68,65	3,17	68,02	4,00	68,89	5,13	70,81	4,90	70,72
Kabupaten Gresik	4,54	68,04	5,82	67,29	5,54	65,65	8,21	66,53	8,00	69,43

Wilayah	2017		2018		2019		2020		2021	
	TPT	TPAK	TPT	TPAK	TPT	TPAK	TPT	TPAK	TPT	TPAK
Kabupaten Bangkalan	4,48	68,07	5,25	68,86	5,84	63,11	8,77	67,00	8,07	68,66
Kota Mojokerto	3,61	68,65	2,45	69,19	2,65	64,88	6,74	68,21	6,87	67,09
Kota Surabaya	5,98	66,36	6,12	66,98	5,87	68,61	9,79	68,05	9,68	67,30
Jawa Timur	**4,00**	**68,78**	**3,91**	**69,37**	**3,82**	**69,45**	**5,84**	**70,33**	**5,74**	**70,00**
Indonesia	**5,50**	**66,67**	**5,30**	**67,31**	**5,23**	**67,53**	**7,07**	**67,77**	**6,49**	**67,80**

Sumber: BPS Kota Mojokerto, 2022

TPT di Kota Mojokerto pada tahun 2021 kembali naik menjadi 6,87 persen sejak tahun 2020. Kenaikan di tahun 2021 relatif kecil hanya berkisar 0,13 persen jika dibandingkan kenaikan tahun sebelumnya yaitu sebesar 4,09 persen. Fenomena kenaikan TPT pada tahun 2020 terjadi hampir pada semua wilayah di Indonesia. Hal ini terjadi karena dampak pandemi Covid-19 yang meruntuhkan semua aspek kehidupan dari sisi sosial maupun ekonomi. Padahal pada tahun-tahun sebelumnya TPT Kota Mojokerto menunjukan trend menurun, dimana menumbuhkan optimisme bagi masyarakat Kota Mojokerto untuk mendapatkan kehidupan yang lebih baik.

Capaian TPT Kota Mojokerto berbanding terbalik dengan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) tahun 2021 yang mengalami penurunan dibandingkan tahun sebelumnya. TPAK Kota Mojokerto tahun 2020 sebesar 68,21 persen menjadi 67,09 persen atau mengalami penurunan sebesar 1,12 persen poin pada tahun 2021. Angka TPAK Kota Mojokerto masih di bawah TPAK Jawa Timur dan TPAK nasional.

3.1.4 PERTUMBUHAN EKONOMI

Salah satu cara untuk menilai pertumbuhan ekonomi adalah melalui penghitungan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Menurut pendekatan produksi, Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) adalah jumlah nilai barang dan jasa akhir yang diproduksikan oleh suatu kegiatan ekonomi di daerah tersebut dikurangi biaya antara masing-masing total produksi bruto tiap kegiatan sub sektor atau sektor.

PDRB Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) bertujuan untuk melihat perkembangan PDRB atau perekonomian secara riil yang kenaikannya/ pertumbuhannya tidak dipengaruhi oleh adanya perubahan harga atau inflasi/ deflasi. Penghitungan PDRB yang berlaku saat ini sudah menggunakan metode baru dan mengalami perubahan tahun dasar yaitu menggunakan tahun dasar 2010. Berikut disajikan perkembangan nilai PDRB Kota Mojokerto Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB), PDRB Kota Mojokerto Atas Dasar Harga

Konstan (ADHK) dan Laju Pertumbuhan Ekonomi selama kurun waktu 5 tahun terakhir sebagai berikut.

Tabel 3. 6 Perkembangan Nilai PDRB Kota Mojokerto Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) Tahun 2017-2021 (Juta Rupiah)

Lapangan Usaha	2017	2018	2019	2020*	2021**
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	37 964,1	39 566,0	39 888,7	43 570,9	41 385,3
Pertambangan dan Penggalian	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Industri Pengolahan	669 352,0	734 546,3	776 431,7	749 658,1	785 113,7
Pengadaan Listrik dan Gas	4 448,0	4 766,0	5 124,0	5 133,9	5 319,9
Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	6 276,1	6 580,3	6 854,0	7 197,0	7 722,1
Konstruksi	635 252,4	675 545,2	711 455,2	672 366,7	684 995,1
Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	1 732 507,9	1 913 304,3	2 054 344,0	1 879 171,9	2 040 288,0
Transportasi dan Pergudangan	157 883,7	171 105,4	186 531,6	173 616,2	185 180,5
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	402 044,4	440 026,1	482 111,8	451 710,1	483 906,3
Informasi dan Komunikasi	692 159,0	737 483,2	794 651,6	856 829,1	909 916,1
Jasa Keuangan dan Asuransi	484 930,2	522 589,7	554 573,2	552 938,2	573 268,3
Real Estate	160 951,1	174 732,6	185 375,7	193 995,7	194 867,8
Jasa Perusahaan	45 875,9	50 484,1	54 136,7	50 843,9	51 585,9
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	274 567,7	302 621,6	334 206,7	336 248,3	335 356,8
Jasa Pendidikan	266 872,9	282 483,1	304 143,4	318 422,7	319 064,0
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	69 182,2	73 291,8	79 159,7	86 878,8	92 348,5
Jasa Lainnya	207 967,2	224 745,0	240 342,0	209 496,3	225 314,1
PDRB	**5 848 234,7**	**6 353 870,7**	**6 809 330,0**	**6 588 057,7**	**6 935 632,3**

Sumber: BPS Kota Mojokerto, 2022
Keterangan : *) Angka sementara
**) Angka sangat sementara

Tabel 3. 7 Perkembangan Nilai PDRB Kota Mojokerto Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) Tahun 2017-2021 (Juta Rupiah)

Lapangan Usaha	2017	2018	2019	2020*	2021**
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	25 355,7	25 551,2	25 158,6	27 210,4	26 554,3
Pertambangan dan Penggalian	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Industri Pengolahan	479 254,5	506 999,5	525 863,8	503 810,5	518 811,7
Pengadaan Listrik dan Gas	3 996,8	4 191,6	4 453,3	4 438,4	4 551,9
Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	5 837,9	6 085,0	6 381,5	6 661,5	7 072,2

Lapangan Usaha	2017	2018	2019	2020*	2021**
Konstruksi	483 704,0	511 849,4	541 446,0	507 533,1	511 896,5
Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	1 327 943,0	1 410 378,0	1 493 486,1	1 355 601,4	1 444 303,0
Transportasi dan Pergudangan	115 047,8	122 207,6	131 717,6	123 346,2	130 523,1
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	281 231,9	303 425,8	327 021,8	300 346,2	304 716,1
Informasi dan Komunikasi	644 050,1	685 621,5	735 246,5	792 049,0	836 423,5
Jasa Keuangan dan Asuransi	325 381,6	340 463,9	355 622,7	355 686,8	357 491,5
Real Estate	123 842,6	128 755,6	133 952,3	138 337,6	138 684,6
Jasa Perusahaan	33 001,9	34 764,2	36 631,3	33 977,5	34 273,0
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	199 252,2	208 050,2	216 931,6	211 685,2	211 252,3
Jasa Pendidikan	192 720,4	200 803,1	213 157,2	219 292,2	219 975,0
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	52 714,5	55 684,8	59 021,0	63 777,6	66 289,8
Jasa Lainnya	167 110,0	174 401,0	184 587,1	157 814,0	163 671,5
PDRB	**4 460 444,9**	**4 719 232,4**	**4 990 678,5**	**4 801 464,0**	**4 976 489,76**
Pertumbuhan Ekonomi	**5,65**	**5,80**	**5,65**	**-3,69**	**3,65**

Sumber: BPS Kota Mojokerto, 2022
Keterangan : *) Angka sementara
**) Angka sangat sementara

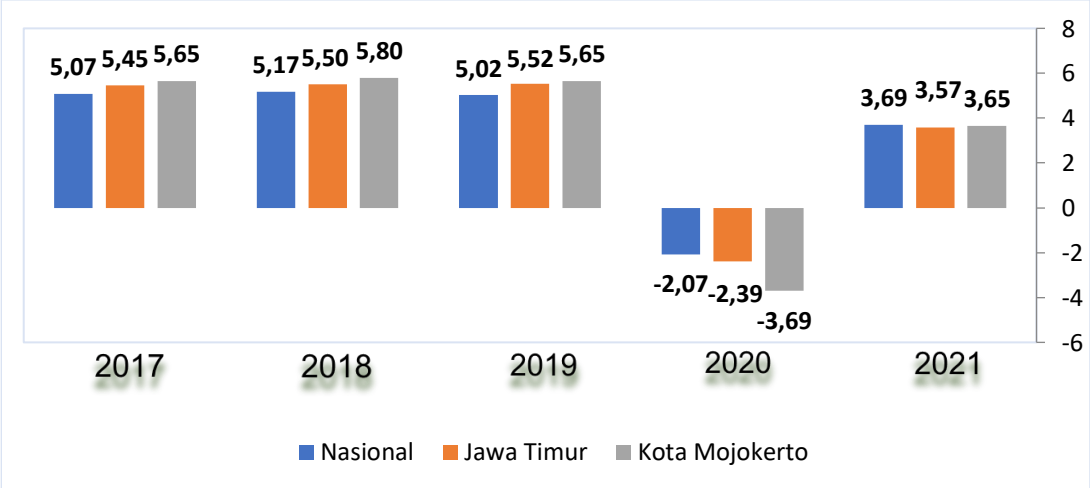

Gambar 3. 1 Perkembangan Pertumbuhan Ekonomi Kota Mojokerto Tahun 2017-2021

Sumber: BPS Kota Mojokerto, 2022, diolah

Selama tahun 2017-2021, laju pertumbuhan ekonomi Kota Mojokerto mengalami fluktuasi dimana pada tahun 2017 sebesar 5,65%, menguat menjadi 5,80% di tahun 2019, melambat pada tahun 2019, dan menurun tajam di angka -3,69% di tahun 2020. Pada tahun 2021 kembali menguat di angka 3,65%. Kenaikan pertumbuhan ekonomi di tahun

2021 meskipun di atas Jawa Timur, namun masih di bawah ekonomi nasional. Seiring dengan melambatnya ekonomi global yang berdampak terhadap hampir seluruh dunia, pertumbuhan ekonomi Jawa Timur masih bertahan pada level pertumbuhan 5,25% pada tahun 2019, terkontraksi pada tahun 2020 di angka -2,39% dan kembali meningkat menjadi 3,57% di tahun 2021. Tidak berbeda dengan kondisi ekonomi Kota Mojokerto dan Jawa Timur, kondisi pertumbuhan ekonomi nasional pada tahun 2020 juga menurun tajam hingga -2,07% dan kembali menguat di angka 3,69% di tahun 2021.

3.1.5 PDRB PER KAPITA

Pendapatan per kapita merupakan sebuah indikator yang sangat dikenal, terutama oleh para pemerhati yang berkecimpung dalam penanganan peningkatan kemakmuran masyarakat. PDRB per kapita adalah nilai nominal PDRB dibagi dengan jumlah penduduk pertengahan tahun. Sehingga besaran nilainya sangat dipengaruhi oleh jumlah penduduk pertengahan tahun, dalam arti bahwa semakin tinggi jumlah penduduk akan semakin kecil besaran PDRB per kapita suatu wilayah. Oleh sebab itu, laju pertumbuhan penduduk idealnya tidak melebihi laju pertumbuhan ekonomi suatu wilayah.

Semakin tinggi PDRB per kapita suatu wilayah mengindikasikan semakin baik tingkat perekonomian wilayah tersebut, meskipun ukuran ini tidak dapat memperlihatkan kesenjangan pendapatan antar penduduk. Walaupun masih terdapat keterbatasan, indikator ini cukup memadai untuk mengetahui tingkat perekonomian suatu wilayah dalam lingkup makro. Dan data PDRB sebagai indikator makro ekonomi dapat digunakan sebagai acuan melihat kemampuan suatu daerah dalam menghasilkan produk domestik barang dan jasa yang berada di wilayah tersebut.

Pada umumnya PDRB per kapita disajikan berdasarkan Atas Dasar Harga Berlaku, karena PDRB per kapita selain dipengaruhi faktor produksi juga dipengaruhi oleh harga barang/jasa. Namun gambaran tersebut tidak dapat langsung dijadikan sebagai ukuran peningkatan ekonomi maupun penyebaran di setiap strata ekonomi karena pengaruh inflasi sangat dominan dalam pembentukan PDRB Atas Dasar Berlaku.

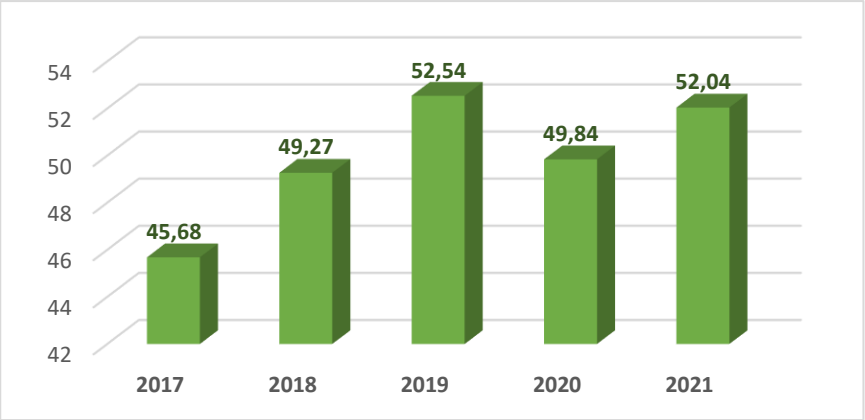

Gambar 3. 2 PDRB Per Kapita Kota Mojokerto 2017 – 2021 (Juta Rupiah)

Sumber: BPS Kota Mojokerto, 2022, diolah

Dari grafik di atas memperlihatkan PDRB per kapita Kota Mojokerto periode lima tahun terakhir. Pada tahun 2017 PDRB per kapita Kota Mojokerto telah mencapai sekitar 45,68 juta rupiah. Tahun 2018 dan 2019 PDRB per kapita Kota Mojokerto berturut-turut mencapai 49,27 dan 52,54 juta rupiah. Selama tahun 2020 PDRB per kapita Kota Mojokerto menjadi 49,84 juta rupiah atau turun sebesar 2,7 persen dibanding tahun sebelumnya. Hal ini merupakan indikasi bahwa hingga tahun 2019 umumnya kesejahteraan masyarakat Kota Mojokerto membaik setiap tahun. Namun pada tahun 2020 menurun sebagai akibat pandemi Covid-19 yang menyerang seluruh negara di dunia, tidak terkecuali Indonesia. Pada tahun 2021 PDRB per kapita Kota Mojokerto kembali menguat menjadi 52,04 atau meningkat sebesar 2,97 persen. Hal ini terjadi karena sinergi pelaksanaan program kegiatan Pemerintah Kota Mojokerto yang mendukung peningkatan ekonomi masyarakat serta bukti keberhasilan penanganan pandemi covid-19 di wilayah Kota Mojokerto sehingga roda perekonomian kembali bergerak.

Jika dibandingkan dengan Nasional, Jawa Timur, dan daerah sekitar wilayah Gerbangkertosusila, maka posisi PDRB per kapita Kota Mojokerto ditunjukan pada tabel di bawah ini:

Tabel 3. 8 PDRB Per Kapita Nasional, Jawa Timur, dan Wilayah Gerbangkertosusila Tahun 2017 – 2021

Wilayah	Tahun				
	2017	2018	2019	2020	2021
Kabupaten Sidoarjo	79,74	85,29	90,62	86,22	100,69
Kabupaten Mojokerto	64,44	69,14	73,65	72,65	77,53
Kabupaten Lamongan	28,91	31,10	33,11	32,58	30,26
Kabupaten Gresik	86,29	100,19	105,68	101,06	109,37

Wilayah	Tahun				
	2017	2018	2019	2020	2021
Kabupaten Bangkalan	22,32	24,35	24,98	23,40	23,01
Kota Mojokerto	45,94	49,27	52,54	49,84	52,04
Kota Surabaya	172,20	186,76	200,36	190,66	204,92
Prov Jawa Timur	**51,38**	**55,41**	**59,19**	**57,55**	**60,04**
Indonesia	**51,88**	**56,17**	**59,32**	**57,25**	**62,23**

Sumber: BPS Kota Mojokerto, 2022

3.1.6 KETIMPANGAN PENDAPATAN (GINI RASIO)

Koefisien Gini (Gini Ratio) adalah ukuran ketidakmerataan atau ketimpangan agregat (secara keseluruhan) yang angkanya berkisar antara nol (pemerataan sempurna) hingga satu (ketimpangan yang sempurna), sehingga nilai Gini Ratio berkisar antara 0–1. Indikator ini mencerminkan tingkat pemerataan pendapatan penduduk suatu wilayah. Gini Ratio Kota Mojokerto tahun 2017 tercatat 0,39. Selanjutnya tahun 2018 dan 2019 mengalami penurunan menjadi 0,341 dan 0,309. Namun pada tahun 2020 indikator ini kembali meningkat menjadi 0,355. Rata-rata pendapatan penduduk yang menurun selama pandemi Covid-19 memperlebar jurang antara penduduk miskin dan non miskin, yang berarti memperdalam ketimpangan pendapatan antar penduduk. Dan di tahun 2021 koefisien Gini Kota Mojokerto menurun kembali menjadi 0,334.

Bila dibandingkan dengan angka koefisien Gini Provinsi Jawa Timur dan Nasional, maka Gini Ratio Kota Mojokerto lebih rendah. Hal ini menandakan bahwa tingkat pemerataan pendapatan antar penduduk di Kota Mojokerto masih lebih baik daripada Jawa Timur maupun nasional.

Tabel 3. 9 Gini Rasio Nasional, Jawa Timur, dan Wilayah Gerbangkertosusila Tahun 2017 - 2021

Wilayah	2017	2018	2019	2020	2021
Kabupaten Sidoarjo	0,34	0,346	0,311	0,340	0,347
Kabupaten Mojokerto	0,32	0,306	0,270	0,325	0,294
Kabupaten Lamongan	0,32	0,313	0,319	0,296	0,292
Kabupaten Gresik	0,29	0,270	0,282	0,299	0,313
Kabupaten Bangkalan	0,3	0,287	0,314	0,322	0,303
Kota Mojokerto	0,39	0,341	0,309	0,355	0,334
Kota Surabaya	0,39	0,358	0,406	0,344	0,351
Prov Jawa Timur	**0,396**	**0,379**	**0,370**	**0,366**	**0,374**

Wilayah	2017	2018	2019	2020	2021
Indonesia	**0,393**	**0,389**	**0,382**	**0,385**	**0,381**

Sumber: BPS Kota Mojokerto, 2022

3.2 CAPAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA

Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Pemerintah Kota Mojokerto bertujuan untuk memberi gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Kota Mojokerto sehingga target pencapaian pembangunan menjadi jelas dan terukur. IKU Daerah Kota Mojokerto tahun 2021 sebagaimana dituangkan dalam Perjanjian Kinerja antara Walikota Mojokerto dengan Gubernur Provinsi Jawa Timur. Perjanjian Kinerja Walikota tersebut dicapai dengan dukungan pencapaian IKU perangkat daerah, baik secara langsung maupun tidak langsung. IKU perangkat daerah yang secara langsung mendukung pencapaian IKU Daerah memiliki makna bahwa perangkat daerah tersebut secara tugas dan fungsi memiliki peran lebih dominan dibandingkan dengan IKU perangkat daerah lainnya dalam pencapaian target kinerja dari setiap misi pembangunan jangka menengah Kota Mojokerto Tahun 2018 – 2023. Adapun capaian IKU Daerah Kota Mojokerto Tahun 2021 disajikan pada Tabel 3.10 berikut.

Tabel 3. 10 Capaian IKU Daerah Tahun 2021

No.	Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Tahun 2021		Keterangan
			Target	Realisasi	
Misi Kesatu : Mewujudkan SDM Berkualitas Melalui Peningkatan Akses dan Kualitas Pendidikan dan Pelayanan Kesehatan					
Indeks Pembangunan Manusia		***Poin***	***78,20***	***78,43***	
1	Indeks Pendidikan	Poin	0,732	0,738	
2	Indeks Kesehatan	Poin	0,821	0,821	
3	Indeks Pengeluaran per kapita	Poin	0,794	0,796	
Misi Kedua : Mewujudkan Ketertiban, Supremasi Hukum, dan HAM					
Indeks Ketentraman dan Ketertiban		***Poin***	***94***	***96,43***	
1	Persentase pelanggaran perda yang terselesaikan	Persen	88	100	
2	Persentase konflik sosial yang terselesaikan	Persen	100	92,86	
Misi Ketiga : Mewujudkan pemerintah daerah yang efektif, demokratis, bersih, profesional dan adil dalam melayani					
Indeks Reformasi Birokrasi		***Kategori***	***B (63-70)***	***-***	*Belum diumumkan*
1	Nilai SAKIP	Kategori	BB (70-75)	-	*Belum diumumkan*

No.	Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Tahun 2021		Keterangan
			Target	Realisasi	
2	Opini BPK	Kategori	WTP	-	*Belum diumumkan*
3	Indeks Kepuasan Masyarakat	Poin	81,26-88,30	84,44	
4	Jumlah unit yang mendapatkan predikat WBK/ WBBM	Unit	2	3	
5	Indeks SPBE	Poin	3,30	2,92	
6	Indeks Manajemen Risiko	Level	1	2	
7	Sistem Merit	Kategori	Kurang (175-249)	Baik (288)	
Misi Keempat : Mewujudkan ekonomi daerah yang mandiri, berdaya saing, berkeadilan dan berbasis pada ekonomi kerakyatan melalui peningkatan fasilitas pembangunan infrastruktur daerah					
Laju Pertumbuhan Ekonomi		***Persen***	***2,5-3,5***	***3,65***	
1	Nilai realisasi investasi (PMA dan PMDN)	Juta Rp	360.000	340.452	
2	Pertumbuhan PDRB sektor industri	Persen	0,7-1,4	2,98	
3	Pertumbuhan PDRB sektor perdagangan	Persen	1,5-2,4	6,54	
4	Pertumbuhan PDRB sektor lainnya	Persen	1,6-2,5	2,53	
5	Pertumbuhan PDRB sektor pariwisata	Persen	1,5	1,45	
6	Laju inflasi	Persen	1,9-2,1	1,64	
Indeks Infrastuktur		***Persen***	***85,19***	***86,27***	
1	Indeks infrastuktur pekerjaan umum	Persen	87,56	89,36	
2	Indeks infrastuktur dasar permukiman	Persen	96,46	96,70	
3	Indeks infrastuktur Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Persen	92,10	94,20	
4	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah (IKLHD)	Persen	57,79	58,08	
Misi Kelima : Mewujudkan Ketahanan Sosial Budaya dalam Kerangka Integrasi Nasional, pada Tatanan Masyarakat yang Bermartabat, Berakhlak Mulia, Beretika, dan Berbudaya Luhur Berlandaskan Pancasila					
Indeks Kesalehan Sosial		***Poin***	***76,23***	***91,90***	
1	Jumlah apresiasi seni dan budaya	Kegiatan	6	12	
2	Persentase konflik SARA yang terselesaikan	Persen	100	100	
Misi Keenam : Mewujudkan Partispasi Masyarakat Melalui Pemberian Akses dan Kesempatan dalam Pembangunan					
Indeks Gini		***Poin***	***0,353***	***0,334***	
1	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	Persen	6,1-6,4	6,87	
2	Angka Kemiskinan	Persen	5,84 -6,04	6,39	
Indeks Pembangunan Gender (IPG)		***Poin***	***93,28***	***93,47***	

No.	Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Tahun 2021		Keterangan
			Target	Realisasi	
3	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	Poin	91,00	83,30*	
Misi Ketujuh : Mewujudkan Anggaran Pendapatan dan Belanja yang Lebih Mengutamakan Kesejahteraan Masyarakat					
Kapasitas Fiskal Daerah		***Juta Rp***	***384.000***	***466.621***	
1	Rasio Kemandirian Keuangan Daerah	Persen	30,415	36,238	

Sumber: Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah, 2022, diolah
Keterangan : *) Angka sementara

Berdasarkan Tabel 3.10 misi pembangunan jangka menengah Kota Mojokerto tahun 2018 – 2023 dilengkapi parameter yang menjadi ukuran pencapaian kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Kota Mojokerto. Pencapaian indikator pada ***misi pertama*** ditunjukan dengan ketercapaian Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Capaian IPM Kota Mojokerto tercatat sebesar 78,43 di tahun 2021. Hal ini berarti bahwa kualitas hidup masyarakat Kota Mojokerto mencapai level yang tinggi. Tercapainya angka IPM yang lebih besar dari target juga mengindikasikan keberhasilan Pemerintah Kota Mojokerto dalam melaksanakan program pembangunan. Sebagai ukuran kualitas hidup, IPM dibangun melalui pendekatan tiga dimensi dasar. Dimensi tersebut mencakup pengetahuan; umur panjang dan sehat; dan kehidupan yang layak. Ketiga dimensi tersebut dirumuskan melalui indikator Indeks Pendidikan, Indeks Kesehatan dan Indeks Pengeluran per Kapita. Indeks Pendidikan pada tahun 2021 teralisasi sebesar 0,738, lebih besar 0,006 dari target yang ditetapkan yaitu 0,732. Indeks Kesehatan tercapai sebesar 0,821 dan capaian Indeks Pengeluaran per Kapita tercatat sebesar 0,796.

Indeks Pendidikan atau dimensi pendidikan pada komponen IPM disusun oleh 2 (dua) indikator utama, yaitu Rata-rata lama sekolah (RLS) dan Harapan lama sekolah (HLS). RLS dihitung berdasarkan rata – rata berapa lama seseorang mengenyam pendidikan, sedangkan HLS dihitung dengan menanyakan berapa lama harapan mengenyam pendidikan. Pada tahun 2021, realiasi indeks pendidikan sebesar 0.738 lebih besar 0.006 dari target yang ditetapkan yaitu 0.732. Meskipun selama tahun 2021 Kota Mojokerto masih dilanda pandemi Covid-19, kebijakan pemerintah mengubah sistem pendidikan dari luring ke daring masih dapat menaikkan indeks pendidikan sebesar 0.007 dari tahun sebelumnya.

Indeks kesehatan pada komponen IPM disusun dari indikator Usia Harapan Hidup. Angka harapan hidup digunakan untuk menilai derajat kesehatan penduduk. Artinya, jika angka harapan hidup meningkat, maka derajat kesehatan penduduk juga meningkat. Capaian indeks kesehatan tahun 2021 sebesar 0.821 sesuai dengan target kinerja di

tahun tersebut atau hanya mengalami kenaikan 0.001 dibanding tahun sebelumnya. Indeks pengeluaran per kapita merepresentasikan standar hidup layak sebagai salah satu dimensi dari pembagunan manusia. Tahun 2021, indeks pengeluaran per kapita Kota Mojokerto sebesar 0.796 lebih besar 0.002 dari target yang ditetapkan yaitu 0.794.

Pencapaian indikator pada ***misi kedua*** ditunjukkan oleh ketercapaian Indeks Ketentraman dan Ketertiban yang diturunkan melalui indikator perentase pelanggaran perda yang terselesaikan dan persentase konflik sosial yang terselesaikan. Indeks Ketentraman dan Ketertiban tercapai sebesar 96,43, lebih besar 2,43 dari yang ditargetkan. Kasus pelanggaran perda pada tahun 2021 terselesaikan sebesar 5.276 kasus atau teracpai sebesar 100%. Adapun Pelanggaran Perda dan Perwali yang ditangani adalah:

1. Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 12 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah;
2. Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 3 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum;
3. Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 13 Tahun 2015 tentang Izin Penyelenggaraan Rumah Kos;
4. Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 2 Thn 2015 tentang Pengawasan dan Pengendalian Minuman Beralkohol;
5. Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 5 Tahun 2017 tentang Bangunan Gedung;
6. Peraturan Walikota Mojokerto Nomor 17 Tahun 2009 tentang Petunjuk Pelaksanaan Program Kota Mojokerto Berlingkungan Pendidikan;
7. Peraturan Walikota Mojokerto Nomor 24 Tahun 2009 tentang Kawasan Bebas Kendaraan Bermotor;
8. Peraturan Walikota Mojokerto Nomor 9 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Reklame;
9. Peraturan Walikota Mojokerto Nomor 55 Tahun 2020 Perubahan Atas Peraturan Walikota Mojokerto Nomor 47 Tahun 2020 Tentang Pedoman Tatanan Normal Baru Pada Kondisi Pandemi Corona Virus Disease 2019 Di Kota Mojokerto.

Faktor pendukung terselesaikannya pelanggaran perda tersebut adalah karena optimalnya inergitas dengan Kepolisian, TNI dan Instansi vertikal diwilayah Kota Mojokerto serta dukungan personil keamanan dan ketertiban yang memadai.

Indikator persentase konflik sosial yang terselesaikan pada tahun 2021 tercapai sebesar 92,86 yaitu terselesaikan 13 kasus dari 14 kasus yang terjadi. Kasus unjuk rasa yang terjadi sepanjang tahun 2021 dilaksanakan oleh :

1. Organisasi Aliansi Buruh Dan Rakyat Mojokerto (ABRM) pada tanggal 8 Februari 2021 dengan tuntutan menyikapi kejadian kasus Korupsi yang terjadi ditubuh BPJS

Ketenagakerjaan Cab. Mojokerto;

2. Organisasi GEMPAR Mojokerto pada tanggal 28 Juli 2021 dengan tuntutan penyampaian bantuan sosial;
3. Driver ONLINE Kota Mojokerto pada tanggal 29 Juli 2021 dengan tuntutan terkait Bansos dan penyekakatan selama PPKM;
4. Organisasi Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cab. Mojokerto pada tanggal 5 Agustus 2021 dengan tuntutan agar dievaluasi ulang dalam penanganan Covid 19 di Kota Mojokerto, terkait pemakaman pasien Covid-19 non Muslim;
5. Paguyuban warung kopi dan angkringan Mojokerto pada tanggal 9 Agustus 2021 dengan tuntutan meniadakan sanksi admistrasi, relaksasi jam operasional warung kopi/angkringan, dan permohonan bantuan sosial;
6. LSM Gerakan Bersama Anti Korupsi (Gebrak) di Kota Mojokerto pada tanggal 30 Agustus 2021 dengan tuntutan agar proyek-proyek yang ada di Kota Mojokerto agar dikerjakan oleh kontraktor/pengusaha dari putra Daerah. Aksi protes pembangunan Kantor DPRD Kota Mojokerto, di Jl. Surodinawan Lingk. Kedungmulang RT. 15 RW. 04 Kel. Surodinawan Kec. Prajuritkulon Kota Mojokerto, tender dimenangkan oleh PT. Bumi Mas Perdana, alamat Jl. Pahlawan nomor 01 Parakan - Temanggung – Jateng. Tuntutan berikutnya adalah agar pemerintah kota menegakkan Supermasi Hukum, sekaligus ikut berpartisipasi mewujudkan Pemerintah yang bersih , berwibawa, bebas dari KKN;
7. Warga RT. 01 RW.II Lingkungan Kalimati Kelurahan Jagalan Kecamatan Kranggan Kota Mojokerto pada tanggal 13 September 2021 dengan tuntutan penolakan terkait pembangunan Rumah Sakit Hasanah;
8. Anggota Federasi Serikat Buruh Kerakyatan Yang Bekerja Di PT. Mega Finance Kota Mojokerto pada tanggal 14 Oktober 2021 dengan tuntutan keluarkan anjuran DPMPTSPNAKER untuk pekerjakan kembali kembali 5 orang pengurus dan anggota SBK Basis PT. Mega Finance Kota Mojokerto;
9. Organisasi Lembaga Swadaya Masyarakat Modjokerto Watch pada tanggal 21 Oktober 2021 dengan tuntutan untuk mengkritisasi Pemerintah Kota Mojokerto atas keterlambatan proyek revitalisasi Alon-alon Kota Mojokerto;
10. Organisasi Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cab. Mojokerto pada tanggal 21 Oktober 2021 dengan tuntutan untuk mengkritisasi Pemerintah Kota Mojokerto atas keterlambatan proyek revitalisasi Alon-alon Kota Mojokerto;
11. Organisasi Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cab. Mojokerto pada tanggal 4 Nopember 2021 dengan tuntutan untuk mengkritisi keterlambatan Pembangunan proyek alun-alun Kota Mojokerto;
12. Organisasi Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cab. Mojokerto pada tanggal 21

Nopember 2021 dengan tuntutan untuk mengkritisi keterlambatan Pembangunan proyek alun-alun Kota Mojokerto;

13. Organisasi Majelis Pimpinan Cabang Pemuda Pancasila Kota Mojokerto pada tanggal 1 Desember 2021 dengan tuntutan protes terhadap pernyataan Wakil Ketua Komisi II DPR RI dari Fraksi PDIP (Sdr. Junimart Girsang) dalam pernyataannya meminta agar Pemerintah memberikan sangsi tegas kepada Ormas Pemuda Pancasila (PP) dan Forum Betawi Rembug (FBR) yang terlibat bentrokan di Tangerang Banten;
14. Organisasi Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang P. Mojokerto, aliansi BEM Mojokerto Raya dan Ikatan Mahasiswa pada tanggal 13 Desember 2021 mengevaluasi kinerja Walikota kenapa saat ini kepemimpinan Walikota dalam pemulihan ekonomi masyarakat tidak tuntas.

Dari data di atas diketahui bahwa pada tahun 2021 terjadi 14 kali konflik (unjuk rasa) terkait masalah ekonomi politik dan sosial yang dapat diselesaikan sebanyak 13 kali konflik melalui mediasi antara pihak yang berkonflik di fasilitasi oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dan jajaran samping (POLRI, TNI, Kejaksaan). Langkah-langkah yang dilakukan mengatasi kendala tersebut

1. Rapat koordinasi yang difasilitasi oleh Bakesbangpol dalam rangka upaya mediasi dan mencegah adanya demo yang akan dilakukan agar tidak sampe anarkis;
2. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam deteksi dini dan cegah dini serta penanggulangan terhadap potensi ATHG (Ancaman Tantangan Hambatan dan Gangguan) dalam rangka antisipasi terjadinya konflik di masyarakat;
3. Mengoptimalkan peran forum-forum mitra Bakesbangpol (FKDM, Tim Kewaspadaan Dini, FKUB) yang telah ada untuk mengantisipasi timbulnya gejolak di masyarakat yang dapat menganggu kondusifitas daerah.

Pencapaian indikator pada ***misi ketiga*** ditunjukkan oleh ketercapaian Indeks Reformasi Birokrasi yang kemudian diuraikan dengan indikator nilai SAKIP, opini BPK, Indeks Kepuasan Masyarakat, jumlah unit yang mendapatkan predikat WBK/WBBM, Indeks SPBE, Indeks Manajemen Risiko dan Sistem Merit. Indeks Reformasi Birokrasi mengambarkan sejauh mana instansi pemerintah melaksanakan perbaikan tata kelola pemerintahan yang bertujuan pada pemerintahan yang efektif dan efisien, bersih dari KKN, dan memiliki pelayanan publik yang berkualitas. Berdasarkan Hasil Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Tahun 2020 yang dilakukan oleh Kementrian PAN RB, Indeks Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Mojokerto Tahun 2020 adalah sebesar 62,45 atau termasuk Kategori B. Capaian ini sesuai dengan yang ditargetkan dalam RPJMD.

Sedangkan untuk Indeks Reformasi Birokrasi Tahun 2021 sampai dengan saat ini masih belum diumumkan.

Hasil Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja Instansi Tahun 2020, yang dilakukan oleh Kementrian PAN RB, Nilai SAKIP Pemerintah Kota Mojokerto Tahun 2020 adalah sebesar 67,42 atau termasuk Kategori B. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran dibandingkan dengan capaian kinerjanya sudah cukup memadai, serta kualitas pembangunan budaya kinerja birokrasi dan penyelenggaraan pemerintahan yang berorientasi pada hasil di Pemerintah Kota Mojokerto sudah menunjukan hasil yang baik. serta memberikan Capaian ini sesuai dengan yang ditargetkan dalam RPJMD. Sedangkan untuk Nilai SAKIP Tahun 2021 sampai dengan saat ini masih belum diumumkan.

Pada tahun 2021, Walikota Mojokerto menerima plakat Anugerah Penghargaan Pemerintah kepada Pemerintah Daerah atas capaian Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) lima kali berturut-turut. Pada tahun yang sama, Kota Mojokerto sekaligus memperoleh WTP keenam kalinya. Opini BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah tahun 2021 masih dalam proses.

Capaian Indeks Kepuasan Masyarakat tercatat di angka 84,44. Angka tersebut sesuai dengan target yang telah ditetapkan yaitu berkisar antara 76,61 – 88,30. Penilaian tersebut diperoleh dari rata-rata capaian IKM 41 Perangkat Daerah di wilayah kerja Pemerintah Kota Mojokerto. Capaian nilai tertinggi diperoleh oleh Kelurahan Gedongan dengan nilai 97,40 dan capaian nilai terendah oleh Kelurahan Balongsari dengan nilai 73,00.

Capaian indikator unit yag mendapatkan predikat WBK/WBBM melebihi target perencanaan sebesar 1 unit kerja. Berdasarkan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 1472 tahun 2021 tentang Unit Kerja Berpredikat Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) tahun 2021, unit kerja di Pemerintah Kota Mojokerto mendapatkan predikat WBK ada 2 yaitu Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dan RSU Dr. Wahidin Sudiro Husodo Kota Mojokerto. Sampai dengan tahun 2021, unit kerja yang mendapat predikat di Kota Mojokerto jumlah keseluruhannya sebanyak 3 unit kerja. Sebelumnya, pada tahun 2019 terdapat satu unit kerja di Pemerintah Kota Mojokerto yang telah mendapatkan predikat WBK yaitu Puskesmas Wates.

Capaian Indeks SPBE meskipun di bawah target yaitu sebesar 2,92, namun capaian tersebut masih dalam predikat baik sebagaimana tahun 2019. Predikat tersebut masih di atas capaian nasional yaitu sebesar 2,24. Penurunan indeks SPBE ini disebabkan oleh :

1. Adanya kebijakan baru yaitu PermenPANRB No 59 Tahun 2021 dengan konsep yang berbeda dangan peraturan sebelumnya. Hal tersebut dikarenakan, terdapat beberapa nilai yang harusnya di level atas tetapi karena level sebelumnya belum terpenuhi sehingga nilai yang dihasilkan berada pada level sebelumnya;
2. Adanya Domain, Aspek dan Indikator baru yaitu Domain Manajemen SPBE. Pemerintah Kota Mojokerto belum melaksanakan domain Aspek Audit TIK dan melaksanakan aspek manajemen SPBE tanpa perencanaan sehingga nilai dari domain tersebut adalah 1.64 yang artinya kurang;
3. Belum adanya pedoman atau juknis pelaksanaan Domain Manajemen SPBE pada pelaksanaan evaluasi SPBE tahun 2021. Pemerintah pusat baru mengeluarkan 2 (dua) kebijakan dari 9 (sembilan) kebijakan terkait pelaksanaan Manajemen SPBE di akhir tahun 2021 setelah evaluasi SPBE tahun 2021 dilaksanakan.

Berdasarkan Surat BPKP Nomor S-6312/PW13/3/2021 perihal Hasil Penilaian *Baseline* Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi pada Pemerintah Kota Mojokerto tanggal 29 Desember 2021, skor Manajemen Risiko Indeks (MRI) Kota Mojokerto sebesar 2,711 atau level 2. Capaian ini melebihi target dari RPJMD sebesar level 1.

Berdasarkan Keputusan Komisi Aparatur Sipil Negara nomor: 122/KEP.KASN/C/XI/2021 tanggal 30 Nopember 2021 capaian sistem merit Pemerintah Kota Mojokerto ditetapkan pada Kategori III (Baik) dengan Nilai 288. Capaian ini sangat meningkat tajam dibandingkan tahun 2020 yang berada pada Kategori I (Buruk) dengan nilai 96. Hal ini menunjukkan bahwa pengelolaan ASN di Kota Mojokerto sejalan dengan prinsip pelaksanaan sistem merit. Adapun aspek sistem merit terdiri 8 (delapan) aspek yang meliputi perencanaan kebutuhan; pengadaan; pengembangan karir; promosi dan mutasi; manajemen kinerja; penggajian, penghargaan dan disiplin; perlindungan dan pelayanan; sistem informasi

Pencapaian indikator pada ***misi keempat*** ditunjukkan oleh ketercapaian Laju Pertumbuhan Ekonomi yang pada tahun 2021 tercapai sebesar 3,65 persen dan Indeks Infrastruktur yang tercapai sebesar 86,27. Ketercapaian indikator Laju Pertumbuhan Ekonomi digambarkan melalui indikator nilai realisasi investasi (PMA dan PMDN), pertumbuhan PDRB sektor industri, pertumbuhan PDRB sektor perdagangan, pertumbuhan PDRB sektor lainnya, pertumbuhan PDRB sektor pariwisata serta laju inflasi. Pada tahun 2021 pertumbuhan PDRB sektor Industri pengolahan sebesar 2,98 persen. Sumber pertumbuhan terbesar sektor Industri adalah dari industri makanan dan minuman; industri kimia organik; industri karet dan plastik; serta industri pengolahan lainnya. Sementara pertumbuhan sektor perdagangan meningkat 6,54 persen karena

peningkatan tajam pada penjualan mobil dan motor karena adanya subsidi pajak penjualan. Peningkatan PDRB sektor jasa lainnya sebesar 3,71 persen dan sektor pariwisata sebesar 1,45 persen selama tahun 2021 dikarenakan pelonggaran peraturan PPKM dan dibukanya kembali pusat-pusat ekonomi masyarakat, seperti: Mall, pertokoan, tempat hiburan, hotel, restoran, dll. sehingga aktivitas dan roda perekonomian masyarakat kembali meningkat. Selanjutnya realisasi inflasi tahun 2021 sebesar 1,64 dan masih di bawah target membuktikan bahwa pemerintahan Kota Mojokerto mampu menjaga harga-harga kebutuhan pokok di tingkat konsumen tetap rendah dan persediaan kebutuhan pokok masyarakat tercukupi.

Nilai realisasi investasi (PMA dan PMDN) diperoleh dari laporan realisasi penanaman modal LKPM yang direalease secara resmi oleh BKPM setiap triwulan dan juga diperoleh dari pemantauan nilai realisasi penanaman modal IUMK melalui pelayanan NIB. Tahun 2021 nilai realisasi investasi (PMA dan PMDN) sebesar Rp340.452.087.000 yang berasal dari laporan LKPM sebesar Rp310.781.500.000 dan ijin Usaha Mikro Kecil dalam pelayanan NIB sebesar Rp29.670.587.000. Pada indikator Indeks infrastruktur, secara umum semua komponennya telah tercapai melebihi target.

Sedangkan Indeks Infrastuktur diuraikan melalui indikator Indeks infrastruktur pekerjaan umum, indeks infrastruktur dasar permukiman, indeks infrastruktur Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, serta Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah (IKLHD). Secara umum capaian Indeks Infrastuktur telah melebihi target yaitu sebesar 86,27. Capaian Indeks infrastuktur pekerjaan umum, semua komponennya telah melebihi target. Komponen tersebut meliputi rasio panjang jalan dalam kondisi mantap, persentase luas wilayah bebas genangan, dan persentase fasilitas publik dalam kondisi baik. Meningkatnya capaian ketiga komponen tersebut banyak dipengaruhi oleh komitmen Pemerintah Kota Mojokerto dalam pembangunan infrastuktur secara terus menerus yang meliputi pembangunan jalan, rekonstruksi jalan, pemeliharaan jalan, pembangunan sistem drainase, pemeliharaan saluran, pembersihan walet, serta pembangunan gedung dan penataan lingkungan.

Pada Indeks infrastruktur dasar permukiman, capaian komponen persentase pemenuhan akses layak sanitasi telah melebihi target. Hal ini dikarenakan optimalnya pengelolaan dan pengembangan sistem air limbah, perbaikan rumah tidak layak huni, serta penyediaan sarana dan prasarana dan utilitas umum. Sedangkan komponen persentase pemenuhan akses layak air minum tidak mencapai target karena tidak tercapainya angka Sambungan Rumah (SR) air minum perpipaan. Kurangnya capaian tersebut disebabkan oleh sistem layanan PDAM yang kurang maksimal, sehingga masih

banyak masyarakat yang kurang berminat menggunakan air minum perpipaan dan lebih memilih menggunakan air sumur.

Capaian Indeks Infrastruktur Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ) banyak dipengaruhi oleh keberhasilan manajemen dan rekayasan lalu lintas sehingga banyak ruas jalan dengan tingkat layanan jalan "C" pada jam sibuk. Selain itu juga banyaknya fasilitas perlengkapan jalan yang dipasang serta pemeliharaan terhadap fasilitas perlengkapan jalan yang rutin dilaksanakan.

Indeks Kualitas Lingkungan Hidup merupakan gambaran atau indikasi awal yang memberikan kesimpulan cepat tentang suatu kondisi dan mutu lingkungan hidup pada ruang dan periode tertentu. Nilai IKLH digunakan untuk memperbaiki kualitas/mutu lingkungan hidup tiap kabupaten/kota pada waktu tertentu. Pada tahun 2021, capaian IKLH Kota Mojokerto terealisasi melebihi target yaitu sebesar 58,08 yang berarti pada kategori Sedang. Perhitungan IKLH terdiri dari komponen Indeks Kualitas Air (IKA), Indeks Kualitas Udara (IKU) dan Indeks Kualitas Lahan (IKL). Pada komponen IKA tercapai sebesar 51, lebih dari target angka 50,06 yang berarti berada pada kategori Sedang. Kenaikan tersebut dikarenakan monitoring dan evaluasi terhadap pemantauan limbah air baik untuk pelaku usaha/kegiatan dan masyarakat dilakukan secara rutin dan terjadwal. Pada komponen IKU, capaiannya sedikit lebih rendah dari target. Hal ini dikarenakan pertumbuhan kendaraan semakin meningkat dan konsumsi energi yang menyebabkan kadar emisi mengalami peningkatan juga. Meskipun demikian, nilai IKU masih berada pada kategori Baik yaitu sebesar 81,38. Komponen IKL juga tercatat memiliki persentase capaian sebesar 100,11%. Namun capaian sebesar 27,13 tersebut berdasarkan Indeks Kualitas Lahan (IKL) termasuk dalam kategori Waspada. Rencana yang akan dilakukan di tahun 2022 adalah dengan melakukan pendataan luas taman pada instansi dan Lembaga lainnya serta melanjutkan pembangunan Taman Budaya agar luasan RTH di Kota Mojokerto menjadi bertambah

Pencapaian indikator pada ***misi kelima*** ditunjukkan melalui indikator Indeks Kesalehan Sosial yang pada tahun 2021 tercapai sebesar 91,90. Capaian tersebut jauh lebih tinggi daripada angka yang ditargetkan sebesar 76,23 yang berarti naik sebesar 15,70% dari tahun sebelumnya. Kenaikan tersebut disebabkan oleh beberapa faktor berikut :

1. Program Pemerintah Kota Mojokerto dalam peningkatan Kapasitas Solidaritas Sosial, Toleransi kehidupan bermasyarakat dan kepedulian lingkungan berjalan baik;
2. Kepedulian masyarakat secara individu, ormas, komunitas, organisasi kepemudaan dalam menjaga kehidupan harmonis masyarakat Kota Mojokerto dengan melakukan diskusi secara berkala;

3. Adanya sinergik Pemerintah Kota dan Forum Komunikasi Umat Beragama (FKUB) dalam program kampung harmoni sebagai percontohan toleransi dan kepedulian sosial masayarakat;
4. Kegiatan Silaturahim Pemerintah Kota, Forkopimda bersama masyarakat lintas agama memperkuat pembangunan sosial masyarakat;
5. Capaian berupa penghargaan yang diterima Pemerintah Kota Mojokert, yakni Harmony Award dari Kementrian Agama RI sebagai apresiasi keselarasan kehidupan beragama dan penghargaan Anugerah kebudayaan dari Persatuan Wartawan Indonesia;
6. Efiktifitas sosialisasi dan pelaksanaan program sosial pemerintah kota didukung cakupan area yang terdiri 3 kecamatan;
7. Potensi capaian IKS yang dinamis setiap periode tergantung pada isu, capaian program dan partisipasi masyarakat.

Indikator sasaran pada misi kelima ini diuraikan melalui jumlah apresiasi seni dan budaya yang tercapai sebesar 12 event dan persentase konflik SARA yang terselesaikan sesuai target sebesar 100%. Kenaikan pada apresiasi seni dan budaya disebabkan adanya pelaksanaan event yang melebihi target awal, adapun event sebagai apresiasi seni dan budaya tahun 2021 adalah sebagai berikut :

1. Hari Dongeng pada Peringatan Hari Dongeng Sedunia tanggal 12 Maret 2021;
2. Mojotirto pada Peringatan Hari Air Sedunia tanggal 22 Maret 2021;
3. Tampilan Tari Climen pada Serasehan Budaya tanggal 30 April 2021;
4. Mojobangkit, Tampilan Music Keroncong, Tampilan Music Accoustic, Pagelaran Ludruk, Pagelaran Wayang Kulit pada Peringatan Hari Jadi Kota Mojokerto tanggal 20 – 26 Juni 2021;
5. Pengiriman Raka – Raki pada Event Tahunan untuk peningkatan kualitas SDM tanggal 5 Oktober 2021;
6. Apeksi pada Event Tahunan Indosmart City tanggal 13 Oktober 2021;
7. Event Anjungan TMII "Pagelaran Drama Tari " Tribuana Tungga Dewi Sang Payung Agung Wilwatika" pada Event tahunan seni budaya untuk peningkatan kualitas SDM tanggal 31 Oktober 2021;
8. Jalur Rempah dan Tari Topeng pada Festival jalur rempah tanggal 1-3 November 2021;
9. Gus Yuk pada Event Tahunan untuk peningkatan kualitas SDM tanggal 12 November 2021;
10. Pegelaran Wayang Beber pada Peringatan Hari Wayang Sedunia tanggal 27 November 2021;

11. Pawai Pembangunan (Mobil Hias) pada Peringatan 3 Tahun Kepemimpinan Wali Kota tanggal 8 Desember 2021;
12. Mojobatik pada Peringatan 3 Tahun Kepemimpinan Wali Kota tanggal 15 Desember 2021.

Pada tahun 2021 konflik sara di Kota Mojokerto pada tahun 2021 tidak ada. Hal ini dikarenakan Pemerintah Kota Mojokerto telah :

1. Mengoptimalkan dan koordinasi dengan pengurus forum kerukunan umat beragama (FKUB) selama pelaksanaan di berbagai kegiatan;
2. Mengoptimalkan fungsi forum komunikasi deteksi dini masyarakat (FKDM);
3. Optimalisasi dan koordinasi intensif terhadap semua perangkat daerah, kelurahan, kecamatan serta intansi terkait

Pencapaian indikator pada ***misi keenam*** ditunjukkan oleh indikator Indeks Gini yang tercapai sebesar 0,334. Capaian angka tersebut mengindikasikan bahwa Kota Mojokerto memiliki tingkat ketimpangan yang relatif sedang. Demikian pula Gini Ratio untuk setiap Kecamatan di Kota Mojokerto yang berada di antara 0,34 sampai 0,36. Angka tersebut sekaligus menjadi peringatan bahwa Kota Mojokerto harus lebih berhati-hati dan mengatisipasi agar Gini Ratio di tahun mendatang dapat berkurang. Namun demikian kondisi ketimpangan di Kota Mojokerto selama tahun 2017-2021 hampir selalu berada di bawah angka provinsi dan nasional.

Indikator kedua pada misi keenam ini adalah Indeks Pembangunan Gender (IPG) yang diuraian melalui indikator Indeks Pemberdayaan Gender (IGD). Walaupun angka IDG Kota Mojokerto pada tahun 2021 menunjukkan peningkatan dibandingkan tahun 2020 dan angkanya melebihi provinsi Jawa Timur dan Nasional, namun angka tersebut masih jauh dari target yaitu sebesar 91. Target tersebut tergolong tinggi, sehingga membutuhkan upaya yang cukup besar. Komponen indikator penyusun IDG adalah sebagai berikut :

1. Keterlibatan perempuan di parlemen selama 5 tahun terakhir di Kota Mojokerto sudah memenuhi standard minimal perundangan yaitu 30%. Namun angka tersebut tidak mengalami peningkatan. Keterlibatan perempuan di parlemen bukan merupakan hal yang bisa dikontrol, karena merupakan hasil proses politik;
2. Sumbangan pendapatan perempuan di Kota Mojokerto mengalami peningkatan signifikan selama 12 tahun terakhir (2010 – 2021). Pada tahun 2021, sumbangan pendapatan perempuan di Kota Mojokerto sebesar 37,44 persen, naik 0,31 persen dibandingkatan tahun sebelumnya sebesar 37,13 persen;
3. Proporsi perempuan sebagai tenaga profesional menunjukkan pola yang fluktuatif. Selama 12 tahun terakhir (2010 – 2021) proporsi perempuan sebagai tenaga

profesional telah lebih dari 50 persen. Proporsi perempuan sebagai tenaga profesional tertinggi terjadi pada tahun 2021, yaitu sebesar 58,64 persen.

Pencapaian indikator pada ***misi ketujuh*** ditunjukkan oleh Kapasitas Fiskal Daerah yang pada tahun 2021 tercapai sebesar Rp466,621,656,181.13. Kapasitas fiskal daerah yaitu kemampuan keuangan masing-masing daerah yang dicerminkan melalui pendapatan daerah dikurangi dengan pendapatan yang penggunaannya sudah ditentukan dan belanja tertentu, sesuai Pasal 1 angka 1 Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 120 Tahun 2020. Meningkatnya Realisasi komponen Pajak Daerah didukung oleh adanya aplikasi yang memudahkan Wajib Pajak (WP) untuk melakukan pembayaran pajak secara online. Persentase pendapatan pajak daerah terbesar ada pada pajak reklame dan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB). Meningkatnya Pendapatan Asli daerah juga dipengaruhi oleh komponen Lain-lain PAD yang sah. Komponen ini berasal dari penerimaan BLUD RSU dan Puskesmas yang terealisasi melebihi target.

Indikator sasaran pada misi ketujuh diuraikan melalui indikator Rasio Kemandirian Keuangan Daerah yang tercapai sebesar 36,238%. Rasio Kemandirian Keuangan Daerah Menunjukkan kemampuan Pemerintah Daerah dalam membiayai kegiatan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat yang telah membayar pajak dan retribusi sebagai sumber yang diperlukan oleh daerah. Semakin tinggi angka rasio ini menunjukkan pemerintah daerah semakin tinggi kemandirian keuangan daerahnya. rasio efektivitas PAD, DAK, DAU dan DBH berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah. Semakin tinggi rasio efektivitas PAD, semakin rendah DAK, DAU, dan DBH maka semakin tinggi pula tingkat kemandirian keuangan daerah yang dihasilkan ataupun sebaliknya.

3.3 CAPAIAN PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN

Program dan kegiatan Pemerintah Kota Mojokerto merupakan penjabaran dari setiap urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah baik urusan konkuren pemerintahan maupun fungsi penunjang urusan pemerintahan. Urusan konkuren pemerintahan ialah urusan pemerintahan yang dibagi antara pemerintah pusat dan daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota. Urusan konkuren pemerintahan yang diserahkan kepada Pemerintah Kota Mojokerto meliputi Urusan Wajib Pelayanan Dasar maupun Non Pelayanan Dasar, Urusan Pemerintahan Pilihan, serta Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan. Selain melaksanakan penyelenggaraan urusan pemerintahan konkuren, pemerintah daerah menyelenggarakan urusan penunjang pemerintahan.

Penyelenggaraan Urusan Wajib yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar terdiri atas 6 (enam) bidang urusan pemerintahan yakni pendidikan; kesehatan; pekerjaan umum dan penataan ruang; perumahan dan kawasan permukiman; ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat; dan sosial. Penyelenggaraan Urusan Wajib yang tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar terdiri atas 17 (tujuh belas) bidang urusan pemerintahan, yakni tenaga kerja, pemberdayaan perempuan dan pelindungan anak, pangan, pertanahan, lingkungan hidup, administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, perhubungan, komunikasi dan informatika, koperasi, usaha kecil dan menengah, penanaman modal, kepemudaan dan olahraga, statistik, persandian, kebudayaan, serta perpustakaan dan kearsipan. Penyelenggaraan Urusan Pilihan Pemerintahan terdiri atas 8 (delapan) bidang urusan pemerintahan, yakni kelautan dan perikanan, pariwisata, pertanian, energi dan sumber daya mineral, perdagangan, dan perindustrian. Penyelenggaraan urusan pemerintahan terdiri atas unsur Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD. Adapun Penyelenggaraan Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan terdiri atas 5 (lima) bidang urusan yakni perencanaan; keuangan; kepegawaian; pendidikan dan pelatihan; serta penelitian dan pengembangan. Program dan kegiatan yang dilaksanakan Pemerintah Kota Mojokerto Tahun Anggaran 2021 meliputi 153 Program dan 397 Kegiatan. Adapun rincian capaian program dan kegiatan diuraikan pada tabel di bawah ini.

3.3.1 Pelaksanaan Urusan Wajib yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar

Tabel 3.11
Capaian Pelaksanaan Program dan Kegiatan
Pelaksanaan Urusan Wajib yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar

No	Urusan Pemerintahan	Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tinjut Rekom DPRD
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
1.	Pendidikan	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Meningkatkan Akses dan Kualitas Pendidikan	1 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	APK SD/MI/Paket A	100%	116%	Tidak ada	Tidak ada	
					APK SMP/MTs/ Paket B	100%	132%	Tidak ada	Tidak ada	
					APM SD/MI/Paket A	100%	111%	Tidak ada	Tidak ada	
					APM SMP/MTs/ Paket B	96,26%	118%	Tidak ada	Tidak ada	
					Angka Partisipasi Sekolah (APS) SD/MI/Paket A	100%	116%	Tidak ada	Tidak ada	
					Angka Partisipasi Sekolah (APS) SMP/MTs/ Paket B	100%	117%	Tidak ada	Tidak ada	
					Angka Kelulusan SD/MI	100%	100%	Tidak ada	Tidak ada	
					Angka Kelulusan SMP/MTs	100%	100%	Tidak ada	Tidak ada	
					Angka Melanjutkan dari SD/MI ke SMP/MTs	97,93%	119%	Tidak ada	Tidak ada	
					Angka Putus Sekolah (APS) SD/MI	0,01%	0,01%	Tidak ada	Tidak ada	
					Angka Putus Sekolah (APS) SMP/MTs	0,06%	0,01%	Tidak ada	Tidak ada	
					Persentase capaian SPM pendidikan dasar	100%	95,91%	Tenaga Pendidik pada Pendidikan Dasar di Kota Mojokerto hampir seluruhnya sudah berkualifikasi S1/D4 akan tetapi masih ada beberapa yang belum mempunyai sertifikat pendidik (mayoritas dari lembaga swasta) dan untuk mendapatkan sertifikat tersebut harus mengikuti diklat peningkatan kompetensi guru dengan jumlah kuota sudah ditentukan oleh Pusat	Terus mendorong dan mengusulkan guru-guru tersebut utk bisa segera memperoleh sertifikat tersebut	

No	Urusan Pemerintahan	Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tinjut Rekom DPRD
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
					Sekolah pendidikan SD/MI kondisi bangunan baik	63,56%	65,67%	Tidak ada	Tidak ada	
					Sekolah pendidikan SMP/MTs kondisi bangunan baik	75%	77,27%	Tidak ada	Tidak ada	
					Rasio ketersediaan sekolah/penduduk usia sekolah pendidikan dasar	50/10.000	47/10.000	Dikarenakan ada 4 lembaga Sekolah Dasar yang merger		
					Rasio ketersediaan sekolah terhadap penduduk usia sekolah pendidikan menengah	33/10.000	33/10.000	Tidak ada	Tidak ada	
					Proporsi murid kelas 1 yang berhasil menamatkan sekolah dasar	100%	118%	Tidak ada	Tidak ada	
					Persentase SD/MI yang memiliki nilai akreditasi A	60,56%	63,24%	Tidak ada	Tidak ada	
					Persentase SMP/MTs yang memiliki nilai akreditasi A	71,43%	68,18%	Kegiatan Penilaian Akreditasi tidak bisa dilaksanakan dikarenakan Pandemi COVID-19	Tetap mengusulkan penilaian akreditasi ke Pemerintah Pusat	
					APK PAUD	100%	81%	Kondisi pandemi Covid 19 ini juga membuat orang tua enggan mendaftarkan putra putrinya untuk bersekolah di PAUD	Melaksanakan sosialisasi kepada masyarakat tentang pentingnya menyekolahkan putra putrinya di Pendidikan Anak Usia Dini, karena peletakan dasar-dasar karakter anak dilakukan pada masa golden age yaitu pada anak usia dini, dan masa golden age tidak akan bisa kembali jika terlewati, dan mendukung gerakan keluarga mendaftarkan anak usia dini ke sekolah PAUD	
					Angka kelulusan PNF	100%	100%	Tidak ada	Tidak ada	
					Persentase capaian SPM pendidikan anak usia dini	100%	88,27%	Tenaga Kependidikan (Kepala Sekolah) sudah berijazah S1/D4 semua dan hampir	Terus mendorong dan mengusulkan untuk kepala sekolah dan guru yang belum	

No	Urusan Pemerintahan	Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tinjut Rekom DPRD
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
								semuanya sudah bersertifikat pendidik juga dan hanya beberapa yang belum mempunyai Sertifilkat kelulusan pelatihan calon kepala sekolah sedangkan untuk tenaga pendidik hampir seluruhnya sudah berkualifikasi S1/D4 akan tetapi masih ada beberapa yang belum mempunyai sertifikat pendidik dan semuanya berasal dari lembaga sekolah swasta	mempunyai sertifikat tersebut sesuai dengan kuota dari Pusat	
					Angka melek huruf penduduk usia 15-24 tahun, perempuan dan laki-laki	100%	100%	Tidak ada	Tidak ada	
					Penduduk yang berusia >15 tahun melek huruf (tidak buta aksara)	98,36%	100%	Tidak ada	Tidak ada	
					Persentase capaian SPM pendidikan kesetaraan	49,57%	99,29%	Tidak ada	Tidak ada	
					Persentase PAUD yang memiliki nilai akreditasi A	26,47%	27,74%	Tidak ada	Tidak ada	
					Persentase PAUD yang terakreditasi	70,59%	75,91%	Tidak ada	Tidak ada	
					Persentase lembaga PNF yang terakreditasi	4%	4%	Tidak ada	Tidak ada	
					Guru PAUD yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV	75,38%	77,68%	Tidak ada	Tidak ada	
					Guru SD yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV	94,5%	94,36%	Tidak ada	Tidak ada	
					Guru SMP yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV	98,6%	98,72%	Tidak ada	Tidak ada	
				1 Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Jumlah pengelolaan kegiatan kurikulum dan kesiswaan Jenjang PAUD	15 kegiatan	14 kegiatan	Tidak bisa dilaksanakan dikarenakan kebijakan PPKM darurat Pandemi Covid-19	Melaksanakan kegiatan semaksimal mungkin sesuai dengan anggaran dan SDM yang ada	

No	Urusan Pemerintahan	Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan				Indikator	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tinjut Rekom DPRD
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)				(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
							Jumlah Pengelolaan Kegiatan Sarpras PAUD	**Jumlah Pengelolaan Kegiatan Sarpras PAUD**	**16 kegiatan**	**16 kegiatan**	**Tidak ada**	**Tidak ada**	
							Jumlah Pengelolaan Kegiatan GTK Jenjang PAUD	**Jumlah Pengelolaan Kegiatan GTK Jenjang PAUD**	**8 kegiatan**	**8 kegiatan**	**Tidak ada**	**Tidak ada**	
						1	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik PAUD	Jumlah Siswa Penerima Bantuan	1 kegiatan	1 kegiatan	Tidak ada	Tidak ada	
						2	Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD	Jumlah Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD	5 kegiatan	5 kegiatan	Tidak ada	Tidak ada	
						3	Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan PAUD	Jumlah Evaluasi Satuan PAUD yang disiapkan dan ditindaklanjuti	3 kegiatan	3 kegiatan	Tidak ada	Tidak ada	
						4	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD	Jumlah Pembinaan kelembagaan dan Manajemen PAUD	3 kegiatan	3 kegiatan	Tidak ada	Tidak ada	
						5	Pengelolaan Dana BOP PAUD	Jumlah Lembaga PAUD Penerima BOP	7 kegiatan	5 kegiatan	Tidak bisa dilaksanakan dikarenakan kebijakan PPKM darurat Pandemi Covid-19	Melaksanakan kegiatan semaksimal mungkin sesuai dengan anggaran dan SDM yang ada	
						6	Pembangunan Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD	Jumlah ruang kelas yang dibangun	3 ruang	3 ruang	Tidak ada	Tidak ada	
						7	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD	Jumlah gedung sekolah yang direhab	2 gedung	2 gedung	Tidak ada	Tidak ada	
						8	Pengadaan Perlengkapan PAUD	Jumlah Perlengkapan sekolah yang diadakan	2 macam	2 macam	Tidak ada	Tidak ada	
						9	Pengadaan Perlengkapan Siswa PAUD	Jumlah Perlengkapan siswa yang diadakan	4 macam	4 macam	Tidak ada	Tidak ada	
						10	Pengadaan Alat Permainan Edukatif Siswa PAUD	Jumlah Alat Permainan Edukatif yang diadakan	4 macam	4 macam	Tidak ada	Tidak ada	
						11	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD	Jumlah Dokumen Pelayanan Administrasi Kepegawaian Guru dan Tenaga Kependidikan Jenjang PAUD	12 Dokumen	12 Dokumen	Tidak ada	Tidak ada	
								Jumlah Dokumen Pembinaan dan Pengembangan karir guru dan tenaga kependidikan jenjang PAUD	2 Dokumen	2 Dokumen	Tidak ada	Tidak ada	
								Jumlah kegiatan pembinaan dan	5 Dokumen	5 Dokumen	Tidak ada	Tidak ada	

No	Urusan Pemerintahan	Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tinjut Rekom DPRD
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
					pengembangan kompetensi guru dan tenaga kependidikan jenjang PAUD					
					Jumlah dokumen kegiatan peningkatan kesejahteraan guru dan tenaga kependidikan jenjang PAUD	12 dokumen	12 dokumen	Tidak ada	Tidak ada	
					Jumlah Dokumen Pegelolaan data Guru dan Tenaga Kependidikan jenjang PAUD	2 Dokumen	2 Dokumen	Tidak ada	Tidak ada	
				2 Pengelolaan Pendidikan Nonformal/ Kesetaraan	**Jumlah pengelolaan kegiatan kurikulum dan kesiswaan Jenjang Pendidikan Non Formal**	**32 kegiatan**	**20 kegiatan**	**Tidak bisa dilaksanakan dikarenakan kebiaakan PPKM darurat Pandemi Covid-19**	**Melaksanakan kegiatan semaksimal mungkin sesuai dengan anggaran dan SDM yang ada**	
				1 Penyelenggaraan Proses Belajar Nonformal/ Kesetaraan	Jumlah Penyelenggaraan Proses Belajar Non Formal/Kesetaraan	9 kegiatan	9 kegiatan	Tidak ada	Tidak ada	
				2 Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan di Pendidikan Nonformal/ Kesetaraan	Jumlah Evaluasi Satuan Pendidikan di Pendidikan Non Formal/Kesetaraan yang disiapkan dan ditindaklanjuti	10 kegiatan	10 kegiatan	Tidak ada	Tidak ada	
				3 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/ Kesetaraan	Jumlah Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Non Formal/Kesetaraan	1 kegiatan	1 kegiatan	Tidak ada	Tidak ada	
				4 Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/ Kesetaraan	Jumlah Pengelolaan dan BOP Sekolah Non Formal/Kesetaraan	2 kegiatan	2 kegiatan	Tidak ada	Tidak ada	
				3 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	**Jumlah pengelolaan kegiatan kurikulum dan kesiswaan jenjang SD**	**18 kegiatan**	**18 kegiatan**	**Tidak ada**	**Tidak ada**	
					Jumlah Pengelolaan Kegiatan Sarpras SD	**12 kegiatan**	**12 kegiatan**	**Tidak ada**	**Tidak ada**	
					Jumlah Pengelolaan Kegiatan GTK Jenjang SD	**12 dokumen**	**12 dokumen**	**Tidak ada**	**Tidak ada**	
				1 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas	Jumlah lembaga yang menerima rehabilitasi ruang kelas	8 lembaga	8 lembaga	Tidak ada	Tidak ada	
				2 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang	Jumlah lembaga yang menerima rehabilitasi	5 lembaga	5 lembaga	Tidak ada	Tidak ada	

No	Urusan Pemerintahan	Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan				Indikator	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tinjut Rekom DPRD
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)				(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
							Guru/Kepala Sekolah/TU	ruang guru dan kepala sekolah/TU					
						3	Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah	Jumlah lembaga yang menerima rehabilitasi ruang perpustakaan	7 lembaga	7 lembaga	Tidak ada	Tidak ada	
						4	Pengadaan Mebel Sekolah	Jumlah lembaga yang menerima paket meubelair	5 lembaga	17 lembaga	Tidak ada	Tidak ada	
						5	Pengadaan Perlengkapan Siswa	Jumlah lembaga yang menerima perlengkapan siswa	61 lembaga	68 lembaga	Tidak ada	Tidak ada	
						6	Pemeliharaan Rutin Bangunan Gedung dan Ruangan	Jumlah Bangunan sekolah yang dipelihata	5 lembaga	6 lembaga	Tidak ada	Tidak ada	
						7	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	Jumlah lembaga yang menerima alat praktik dan peraga siswa	32 lembaga	37 lembaga	Tidak ada	Tidak ada	
						8	Penyelengaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	Jumlah Penyelengaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	63 lembaga	63 lembaga	Tidak ada	Tidak ada	
						9	Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Dasar	Jumlah Evaluasi Satuan Pendidikan Dasar yang disiapkan dan ditindaklanjuti	63 lembaga	63 lembaga	Tidak ada	Tidak ada	
						10	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	63 lembaga	63 lembaga	Tidak ada	Tidak ada	
						11	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Jumlah Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	63 lembaga	63 lembaga	Tidak ada	Tidak ada	
						12	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	59 lembaga	59 lembaga	Tidak ada	Tidak ada	
						13	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	Jumlah pembimbing khusus di SD inklusi	5 orang	5 orang	Tidak ada	Tidak ada	
						14	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	Jumlah Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	63 SD	63 SD	Tidak ada	Tidak ada	
					4		**Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama**	**Jumlah pengelolaan kegiatan kurikulum dan kesiswaan jenjang SMP**	**12 kegiatan**	**12 kegiatan**	**Tidak ada**	**Tidak ada**	
								Jumlah Pengelolaan Kegiatan Sarpras SMP	**8 kegiatan**	**8 kegiatan**	**Tidak ada**	**Tidak ada**	

No	Urusan Pemerintahan	Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tinjut Rekom DPRD
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
				Jumlah Pengelolaan Kegiatan GTK Jenjang SMP	**Jumlah Pengelolaan Kegiatan GTK Jenjang SMP**	**12 dokumen**	**12 dokumen**	Tidak ada	Tidak ada	
				1 Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Sekolah	Jumlah bangunan sekolah yang direhab	5 lembaga	5 lembaga	Tidak ada	Tidak ada	
				2 Pengadaan Perlengkapan Sekolah	Jumlah perlengkapan sekolah yang diadakan	12 paket	12 paket	Tidak ada	Tidak ada	
					Jumlah Perlengkapan siswa yang diadakan	3 paket	3 paket	Tidak ada	Tidak ada	
				3 Penyelengaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	Jumlah Penyelengaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	19 lembaga	19 lembaga	Tidak ada	Tidak ada	
				4 Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	21 lembaga	21 lembaga	Tidak ada	Tidak ada	
				5 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Jumlah Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	19 lembaga	19 lembaga	Tidak ada	Tidak ada	
				6 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	21 lembaga	21 lembaga	Tidak ada	Tidak ada	
				7 Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Jumlah dokumen pengelolaan data, penyajian dan pelayanan informasi GTK jenjang SMP sebagai bahan penyusunan formasi, kebutuhan GTK, untuk proses mutasi kepangkatan, mutasi status alih fungsi, bahan dalam rangka pembinaan, pengembangan karir dan kesejahteraan GTK dan bahan dalam rangka pembinaan, pengembangan kemampuan profesionalisme GTK	12 dokumen	12 dokumen	Tidak ada	Tidak ada	
				8 Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Jumlah dokumen pelayanan administrasi kepegawaian/angka kredit jabatan fungsional dan pelaksanaan urusan ketatausahaan GTK jenjang SMP	12 dokumen	12 dokumen	Tidak ada	Tidak ada	

No	Urusan Pemerintahan	Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tinjut Rekom DPRD
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
2	Kesehatan	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Meningkatnya Kualitas Derajat Kesehatan Masyarakat dan Pemerataan Akses Pelayanan Kesehatan	1 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Angka kesakitan penemuan penyakit Diabetes Mellitus per 1.000 penduduk ≥ 15 tahun	184 per 1.000 penduduk	70.59	- Tingginya target yang ditetapkan di dalam Renstra yang tidak sesuai dengan target prevalensi dari Dinkes Provinsi; - Turunnya Prevalensi DM dibandingkan tahun lalu dimana Prevalensi DM dari 5,9% menjadi 4,9%; - Rendahnya kunjungan masyarakat ke Puskesmas maupun Rumah Sakit termasuk penderita DM dikarenakan masa Pandemi COVID-19; - Adanya gap/ kesenjangan yang cukup tinggi antara jumlah penduduk Kota Mojokerto berdasarkan data dari Dispendukcapil dengan data riil penduduk Kota Mojokerto yang berdomisili di Kota Mojokerto;	- Menyesuaikan target di Renstra dengan target dari Provinsi maupun Pemerintah Pusat - Melaksanakan KIE secara terus menerus bahwa pelayanan rawat jalan tetap dilaksanakan di Puskesmas meskipun pandemi COVID-19 dengan menerapkan Prokes - Menetapkan data hasil pendataan dengan Surat Keputusan Kepala Daerah sehingga tidak menggunakan data proyeksi maupun Data Dispendukcapil sebagai acuan program	
					AKI per 100.000 KH (target : kurang dari)	94.6 per 100.000 KH (2 ibu)	17 % (11 kasus)	Adanya Pandemi Covid -19 sehingga layanan maternal dan neonatal menurun baik di FKTP maupun lanjutan serta kurang optimal sistim rujukan.banyak pembatasan hampir ke semua layanan rutin termasuk pelayanan kesehatan maternal dan neonatal (jumlah maternal terkonfirmasi Covid 19 sebanyak 72 kasus dan penyebab kematian maternal 100% karena Covid 19 positif)	- Optimalisasi pelaksanaan Audit Maternal Perinatal - Koordinasi jejaring kamar bersalin dengan RS, PONED dan Puskesmas - Bimtek oleh Sp.A dan Sp.OG	

No	Urusan Pemerintahan	Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tinjut Rekom DPRD
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
					AKB per 1.000 KH (target : kurang dari)	4.22 per 1000 KH (9 bayi)	69.6% (12 kasus)	Pelaksanaan UKBM di Puskesmas belum berjalan dengan optimal	Melaksanakan bimbingan teknik nakes oleh SpA/SpOG	
					Prevalensi stunting balita	19.5%	6.9% capaian kinerja 100%	Belum semua puskesmas mendapat pelatihan standar gizi : tatalaksana gizi buruk, konselor menyusui, fasilitator PMBA dan pemantauan pertumbuhan	- Komunikasi dan koordinasi antara RS, puskesmas dan Dinkes - Melakukan kegiatan verifikasi dan pelacakan gizi buruk balita/balita stunting	
					Persentase kelurahan memenuhi tatanan Kota Sehat ke 8 (Kawasan dengan tatanan kehidupan masyarakat sehat mandiri)	88%	88% capaian kinerja 100%	Tidak ada	Tidak ada	
					Angka Kesakitan TB Paru BTA (All Cases) per 100.000 Penduduk	183.5 per 100.000 penduduk (242 kasus)	363,3 per 100.000 penduduk (472 Kasus) capaian kinerja 195%	- Penemuan terduga TBC masih belum melibatkan FKTP swasta baik DPM maupun Klinik; - Masih rendahnya kunjungan masyarakat ke Puskesmas maupun ke Rumah Sakit sebagai dampak pandemi COVID-19; - Belum optimalnya pelaksanaan skreening TBC pada masyarakat akibat pemberlakuan PPKM Darurat Level 3 di Jawa-Bali sehingga Skreening TBC baru bisa dilaksanakan setelah pemberlakuan PPKM Darurat Level 1 di Kota Mojokerto yakni pada TW 4 tahun 2021	- Koordinasi dengan semua jejaring Puskesmas (klinik Pratama, Klinik Utama maupun Dokter Praktek mandiri (DPM)) serta semua Rumah Sakit yang ada di Kota Mojokerto terkait kunjungan pelayanan pasien TBC serta melibatkan untuk pelaksanaan skreening TBC pada pasien maupun keluarga pasien yang datang ke Faskes; - KIE kepada masyarakat untuk tidak takut berobat ke Puskesmas meskipun masa pandemi COVID-19 karena pelayanan tetap dilaksanakan dengan menerapkan Prokes secara ketat; - Meningkatkan kinerja Kader kesehatan dalam penanggulangan TBC mulai dari penemuan kasus melalui skreening TBC,	

No	Urusan Pemerintahan	Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tinjut Rekom DPRD
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
									Pendampingan serta pemantauan pengobatan.	
					Persentase kelurahan UCI	95%	70.5%	Kurangnya pengetahuan orang tua terkait pentingnya Imunisasi	Intensifikasi kolaborasi dg Bidang Kesmas terkait dengan penyuluhan dan monitoring secara paripurna pada balita,Pemanfaatan dana kelurahan untuk menarik minat Imunisasi	
					Persentase penduduk yang mendapatkan Jaminan Kesehatan saat dibutuhkan	97.3%	100%	UHC di Kota Mojokerto sudah 99.14% dari target 95% sedangkan jumlah penduduk yang tercover di PBID Sebagian telah beralih di pembiayaan mandiri, PPU atau beralih ke PBID Propinsi dan PBIN	Perubahan segmen pembayaran JKN tidak mengurangi capaian UHC	
					Persentase kesehatan Tradisional (HATTRA) yang berijin/terdaftar STPT (Surat Terdaftar Pengobat Tradisional)	18%	9.09%%	Perijinan untuk STPT terkendala dikarenakan oleh rekomendasi dari Asosiasi	Dibentuknya Paguyuban Hattra dimasing-masing wilayah Puskesmas untuk memfasilitasi dikeluarkannya rekomendasi utnuk kepengurusan STPT	
					Persentase Fasilitas Kesehatan dan Penunjang sesuai standar atau terakreditasi minimal Madya dan berkelanjutan	100%	100%	Tidak ada	Tidak ada	
				1 Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah bangunan gedung pelayanan kesehatan di bangun/ditingkatkan dengan kondisi lebih representatif	2 bangunan gedung	2 gedung	Adanya keterlambatan progres dalam pembangunan puskesmas Gedongan dan Mentikan	- Koordinasi setiap minggu antara direksilapangan,perencana,pengawas,pelaksana,PPTK dan PPK - Penghitungan ulang untuk mengejar keterlambatan capaian progres	
					Jumlah paket sarana pelayanan, alat kesehatan dan perbekalan kesehatan	2 paket	2 paket	Nominal hasil lelang pengadaan ambulan puskesmas wates jauh dibawah pagu	- Melakukan survey harga sesuai spesifikasi teknis pekerjaa/ barang yang	

No	Urusan Pemerintahan	Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tinjut Rekom DPRD
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
					rumah tangga yang diadakan				**akan diadakan secara lebih akurat**	
					Jumlah paket obat/kefarmasian yang diadakan	**2 paket**	**1 paket**	**Beberapa item alkes tidak dikirim penyedia karena terkendala waktu pengadaan (alkes import)**	**Melaksanakan pengadaan alkes pada tribulan 1,2,3 untuk memperpanjang waktu pelaksanaan kegiatan**	
					Jumlah UPT Pelayanan Kesehatan yang membutuhkan pemeliharaan aldok/alkes/alat laborat dan lainnya dalam kondisi baik	**8 UPT**	**6 UPT**	**Realisasi hanya 6 UPT, karena 2 UPT yaitu Labkesda mengadakan pemeliharaan alat sendiri, sedangkan GFK tidak ada pengajuan pemeliharaan untuk tahun 2021**	- **Perbaikan target sasaran untuk tahun berikutnya** - **Rescedule pemeliharaan aldok di masing2 masing UPT**	
					Persentase sarana DAK Fisik yang telah dimanfaatkan	**100%**	**100%**	**Tidak ada**	**Tidak ada**	
				1 Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Vaksin, BMHP, Makanan dan Minuman ke Puskesmas serta Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah puskesmas dan jaringannya dengan ketersediaan obat dan perbekalan kesehatan yang mencukupi	6 Puskesmas	6 Puskesmas	- Karena pandemi covid maka mengurangi pertemuan (rapat) - Uji mutu obat di Balai Besar POM tidak dapat dilaksanakan karena BPOM masih dalam masa akreditasi sehingga tidak menerima sampel dari pihak ketiga	- Koordinasi melalui media elektronik - Sudah berupaya koordinasi dengan Balai Besar POM Surabaya mulai tanggal 15 September s/d 3 Desember tetapi Balai POM Surabaya tetap tidak bisa menerima sampel dari pihak ketiga karena masih dalam akreditasi	
				2 Pembangunan Puskesmas	Jumlah bangunan gedung pelayanan kesehatan di bangun/ditingkatkan dengan kondisi lebih representatif	2 gedung	2 gedung	Adanya keterlambatan progres dalam pembangunan puskesmas Gedongan dan Mentikan	- Koordinasi setiap minggu antara direksi lapangan,perencana pengawas, pelaksana, PPTK dan PPK - Penghitungan ulang untuk mengejar keterlambatan capaian progres	
				3 Pengadaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah paket sarana pelayanan, alat kesehatan dan perbekalan kesehatan rumah tangga yang diadakan	2 paket	2 paket	- Tidak terserap honor UKPBJ untuk pengadaan genset dan rumah genset pustu bancang, karena HPS kurang	Melakukan survey harga sesuai spesifikasi teknis pekerjaa/ barang yang akan diadakan secara lebih akurat	

No	Urusan Pemerintahan	Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan				Indikator	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tinjut Rekom DPRD
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)				(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
											dari 200.000.000 - 2. Nominal hasil lelang pengadaan ambulan puskesmas wates jauh dibawah pagu		
								Persentase prasarana DAK Fisik yang telah dimanfaatkan	100%	100%	Tidak ada	Tidak ada	
						4	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Persentase ketersediaan sarana dan prasarana laboratorium kesehatan sesuai yang dibutuhkan	100%	100%	- Beberapa alat gigi pada set kesehatan gigi mulut dibawah harga pagu - Pengadaan set farmasi tidak terlaksana secara maksimal karena keterbatasan waktu pelaksanaan - Proses Pengadaan sarpras mundur dari jadwal yang direncanakan karena pandemi Covid. - Alat yang dibutuhkan banyak yang turun tayang dari e-catalog lkpp	- Melaksanakan pengaaan sesuai harga e catalog. - Melaksanakan pengadaan pada tribulan 1-3 untuk memperpanjang masa pelaksanaan kontrak - Tetap melakukan proses pengadaan melalui koordinasi dengan pihak terkait sehingga semua sarpras dapat terpenuhi. - Mencari spek sarpras sesuai dengan yang direncanakan.	
								Jumlah pengadaan alkes/ alat penunjang medik fasyankes yang diadakan	2 paket	2 paket	Tidak ada	Tidak ada	
								Persentase alat kesehatan DAK Fisik yang telah dimanfaatkan	100%	100%	Tidak ada	Tidak ada	
						5	Pengadaan Obat, Vaksin	Jumlah paket obat / kefarmasian yang diadakan	2 paket	2 paket	- Anggaran obat terlalu besar, sedangkan stok obat di GFK dan pusk masih mencukupi karena saat pandemi jumlah pasien berkurang - Belum ada aplikasi pengelolaan obat di puskesmas - Beberapa item obat yang telah diadakan, tidak dikirim penyedia karena kesulitan bahan baku/	- Penyusunan perencanaan obat dan pengajuan anggran pengadaan secara lebih akurat - Pembuatan aplikasi pengelolaan obat di puskesmas - Melakukan PAK untuk kegiatan dan anggran yang tidak dapat dilaksankan penyerapan secara maksimal	

No	Urusan Pemerintahan	Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan				Indikator	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tinjut Rekom DPRD
(1)	(2)	(3)	(4)				(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
											gangguan distribusi saat pandemi - Hasil lelang obat jauh dibawah survey harga - Tidak terserapnya honor PPK, karena PPK merangkap PA		
								Persentase puskesmas dengan ketersediaan obat esensial (DAK Fisik)	100%	100%	Tidak ada	Tidak ada	
						6	Pengadaan Bahan Habis Pakai	Jumlah paket obat / kefarmasian yang diadakan	2 paket	1 paket	Beberapa item alkes tidak dikirim penyedia karena terkendala waktu pengadaan (alkes imppor)	Melaksanakan pengadaan alkes pada tribulan 1,2,3 untuk memperpanjang waktu pelaksanaan kegiatan	
								Persentase ketersediaan sarana dan prasarana laboratorium kesehatan sesuai yang dibutuhkan	100%	100%	Tidak ada	Tidak ada	
						7	Pemeliharaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah UPT Pelayanan Kesehatan yang membutuhkan pemeliharaan aldok / alkes / alat laborat dan lainnya dalam kondisi baik	8 UPT	8 UPT	Ada negosiasi harga dalam pelaksanaan pekerjaan	Negosiasi harga tetap mempertimbangkan kualitas pengadaan/ pemeliharaan	
						8	Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Persentase sampel / specimen yang diuji / diperiksa pada fasilitas kesehatan laboratorium sesuai standar pengujian	100%	100%	Kegiatan sudah terjadwal, tapi dari penyedia jasa layanan masih banyak yang mengurangi pelayanan karena pandemi covid	Tetap melaksanakan kalibrasi dengan mencari penyedia jasa lain yang sesuai standart.	
					2		**Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil**	**100%**	**92.63%**	- **Belum adanya integrasi laporan ibu hamil (RS, Klinik, DPM, PMB)** - **Tidak optimalnya pelayanan pemeriksaan ibu hamil karena pandemic covid (takut datang ke Puskesmas)** - **Adanya kematian ibu hamil karena covid (5 orang atau 0.4%)** - **Data pembanding adalah proyeksi**	- **Rencana penggunaan e-cohort di semua faskes** - **Vaksinasi pada ibu hamil** - **Bekerjasama dengan tim pendamping keluarga (TPK) dan kader untuk pendampingan pelayanan ibu hamil** - **Perlu data sasaran real yng ditetapkan Kepala Daerah**	

No	Urusan Pemerintahan	Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tinjut Rekom DPRD
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
								penduduk yang ditetapkan pusdatin		
					Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan	100%	97.12%	- Belum adanya integrasi laporan ibu hamil (RS, Klinik, DPM, PMB) - Adanya kematian ibu nifas karena covid 6 orang (0.6%) - Data pembanding adalah proyeksi penduduk yang ditetapkan pusdatin	- Rencana penggunaan e-cohort di semua faskes - Bekerjasama dengan tim pendamping keluarga (TPK) dan kader untuk pendampingan pelayanan ibu bersalin - Perlu data sasaran real yng ditetapkan Kepala Daerah	
					Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir	100%	98.63%	- Belum adanya integrasi laporan ibu hamil (RS, Klinik, DPM, PMB) - Adanya kematian bayi 0-28hr sebesar 12 bayi - Data pembanding adalah proyeksi penduduk yang ditetapkan pusdatin	- Rencana penggunaan e-cohort di semua faskes - Bekerjasama dengan tim pendamping keluarga (TPK) dan kader untuk pendampingan pelayanan bayi baru lahir - Perlu data sasaran real yng ditetapkan Kepala Daerah	
					Persentase pelayanan kesehatan balita sesuai standar	100%	100.3%	- Belum adanya integrasi laporan ibu hamil (RS, Klinik, DPM, PMB) - pelaksanaan posyandu, kelas ibu balita, TK/PAUD belum optimal karena pandemic covid, baru bisa efektif setelah kasus melandai - Data pembanding adalah proyeksi penduduk yang ditetapkan pusdatin	- Rencana penggunaan e-cohort di semua faskes - Bekerjasama dengan tim pendamping keluarga (TPK) dan kader untuk pendampingan pelayanan balita - Perlu data sasaran real yng ditetapkan Kepala Daerah	
					Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	100%	122.5%	Tidak ada	Tidak ada	

No	Urusan Pemerintahan	Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tinjut Rekom DPRD
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
					Persentase lanjut usia (lansia) 60 tahun keatas mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	100%	93.15%	- Pelaksanaan posyandu lansia belum optimal karena pandemi covid, baru bs aktif setelah kasus melandai - Banyak lansia yang mengikuti keluarganya di luar kota (KK Kota Mojokerto, domisili luar kota) - Data pembanding adalah proyeksi penduduk yang ditetapkan pusdatin	- Tahun 2022 strategi pelaksanaan skrining lansia bersamaan dengan pelaksanaan posbindu PTM dilanjutkan - Perlu data sasaran real yang ditetapkan Kepala Daerah	
					Persentase penemuan terduga TBC mendapatkan pelayanan standar	100%	120.94%	- Penemuan terduga TBC masih belum melibatkan FKTP swasta baik DPM maupun Klinik; - Masih rendahnya kunjungan masyarakat ke Puskesmas maupun ke Rumah Sakit sebagai dampak pandemi COVID-19; - Belum optimalnya pelaksanaan skreening TBC pada masyarakat akibat pemberlakuan PPKM Darurat Level 3 di Jawa-Bali sehingga Skreening TBC baru bisa dilaksanakan setelah pemberlakuan PPKM Darurat Level 1 di Kota Mojokerto yakni pada TW 4 tahun 2021	- Koordinasi dengan semua jejaring Puskesmas (klinik Pratama, Klinik Utama maupun Dokter Praktek mandiri (DPM)) serta semua Rumah Sakit yang ada di Kota Mojokerto terkait kunjungan pelayanan pasien TBC serta melibatkan untuk pelaksanaan skreening TBC pada pasien maupun keluarga pasien yang datang ke Faskes; - KIE kepada masyarakat untuk tidak takut berobat ke Puskesmas meskipun masa pandemi COVID-19 karena pelayanan tetap dilaksanakan dengan menerapkan Prokes secara ketat; - Meningkatkan kinerja Kader kesehatan dalam penanggulangan TBC mulai dari penemuan kasus melalui	

No	Urusan Pemerintahan	Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tinjut Rekom DPRD
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
									skreening TBC, Pendampingan serta pemantauan pengobatan.	
					Angka kesakitan penemuan penyakit Hipertensi per 1.000 penduduk ≥ 15 tahun	**280 per 1000 penduduk (28.430 kasus)**	**288.3**	- **Rendahnya kunjungan masyarakat ke Puskesmas maupun Rumah Sakit termasuk penderita HT dikarenakan masa Pandemi COVID-19;** - **Adanya gap/ kesenjangan yang cukup tinggi antara jumlah penduduk Kota Mojokerto berdasarkan data dari Dispendukcapil dengan data riil penduduk Kota Mojokerto yang berdomisili di Kota Mojokerto;**	- **Melaksanakan KIE secara terus menerus bahwa pelayanan rawat jalan tetap dilaksanakan di Puskesmas meskipun pandemi COVID-19 dengan menerapkan Prokes** - **Menetapkan data hasil pendataan dengan Surat Keputusan Kepala Daerah sehingga tidak menggunakan data proyeksi maupun data Dispendukcapil sebagai acuan program**	
					Persentase Baduta mendapat Imunisasi Lanjutan	**100%**	**90.06%**	**Peningkatan kompetensi untuk tenaga Faskes baik RS maupun Puskesmas penting dilakukan serta perlunya dilakukan kegaiatan Surveillance aktif RS untuk mengetahui secara dini penyakit-penyakit yang berpotensi KLB**	- **Intensifikasi kolaborasi dg Bidang Kesmas terkait dengan penyuluhan dan monitoring secara paripurna pada balita,** - **Pemanfaatan dana kelurahan untuk menarik minat Imunisasi**	
				1 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan ibu hamil	100%	92.63%	- Belum adanya integrasi laporan ibu hamil (RS, Klinik, DPM, PMB) - Tidak optimalnya pelayanan pemeriksaan ibu hamil karena pandemic covid (takut datang ke Puskesmas) - Adanya kematian ibu	- Rencana penggunaan e-cohort di semua faskes - Vaksinasi pada ibu hamil - Bekerjasama dengan tim pendamping keluarga (TPK) dan kader untuk pendampingan pelayanan ibu hamil	

No	Urusan Pemerintahan	Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tinjut Rekom DPRD
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
								hamil karena covid (5 orang atau 0.4%) - Data pembanding adalah proyeksi penduduk yang ditetapkan pusdatin	- Perlu data sasaran real yng ditetapkan Kepala Daerah	
					Persentase Bayi Baru Lahir mendapatkan pelayanan kesehatan Bayi baru lahir (Puskesmas Blooto)	100%	347%	Tidak ada	Tidak ada	
					Persentase ibu Bersalin mendapatkan pelayanan persalinan (Puskesmas Blooto)	100%	370%	Tidak ada	Tidak ada	
					Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan ibu hamil (Puskesmas Blooto)	100%	370%	Tidak ada	Tidak ada	
					Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan ibu hamil (Puskesmas Kedundung)	100%	95.83%	Belum memenuhi target karena bln ini sdh tdk ada sasaran K4	Optimalisasi kelas ibu hamil, Pelayanan Kesehatan pada CATIN dan PUS, Pendampingan ibu hamil risti sampai dengan Post Partum, pemeriksaan USG, GEMULAI (Gerakan pemantauan kesehatan ibu hamil melalui grup WA)	
					Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan ibu hamil (Puskesmas Mentikan)	100%	100,25%	Perlu mempertahankan capaian	Meningkatkan koordinasi internal (lintas program), eksternal (lintas sektor dan jejaring	
					Persentase Bayi Baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir (Puskesmas Wates)	100%	92,6%	- Adanya Pandemi sehingga jumlah kunjungan menurun - Jumlah riil ibu hamil yang ditemukan tidak sebanyak sasaran supas (proyeksi) - ada beberapa bayi dengan KK wates yang dilahirkan di luar kota sehingga menyulitkan monitoring	- Meningkatkan kunjungan online - Melakukan pendataan jumlah ibu hamil riil oleh kader motivator - Meningkatkan koordinasi internal (lintas program), eksternal (lintas sektor dan jejaring	
					Persentase Ibu bersalin mendapatkan pelayanan	100%	90,3%	- Pandemi, sehingga jumlah kunjungan	- Meningkatkan kunjungan online	

No	Urusan Pemerintahan	Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tinjut Rekom DPRD
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
					persalinan (Puskesmas Wates)			persalinan menurun - Jumlah riil ibu hamil yang ditemukan tidak sebanyak sasaran Supas (Proyeksi) - terdapat Sebagian (69) ibu hamil wilayah wates yang bersalin diluar wates (domisili, rumah orang tua)	- Melakukan pendataan jumlah ibu hamil riil oleh kader motivator - Meningkatkan koordinasi internal (lintas program), eksternal (lintas sektor dan jejaring, jaberned)	
					Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan ibu hamil (Puskesmas Wates)	100%	86,2%	- Pandemi sehingga kunjungan ibu hamil menurun - Ada banyak ibu halim KK KTP wates namun domisili diluar wates saat hamil dan persalinan - Definisi operasional yang menyatakan bahwa ibu hamil yang diakui sebagai capaian adalah K4 yang sudah bersalin sehingga menurunkan capaian.	- Meningkatkan kunjungan online - Melakukan pendataan jumlah ibu hamil riil oleh kader motivator - Meningkatkan koordinasi internal (lintas program), eksternal (lintas sektor dan jejaring	
					Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil sesuai standart (Puskesmas Kranggan)	100%	98,09%	Kurangnya kesadaran ibu hamil untuk mendapatkan pelayanan ibu hamil sesuai standar	Meningkatkan koordinasi internal (lintas program) dan eksternal (lintas sektor dan jejaring)	
					Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan ibu hamil (Puskesmas Gedongan)	100%	81 %	Mobilisasi Tinggi Dan Tidak Ditemukannya K4	Optimalisasi pendampingan ibu hamil oleh kader dg dana dakkel, kordinasi dg fasyankes jejaring	
					Prosentase Ibu Hamil Resiko Tinggi ditangani oleh Tenaga Kesehatan	20%	40.13%	- Seluruh ibu hamil kontak nakes ditemukan resiko tinggi lebih tinggi dari sasaran - Belum adanya integrasi laporan ibu hamil (RS, Klinik, DPM, PMB)	- Optimalisasi ANC terpadu berkualitas - Pelaksanaan kelas ibu hamil - Rencana penggunaan e-cohort di semua faskes - Perencanaan persalinan di fasilitas kesehatan dan KB Paska Salin - Pendampingan bumil risti oleh nakes dan	

No	Urusan Pemerintahan	Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tinjut Rekom DPRD
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
									kader sampai masa nifas paripurna - Optimalisasi jejaring kamar bersalin & PONED - Bimbingan Teknik oleh SpOG ke Nakes	
				2 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Persentase ibu Bersalin mendapatkan pelayanan persalinan	100%	97.12%	- Belum adanya integrasi laporan ibu hamil (RS, Klinik, DPM, PMB) - Adanya kematian ibu nifas karena covid 6 orang (0.6%) - Data pembanding adalah proyeksi penduduk yang ditetapkan pusdatin	- Rencana penggunaan e-cohort di semua faskes - Bekerjasama dengan tim pendamping keluarga (TPK) dan kader untuk pendampingan pelayanan ibu bersalin - Perlu data sasaran real yng ditetapkan Kepala Daerah	
					Persentase Ibu Nifas mendapatkan pelayanan KB Pasca Salin	60%	50.52%	- Adanya kasus kematian Ibu sebanyak 11 kasus (0.55%) - Integrasi lintas program (PeKB) belum optimal - Pelaksanaan kelas ANC terpadu & kelas ibu hamil tidak efektif karena Pandemi covid-19	- Optimalisasi ANC terpadu berkualitas - Perencanaan persalinan di fasilitas kesehatan - an kelas ibu hamil - Koordinasi dengan llintas Program (PeKB) terkait KB paska Salin	
					Persentase Pelayanan Komplikasi Kebidanan tertangani	80%	96.94%	- Kasus maternal komplikasi tertangani tinggi - kasus covid -19 (+) pada maternal cukup tinggi sebanyak 77 kasus (17,9%)	- Optimalisasi ANC terpadu berkualitas - Pelaksanaan kelas ibu hamil - Perencanaan persalinan di fasilitas kesehatan dan KB Paska Salin - Pendampingan bumil risti oleh nakes dan kader sampai masa nifas paripurna - Optimalisasi jejaring kamar bersalin & PONED - Bimbingan Teknik oleh SpOG ke Nakes	

No	Urusan Pemerintahan	Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan				Indikator	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tinjut Rekom DPRD
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)				(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
								Persentase Persalinan di Fasilitas Kesehatan sesuai standar	100%	97.2%	- Belum adanya integrasi laporan ibu hamil (RS, Klinik, DPM, PMB) - Adanya kematian ibu nifas karena covid 6 orang (0.6%) - Data pembanding adalah proyeksi penduduk yang ditetapkan pusdatin	- Rencana penggunaan e-cohort di semua faskes - Bekerjasama dengan tim pendamping keluarga (TPK) dan kader untuk pendampingan pelayanan ibu bersalin - Perlu data sasaran real yng ditetapkan Kepala Daerah	
								Persentase ibu Bersalin mendapatkan pelayanan persalinan (Puskesmas Wates)	100%	90,3%	- Pandemi, sehingga jumlah kunjungan persalinan menurun - Jumlah riil ibu hamil yang ditemukan tidak sebanyak sasaran Supas (Proyeksi) - terdapat Sebagian (69) ibu hamil wilayah wates yang bersalin diluar wates (domisili, rumah orang tua)	- Meningkatkan kunjungan online - Melakukan pendataan jumlah ibu hamil riil oleh kader motivator - Meningkatkan koordinasi internal (lintas program), eksternal (lintas sektor dan jejaring, jaberned)	
								Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan (Puskesmas Gedongan)	100%	84,9%	Adanya Ibu Bersalin diluar kota atau di faskes jejaring yang belum Terlapor	- Kunjungan rumah & kordinasi dg pihak keluarga atau kader pendamping - Koordinasi dg Fasyankes Jejaring	
						3	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Persentase Bayi Baru Lahir mendapatkan pelayanan kesehatan Bayi baru lahir	100%	98.63%	- Belum adanya integrasi laporan ibu hamil (RS, Klinik, DPM, PMB) - Adanya kematian bayi 0-28hr sebesar 12 bayi - Data pembanding adalah proyeksi penduduk yang ditetapkan pusdatin	- Rencana penggunaan e-cohort di semua faskes - Bekerjasama dengan tim pendamping keluarga (TPK) dan kader untuk pendampingan pelayanan bayi baru lahir - Perlu data sasaran real yng ditetapkan Kepala Daerah	
								Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan sesuai standart (Puskesmas Wates)	100%	92,6%	- Adanya pandemi sehingga jumlah kunjungan menurun - Jumlah riil ibu hamil yang ditemukan tidak sebanyak sasaran supas	- Meningkatkan kunjungan online - Melakukan pendataan jumlah ibu hamil riil oleh kader motivator - Meningkatkan koordinasi internal	

No	Urusan Pemerintahan	Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan				Indikator	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tinjut Rekom DPRD
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)				(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
											(proyeksi) - ada beberapa bayi dengan KK wates yang dilahirkan di luar kota sehingga menyulitkan monitoring	(lintas program), eksternal (lintas sektor dan jejaring	
								Persentase bayi baru lahir yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar (Puskesmas Gedongan)	100%	83,5 %	Kunjungan neonatal tidak terlaporkan krn pandemi	Kunjungan rumah & koordinasi dg Kader Pendamping Mmupun jejaring	
								Persentase Pelayanan Neonatal dengan komplikasi tertangani	100%	77.57%	- Belum adanya integrasi laporan ibu hamil (RS, Klinik, DPM, PMB) - Kasus neonatal komplikasi ditangani ditemukan lebih rendah dari sasaran	- Bimbingan Teknik oleh SpA ke Nakes untuk SOP kasus neonatal komplikasi - Rencana penggunaan e-cohort di semua faskes - Pelaksanaan kelas ibu hamil & ibu Balita - Perencanaan persalinan di fasilitas kesehatan dan KB Paska Salin - Pendampingan bayi baru lahir (KN) oleh nakes dan kader - Optimalisasi jejaring kamar bersalin & PONED	
						4	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Persentase Anak Usia 0 - 59 bulan yang mendapatkan pelayanan kesehatan Balitasesuai standar	100%	100.3%	- Belum adanya integrasi laporan ibu hamil (RS, Klinik, DPM, PMB) - pelaksanaan posyandu, kelas ibu balita, TK/PAUD belum optimal karena pandemic covid, baru bisa efektif setelah kasus melandai - Data pembanding adalah proyeksi penduduk yang ditetapkan pusdatin	- Rencana penggunaan e-cohort di semua faskes - Bekerjasama dengan tim pendamping keluarga (TPK) dan kader untuk pendampingan pelayanan balita - Perlu data sasaran real yng ditetapkan Kepala Daerah	
								Persentase Anak Usia 0 - 59 bulan yang mendapatkan pelayanan kesehatan Balita sesuai	100%	119%	Tidak ada	Tidak ada	

No	Urusan Pemerintahan	Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan				Indikator	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tinjut Rekom DPRD
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)				(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
								standar (Puskesmas Blooto)					
								Persentase Anak Usia 0 - 59 bulan yang mendapatkan pelayanan kesehatan Balita sesuai standar (Puskesmas Kedundung)	100%	100.3%	Tidak ada	Tidak ada	
								Persentase Anak Usia 0 - 59 bulan yang mendapatkan pelayanan kesehatan Balita sesuai standar (Puskesmas Wates)	100%	100,4%	Adanya pandemi sehingga kunjungan menurun dan kegiatan posyandu masih terbatas	- Meningkatkan kunjungan online - Melakukan pelayanan posyandu door to door oleh kader - Petugas puskesmas Melakukan verifikasi hasil kegiatan kader	
								Persentase Anak Usia 0-59 Bulan yang mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Puskesmas Gedongan)	100%	97.1%	Selama pandemi posyandu belum dibuka sehingga pelayanan tidak bisa maximal	Pemberian jadwal DDTK di posyandu dan kunjungan rumah	
						5	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Persentase penjaringan kesehatan dan pemeriksaan berkala siswa SD / peserta didik kelas 1 sampai 9 sesuai pelayanan standar	100%	122.5%	Tidak ada	Tidak ada	
								Persentase penjaringan kesehatan dan pemeriksaan berkala siswa SD /peserta didik kelas 1 sampai 9 sesuai pelayanan standar (Puskesmas Blooto)	100%	90%	- Sekolah daring - Sapras kurang mendukung - Adanya sasaran yang sekolah diluar wlayah	- Mengoptimalkan kegiatan UKS bersaman dengan kegiatan yang dilakukan dgn pertemuan langsung misal saat vaksin, BIAS - Bimtek dan Koordinasi Guru UKS terkait program UKS - Koordinasi dengan puskesmas wilayah setempat terkait sasaran yang sekolah diluar wilayah	
								Persentase penjaringan kesehatan dan pemeriksaan berkala siswa SD /peserta didik kelas 1 sampai 9 sesuai	100%	86.47%	- Sasaran banyak sekolah di luar wilayah PKM Kedundung.	- Melakukan koordinasi dengan guru UKS untuk skrining pada murid yang blm mengisi Google Form	

No	Urusan Pemerintahan	Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tinjut Rekom DPRD
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
					pelayanan standar (Puskesmas Kedundung)			- Jumlah SD dan SMP sedikit - Adanya Pandemi covit sehingga sekolah dg daring - Siswa ada yang tidak punya HP dan paketan data internet	- Koordinasi dengan PKM lain minta GF wilayah kedundung	
					Persentase penjaringan kesehatan dan pemeriksaan berkala siswa SD /peserta didik kelas 1 sampai 9 sesuai pelayanan standar (Puskesmas Mentikan)	100%	100%	Perlu mempertahankan capaian	Meningkatkan koordinasi internal (lintas program), eksternal (lintas sektor dan jejaring	
					Persentase penjaringan kesehatan dan pemeriksaan berkala siswa SD /peserta didik kelas 1 sampai 9 sesuai pelayanan standar (Puskesmas Wates)	100%	91,5%	- Pandemi sehingga school for Home (SFH) - Kegiatan pembelajaran tatap muka yang terbatas menyebabkan kesulitan untuk memantau form yang telah dibagikan untuk pemeriksaan kesehatan mandiri (banyak yang tidak mengisi/mengembaikan) sekitar 200 siswa	- Meningkatkan koordinasi internal (lintas program), eksternal (lintas sektor dan sekolah) - Pemeriksaan Kesehatan melalui google form - Melakukan kunjungan atau sweeping hasil pengisian google form yang belum tuntas	
					Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan skrining kesehatan sesuai standart (Puskesmas Kranggan)	100%	87,08%	Perlu meningkatkan capaian	Meningkatkan koordinasi internal (lintas program), eksternal (lintas sektor dan jejaring	
					Persentase penjaringan kesehatan dan pemeriksaan berkala siswa SD /peserta didik kelas 1 sampai 9 sesuai pelayanan standar (Puskesmas Gedongan)	100%	100%	Perlu mempertahankan capaian	Meningkatkan koordinasi internal (lintas program), eksternal (lintas sektor dan jejaring	
					Persentase Remaja usia 10 s/d 18 tahun mendapatkan pelayanan kesehatan (PKPR)	100%	99.59%	- Pelayanan ukbm belum optimal karena pandemi covid, baru bs aktif setelah kasus melandai - Data pembanding adalah proyeksi	- Melaksanakan strategi melaksanakan layanan kesehatan remaja bersamaan dengan pelaksanaan kegiatan diluar gedung yang melibatkan remaja	

No	Urusan Pemerintahan	Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan				Indikator	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tinjut Rekom DPRD
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)				(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
											penduduk yang ditetapkan pusdatin - belum semua puskesmas mendapatkan pelatihan PKPR	seperti posyandu remaja, pelatihan kader remaja, vaksinasi remaja - Mengajukan pelatihan PKPR bagi puskesmas yang belum	
						6	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Persentase warga negara usia 15 - 59 tahun mendapatkan Skrining Kesehatan sesuai standar (Puskesmas Blooto)	100%	100%	Perlu mempertahankan capaian	Meningkatkan koordinasi internal (lintas program), eksternal (lintas sektor dan jejaring	
								Persentase warga negara usia 15 - 59 tahun mendapatkan Skrining Kesehatan sesuai standar (Puskesmas Kedundung)	100%	96.76%	Blm memenuhi target karena data hasil pemeriksaan PTM belom ter entry karena keterbatasan petugas.	- Melakukan entry hasil pelayanan PTM. - 2) Kolaborasi dengan pelaksanan vaksinasi covid Road show di tiap-tiap RW	
								Persentase warga negara usia 15 - 59 tahun mendapatkan Skrining Kesehatan sesuai standar (Puskesmas Wates)	100%	82%	- Pandemi - skrining Kesehatan di beberapa RW kurang maksimal kendala mobilisasi warga - warga domisili luar kota dan bekerja sulit untuk terjaring	- Meningkatkan koordinasi internal (lintas program), eksternal (lintas sektor dan jejaring - Melakukan skrining ke Balai RW untuk mendekatkan akses (anggaran dari dana kelurahan) - Pemberdayaan kader untuk membantu pelaksanaan skrining PTM - Adanya inovasi program BOTOKAN SAMBIROTO	
								Persentase warga negara usia 15 - 59 tahun mendapatkan Skrining Kesehatan sesuai standar (Puskesmas Gedongan)	100%	90.9%	Skrining di FKTP belum optimal	- Melakukan skrining kepada pasien di pelayanan dan saat melakukan tracing - Melakukan skrining pada waktu pelaksanaan vaksinasi	
						7	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Persentase Lanjut Usia (Lansia) 60 tahun keatas mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	100%	93.15%	- Pelaksanaan posyandu lansia belum optimal karena pandemi covid, baru bs aktif setelah kasus melandai - Banyak lansia yang mengikuti keluarganya	- Tahun 2022 strategi pelaksanaan skrining lansia bersamaan dengan pelaksanaan posbindu PTM dilanjutkan - Perlu data sasaran real yng ditetapkan Kepala	

No	Urusan Pemerintahan	Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan				Indikator	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tinjut Rekom DPRD
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)				(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
											di luar kota (KK kota mojokerto, domisili luar kota) - Data pembanding adalah proyeksi penduduk yang ditetapkan pusdatin	Daerah	
								Persentase warga negara usia 60 thn keatas mendapatkan Skrining Kesehatan sesuai standar (Puskesmas Mentikan)	100%	108,22%	Perlu mempertahankan capaian	Meningkatkan koordinasi internal (lintas program), eksternal (lintas sektor dan jejaring	
								Persentase warga negara usia (60 tahun ke atas) mendapatkan skrining kesehatan sesuai standart (Puskesmas Kranggan)	100%	98,84%	Kurangnya kesadaran masyarakat usia lanjut akan kesehatan	Meningkatkan koordinasi internal (lintas program), eksternal (lintas sektor dan jejaring	
								Persentase warga negara usia 60 thn keatas mendapatkan Skrining Kesehatan sesuai standar (Puskesmas Gedongan)	100%	96,6%	Selama pandemic kegiatan posyandu belum bisa berjalan optimal	- Meningkatkan koordinasi internal (lintas program), eksternal (lintas sektor dan jejaring - Melakukan pelayanan kesehatsn usia lanjut melalui kunjungan rumah bersamaan dengan kegiatan PSN	
						8	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Persentase penderita hipertensi mendapatkan yankes sesuai standar	100%	80.09%	- Belum optimalnya kunjungan masyarakat ke Puskesmas sebagai dampak dari pandemi Covid 19 - Masih belum optimal kegiatan POSBINDU dgn kunjungan petugas kesehatan ke masy karena dampak Pandemi COVID-19 - Belum optimalnya laporan pelayanan hipertensi dari Faskes jejaring baik RS,Klinik Pratama maupun Dokter Praktek mandiri (DPM)	- Mengupayakan edukasi kepada masyarakat bahwa pelayanan rawat jalan tetap dilaksanakan di Puskesmas secara Prokes - Melakukan pengelolaan pelayanan Hipertensi dengan mapping RT, RW untuk dikoordinasikan dengan kader kesehatan pasien hipertensi yang menjadi KK Pembina keluanga dan dipantau pengobatannya - Koordinasi dengan semua jejaring Puskesmas (Klinik	

No	Urusan Pemerintahan	Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan				Indikator	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tinjut Rekom DPRD
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)				(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
												Pratama, Klinik Utama maupun Dokter Praktek mandiri (DPM)) serta semua Rumah Sakit yang ada di Kota Mojokerto terkait kunjungan pelayanan pasien hipertensi	
								Persentase penderita hipertensi mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar (Puskesmas Wates)	100%	41%	Kesulitan dalam melakukan monitoring pasien hipertensi mengingat kesadaran masyarakat yang kurang akan pentingnya manajemen pengobatan hipertensi	- Meningkatkan koordinasi internal (lintas program), eksternal (lintas sektor dan jejaring - Melaksanakan kelas Hipertensi dan DM - Kolaborasi dengan rumah sakit dan HCI	
								Persentase Penderita Hipertensi mendapatkan yankes sesuai standar (Puskesmas Gedongan)	100%	79.92%	- Karena pandemi covid maka banyak masyarakat yang tidak melakukan pemeriksaan ke Fasyankes - Masyarakat masih banyak yang belum mengerti tentang komplikasi hipertensi terutama pada hipertensi ringan sehingga menunggu ada keluhan baru melakukan pemeriksaan ke Fasyankes	- Mengoptimalkan tenaga pendamping bidang kesehatan di kelurahan untuk memetakan pasien hipertensi sehingga dapat di lakukan intervensi serta pemantauan secara intensive - Koordinasi dengan faskes jejaring - Melakukan penyuluhan secara massive kepada masyarakat tentang bahaya hipertensi	
						9	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	Persentase penyandang DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	100%	144.01%	Belum optimalnya laporan pelayanan DM dari Faskes jejaring baik RS,Klinik Pratama maupun Dokter Praktek mandiri (DPM)	Koordinasi dengan semua jejaring Puskesmas (klinik Pratama, Klinik Utama maupun Dokter Praktek mandiri (DPM)) serta semua Rumah Sakit yang ada di Kota Mojokerto terkait kunjungan pelayanan pasien DM	
								Persentase penderita diabetes mellitus dan hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standart	100%	132.31%	Tidak ada	Tidak ada	

No	Urusan Pemerintahan	Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan				Indikator	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tinjut Rekom DPRD
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)				(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
								pelayanan (Puskesmas Kedundung)					
								Persentase penyandang DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar (Puskesmas Gedongan)	100%	100%	Tidak ada	Tidak ada	
						10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar	100%	136.07%	- Meskipun Persentase ODGJ berat yang mendapat pelayanan sesuai standart sudah mencapai target akan tetapi entry data pada aplikasi SIMKESWA belum dilakukan secara rutin dan lengkap - KOHORT Jiwa belum ada pemilahan antara kasus ODGJ dan ODMK	- Melakukan refreshing PJ KESWA terkait entry data pada aplikasi SIMKESWA sesuai dengan standar - Menambahkan kolom pada KOHORT Jiwa supaya mempermudah melakukan pemilahan antara kasus ODGJ dan ODMK	
								Persentase ODGJ Berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standart (Puskesmas Kedundung)	100%	114.29%	Tidak ada	Tidak ada	
								Persentase pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa berat sesuai standart (Puskesmas Kranggan)	100%	60,54%	Kurangnya pemahaman dan kurangnya sosialisasi terkait keberadaan layanan kesehatan jiwa	Meningkatkan koordinasi internal (lintas program), eksternal (lintas sektor dan jejaring	
								Persentase ODGJ Berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar (Puskesmas Blooto)	100%	52%	Perlu meningkatkan capaian karena kurang optimalnya penjaringn pasien ODGJ	Meningkatkan koordinasi internal (lintas program) poli umum dan pustu, eksternal (lintas sektor dan jejaring dengan cara bekerja sama dengan kader dalam penjaringan pasien ODGJ	
								Persentase ODGJ Berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar (Puskesmas Gedongan)	100%	100%	Tidak ada	Tidak ada	
								Persentase ODGJ Berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa	100%	100%	Tidak ada	Tidak ada	

No	Urusan Pemerintahan	Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tinjut Rekom DPRD
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
					sesuai standar(Puskesmas Mentikan)					
					Persentase ODGJ Berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar (Puskesmas Wates)	100%	163,9%	Adanya pandemi sehingga kunjungan kasus ODGJ menurun	- Meningkatkan koordinasi internal (lintas program), eksternal (lintas sektor dan jejaring - Meningkatkan kunjungan online - Meningkatkan pendampingan kasus jiwa oleh kader	
				11 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Persentase Keberhasilan pengobatan TBC	90%	94.21%	Adanya pandemi covid-19 sehingga pasien enggan datang ambil obat ke fasyankes	- Memberikan obat TB dengan jarak waktu yang lebih Panjang dan memantau minum obat melalui VC dan juga mengaktifkan PMO; - Edukasi pentingnya minum obat sesuai advice dokter dan melakukan pengobatan sampai dengan selesai pengobatan/sembuh - Komitmen dari penderita maupun keluarga/PMO terkait pendampingan dan pemantauan pengobatan TBC sampai dengan selesai/ sembuh	
					Persentase penderita TBC yang ditemukan dan diobati sesuai standar	100%	100%		Membentuk PPM, KOPI TB serta mengaktifkan peran dari DPPM dalam penangulangan TBC di Kota Mojokerto	
					Persentase penemuan terduga TBC mendapatkan pelayanan standar	100%	120.94%	- Penemuan terduga TBC masih belum melibatkan FKTP swasta baik DPM maupun Klinik; - Masih rendahnya kunjungan masyarakat ke Puskesmas maupun ke Rumah Sakit sebagai dampak pandemi COVID-19;	- Koordinasi dengan semua jejaring Puskesmas (klinik Pratama, Klinik Utama maupun Dokter Praktek mandiri (DPM)) serta semua Rumah Sakit yang ada di Kota Mojokerto terkait kunjungan pelayanan pasien TBC serta melibatkan untuk pelaksanaan skreening	

No	Urusan Pemerintahan	Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tinjut Rekom DPRD
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
								- Belum optimalnya pelaksanaan skreening TBC pada masyarakat akibat pemberlakuan PPKM Darurat Level 3 di Jawa-Bali sehingga Skreening TBC baru bisa dilaksanakan setelah pemberlakuan PPKM Darurat Level 1 di Kota Mojokerto yakni pada TW 4 tahun 2021	TBC pada pasien maupun keluarga pasien yang datang ke Faskes; - KIE kepada masyarakat untuk tidak takut berobat ke Puskesmas meskipun masa pandemi COVID-19 karena pelayanan tetap dilaksanakan dengan menerapkan Prokes secara ketat; - Meningkatkan kinerja Kader kesehatan dalam penanggulangan TBC mulai dari penemuan kasus melalui skreening TBC, Pendampingan serta pemantauan pengobatan.	
					Persentase Orang dengan TB yang mendapatkan pelayanan TB sesuai standar (Puskesmas Blooto)	100%	184%	Perlu mempertahankan capaian	Meningkatkan koordinasi internal (lintas program), eksternal (lintas sektor dan jejaring	
					Persentase Keberhasilan pengobatan TBC (Puskesmas Mentikan)	90%	90%	Perlu mempertahankan capaian	Meningkatkan koordinasi internal (lintas program), eksternal (lintas sektor dan jejaring	
					Persentase Orang dengan TB yang mendapatkan pelayanan TB sesuai standar (Puskesmas Mentikan)	100%	79,26%	Perlu meningkatkan capaian. Akar permasalahan pada kurangnya kesadaran masyarakat tentang bahaya TB dan TB bisa diobati	- Meningkatkan koordinasi lintas program dan lintas sektor maupun jejaring untuk meningkatkan angka cakupan TB - Membuat acara gebyar peduli TB untuk meningkatkan kesadaran masyarakat memeriksakan diri dan mengurangi stigma TB. Acara hendaknya didukung oleh pemerintah daerah beserta seluruh jajarannya	
					Persentase penderita TBC yang ditemukan dan diobati sesuai standar (Puskesmas Mentikan)	100%	79,26%	Perlu meningkatkan capaian. Akar permasalahan pada kurangnya kesadaran masyarakat tentang	- Meningkatkan koordinasi lintas program dan lintas sektor maupun jejaring	

No	Urusan Pemerintahan	Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan				Indikator	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tinjut Rekom DPRD
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)				(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
											bahaya TB dan TB bisa diobati	untuk meningkatkan angka cakupan TB - Membuat acara gebyar peduli TB untuk meningkatkan kesadaran masyarakat memeriksakan diri dan mengurangi stigma TB. Acara hendaknya didukung oleh pemerintah daerah beserta seluruh jajarannya	
								Persentase Orang dengan TB yang mendapatkan pelayanan TB sesuai standar (Puskesmas Wates)	100%	116,4%	- Adanya pandemic sehingga kunjungan poli ISPA menurun - Adanya stigma masyakarakat dan kurangnya pengetahuan	- Meningkatkan koordinasi internal (lintas program), eksternal (lintas sektor dan jejaring - Sosialsiasi masiv terkait TBC - Mengaktifkan kader TBC Pembinaan atau pelatihan kader TBC	
								Persentase pelayanan kesehatan orang terduga Tuberkulosis (TB) sesuai standart (Puskesmas Kranggan)	100%	87,88%	Kurangnya kesadaran masyarakat tentang bahaya TB dan adanya stigma masyarakat bahwa TB tidak bisa diobati	Meningkatkankoordinasi internal (lintas program), eksternal (lintas sektor dan jejaring	
								Persentase Orang dengan TB yang mendapatkan pelayanan TB sesuai standar (Puskesmas Kranggan)	100%	48,19%	Kurangnya kesadaran masyarakat tentang bahaya TB dan adanya stigma masyarakat bahwa TB tidak bisa diobati	Meningkatkankoordinasi internal (lintas program), eksternal (lintas sektor dan jejaring	
								Persentase penderita TBC yang ditemukan dan diobati sesuai standar (Puskesmas Kranggan)	100%	70%	Kurangnya kesadaran masyarakat tentang bahaya TB dan adanya stigma masyarakat bahwa TB tidak bisa diobati	Meningkatkankoordinasi internal (lintas program), eksternal (lintas sektor dan jejaring	
								Persentase penderita TBC yang ditemukan dan diobati sesuai standar (Puskesmas Gedongan)	100%	100%	Perlu mempertahankan capaian	Meningkatkan koordinasi internal (lintas program), eksternal (lintas sektor dan jejaring	
						12	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang	Persentase Ibu hamil yang mendapatkan pemeriksaan 3 E	90%	55.97%	Adanya pandemi covid sehingga bumil enggan periksa ke Fasyankes	- Melakukan kunjungan rumah pada bumil tetap dengan menerapkan	

No	Urusan Pemerintahan	Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tinjut Rekom DPRD
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
				dengan Risiko Terinfeksi HIV	(Eliminasi HIV / AIDS, Eliminasi Hepatitis B / C, Eliminasi IMS / Sypilis)				protokol kesehatan serta melakukan pemeriksaan Triple E; - Edukasi kepada masyarakat tentang pentingnya berobat ke Faskes jika sakit maupun kontrol/ pemeriksaan rutin pada Bayi, Balita, Ibu Hamil dan juga lansia meskipun pada masa pandemi COVID-19 karena pelayanan sudah disesuaikan denga adaptasi kebiasaan baru sebagai dampak Pandemi COVID-19 serta menerapkan Prokes secara ketat	
					Persentase ODHA Baru yang Minum ARV	100%	100%	- Turunnya kunjungan masyarakat termasuk kelompok beresiko baik ke Puskesmas maupun RS pada masa Pandemi COVID-19 yang tentunya akan berdampak pada penemuan kasus ODHIV/ODHA baru - Belum semua Puskesmas mampu melakukan pelayanan (PDP) pada pasien HIV di kota Mojokerto	- Nakes bekerjasama dengan LSM Mahameru untuk door to door pada pasien atau pasangan ODHA yang harus melakukan skrining - Skrining ke Lapas setiap bulan oleh Fasyankes untuk memudahkan orang berisiko melakukan pemeriksaan sekalipun tidak ada akses keluar - Meningkatkan kompetensi petugas puskesmas supaya mampu melakukan pelayanan pada pasien HIV (PDP) sebagai upaya untuk mendekatkan akses pelayanan	
					Persentase ODHA telah ON ARV selama 12-15 bulan mengalami penurunan ViralLoad	100%	109.1%	Pemeriksaan VL sempat terhenti dikarenakan Reagen di RS Provinsi sedang kehabisan stock namun dimulai lagi di trimester 3 tahun 2021	Saat Kembali diperbolehkan melakukan pemeriksaan VL, maka Fasyankes bergerak cepat menjadwal pasien yang akan dilakukan pemeriksaan VL setiap	

No	Urusan Pemerintahan	Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tinjut Rekom DPRD
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
									bulannya hingga bulan November	
					Persentase orang berisiko terinfeksi HIV mendapatkan pemeriksaan HIV sesuaistandar	100%	126.3%	- Kondisi pandemi membuat orang berisiko takut datang ke Fasilitas Kesehatan - Belum semua Puskesmas mampu melakukan pelayanan (PDP) pada pasien HIV di kota Mojokerto - Masih belum tertibnya faskes dalam entry data terkait program HIV pada aplikasi SIHA - Belum optimalnya pemeriksaan atau notifikasi pasangan pada kelompok beresiko	- Peran Nakes dalam memberika solusi agar pasien tetap mau datang untuk melakukan skrining dengan meluangkan waktu diluar jam kerja - Skrining ke Lapas setiap bulan oleh Fasyankes untuk memudahkan orang berisiko melakukan pemeriksaan sekalipun tidak ada akses keluar. - Meningkatkan kompetensi petugas puskesmas supaya mampu melakukan pelayanan pada pasien HIV (PDP) sebagai upaya untuk mendekatkan akses pelayanan - Melakukan refreshing PJ HIV dan Monev secara berkala terkait entry data pada aplikasi SIMKESWA sesuai dengan standar - Melakukan KIE pada semua kelompok beresiko tentang pentingnya pemeriksaan/ notifikasi pasangan untuk deteksi dini serta pencegahan keterlambatan penanganan pada pasangan ODHIV/ODHA	
					Persentase orang beresiko terinfeksi HIV mendapatkan pemeriksaan HIV sesuai standar (Puskesmas Blooto)	100%	707%	Tidak ada	Tidak ada	
					Persentase Orang Beresiko Terinfeksi HIV mendapatkan	100%	105.5%	Tidak ada	Tidak ada	

No	Urusan Pemerintahan	Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan				Indikator	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tinjut Rekom DPRD
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)				(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
								pemeriksaan HIV sesuai standart (Puskesmas Kedundung)					
								Persentase orang beresiko terinfeksi HIV mendapatkan pemeriksaan HIV sesuai standar (Puskesmas Gedongan)	100%	100%	Tidak ada	Tidak ada	
						13	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	Persentase penemuan penderita AFP per 100.000 penduduk usia < 15 tahun	2 kasus	0	- Dampak pandemi sehingga terjadi penurunan kunjungan masyarakat ke Faskes - Kurang aktifnya Surveikllance Aktif RS - Belum terbentuknya/ ditunjuk secara formal dari pimpinan RS untuk Petugas surveilans RS	- Perlu ditunjuk dan dibentuk SK oleh Pimpinan RS terkait dg Tim Surveilans RS - Monev dan Bimtek Surveillance secara berkala - Intensifikasi Surveillance aktif RS	
								Prosentase penyedilikan epidemiologi yang dilakukan < 24 Jam kasus berpotensi Kejadian Luar Biasa	100%	100%	Tidak ada	Tidak ada	
						14	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bagi Pendudukan Terdampak Krisis Kesehatan akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana	Jumlah frekuensi pembinaan rumah observasi Rusunawa Kota Mojokerto	8 kali	8 kali	Tidak ada	Tidak ada	
						15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Persentase Balita Kurus yang mendapatkan makanan tambahan	100%	77.4%	- Jumlah Makanan Tambahan belum mencukupi untuk mencover semua sasaran balita kurus baik yang gakin maupun non gakin - Adanya sasaran yang drop out karena tidak menyukai Makanan Tambahan	- Pada tahun 2022 mulai menggunakan sistem pelaporan terintegrasi dalam aplikasi GAYATRI untuk mengoptimalkan sistem pencatatan dan pelaporan gizi by name by address - Mengajukan permohonan kekuarangan makanan tambahan biskuit untuk balita kurus ke Kemenkes - Meningkatkan edukasi terkait manfaat	

No	Urusan Pemerintahan	Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tinjut Rekom DPRD
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
									makanan dan demo inovasi pengolahan biskuit unt ibu/ pengasuh balita	
					Persentase ibu hamil KEK yang mendapatkan makanan tambahan	100%	100%	Tidak ada	Tidak ada	
					Persentase Kecamatan Bebas Rawan Gizi	100%	100%	Tidak ada	Tidak ada	
					Prosentase Balita gizi buruk yang mendapat perawatan	100%	100%	Tidak ada	Tidak ada	
					Persentase Anak Usia 0 - 59 bulan yang mendapatkan pelayanan kesehatan Balita sesuai standar (Puskesmas Blooto)	100%	119%	Tidak ada	Tidak ada	
					Persentase masyarakat mendapat pelayanan gizi sesuai standart (Puskesmas Kedundung)	75%	75%	Tidak ada	Tidak ada	
					Persentase Balita gizi buruk yang mendapat perawatan (Puskesmas Mentikan)	75%	75%	Tidak ada	Tidak ada	
					Persentase balita gizi yang mendapatkan pelayanan gizi sesuai standar (D/S) (Puskesmas Wates)	75%	66%	- Adanya pandemi sehingga orang tua takut membawa ke posyandu - Pelaksanaan posyandu yang masih terbatas - Data sasaran proyeksi (supas) jauh diatas data riil balita (selisih 450 balita) - Tidak semua balita dan keluarga mau diakses oleh puskesmas untuk pemeriksaan kesehatan - TK paud masih belum aktif sepenuhnya - Tidak semua TK paud menyetorkan data hasil penimbangan - Alat penimbangan masih belum sesuai	- Meningkatkan koordinasi internal (lintas program), eksternal (lintas sektor, TK PAUD dan kader) - Melakukan pendataan riil data posyandu oleh kader - Membuat MOU dengan sekolah TK PAUD - Melaksanakan kelas ibu balita - Melakukan pelayanan posyandu door to door oleh kader - Petugas puskesmas Melakukan verifikasi hasil kegiatan kader	

No	Urusan Pemerintahan	Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan				Indikator	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tinjut Rekom DPRD
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)				(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
											standart untuk pemeriksaan dari rumah ke rumah		
								Persentase masyarakat yang mendapat pelayanan gizi sesuai standart (Puskesmas Kranggan)	75%	65,67%	Perlu meningkatkan capaian untuk mencapai target	Melakukan validasi data bulanan	
								Persentase masyarakat mendapat pelayanan gizi sesuai standar (Puskesmas Gedongan)	75%	74.1%	Pandemi COVID-19 membuat jumlah kunjungan ke layanan gizi dan kesehatan ibu dan anak (KIA) menurun	- Meningkatkan peran kader - Pemantauan pasien lewat telepon	
								Persentase masyarakat mendapat pelayanan gizi sesuai standar (Puskesmas Blooto)	75%	75%	Tidak ada	Tidak ada	
						16	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Persentase Jemaah haji yang diperiksa kebugaran	85%	0	Karena pandemi covid - 19 pada tahun 2021 Pemerintah tidak melaksanakan pemberangkatan haji sehingga kegiatan pengukuran kebugaran CJH tidak terlaksan	Dengan selalu meningkatkan Prokes dan vaksinasi maka diharapkan covid -19 segera berakhir sehingga program pelaksaan haji bisa dilaksanakan dan CJH akan dilaksanakan pengukuran kebugaran	
								Persentase Pos UKK yang terbentuk	88%	88.9%	Tidak ada	Tidak ada	
								Persentase Puskesmas dengan kesehatan kerja Dasar	100%	100%	Tidak ada	Tidak ada	
								Persentase Puskesmas dengan kesehatan Olah Raga	100%	100%	Tidak ada	Tidak ada	
								Prosentase Pos UKK yang dibina	58%	100%	Tidak ada	Tidak ada	
								Persentase warga negara usia 15 - 59 tahun mendapatkan Skrining Kesehatan sesuai standar (Puskesmas Blooto)	100%	100%	Tidak ada	Tidak ada	
								Persentase warga negara usia 15 - 59 tahun yang mendapatkan screening kesehatan sesuai standart (Puskesmas Kedundung)	100%	96.76%	Blm memenuhi target karena data hasil pemeriksaan PTM belom ter entry karena keterbatasan petugas.	- Melakukan entry hasil pelayanan PTM. - Kolaborasi dengan pelaksanan vaksinasi covid Road show di tiap-tiap RW	

No	Urusan Pemerintahan	Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tinjut Rekom DPRD
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
					Persentase Jemaah haji yang diperiksa kebugaran (Puskesmas Mentikan)	85%	0%	Keberangkatan haji yang ditunda	Akan dikejar pada tahun berikutnya	
					Persentase Pos UKK yang dibina (Puskesmas Mentikan)	58%	100%	Tidak ada	Tidak ada	
					Persentase Pos UKK yang terbentuk (Puskesmas Mentikan)	88%	0%	Pos UKK baru belum ada, karena terhalang pandemi	Akan dikejar pada tahun berikutnya	
					Persentase Puskesmas dengan kesehatan kerja Dasar (Puskesmas Mentikan)	100%	100%	Tidak ada	Tidak ada	
					Persentase Puskesmas dengan kesehatan Olah Raga (Puskesmas Mentikan)	100%	100%	Tidak ada	Tidak ada	
					Persentase Puskesmas dengan kesehatan Olah Raga bagi anak SD (Puskesmas Mentikan)	100%	0%	Sekolah dengan pertemuan tatap muka masih terbatas	Mengejar pada tahun berikutnya	
					Persentase warga negara usia 15 - 59 tahun mendapatkan Skrining Kesehatan sesuai standar (Puskesmas Wates)	100%	82%	- Pandemi - Skrining Kesehatan di beberapa RW kurang maksimal kendala mobilisasi warga - Warga domisili luar kota dan bekerja sulit untuk terjaring	- Meningkatkan koordinasi internal (lintas program), eksternal (lintas sektor dan jejaring - Melakukan skrining ke Balai RW untuk mendekatkan akses (anggaran dari dana kelurahan) - Pemberdayaan kader untuk membantu pelaksanaan skrining PTM Adanya inovasi program BOTOKAN SAMBIROTO	
					Persentase pelayanan kesehatan kerja dan olahraga sesuai standart (Puskesmas Kranggan)	35%	100%	Tidak ada	Tidak ada	
					Persentase warga negara usia 15 - 59 tahun mendapatkan Skrining Kesehatan sesuai standar (Puskesmas Gedongan)	100%	90.9%	Dampak pandemi covid mengakibatkan sasaran UKK yang ada di wilayah gedongantidak bersedia dikunjungi karena takut image masyarakat	Koordinasi dengan pos ukk terkait	

No	Urusan Pemerintahan	Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tinjut Rekom DPRD
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
				17 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Persentase akses air bersih	94%	100%	Tidak ada	Tidak ada	
					Persentase kelurahan memenuhi tatanan Kota Sehat ke 1 (Kawasan Permukiman, Sarana dan Prasarana Sehat)	44%	100%	Tidak ada	Tidak ada	
					Persentase KK yang akses ODF (Open Defecation Free)	99%	100%	Tidak ada	Tidak ada	
					Persentase rumah sehat	91%	87.2%	Adanya rumah dengan penghuni yang lebih banyak sedangkan luas rumah dan halaman tidak berubah , kurang ventilasi, lantai rusak / dari tanah, pencahayaan yang kurang menyebabkan rumah menjadi tidak memenuhi syarat rumah sehat.	Promosi kesehatan pelaksanaan penyuluhan tentang rumah sehat terus ditingkatkan dan apa bila memungkinkan pemerintah memberikan bantuan bedah rumah bagi warga yang kurang mampu.	
					Persentase Tempat Pengolahan Makanan (TPM) sehat	74%	80.5%			
					Persentase TTU sehat	91%	87.7%	Tempat Tempat Umum / TTU yang dilaksanakan Inspeksi Kesehatan Lingkungan (IKL) adalah Sekolah, Pasar, Terminal dan Puskesmas Ada beberapa Tempat Umum yang kurang memenuhi syarat setelah di IKL antaralain pasar, sekolahan dll	Perlu selalu dilakukan IKL di tempat tempat umum dan penyuluhan kepada pengelola oleh sanitarian dan Pengelola TTU (tempat tempat umum) didorong untuk melakukan pemeriksaan secara mandiri. .sehinga mengetahui hasil rapotnya.	
					Presentase kelurahan melaksanakan STBM sesuai standart (Puskesmas Blooto)	20%	100%	Tidak ada	Tidak ada	
					Persentase Kelurahan melaksanakan STBM sesuai standart (Puskesmas Kedundung)	20%	20%	Tidak ada	Tidak ada	
					Persentase kelurahan melaksanakan stbm sesuai standar (Puskesmas Mentikan)	20%	20%	Tidak ada	Tidak ada	

No	Urusan Pemerintahan	Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan				Indikator	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tinjut Rekom DPRD
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)				(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
								Persentase kelurahan melaksanakan stbm sesuai standar (Puskesmas Wates)	20%	100%	- Masih banyak septik tank yang lebih dari 5 tahun tidak dikuras sehingga menyulitkan pencapaian indikator STBM pilar 1 - Belum semua rumah tangga mempunyai grease trap untuk pencapaian STBM pilar 5 - Belum ada sedot tinja yang dapat rekomendasi dari DLH	- Meningkatkan koordinasi internal (lintas program), eksternal (lintas sektor PU, dan jejaring) - Melakukan workshop pembuatan grease trap ke masyarakat - Melakukan worshop penggolahan air bersih - Sosialisasi dan pemicuan STBM	
								Jumlah kelurahan melaksanakan STBM sesuai standart (Puskesmas Kranggan)	20%	19,13%	Tidak ada	Tidak ada	
						18	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Persentase terlaksananya kegiatan pelayanan promosi kesehatan	100%	100%	Tidak ada	Tidak ada	
								Persentase masyarakat yang melaksanakan PHBS (Puskesmas Blooto)	100%	135%	Tidak ada	Tidak ada	
								Persentase warga negara usia 15 - 59 tahun mendapatkan Skrining Kesehatan sesuai standar (Puskesmas Kedundung)	100%		Tidak ada	Tidak ada	
								Persentase Institusi Pendidikan dikaji PHBS yang memenuhi klasifikasi 4 (Puskesmas Mentikan)	80%	100%	Tidak ada	Tidak ada	
								Persentase kelurahan siaga aktif PURI (Purnama Mandiri) (Puskesmas Mentikan)	85%	100%	Tidak ada	Tidak ada	
								Persentase posbindu PTM yang dibentuk (Puskesmas Mentikan)	88%	100%	Tidak ada	Tidak ada	
								Persentase poskesdes dibina dan berstrata PURI (Puskesmas Mentikan)	100%	100%	Tidak ada	Tidak ada	
								Persentase poskestren yang dibentuk (Puskesmas Mentikan)	81%	75%	Tidak ada	Tidak ada	

No	Urusan Pemerintahan	Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan				Indikator	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tinjut Rekom DPRD
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)				(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
								Persentase Posyandu berstrata PURI (Purnama Mandiri) (Puskesmas Mentikan)	93%	100%	Tidak ada	Tidak ada	
								Persentase rumah tangga sehat yang dikaji PHBS (Puskesmas Mentikan)	64%	22%	Kondisi pandemi menyulitkan petugas untuk melakukan survei dari rumah ke rumah	Akan dikejar pada tahun berikutnya, dan sudah ada kegiatan yang dimasukkan yaitu kunjungan rumah yang berkolaborasi dengan tim kunjungan rumah IKS	
								Persentase Saka Bakti Husada dibentuk (Puskesmas Mentikan)	44%	0%	Kondisi pandemi covid 19 dengan kondisi sekolah tatap muka yang terbatas	Akan dikejar pada tahun selanjutnya	
								Persentase warga negara usia 15 - 59 tahun mendapatkan Skrining Kesehatan sesuai standar (Puskesmas Wates)	100%	82%	- Pandemi - Skrining Kesehatan di beberapa RW kurang maksimal kendala mobilisasi warga - Warga domisili luar kota dan bekerja sulit untuk terjaring	- Meningkatkan koordinasi internal (lintas program), eksternal (lintas sektor dan jejaring - Melakukan skrining ke Balai RW untuk mendekatkan akses (anggaran dari dana kelurahan) - Pemberdayaan kader untuk membantu pelaksanaan skrining PTM - Adanya inovasi program BOTOKAN SAMBIROTO	
								Persentase masyarakat yang menerapkan PHBS (Puskesmas Kranggan)	80%	67,09%	Tidak ada	Tidak ada	
						19	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya	Jumlah Puskesmas melaksanakan Pelayanan Kesehatan Tradisional	6 Puskesmas	6 Puskesmas	Perijinan untuk STPT terkendala dikarenakan oelh Rekomendasi dari Asosiasi	Dibentuknya Paguyuban Hattra di masing-masing wilayah Puskesmas untuk memfasilitasi dikeluarkannya rekomendasi untuk kepengurusan STPT	
								Persentase warga negara usia 60th keatas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standart (Puskesmas Blooto)	100%	8%	Perlu meningkatkan capaian karena belum adanya paguyuban hatra	Meningkatkan koordinasi internal (lintas program), eksternal (lintas sektor dan jejaring	
								Persentase warga negara usia 15 - 59 tahun yang mendapatkan screening kesehatan sesuai	100%	96.76%	Belum tercapai karena para penyehat tradisional terkendala PIRT	Dilakukan pembinaan pada para penyehat tradisional	

No	Urusan Pemerintahan	Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan				Indikator	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tinjut Rekom DPRD
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)				(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
								standart (Puskesmas Kedundung)					
								Persentase warga negara usia 60 thn keatas mendapatkan Skrining Kesehatan sesuai standar (Puskesmas Mentikan)	100%	108,22%	Sudah baik dan perlu dipertahankan	Meningkatkan koordinasi internal (lintas program), eksternal (lintas sektor dan jejaring)	
								Persentase warga negara usia 60 thn keatas mendapatkan Skrining Kesehatan sesuai standar (Puskesmas Wates)	100%	87%	- Pandemi - Skrining Kesehatan di beberapa RW kurang maksimal kendala mobilisasi warga - Warga domisili luar kota dan bekerja sulit untuk terjaring	- Meningkatkan koordinasi internal (lintas program), eksternal (lintas sektor dan jejaring - Melakukan skrining ke Balai RW untuk mendekatkan akses (anggaran dari dana kelurahan) - Pemberdayaan kader untuk membantu pelaksanaan skrining PTM - Adanya inovasi program BOTOKAN SAMBIROTO	
								Persentase warga negara usia 60 thn keatas mendapatkan Skrining Kesehatan sesuai standar	100%	163,70%	Tidak ada	Tidak ada	
								Persentase warga negara usia 60 thn keatas mendapatkan Skrining Kesehatan sesuai standar (Puskesmas Gedongan)	100%	96,9%	Pandemi covid menyebabkan banyak masyarakat yg takut untuk melakukan pijat tradisional	Meningkatkan koordinasi dengan lintas sektor	
								Jumlah dokumen evaluasi Program Indonesia Sehat dengan Pendekatan Keluarga (PIS-PK)	6 dokumen	6 dokumen	Tidak ada	Tidak ada	
								Jumlah frekuensi monitoring dan evaluasi Penyelenggaraan Program Indonesia Sehat dengan Pendekatan Keluarga (PIS-PK) dan intervensinya	6 kali	6 kali	Tidak ada	Tidak ada	
						20	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Persentase terlaksananya kegiatan pengelolaan surveilans kesehatan	100%	90.76%	Dampak pandemi, akses posyandu ditutup untuk pelaksanaan vaksinasi di Puskesmas	Kegiatan RCA (Rapid Convenient Assessment) dimana untuk mencari data sasaran secara nyata dan melakukan penyulaman vaksinasi.	

No	Urusan Pemerintahan	Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan				Indikator	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tinjut Rekom DPRD
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)				(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
								Persentase terpenuhinya pelayanan kesehatan untuk meningkatkan pencegahan potensial KLB (Puskesmas Mentikan)	100%	100%	Tidak ada	Tidak ada	
								Persentase Orang dengan TB yang mendapatkan pelayanan TB sesuai standar (Puskesmas Wates)	100%	116,4%	- Adanya pandemi sehingga kunjungan poli ISPA menurun - Adanya stigma masyakarakat dan kurangnya pengetahuan	- Meningkatkan koordinasi internal (lintas program), eksternal (lintas sektor dan jejaring - Sosialsiasi masiv terkait TBC - Mengaktifkan kader TBC - Pembinaan atau pelatihan kader TBC	
								Terpenuhinya pelayanan kesehatan untuk meningkatkan pencegahan potensi KLB (Puskesmas Kranggan)	100%	100%	Tidak ada	Tidak ada	
								Persentase Orang dengan TB yang mendapatkan pelayanan TB sesuai standar (Puskesmas Gedongan)	100%	100%	Tidak ada	Tidak ada	
						21	Pengelolaan Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan dan Pasca Krisis Kesehatan	Jumlah dokumen laporan kinerja pelayanan RS	1 laporan	1 laporan	Tidak ada	Tidak ada	
						22	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Angka Bebas Jentik	95%	97.5%	Kondisi Pandemi membuat kegiatan jumantik sempat terhenti dan beralih menjadi 1 rumah 1 jumantik. Hal itu menyebabkan ketidak akuratan pengawasan lokasi bertelurnya nyamuk di masing-masing rumah.	- Peran kader jumantik dalam mengkolektif hasil temuan jentik dilakukan dengan komitmen tinggi - Fasyankes bekerjasama dengan perangkat kelurahan dalam memotivasi warga agar tetap melakukan 3M plus sekalipun dalam kondisi Pandemi	
								CFR penderita DBD	0%	0%	Masih adanya FKTL tidak tepat diagnosa dan keterlambatan pelaporan pada fasyankes dan dinas Kesehatan	Penyelidikan Epidemiologi mengalami hambatan sehingga terlambat melakukan tindak lanjut pada lingkungan dengan kasus DBD maupun DD	
								Persentase Bayi yang lahir hidup dari Ibu	100%	100%		Menghimbau kepada Pelaksana Program	

No	Urusan Pemerintahan	Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tinjut Rekom DPRD
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
					Reaktif Hepatitis B mendapatkan HbIg < 24 Jam				Hepatitis untuk segera melaporkan ke Dinas atau mengentrikan pemberian HbIg di aplikasi	
					Persentase Ibu hamil yang mendapatkan pemeriksaan 3 E (Eliminasi HIV / AIDS, Eliminasi Hepatitis B / C, Eliminasi IMS / Sypilis)	90%	55.97%	Adanya pandemi covid sehingga bumil enggan periksa ke Fasyankes	Melakukan kunjungan rumah pada bumil tetap dengan menerapkan protocol kesehatan	
					Persentase pelaksanaan Fogging Fokus yang sesuai kriteria	100%	100%	Adanya masyarakat yang belum paham tentang indikasi dilaksanakannya fogging	Memberikan KIE pada masyarakat tentang indikasi dilakukannya fogging	
					Persentase Penemuan dan Penanganan penderita DBD	100%	100%	- Kasus DBD ditemukan saat mulai musim penghujan ditengah pandemi Covid-19 - Pada saat Pandemi kegiatan PSN terhenti sehingga beralih ke kegiatan 1 rumah 1 jumantik untuk mencegah penularan Covid-19	- Rumah Sakit melaporkan hasil temuan kasus DBD dan penegakan Diagnosa pada Dinas Kesehatan - Fasyankes dan Dinas Kesehatan langsung melakukan kunjungan lapangan pada lingkungan yang ditemukan kasus DBD - Bekerjasama dengan Kader Jumantik dalam pemeriksaan jentik dilakukan untuk mencegah munculnya kasus DBD baru	
					Persentase penderita hipertensi mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar (Puskesmas Blooto)	100%	608%	Tidak ada	Tidak ada	
					Persentase penyandang DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar (Puskesmas Blooto)	100%	158%	Tidak ada	Tidak ada	
					Persentase ODGJ Berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar (Puskesmas Wates)	100%	163,9%	Adanya pandemi sehingga kunjungan kasus ODGJ menurun	- Meningkatkan koordinasi internal (lintas program), eksternal (lintas sektor dan jejaring	

No	Urusan Pemerintahan	Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tinjut Rekom DPRD
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
									- Meingkatkan kunjungan online - Meningkatkan pendampingan kasus jiwa oleh kader	
					Persentase penderita hipertensi mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar (Puskesmas Wates)	100%	41%	Kesulitan dalam melakukan monitoring pasien hipertensi mengingat kesadaran masyarakat yang kurang akan pentingnya manajemen pengobatan hipertensi	- Meningkatkan koordinasi internal (lintas program), eksternal (lintas sektor dan jejaring - Melaksanakan kelas Hipertensi dan DM - Kolaborasi dengan rumah sakit dan HCI	
					Persentase penyandang DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar (Puskesmas Wates)	100%	123%	- Kesulitan dalam melakukan monitoring pasien DM mengingat kesadaran masyarakat yang kurang akan pentingnya manajemen pengobatan DM - Prevalensi kasus DM diwilayah wates melebihi target nasional	- Meningkatkan koordinasi internal (lintas program), eksternal (lintas sektor dan jejaring - Melaksanakan kelas Hipertensi dan DM - Kolaborasi dengan rumah sakit dan HCI	
					Persentase ODGJ Berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar (Puskesmas Mentikan)	100%	100%	Tidak ada	Tidak ada	
					Persentase penderita hipertensi mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar (Puskesmas Mentikan)	100%	45,41%	Kondisi pandemi covid 19 dan masih kurangnya kesadaran pasien HT untuk berobat rutin	- Meningkatkan Kerjasama lintas program, lintas sektor (kader, kelurahan, toma, toga) serta jejaring untuk meningkatkan capaian - Membuat gebyar pemeriksaan massal pasien HT yang didukung oleh pemerintah kota	
					Persentase penyandang DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar (Puskesmas Mentikan)	100%	119,11%	Tidak ada	Tidak ada	

No	Urusan Pemerintahan	Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan				Indikator	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tinjut Rekom DPRD
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)				(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
								Persentase ODGJ Berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar (Puskesmas Kranggan)	100%	127,17%	Tidak ada	Tidak ada	
								Persentase penderita hipertensi mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar (Puskesmas Kranggan)	100%	125,3%	Tidak ada	Tidak ada	
								Persentase penyandang DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar (Puskesmas Kranggan)	100%	146,85%	Tidak ada	Tidak ada	
								Presentase ODGJ Berat yang mendapatkan pelayanan Kesehatan Jiwa Sesuai standart (Puskesmas Kedundung)	100%	114.29%	Tidak ada	Tidak ada	
								Presentasi Penderita Hipertensi yang mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai standart (Puskesmas Kedundung)	100%	81.07%	Laporan penderita HT belum terlaporkan dari jejaring dan RS. Banyak penderita yang tidak mengakui mempunyai penyakit HT	- Koordinasi dengan jejaring dan RS - Skrining PTM	
								Presentasi Penderita Diabetes Mellitus yang mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai standart (Puskesmas Kedundung)	100%	132.21%	Tidak ada	Tidak ada	
								Persentase Penemuan dan Penanganan penderita Diare pada Balita	100%	100%	Masih adanya masyarakat yang menganggap enteng kalau ada keluarga dengan diare dan hanya dibelikan obat sendiri di toko obat	Memberikan KIE pada masyarakat tentang bahaya diare serta tanda-tanda dehidrasi dan pentingnya penanganan secara tepat	
								Persentase Penemuan penderita Pneumonia Usia Balita	100%	95.77%	Masih banyaknya masyarakat tidak mengetahui bahaya pneumonia bila tidak ditangani secara tepat	Memberikan KIE pada masyarakat tentang bahaya Pneumoni serta tanda-tanda gejala memberat dan pentingnya penanganan secara tepat	
						23	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Jumlah bulan pemenuhan kebutuhan pembayaran Iuran Jaminan Kesehatan	12 bulan	12 bulan	Pembayaran tidak dapat di lakukan di awal tahun karena kendala aplikasi keuangan	Koordinasi dengan Provider (BPJS) untuk bisa di lakukan	

No	Urusan Pemerintahan	Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan				Indikator	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tinjut Rekom DPRD
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)				(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
												pembayaran pada bulan berikutnya	
								Jumlah penduduk yang tercover Asuransi Jaminan Kesehatan dengan kepersertaan PBID (Universal Health Coverage)	55.000 jiwa	53.480 jiwa	UHC di Kota mojokrto sudah 99,14% dari target 95% sedangkan jumlah pendudukyang tercover di PBID sebagian telah beralih di Pembiayaan Mandiri, PPU atau beralih ke PBID provinsi dan PBIN	Perubahan segmen pembayaran JKN tidak mengurangi capaian UHC	
								Jumlah FKTP puskesmas yang melayani peserta yang tercover Asuransi jaminan Kesehatan (UHC)	6 Puskesmas	6 Puskesmas	Tidak ada	Tidak ada	
								Jumlah dokumen monitoring dan evaluasi penyelenggaraan Program JKN	6 dokumen	6 dokumen	Tidak ada	Tidak ada	
								Jumlah frekuensi monev penyelenggaraan program JKN dengan lintas sektor	4 kali	4 kali	Tidak ada	Tidak ada	
						24	Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan / Nasional	Persentase Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan / Nasional (Puskesmas Wates)	25%	0%	- Penurunan kasus terkonfirmasi covid - Pemeriksaan penunjang diagnostic covid tidak lagi menggunakan PCR (sample dikirim ke dinkes/labkesda) cukup dengan swab antigen di puskesmas	Meningkatkan koordinasi internal (lintas program), eksternal (dinkes bagian P2 dan keuangan)	
						25	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah puskesmas dan UPT penunjang yang mendapatkan biaya operasional dan pemeliharaan untuk mendukung pelaksanaan pelayanan FKTP dan Penunjang (Puskesmas Mentikan)	1	1	Tidak ada	Tidak ada	
								Persentase warga negara usia 15 - 59 tahun mendapatkan Skrining	100%	100%	82%	- Pandemi - Skrining Kesehatan di beberapa RW kurang	

No	Urusan Pemerintahan	Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan				Indikator	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tinjut Rekom DPRD
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)				(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
								Kesehatan sesuai standar (Puskesmas Wates)				maksimal kendala mobilisasi warga Warga domisili luar kota dan bekerja sulit untuk terjaring	
								Jumlah puskesmas dan UPT penunjang yang mendapatkan biaya operasional dan pemeliharaan untuk mendukung pelaksanaan pelayanan FKTP dan Penunjang	1	0	Menuju BLUD	Menuju BLUD	
						26	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah puskesmas yang mendapatkan biaya operasional dan pemeliharaan untuk mendukung pelaksanaan pelayanan BLUD	1	1	Tidak ada	Tidak ada	
						27	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah layanan laboratorium kesehatan terakreditasi dan berkelanjutan	1 UPT	1 UPT	Tidak ada	Tidak ada	
								Jumlah puskesmas dan jaringannya dengan ketersediaan obat dan perbekalan kesehatan yang mencukupi	6 Puskesmas	6 Puskesmas	Tidak ada	Tidak ada	
						28	Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen Evaluasi Program Indonesia Sehat dgn Pendekatan Keluarga (PIS-PK)	1 dokumen	1 dokumen	Intervensi lanjutan masih belum maksimal terlaksana	Intervensi lanjutan tetap dilakukan kolaborasi dengan kegiatan Posbindu PTM, PSN, Posyandu	
								Jumlah dokumen Penilaian Kinerja Puskesmas (PKP)	1 dokumen	1 dokumen	Tidak ada	Tidak ada	
								Jumlah Puskesmas melaksanakan Pelayanan Keperawatan Kesehatan masyarakat (Perkesmas)	6 Puskesmas	6 Puskesmas	Tidak ada	Tidak ada	
								Jumlah puskesmas terakuntabilisasi Pengelolaan Keuangan BLUD	5 Puskesmas	5 Puskesmas	Tidak ada	Tidak ada	
								Jumlah Puskesmas terpilih berprestasi Tingkat Kota	0 Puskesmas	0 Puskesmas	Tidak terlaksana dikarenakan masih dalam pandemic Covid	Tetap melakukan pemb inaan bagi Puskesmas yang memnuhi kriteria	
								Jumlah Prosentase warga Kota Mojokerto yang	95%	95%	Pendataan sebagian besar tidak dilakukan	Intervensi lanjutan tetap dilakukan kolaborasi	

No	Urusan Pemerintahan	Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan				Indikator	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tinjut Rekom DPRD
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)				(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
								dilakukan Pendataan Kesehatan			untuk intervensi lanjutan dikarenakan pandemic *COVID-19*	dengan kegiatan Posbindu PTM, PSN, Posyandu	
						29	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Persentase Baduta mendapat Imunisasi Lanjutan (DPT, HB, Hib)	100%	90.06%	Peningkatan kompetensi untuk tenaga Faskes baik RS maupun Puskesmas penting dilakukan serta perlunya dilakukan kegaiatan Surveillance aktif RS untuk mengetahui secara dini penyakit-penyakit yang berpotensi KLB	Intensifikasi kolaborasi dg Bidang Kesmas terkait dengan penyuluhan dan monitoring secara paripurna pada balita,Pemanfaatan dana kelurahan untuk menarik minat Imunisasi	
								Persentase Kelurahan telah Universal Child Immunization (UCI)	95%	70.5%	Kurang pengetahuan orang tua terkait pentingnya Imunisasi	Intensifikasi kolaborasi dg Bidang Kesmas terkait dengan penyuluhan dan monitoring secara paripurna pada balita,Pemanfaatan dana kelurahan untuk menarik minat Imunisasi	
								Prosentase bayi mendapat Imunisasi Dasar Lengkap (IDL)	94%	97%	Kurangnya pemantauan imunisasi terhadap anak, untuk pemantauan melalui buku besar yang bisa diakses oleh Puskesmas	- monitoring evaluasi secara berkala pada sasaran anak - Adanya wadah untuk monitoring secara terintegrasi mulai dari tingkat Dinkes dan Puskesmas melalui Gayatri - Kegiatan penyulaman tetap dilakukan untuk memeberikan perlindungan maksimal kepada anak - Intensifikasi kolaborasi dg Bidang Kesmas terkait dengan penyuluhan dan monitoring secara paripurna pada balita - Pemanfaatan dana kelurahan untuk menarik minat Imunisasi	
						30	Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	Persentase Orang dengan TB yang mendapatkan pelayanan	94%		Tidak ada	Tidak ada	

No	Urusan Pemerintahan	Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tinjut Rekom DPRD
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
					TB sesuai standar (Puskesmas Wates)					
				3 Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi	**Jumlah buku profile yang disusun**	**1 buku**	**1 buku**	**Tidak ada**	**Tidak ada**	
					Jumlah data SPM yang divalidasi	**12 indikator**	**12 indikator**	**Tidak ada**	**Tidak ada**	
					Jumlah titik jaringan SIK yang berfungsi on line	**19 titik**	**17 titik**	**Dilakukan efisiensi dan efektifitas jaringan SIK,sehingga dilakukan pembongkaran pada 2 tower yg ada yaitu tower di Dinkes dan Labkesda, Namun hal tsb tidak mengurangi outcame dari kegiatan penyelenggaraan SIK secara terintegrasi.**	**Target selanjutnya akan direvisi menjadi 17 titik, karena menyesuaikan dengan kebutuhan yg ada di DKPPKB**	
				1 Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan	Jumlah buku profile yang disusun	1 buku	1 buku	Tidak ada	Tidak ada	
					Jumlah data SPM yang divalidasi	12 indikator	12 indikator	Tidak ada	Tidak ada	
				2 Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Jumlah titik jaringan SIK yang berfungsi on line	19 titik	17 titik	Dilakukan efisiensi dan efektifitas jaringan SIK,sehingga dilakukan pembongkaran pada 2 tower yg ada yaitu tower di Dinkes dan Labkesda, Namun hal tsb tidak mengurangi outcame dari kegiatan penyelenggaraan SIK secara terintegrasi.	Target selanjutnya akan direvisi menjadi 17 titik, karena menyesuaikan dengan kebutuhan yg ada di DKPPKB	
				3 Pengadaan Alat/Perangkat Sistem Informasi Kesehatan dan Jaringan Internet	Jumlah titik jaringan SIK yang berfungsi on line	19 titik	17 titik	Dilakukan efisiensi dan efektifitas jaringan SIK,sehingga dilakukan pembongkaran pada 2 tower yg ada yaitu tower di Dinkes dan Labkesda, Namun hal tsb tidak mengurangi outcame dari kegiatan penyelenggaraan SIK secara terintegrasi.	Target selanjutnya akan direvisi menjadi 17 titik, karena menyesuaikan dengan kebutuhan yg ada di DKPPKB	
					Jumlah macam pengadaan alat/perangkat SIK	10 macam	7 macam	Target sd direvisi menjadi 7 macam sewaktu PAK	Dari revisi target menjadi 7 macam sudah terealisasi 100%	
				4 Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan	**Persentase terlaksananya**	**100%**	**100%**	**Tidak ada**	**Tidak ada**	

No	Urusan Pemerintahan	Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tinjut Rekom DPRD
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
				Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	**peningkatan mutu pelayanan fasilitas kesehatan**					
				1 Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	Persentase terlaksananya peningkatan mutu pelayanan fasilitas kesehatan	100%	100%	Tidak ada	Tidak ada	
				2 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	**Persentase kompetensi Tenaga Kesehatan JFU/JFT pada Jajaran Dinas Kesehatan**	**100%**	**100%**	**Tidak ada**	**Tidak ada**	
				1 Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah Kabupaten/Kota	**Persentase Tenaga Kesehatan memiliki Ijin Praktek**	**96%**	**96%**	**Tidak ada**	**Tidak ada**	
				1 Pengendalian Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan	Persentase Tenaga Kesehatan memiliki Ijin Praktek	96%	96%	Tidak terserap belanja bahan bakar dan Pelumas (BBM) dikarenakan ketidaksesuain antara jadwal dan jarak dalam pelaksanaan kegiatan perijinan	Belanja BBM diganti dengan belanja makmin lapangan dan menyusun jadwal	
				2 Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan	Persentase Tenaga Kesehatan memiliki Ijin Praktek	96%	96%	Menyesuaikan dengan kedatangan Peserta Internsip Dokter Indonesia dari Dinkes Prop. Jatim	Mengusulkan jadwal kedatangan Peserta Intersip Dokter Indonesia ke Dinkes Prop. Jatim	
				2 Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	**Jumlah dokumen manajemen sumber daya manusia kesehatan yang tersusun**	**4 dokumen**	**4 dokumen**	- **Tenaga kesehatan yang ada di Rumah sakit dan puskesmas belum memahami bahwa kenaikan jabatan itu juga dikarenakan adanya formasi yang dibutuhkan** - **Masih belum memahami dalam penghitungan kebutuhan formasi kebutuhan tenaga kesehatan pada sitem aplikasi Renbut**	- **Mengadakan pertemuan dengan narasumber yang kompeten dari Kementrian Kesehatan agar tenaga kesehatan memahami dalam kenaikan jabatan** - **Koordinasi dengan BKD tentang formasi CASN**	
					Jumlah puskesmas memberikan pelayanan kemitraan spesialistik dan dokter umum	**6 Puskesmas**	**6 Puskesmas**	**Menyesuaikan dengan jadwal kunjungan dokter spesialis ke**	**Penyusunan jadwal kunjungan dokter spesialis di puskesmas dengan**	

No	Urusan Pemerintahan	Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tinjut Rekom DPRD
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
								Puskesmas	**menyesuaikan jadwal dokter di RSU**	
				1 Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Jumlah dokumen manajemen sumber daya manusia kesehatan yang tersusun	4 dokumen	4 dokumen	- Tenaga kesehatan yang ada di Rumah sakit dan puskesmas belum memahami bahwa kenaikan jabatan itu juga dikarenakan adanya formasi yang dibutuhkan - Masih belum memahami dalam penghitungan kebutuhan formasi kebutuhan tenaga kesehatan pada sitem aplikasi Renbut	- Mengadakan pertemuan dengan narasumber yang kompeten dari Kementrian Kesehatan agar tenaga kesehatan memahami dalam kenaikan jabatan - Koordinasi dengan BKD tentang formasi CASN	
				2 Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar	Jumlah puskesmas memberikan pelayanan kemitraan spesialistik dan dokter umum	4 dokumen	4 dokumen	Tidak ada	Tidak ada	
				3 Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar	Jumlah puskesmas memberikan pelayanan kemitraan spesialistik dan dokter umum	6 Puskesmas	6 Puskesmas	Menyesuaikan dengan jadwal kunjungan dokter spesialis ke Puskesmas	Penyusunan jadwal kunjungan dokter spesialis di puskesmas dengan menyesuaikan jadwal dokter di RSU	
				4 Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Jumlah puskesmas memberikan pelayanan kemitraan spesialistik dan dokter umum	6 Puskesmas	6 Puskesmas	- Tenaga kesehatan belum memahami tentang jabatan fungsional yang ada di puskesmas - Belum terbentuknya tim PAK yang sesuai dengan kriteria	- Memberikan pemahaman tentang jabatan fungsional dengan narasumber yang lebih kompeten - Dibentuk Tim PAK yang kompeten sesuai dengan jenis profesi nya	
					Jumlah dokter umum yang diberi honor BK Khusus Bidang Kesehatan (BK Propinsi)	1 orang	1 orang	Tidak ada	Tidak ada	
				3 Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	**Jumlah tenaga kesehatan teladan terpilih tingkat kota**	**2 orang**	**0**	- **Dikarenakan pandemi Covid-19 sehingga tidak dilaksanakan kegiatan pemilihan tenaga kesehatan teladan tingkat kota**	**Pelaksanaan kursus singkat/pelatihan di Murnajati dilaksanakan secara zoom**	

No	Urusan Pemerintahan	Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tinjut Rekom DPRD
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
								- **Adanya pandemi Covid sehingga kegiatan kursus/pelatihan ada yang tidak bisa dilaksanakan karena kuota di Murnajati tidak terpenuhi**		
				1 Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah tenaga kesehatan teladan terpilih tingkat kota	2 orang	0	- Dikarenakan pandemi Covid-19 sehingga tidak dilaksanakan kegiatan pemilihan tenaga kesehatan teladan tingkat kota - Adanya pandemi Covid sehingga kegiatan kursus/pelatihan ada yang tidak bisa dilaksanakan karena kuota di Murnajati tidak terpenuhi	Pelaksanaan kursus singkat/pelatihan di Murnajati dilaksanakan secara zoom	
					Persentase sarana produksi IRTP yang memenuhi ketentuan (BPOM)	40%	40%	Tidak ada	Tidak ada	
					Persentase pangan IRT yang memenuhi syarat (BPOM)	65%	65%	Tidak ada	Tidak ada	
				3 PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	**Persentase sediaan farmasi, alat kesehatan, dan makanan minuman yang memenuhi standar**	**90%**	**90%**	**Tidak ada**	**Tidak ada**	
				1 Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	**Cakupan Penggunaan Obat Rasional (POR) untuk tiga indikator penyakit**	**96%**	**96%**	**Tidak ada**	**Tidak ada**	
				1 Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Cakupan penggunaan obat rasional (POR) untuk tiga indikator penyakit	96%	96%	Tidak ada	Tidak ada	

No	Urusan Pemerintahan	Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tinjut Rekom DPRD
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
				2 Penyediaan dan Pengelolaan Data Perizinan dan Tindak Lanjut Pengawasan Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Cakupan penggunaan obat rasional (POR) untuk tiga indikator penyakit	96%	96%	Tidak ada	Tidak ada	
					Persentase fasilitas pelayanan kefarmasian (apotek dan toko obat) yang memenuhi standar dan persyaratan perijinan (BPOM)	49%	49%	Tidak ada	Tidak ada	
					Persentase sarana produksi UMOT yang memenuhi ketentuan (BPOM)	60%	60%	Tidak ada	Tidak ada	
				2 Pemberian Sertifikat Produksi untuk Sarana Produksi Alat Kesehatan Kelas 1 tertentu dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga Kelas 1 Tertentu Perusahaan Rumah Tangga	**Persentase sarana obat dan makanan terinspeksi dan dibina untuk memenuhi standar kesehatan**	**45%**	**45%**	**Tidak ada**	**Tidak ada**	
				1 Pengendalian dan Pengawasan serta tindak lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Alat Kesehatan Kelas 1 Tertentu dan PKRT Kelas 1 Tertentu Perusahaan Rumah Tangga	Persentase sarana obat dan makanan terinspeksi dan dibina untuk memenuhistandar kesehatan	45%	45%	Tidak ada	Tidak ada	
				3 Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	**Persentase PIRT memiliki Sertifikat PKP (Penyuluhan Keamanan Pangan) dan Laik Sehat**	**70%**	**70%**	**Tidak ada**	**Tidak ada**	
				1 Pengendalian dan Pengawasan Serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT Sebagai Izin Produksi,	Persentase PIRT memiliki Sertifikat PKP (Penyuluhan Keamanan Pangan) dan Laik Sehat	70%	70%	Tidak ada	Tidak ada	
					Persentase sarana produksi IRTP yang memenuhi ketentuan (BPOM)	40%	40%	Tidak ada	Tidak ada	

No	Urusan Pemerintahan	Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tinjut Rekom DPRD
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
				untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	Persentase pangan IRT yang memenuhi syarat (BPOM)	65%	65%	Tidak ada	Tidak ada	
					Persentase SPP-IRT yang diterbitkan sesuai ketentuan (BPOM)	40%	40%	Tidak ada	Tidak ada	
				4 Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga	**Jumlah Tempat Pengolahan Makmin yang di SIDAK beredar di masyarakat**	**40 lokasi**	**40 lokasi**	**Tidak ada**	**Tidak ada**	
				1 Pengendalian Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga yang Beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan	Jumlah Tempat Pengolahan Makmin yang di SIDAK beredar di masyarakat	40 lokasi	40 lokasi	Tidak ada	Tidak ada	
					Persentase sarana produksi IRTP yang memenuhi ketentuan (BPOM)	40%	40%	Tidak ada	Tidak ada	
					Persentase pangan IRT yang memenuhi syarat (BPOM)	65%	65%	Tidak ada	Tidak ada	
					Persentase SPP-IRT yang diterbitkan sesuai ketentuan (BPOM)	40%	40%	Tidak ada	Tidak ada	
				2 Penyediaan dan Pengelolaan Data Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Industri Rumah Tangga	Jumlah Tempat Pengolahan Makmin yang di SIDAK beredar di masyarakat	40 lokasi	40 lokasi	Tidak ada	Tidak ada	
				4 Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	**Persentase indikator SPM yang dilakukan upaya promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat**	**100%**	**100%**	**Tidak ada**	**Tidak ada**	
				1 Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah	**Persentase kelurahan siaga aktif PURI (Purnama Mandiri)**	**83.33%**	**89%**	**Tidak ada**	**Tidak ada**	
				1 Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	Persentase Institusi Pendidikan dikaji PHBS yang memenuhi klasifikasi 4	74%	85%	Tercapai Dengan adanya pandemi covid-19, maka Pembelajaran Tatap Muka tidak dilakukan di sekolah, melainkan secara	Intervensi dan implementasi kegiatan bidang Kesehatan di sekolah dilaksanakan pada saat Pertemuan Tatap Muka terbatas mulai dilakukan	

No	Urusan Pemerintahan	Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tinjut Rekom DPRD
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
								daring dirumah. Sehingga tidak ada beberapa indikator PHBS di sekolah yang tidak dapat diukur karena tidak adanya aktifitas di sekolah.		
					Persentase kelurahan siaga aktif PURI (Purnama Mandiri)	83%	89%	Tidak ada	Tidak ada	
					Prosentase rumah tangga sehat yang dikaji PHBS	62%	65%	Tidak ada	Tidak ada	
					Persentase pondok pesantren yang dikaji PHBS	73%	77%	Tidak ada	Tidak ada	
					Prosentase pembinaan dan pengukuran tingkat perkembangan UKBM	94%	94%	Tidak ada	Tidak ada	
					Jumlah poskestren yang didampingi (BK Propinsi)	7 Poskestren	10 Poskestren	Tidak ada	Tidak ada	
					Persentase pangan IRT yang memenuhi syarat (BPOM)	65%	65%	Tidak ada	Tidak ada	
				2 Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	**Jumlah media penyuluhan promosi kesehatan**	**5 media**	**5 media**	**Tidak ada**	**Tidak ada**	
				1 Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	Jumlah media penyuluhan promosi kesehatan	5 media	5 media	Tidak ada	Tidak ada	
					Jumlah kegiatan penggerakan masyarakat ber PHBS	3 kali	3 kali	Tidak ada	Tidak ada	
		RSUD dr. Wahidin Sudiro Husodo	**Meningkatkan capaian pelaksanaan kegiatan pelayanan sesuai dengan SPM**	**1 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	**Persentase pemenuhan sarana dan prasarana sesuai standar rumah sakit tipe B**	**100%**	**100%**	**Tidak ada**	**Tidak ada**	
				1 Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten / Kota	**Jumlah sarana dan prasarana yang disediakan**	**2 paket**	**1,2 paket**	- **Ada beberapa item yang discontinue namun masih tayang di e-catalog serta disarankan merubah spesifikasi yang lebih tinggi sedangkan anggaran tidak mencukupi** - **Barang mengalami kenaikan harga, sudah melakukan**	- **Perencanaan yang matang** - **Untuk usulan DAK yang tidak terlaksana akan diajukan kembali pada usulan DAK berikutnya**	

No	Urusan Pemerintahan	Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tinjut Rekom DPRD
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
								negosiasi tap tidak terjadi kesepakatan - **Terdapat 1 alat yang turun tayang di e-catalog, yaituMeja Instrumen**		
				1 Pengadaan AlatKesehatan / Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah alat Kesehatan yang diadakan	2 Paket	1,2 paket	Tidak ada	Tidak ada	
3	**Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang**	**Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang,Perumahan Rakyat dan Permukian**		**1 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM**	**Presentase Pemenuhan akses layak air minum**	**95,28 SR**	**94,76 SR**	**Sambungan Rumah (SR) air minum perpipaan. Target tidak tercapai Targetnya karena pelayanan PDAM kurang maksimal, sehingga masih banyak yang menggunakan air sumur**	**Selanjutnya berupaya menghimbau kepada masyarakat untuk menggunakan air minum PDAM dan pelayanan PDAM dimaksimalkan**	
				1 Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten / Kota	**Jumlaah SR air minum yang terpasang**	**80 SR**	**80 SR**	**Tidak ada**	**Tidak ada**	
				1 Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan	Jumlaah SR air minum yang terpasang	80 SR	80 SR	Tidak ada	Tidak ada	
				2 PROGRAM PENGELOLAANDAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	**Persentase pemenuhan akses layak sanitasi**	**98.57%**	**98.63%**	**Tidak ada**	**Tidak ada**	
				1 Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten / Kota	**Jumlah pemenuhan akses layak sanitasi**	**10 dok**	**10 dok**	**Tidak ada**	**Tidak ada**	
				1 Penyusunan Rencana, Kebijakan , Strategi dan teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik dalam daerah Kabupaten / Kota	Jumlah Dokumen FS,Dokumen DED,Dokumen UKL UPL yang disusun	3 dok	3 dok	Tidak ada	Tidak ada	
				2 Pembangunan/ Penyediaan Sistem Air Pengelolaan Air Limbah Terpusat Skala Kota	Jumlah IPAL yang dibangun	7 unit	7 unit	Tidak ada	Tidak ada	

No	Urusan Pemerintahan	Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tinjut Rekom DPRD
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
				3 Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase	**Persentase penurunan luas wilayah rawan genangan (genangan tidak lebih dari 2 jam)**	**83.06%**	**83.20%**	**Tidak ada**	**Tidak ada**	
				1 Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengat Sungai dalam Daerah Kabupaten/ Kota	**Jumlah penurunan luas wilayah rawan genangan (genangan tidak lebih dari 2 jam)**	**19 km**	**19 km**	**Tidak ada**	**Tidak ada**	
				1 Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan	Panjang drainase yang dibangun	10 km	10 km	Tidak ada	Tidak ada	
				2 Rehabilitasi saluran Drainase Perkotaan	Panjang drainase yang dipelihara	9 km	9 km	Tidak ada	Tidak ada	
				3 Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase	Jumlah oprasional dan tenaga Non ASN (walet) yg dibayarkan	78 org	78 org	Tidak ada	Tidak ada	
				4 Program Penyelenggaraan Jalan	**Persentase jalan kota dalam kondisi mantab (> 40km/jam)**	**91,50%**	**95.98%**	**Tidak ada**	**Tidak ada**	
				1 Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/ Kota	**Jumlah jalan kota dalam kondisi mantap (> 40km/jam)**	**6,5 km**	**6,5 km**	**Tidak ada**	**Tidak ada**	
				1 Pembangunan Jalan	Panjang jalan yang dibangun	3,2 km	3,2 km	Tidak ada	Tidak ada	
				2 Rekonstruksi jalan	Panjang jalan yang dibangun/ditingkatkan	5 km	5 km	Tidak ada	Tidak ada	
				3 Pemeliharaan Berkala Jalan	Panjang jalan yang dipelihara	1,6 km	1,6 km	Tidak ada	Tidak ada	
				4 Pemeliharaan Rutin Jalan	Panjang jalan yang dipelihara	6 km	6 km	Tidak ada	Tidak ada	
				5 Pembangunan Jembatan	Jumlah jembatan yang dibangun	4 jembatan	4 jembatan	Tidak ada	Tidak ada	
				6 Pemeliharaan Rutin Jembatan	Jumlah jembatan yang dipelihara	22 jembatan	22 jembatan	Tidak ada	Tidak ada	
				5 Program Pengembangan Jasa Konstruksi	**Presentase pengembangan jasa konstruksi**	**100%**	**100%**	**Tidak ada**	**Tidak ada**	
				1 Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	**Jumlah pengembangan jasa konstruksi**	**80 org**	**80 org**	**Tidak ada**	**Tidak ada**	
				1 Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Konstruksi	Jumlah tenaga konstruksi yang dipilih	80 org	80 org	Tidak ada	Tidak ada	
				6 Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	**Presentase penyelenggaraan penataan ruang**	**100%**	**100%**	**Tidak ada**	**Tidak ada**	

No	Urusan Pemerintahan	Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tinjut Rekom DPRD
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
				1 Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan tata ruang Daerah kabupaten / Kota	**Jumlah dokumen tata ruang yang disusun**	**1 dok**	**1 dok**	**Tidak ada**	**Tidak ada**	
				1 Koordinasi dan Sinkronisasi RTRW Kabupaten/ Kota	Jumlah dokumen tata ruang yang disusun	2 dok	2 dok	Tidak ada	Tidak ada	
4	**Perumahan dan Kawasan Permukiman**	**Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang,Perumahan Rakyat dan Permukian**		**1 Program Pengembangan Perumahan**	**Persentase kecukupan pengembangan perumahan**	**100%**	**100%**	**Tidak ada**	**Tidak ada**	
				1 Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Umum dan /atau Rumah Khusus	**Jumlah kecukupan pengembangan perumahan**	**1**	**1**	**Tidak ada**	**Tidak ada**	
				1 Fasilitasi Pengelolaan Kelembagaan dan Pemilik/ Penghuni Rumah susun	Jumlah pemeliharaan sarana dan prasarana rusunawa	1	1	Tidak ada	Tidak ada	
				2 Program Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kumuh	**Persentase pengurangan kawasan kumuh**	**80%**	**80%**	**Tidak ada**	**Tidak ada**	
				1 Pencegahan Perumahan dan Kawsan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten / Kota	**Jumlah pengurangan kawasan kumuh**	**175 unit**	**175 unit**	**Tidak ada**	**Tidak ada**	
				1 Perbaikan RTLH untuk pencegahan terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di luar Kawasan Permukiman Kumuh dg Luas di Bawah 10 Ha	Jumlah RTLH yang direhab	140 unit	140 unit	Tidak ada	Tidak ada	
				3 Program Penigkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)	**Persentase kecukupan sarana dan prasarana utilitas umum**	**100%**	**100%**	**Tidak ada**	**Tidak ada**	
				1 Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	**Jumlah kecukupan sarana dan prasarana utilitas umum**	**56 jenis**	**56 jenis**	**Tidak ada**	**Tidak ada**	
				1 Penyediaan Prasarana, Sarana,dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	Jumlah yang dibangun (Pokkir)	54	54	Tidak ada	Tidak ada	
				2 Koordinasi dan Sunkronisasi c dalam Rangka Penyediaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum Perumahan	Jumlah database prasarana,sarana dan utilitas umum di perumahan			Tidak ada	Tidak ada	

No	Urusan Pemerintahan	Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tinjut Rekom DPRD
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
5	**Ketentraman dan Ketertiban Umum, serta Perlindungan Masyarakat**	**Satuan Polisi Pamong Praja**	**Peningkatan pembinaan ketentraman dan ketertiban umum, satuan perlindungan masyarakat dan unsur rakyat terlatih lainnya**	**1 PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**Persentase Penanganan Penegakan Perda/Perkada yang ditangani**	**100%**	**100%**	**Tidak ada**	**Tidak ada**	
				1 Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	**Persentase Penanganan penyelesaian Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum**	**100%**	**100%**	**Tidak ada**	**Tidak ada**	
				1 Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Operasi Gabungan Penyakit Masyarakat (PEKAT) Dalam Menciptakan Trantibmas	27 Kali	27 Kali	Tidak ada	Tidak ada	
				2 Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Petugas Linmas yang dibina tentang Pengamanan Lingkungan	216 orang	216 orang	Tidak ada	Tidak ada	
				3 Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia	Jumlah Bintek/Binsik Anggota Satpol PP	12 Kali	12 Kali	Tidak ada	Tidak ada	
				4 Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Kegiatan Aparat Tim koordinasi pengendali dan Tim pelaksana Ketentraman dan Ketertiban terpadu dalam rangka menciptakan Trantibmas yang honorariumnya dibayar tepat waktu	36 Kali	36 Kali	Tidak ada	Tidak ada	
				5 Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Peralatan kerja penyelenggara trantib yang tersedia	12 Buah	12 Buah	Tidak ada	Tidak ada	
				2 Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Walikota	**Persentase Pengamanan dan Pengendalian Ketertiban Berdasarkan Perda dan Perwali**	**100%**	**100%**	**Tidak ada**	**Tidak ada**	

No	Urusan Pemerintahan	Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tinjut Rekom DPRD
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
				1 Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupat/Walikota	Jumlah Pengamanan dan pengendalian Ketertiban berdasarkan Perda dan Perkada	102 Kali	102 Kali	Tidak ada	Tidak ada	
					Jumlah warga negara yang memperoleh layanan akibat dari Penegakan hukum Perda dan Perkada	0	0	Tidak ada	Tidak ada	
				2 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	**Persentase koordinasi ketentraman dan ketertiban umum yang terlaksana**	**100%**	**100%**	**Tidak ada**	**Tidak ada**	
				1 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	**Persentase Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang terlaksana**	**100%**	**100%**	**Tidak ada**	**Tidak ada**	
				1 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamata	Jumlah Transaksi Pembayaran honor satgas covid-19	12 Transaksi	12 Transaksi	Tidak ada	Tidak ada	
				3 PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	**Persentase Penanggulangan Bencana yang ditangani**	**100%**	**100%**	**Tidak ada**	**Tidak ada**	
				1 Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	**Persentase Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota**	**100%**	**100%**	**Tidak ada**	**Tidak ada**	
				1 Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana)	Jumlah Warga Negara yang memperoleh Layanan Informasi Rawan Bencana	135 Orang	135 Orang	Tidak ada	Tidak ada	
					Jumlah Penduduk di Daerah Rawan Bencana yang memperoleh Layanan Informasi Rawan Bencana	135 Orang	135 Orang	Tidak ada	Tidak ada	
				2 Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	**Persentase Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana**	**100%**	**71,32%**	**Tidak ada**	**Tidak ada**	
				1 Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Penduduk yang memperoleh layanan pencegahan dan	373 Orang	373 Orang	Tidak ada	Tidak ada	

No	Urusan Pemerintahan	Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tinjut Rekom DPRD
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
					kesiapsiagaan terhadap bencana					
					Jumlah Penduduk yang memperoleh layanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	0	0	Tidak ada	Tidak ada	
				4 PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	**Persentase Pelayanan Pencegahan, Penanggulangan Penyelamatan Kebakaran dan Non Kebakaran yang ditangani**	**100%**	**100%**	**Tidak ada**	**Tidak ada**	
				1 Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	**Persentase Pelayanan Bencana Kebakaran dan Non Kebakaran**	**100%**	**100%**	**Tidak ada**	**Tidak ada**	
				1 Pencegahan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Transaksi Honor Tunjangan Petugas Kebakaran dan Non Kebakaran yang dibayarkan	12 Transaksi	12 Transaksi	Tidak ada	Tidak ada	
				2 Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran	Jumlah Sarana dan Prasarana Pemadam Kebakaran yang di Rawat dan Dipelihara	5 Unit	5 Unit	Tidak ada	Tidak ada	
					Respon Time Rate Evakuasi Korban Bencana Kebakaran	< 14 menit	< 14 menit	Tidak ada	Tidak ada	
					Jumlah Penduduk yang memperoleh layanan penyelamatan dan Evakuasi korban kebakaran	250 orang	250 orang	Tidak ada	Tidak ada	
				3 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri	Jumlah Peralatan kerja Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri	5 Buah	5 Buah	Tidak ada	Tidak ada	
6	**Sosial**	**Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan**	**Penguatan aksebilitas terhadap pelayanan sosial**	**1 PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL**	**Persentase Pelaksanaan Pemberdayaan Sosial**	**100%**	**100%**	**Tidak ada**	**Tidak ada**	
				1 Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan	**Persentase pelaksanaan pengembangan potensi**	**100%**	**100%**	**Tidak ada**	**Tidak ada**	

No	Urusan Pemerintahan	Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tinjut Rekom DPRD
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
		Perlindungan Anak	**dasar, fasilitas pelayanan publik, dan jaminan kesejahteraan sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial**	**Sosial Daerah Kabupaten/Kota**	**sumber kesejahteraan sosial daerah kabupaten/ kota**					
				1 Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Peserta Pemberdayaan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial(PSKS)IPSM,KT, Pilar Sosial,TKD kota dan Lembaga Sosial	400 orang	400 orang	Tidak ada	Tidak ada	
					Jumlah peserta peringatan hari kesetiakawanan sosial nasional, serta mengikuti agenda kota lainnya	180 Orang	180 Orang	Tidak ada	Tidak ada	
					Jumlah pelaksanaan kegiatan agenda kota	5 Kegiatan	5 Kegiatan	Tidak ada	Tidak ada	
				2 Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)	Jumlah Sumber Daya Manusia yang telah diberikan pelatihan	150 Orang	150 Orang	Tidak ada	Tidak ada	
					Jumlah pelaksanaan kegiatan pelatihan	5 Kegiatan	5 Kegiatan	Tidak ada	Tidak ada	
				2 PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	**Presentase PMKS yang terlayani sesuai SOP**	**100%**	**100%**	**Tidak ada**	**Tidak ada**	
					Presentasi PMKS yang direhabilitasi	**100%**	**100%**	**Tidak ada**	**Tidak ada**	
				1 Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	**Persentase pelaksanaan rehabilitasi sosial dasar penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis diluar panti**	**100%**	**100%**	**Tidak ada**	**Tidak ada**	
				1 Pemberian Layanan Data dan Pengaduan	Jumlah penyandang disabilitas terlantar anak terlantar, lansia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya diluar panti	40 org	40 org	Tidak ada	Tidak ada	
					Jumlah PMKS dan tuna sosial lainnya yang dipantau	65 org	65 org	Tidak ada	Tidak ada	
				2 Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial	**Persentase pelaksanaan rehabilitasi sosial penyandang**	**100%**	**100%**	**Tidak ada**	**Tidak ada**	

No	Urusan Pemerintahan	Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tinjut Rekom DPRD
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
				(PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	**masalah kesejahteraan sosial (PMKS) lainnya bukan korban HIV/AIDS**					
				1 Penyediaan Permakanan	Jumlah PMKS yang terlayani	2430	2430	Tidak ada	Tidak ada	
				2 Penyediaan Sandang	Jumlah PMKS yang terlayani	28 Org	28 Org	Tidak ada	Tidak ada	
				3 Penyediaan Alat Bantu	Jumlah rumah singgah /shelter /tempat tinggal sementara yang dimiliki sesuai standart	2 unit	2 unit	Tidak ada	Tidak ada	
					Jumlah bulan pelaksanaan operasional rumah aman/shelter	12 bulan	12 bulan	Tidak ada	Tidak ada	
					Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lansia terlantar dan gepeng	60 orang	60 orang	Tidak ada	Tidak ada	
				4 Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Jumlah PMKS yang mendapat bimbingan	400	400	Tidak ada	Tidak ada	
				5 Pemberian Layanan Rujukan	Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lansia terlantar dan gepeng yang direunifikasi dan seharusnya dapat direunifikasi dengan keluarga	16 orang	16 orang	Tidak ada	Tidak ada	
					Jumlah PMKS yang telah mendapatkan rehabilitasi dan dikirim ke UPT	16 orang	16 orang	Tidak ada	Tidak ada	
				3 PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	**Persentase Pelaksanaan Perlindungan Dan Jaminan Sosial**	**100%**	**100%**	**Tidak ada**	**Tidak ada**	
				1 Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	**Persentase penyediaan data kemiskinan dan pengelolaannya**	**100%**	**100%**	**Tidak ada**	**Tidak ada**	
				1 Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Data kemiskinan di Kota Mojokerto	2 dokumen	2 dokumen	Tidak ada	Tidak ada	
				2 Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Kelompok Penerima Manfaat (KPM) Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) APBD	3500	3500	Tidak ada	Tidak ada	
				4 PROGRAM PENANGANAN BENCANA	**Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi**	**100%**	**100%**	**Tidak ada**	**Tidak ada**	

No	Urusan Pemerintahan	Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tinjut Rekom DPRD
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
					kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kota					
				1 Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	**Persentase pelaksanaan perlindungan sosial korban bencana alam/ sosial**	**100%**	**100%**	**Tidak ada**	**Tidak ada**	
				1 Penyediaan Makanan	Jumlah Korban bencana Alam dan Bencana Sosial yang terpenuhi-nya kebutuhan dasarnya	11.148 Orang	11.148 Orang	Tidak ada	Tidak ada	
				2 Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota	**Persentase penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat terhadap kesiapsiagaan bencana**	**100%**	**100%**	**Tidak ada**	**Tidak ada**	
				1 Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	Jumlah korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya dalam satu tahun anggaran	10 Orang	10 Orang	Tidak ada	Tidak ada	
					Jumlah Bulan Pelaksanaan Operasional Pengiriman Tenaga TAGANA (12 Bulan)	12 Bulan	12 Bulan	Tidak ada	Tidak ada	
					Jumlah Tenaga TAGANA yang Mumpuni (36 Orang)	36 Orang	36 Orang	Tidak ada	Tidak ada	
				5 PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	**Persentase Pelaksanaan Pengelolaan Taman Makam Pahlawan**	**100%**	**100%**	**Tidak ada**	**Tidak ada**	
				1 Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	**Persentase pelaksanaan pemeliharaan taman makam pahlawan nasional**	**100%**	**100%**	**Tidak ada**	**Tidak ada**	
				1 Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Jumlah Jasa pemeliharaan kebersihan TMP yang terbayarkan honorariumnya	9 orang	9 orang	Tidak ada	Tidak ada	
					Jumlah Kegiatan Kepahlawanan yang dilaksanakan	3 kegiatan	3 kegiatan	Tidak ada	Tidak ada	

3.3.2 Pelaksanaan Urusan Wajib yang Tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar

Tabel 3.12
Capaian Pelaksanaan Program dan Kegiatan
Pelaksanaan Urusan Wajib yang Tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar

No	Urusan Pemerintahan	Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tinjut Rekom DPRD
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
1	Tenaga Kerja	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kota Mojokerto	Meningkatnya penyerapan tenaga kerja	**1 PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA**	**Persentase Pelatihan Tenaga Kerja yang Produktif**	**33 %**	**33 %**	**Tidak ada**	**Tidak ada**	
				1 Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	**Jumlah tenaga kerja yang mengikuti uji kompetensi**	**40 Orang**	**40 orang**	**Tidak ada**	**Tidak ada**	
				1 Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	Jumlah Tenaga Kerja yang mendapat Pelatihan berbasis kompetensi	120 Orang	120 orang	Tidak ada	Tidak ada	
				2 PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	**Persentase Pencari Kerja yang Ditempatkan**	**97,55%**	**93,13%**	**Adanya ketidak seimbangan antara angkatan kerja yang semakin bertambah dengan kesempatan kerja yang terbatas selama masa pandemi Covid 19**	**Meningkatkan informasi lowongan kerja dan peningkatan pelayanan kesempatan tenaga kerja di sektor formal (perusahaan) serta perluasan kesempatan kerja di sektor informal**	
				1 Pelayanan Antarkerja di Daerah Kabupaten/Kota	**Jumlah pencari kerja yang ditempatkan**	**1.508 orang**	**1.398 orang**	**Suasana pandemi covid-19, perusahaan masih belum maksimal dalam melakukan rekrutmen tenaga kerja**	**- Meningkatkan informasi lowongan kerja, melakukan pemasaran tenaga kerja dan memberikan informasi pasar kerja - Menyelenggarakan bursa kerja/*job fair* - Pembinaan terhadap lembaga Bursa Kerja Khusus di SMK/SMA (6 BKK) agar mengoptimalkan kerja sama dengan mitra perusahaan dalam melakukan rekrutmen tenaga kerja**	
				1 Penyediaan Sumber Daya Pelayanan antar Kerja	Jumlah pencari kerja yang terdaftar	1.609 orang	1.678 orang	Tidak ada	Tidak ada	
				3 PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	**Persentase Kasus yang Tertangani**	**100%**	**100%**	**Tidak ada**	**Tidak ada**	

No	Urusan Pemerintahan	Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tinjut Rekom DPRD
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
				1 Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota	**Jumlah Kasus yang tertangani**	**12 Kasus**	**12 Kasus**	**Tidak ada**	**Tidak ada**	
				1 Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah kasus perselisihan yang diselesaikan diluar pengadilan hubungan industrial	12 Kasus	12 Kasus	Tidak ada	Tidak ada	
					Jumlah dokumen rekomendasi upah minimum Kota Mojokerto	3 Dokumen	3 Dokumen	Tidak ada	Tidak ada	
					Jumlah dokumen rekomendasi ketenagakerjaan	3 Dokumen	3 Dokumen	Tidak ada	Tidak ada	
2	**Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak**	**Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak**	**Penguatan aksebilitas terhadap pelayanan sosial dasar, fasilitas pelayanan publik, dan jaminan kesejahteraan sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial**	**1 PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN**	**Persentase Pelaksanaan Pengarusutamaam Gender Dan Pemberdayaan Perempuan**	**100%**	**100%**	**Tidak ada**	**Tidak ada**	
				1 Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota	**Persentase pelaksanaan pelembagaan pengarusutamaan gender (PUG) pada lembaga pemerintah kewenangan kab/kota**	**100%**	**100%**	**Tidak ada**	**Tidak ada**	
				1 Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG	Jumlah kebijakan yang mengatur tentang strategi PUG	1 Kebijakan	1 Kebijakan	Tidak ada	Tidak ada	
					Jumlah Anggaran yang di PPRG kan	30%	30%	Tidak ada	Tidak ada	
				2 Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota	**Persentase pemberdayaan perempuan bidang politik, hukum, sosial, dan ekonomi pada organisasi kemasyarakat kewenangan kab/kota**	**100%**	**100%**	**Tidak ada**	**Tidak ada**	
				1 Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	Jumlah Sosialisasi /Warkshop yang dilaksanakan	6 kali	6 kali	Tidak ada	Tidak ada	
					Jumlah Rapat Koordinasi yang dilaksanakan	8 kali	8 kali	Tidak ada	Tidak ada	
				3 Penguatan dan Pengembangan Lembaga	**Persentase pelaksanaan penguatan dan**	**100%**	**100%**	**Tidak ada**	**Tidak ada**	

No	Urusan Pemerintahan	Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tinjut Rekom DPRD
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
				Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	**pengembangan lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan kewenangan kab/kota**					
				1 Advokasi Kebijakan dan Pendampingan kepada Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Advokasi Kebijakan dan Pemdampingan kepada Lembaga Pemberdayaan Perempuan	7 Lembaga	7 Lembaga	Tidak ada	Tidak ada	
				2 PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	**Persentase pelaksanaaan perlindungan perempuan**	**100%**	**100%**	**Tidak ada**	**Tidak ada**	
				1 Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	**Persentase pelaksanaan pencegahan kekerasan terhadap perempuan lingkup daerah kab/kota**	**100%**	**100%**	**Tidak ada**	**Tidak ada**	
				1 Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan pendampingan korban KDRT, TPPG dan Pornografi	100%	100%	Tidak ada	Tidak ada	
					Jumlah sekolah yang menjadi sasaran roadshow pencegahan kekerasan	30 sekolah	30 sekolah	Tidak ada	Tidak ada	
					Jumlah talkshow tentang pencegahan kekerasan melalui media	6 kali	6 kali	Tidak ada	Tidak ada	
				2 Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	**Persentase pelaksanaan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan perlindungan perempuan tingkat daerah kab/kota**	**100%**	**100%**	**Tidak ada**	**Tidak ada**	
				1 Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Cakupan Pendampingan Korban KDRT,TPPO, dan Pornografi	100%	100%	Tidak ada	Tidak ada	
					JumlahRapat Koordinasi Pelaksanaan P2TP2A	6 Kali	6 Kali	Tidak ada	Tidak ada	
				3 PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	**Persentase Pengelolaan Sistem Data Gender Dan Anak**	**100%**	**100%**	**Tidak ada**	**Tidak ada**	
				1 Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di	**Persentase pelaksanaan pengumpulan, pengolahan analisis dan penyajian data gender dan anak dalam**	**100%**	**100%**	**Tidak ada**	**Tidak ada**	

No	Urusan Pemerintahan	Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tinjut Rekom DPRD
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
				Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	**kelembagaab data di tingkat daerah kab/kota**					
				1 Penyediaan Data Gender dan Anak di Kewenangan Kabupaten/Kota	Dokumen Pembangunan Manusia Berbasis Gender	1 Dokumen	1 Dokumen	Tidak ada	Tidak ada	
				4 PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	**Persentase Pelaksanaan Pemenuhan Hak Anak (PHA)**	**100%**	**100%**	**Tidak ada**	**Tidak ada**	
				1 Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	**Persentase pelaksanaan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas hidup anak kewenangan kab/kota**	**100%**	**100%**	**Tidak ada**	**Tidak ada**	
				1 Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga masyarakat dan Dunia Usaha yang mendukung KLA	7 Lembaga	7 Lembaga	Tidak ada	Tidak ada	
3	**Pangan**	**Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian**	**Peningkatan ketersediaan, penguatan cadangan, distribusi, akses dan penganekaragaman pangan, serta keamanan konsumsi pangan masyarakat dan penanganan daerah rawan pangan**	**1 PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT**	**Persentase pemenuhan konsumsi pangan yang beragam (B2SA)**	**80%**	**173%**	**Penentuan Target terlalu rendah dikarenakan pada waktu penentuan target belum ada kegiatan DAKNF**	- **Dalam menentukan target awal hanya berdasarkan kemampuan anggaran APBD tetapi dalam pelaksanaan kegiatan tahun 2021 mendapatkan anggaran DAKNF sebanyak 8 lokasi dan masing masing lokasi beranggota 30 KK** - **Meningkatkan pengetahuan melalui Bintek, sosialisasi tentang Pola Hidup Sehat salah satunya dengan Mengkonsumsi Menu Beragam Bergizi Seimbang dan Aman (B2SA)sesuai AKE /Angka Kecukupuan Energi** - **Melakukan Monitoring dan**	
				1 Penyedian dan Penyaluran Pangan Pokok atau pangan lainnya sesuai dengan Kubutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam Rangka Stabilitasi Pasokan dan Harga Pangan	**Persentase pemanfaatan lahan pekarangan**	**80%**	**210%**			
				1 Penyedian pangan berbasis sumber daya lokal	Jumlah KK yang lahannya dimanfaatkan untuk KRPL	110 KK	358 KK			
				2 Koordinasi, Singkronisasi dan pelaksanaan distribusi pangan pokok dan pangan laiinya	Jumlah sambang KWT yang dilaksanakan	24 Kali	24 kali			

No	Urusan Pemerintahan	Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tinjut Rekom DPRD
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
									Evaluasi Kegiatan Pengan Lestari	
				2 Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun Sesuai Dengan Angka Kecukupan Gizi	**Persentase Konsumsi pangan asupan gizi perkapita/ tahun**	**90%**	**210%**	**Tidak ada**	**Tidak ada**	
				1 Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Jumlah pelaku UMKM yang dilatih aman pangan	110 Org	110 org	Tidak ada	Tidak ada	
					Jumlah peserta festival pangan lokal	1 Kegiatan	2 kegiatan	Tidak ada	Tidak ada	
					Jumlah peserta kampanye diversifikasi pangan	30 Org	100 orang	Tidak ada	Tidak ada	
				2 PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	**Persentase Ketersedian Data Informasi Pangan**	**85%**	**100%**	**Tidak ada**	**Tidak ada**	
				1 Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/ Kota	**Tersedianya dokumen peta ketahanan pangan dan kerentanan pangan**	**1 Dokumen**	**1 Dokumen**	**Tidak ada**	**Tidak ada**	
				1 Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen PPH yang disusun	1 Dokumen	1 Dokumen	Tidak ada	Tidak ada	
				3 PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	**Persentase sampel aman pangan**	**66%**	**100%**	**Tidak ada**	**Tidak ada**	
				1 Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota	**Jumlah pengambilan sampling produk aman pangan**	**10 Lokasi**	**10 lokasi**	**Tidak ada**	**Tidak ada**	
				1 Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah pengambilan sampling produk aman pangan	10 Lokasi	10 lokasi	Tidak ada	Tidak ada	
					Jumlah peserta yang di latih keamanan pangan	50 Org	50 orang	Tidak ada	Tidak ada	
4	**Pertanahan**	**Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang,Perumahan Rakyat dan Permukian.**		**1 PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN**	**Persentase terselesainya sengketa tanah garapan**	**100%**	**100%**	**Tidak ada**	**Tidak ada**	
				1 Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/ Kota	**Jumlah terselesainya sengketa tanah garapan**	**1 perkara**	**1 perkara**	**Tidak ada**	**Tidak ada**	
				1 Mediasi Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dam 1 Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah sengketa tanah yang difasilitasi	1 perkara	1 perkara	Tidak ada	Tidak ada	
				2 PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH	**Persentase penatagunaan tanah**	**50%**	**50%**	**Tidak ada**	**Tidak ada**	
				1 Penggunaan Tanah yang hamparannya dalam Satu Daerah Kabupaten/Kota	**Jumlah penata gunaan tanah**	**1 data**	**1 data**	**Tidak ada**	**Tidak ada**	

No	Urusan Pemerintahan	Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tinjut Rekom DPRD
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
				1 Koordinasi Pemetaan Zona Nilai tanah Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah database bidang tanah (tersedianya data dan informasi penggunaan danpemanfaatan tanah untuk mempermudah akses informasi bagi masyarakat)	1 data	1 data	Tidak ada	Tidak ada	
5	Lingkungan Hidup	Dinas Lingkungan Hidup		**1 ROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP**	**Indeks Kualitas Udara**	**81.55**	**81,38**	**Tidak ada**	**Tidak ada**	
					Indeks Kualitas Air	**50,06**	**51,00**	**Tidak ada**	**Tidak ada**	
				1 Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	**Indeks Kualitas Udara**	**81.55**	**81,38**	**Tidak ada**	**Tidak ada**	
					Indeks Kualitas Air	**50,06**	**51,00**	Tidak ada	Tidak ada	
				1 Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	Jumlah titik pantau pengujian limbah padat dan limbah cair	57 Titik	57 Titik	Tidak ada	Tidak ada	
					Jumlah titik pantau pengujian udara emisi dan ambient	8 Titik	8 Titik	Tidak ada	Tidak ada	
				2 PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	**Indeks Kualitas Lahan**	**27,13**	**27,16**	**Tidak ada**	**Tidak ada**	
				1 Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota	**Indeks Kualitas Lahan**	**27,13**	**27,16**	**Tidak ada**	**Tidak ada**	
				1 Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Jumlah kegiatan pemeliharaan taman (59 lokasi taman/RTH)	12 Kegiatan	12 Kegiatan	Tidak ada	Tidak ada	
					Jumlah taman yang dibangun	1 Paket	0 Paket	- Penyedia Tidak melaksanakan pekerjaan sesuai dengan target yang disepakati Bersama - Waktu pelaksanaan tidak digunakan secara optimal untuk menyelesaikan pekerjaan .	Sesuai dengan Peraturan Presiden No 12 tahun 2021 tentang Perubahan atas Perpres 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah : Pemberian kesempatan kepada Penyedia dengan denda keterlambatan untuk menyelesaikan pekerjaan.	
				3 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	**Prosentase dokumen lingkungan yang tersedia**	**100%**	**100%**	**Tidak ada**	**Tidak ada**	

No	Urusan Pemerintahan	Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tinjut Rekom DPRD
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
				1 Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	**Prosentase dokumen lingkungan yang tersedia**	**100%**	**100%**	**Tidak ada**	**Tidak ada**	
				1 Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH	Jenis dokumen lingkungan yang tersedia	2 dokumen	2 dokumen	Tidak ada	Tidak ada	
				4 PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	**Prosentase sekolah yang memenuhi kriteria adiwiyata**	**100%**	**333%**	**Tidak ada**	**Tidak ada**	
				1 Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	**Prosentase sekolah yang memenuhi kriteria adiwiyata**	**100%**	**333%**	**Tidak ada**	**Tidak ada**	
				1 Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup	Jumlah kegiatan pendampingan lingkungan hidup	3 kegiatan	3 kegiatan	Tidak ada	Tidak ada	
				5 PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	**Prosentase pengaduan yang tertangani**	**100%**	**80%**	**Tidak ada**	**Tidak ada**	
				1 Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kab/Kota	**Prosentase pengaduan yang tertangani**	**100%**	**80%**	**Tidak ada**	**Tidak ada**	
				1 Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap PPLH Kabupaten/Kota	Jumlah pengaduan dari masyarakat	5 pengaduan	4 Pengaduan	Tidak ada	Tidak ada	
				6 PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	**Persentase sampah yang dikelola**	**97,45%**	**97,45%**	**Tidak ada**	**Tidak ada**	
				1 Pengelolaan Sampah	**Persentase sampah yang dikelola**	**97,45%**	**97,45%**	**Tidak ada**	**Tidak ada**	
				1 Penanganan Sampah dengan melakukan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	Jumlah kegiatan penanganan sampah TPA	6 paket	6 Paket	Tidak ada	Tidak ada	
					Jumlah pemeliharaan sarana prasarana TPA	2 kegiatan	2 Kegiatan	Tidak ada	Tidak ada	
				2	Jumlah kader berseri yang terlatih dalam	80 orang	80 orang	Tidak ada	Tidak ada	

No	Urusan Pemerintahan	Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tinjut Rekom DPRD
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
				Peningkatan Peran serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	pengelolaan persampahan					
					Jumlah transaksi pembayaran tenaga kebersihan dan persampahan sebanyak 135 orang yang tepat waktu	12 Transaksi	12 Transaksi	Tidak ada	Tidak ada	
				3 Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan	Jumlah kegiatan pemeliharaan sarana dan prasarana (jumlah kendaraan op.sampah 28 unit)	70 Kegiatan	70 Kegiatan	Tidak ada	Tidak ada	
				7 PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	**Persentase sarana prasarana pendukung RTH yang dibangun**	**100%**	**0%**	**Tidak ada**	**Tidak ada**	
				1 Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	**Persentase sarana prasarana pendukung RTH yang dibangun**	**100%**	**0%**	**Tidak ada**	**Tidak ada**	
				1 Pengelolaan Dana Bagi Hasil Kabupaten/Kota	Jumlah sarana prasarana pendukung RTH yang dibangun	1 Paket	0 Paket	- Penyedia lalai/cidera janji dalam melaksanakan kewajiban dan tidak memperbaiki kelalianna dalam jangka waktu yang ditetapkan - Berdasarkan penelitian pejabat yang berwewenang untuk menandatangani kontrak, penyedia tidak akan mampu menyelesaikan keseluruhan pekerjaan walaupun diberikan kesempatan untuk menyelesaikan pekerjaan - Penyedia Tidak melaksanakan pekerjaan sesuai dengan target yang disepakati Bersama - Waktu pelaksanaan tidak digunakan secara optimal untuk	Sesuai dengan Peraturan Presiden No 12 tahun 2021 tentang Perubahan atas Perpres 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan Perlem LKPP No. 4 Tahun 2021 tentang Pembinaan Pelaku Usaha Pengadaan Barang/Jasa: - Surat Pemutusan Kontrak - Usulan Penetapan Daftar Hitam - Rekomendasi ke APIP/Inspektorat - Penayangan Sanksi Daftar Hitam ke Daftar Hitam Nasional	

No	Urusan Pemerintahan	Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tinjut Rekom DPRD
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
								menyelesaikan pekerjaan		
6	**Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil**	**Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil**	**Meningkatnya kualitas pelayanan kependudukan dan pencatatan sipil**	**1 PROGRAM PENDAFTARAN KEPENDUDUKAN**	**Rasio penduduk ber KTP per satuan penduduk (rasio)**	**98%**	**98%**	**Tidak ada**	**Tidak ada**	
					Cakupan penerbitan Kartu Tanda Penduduk (KTP)	**98%**	**98%**	**Tidak ada**	**Tidak ada**	
				1 Pelayanan Pendaftaran Penduduk	**Persentase Pelayanan Pendaftaran Penduduk yang terfasilitasi**	**100%**	**100%**	**Tidak ada**	**Tidak ada**	
				1 Pencatatan,penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas pendaftaran penduduk	Jumlah Kelurahan tertib Administrasi	18 Kelurahan	18 Kelurahan	Tidak ada	Tidak ada	
				2 Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Persentase wajib KTP pemula yang terekam KTP elektroniki	70%	70%	Tidak ada	Tidak ada	
				2 Penataan Pendaftaran Penduduk	**Persentase tersedianya prasaranan penerbitan dokumen kependudukan dan pencatatan sipil**	**100%**	**100%**	**Tidak ada**	**Tidak ada**	
				1 Pengadaan Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-El, Formulir, dan Buku terkait Pendaftaran Penduduk sesuai dengan Kebutuhan	Persentase tersedianya prasaranan penerbitan dokumen kependudukan dan pencatatan sipil	100%	100%	Tidak ada	Tidak ada	
				3 Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk	**Jumlah pelayanan keliling**	**1 Pelayanan**	**1 Pelayanan**	**Tidak ada**	**Tidak ada**	
				1 Fasilitasi Pendaftaran Penduduk	Jumlah pelayanan keliling	2 Pelayanan		Tidak ada	Tidak ada	
				2 PROGRAM PENCATATAN SIPIL	**Rasio Bayi berakte kelahiran**	**100%**	**100%**	**Tidak ada**	**Tidak ada**	
					Rasio pasangan berakte nikah	**90%**	**90%**	**Tidak ada**	**Tidak ada**	
					Cakupan penerbitan akte kelahiran	**100%**	**100%**	**Tidak ada**	**Tidak ada**	
				1 Pelayanan Pencatatan Sipil	**Persentase pelayanan pencatatan sipil yang terfasilitasi**	**100%**	**100%**	**Tidak ada**	**Tidak ada**	
				1 Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pelaporan Peristiwa Penting	Jumlah cakupan register akte kelahiran pencatatan sipil yang terdigitalisasi	23.000 lembar	23.000 lembar	Tidak ada	Tidak ada	
				2 Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil	Persentase pencatatan perkawinan yang teregister	80%	80%	Tidak ada	Tidak ada	

No	Urusan Pemerintahan	Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tinjut Rekom DPRD
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
				3 PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	**Penggunaan data konsolidasi bersih (%)**	**50%**	**50%**	**Tidak ada**	**Tidak ada**	
					Jumlah Inovasi Pelayanan adminduk (aplikasi)	**100%**	**100%**	**Tidak ada**	**Tidak ada**	
					Cakupan penyediaan hak akses kependudukan (%)	**50%**	**50%**	**Tidak ada**	**Tidak ada**	
				1 Pengumpulan data kependudukan dan pemanfaatan dan penyajian database kependudukan	**Penggunaan data konsolidasi bersih dan inovasi pelayanan Adminduk**	**50%**	**50%**	**Tidak ada**	**Tidak ada**	
				1 Kerjasama pemanfaatan data kependudukan	jumlah inovasi pelayanan	1 inovasi	1 inovasi	Tidak ada	Tidak ada	
					penggunaan data konsolidasi bersih	50%	50%	Tidak ada	Tidak ada	
				2 Penataan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	**Persentase ketersediaan media informasi**	**50%**	**50%**	**Tidak ada**	**Tidak ada**	
				1 Penyusunan Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian, dan Pelaporan Penyelenggaraan Adminduk terkait Pengelolaan Informasi	Jumlah ketersediaan media informasi	2 Media Informasi	2 Media Informasi	Tidak ada	Tidak ada	
				3 Penyelenggaraan Pengelolaan informasi administrasi kependudukan	**Persentase penyediaan informasi pelayanan Publik**	**50%**	**50%**	**Tidak ada**	**Tidak ada**	
				1 Komunikasi,Informasi,dan edukasi kepada pemangku kepentingan masyarakat	Jumlah Inovasi pelayanan	1 Macam	1 Macam	Tidak ada	Tidak ada	
				4 Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	**Persentase pemanfaatan data**	**50%**	**50%**	**Tidak ada**	**Tidak ada**	
				1 Bimbingan Teknis terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pendayagunaan Data Kependudukan	Persentase pemanfaatan data	50%	50%	Tidak ada	Tidak ada	
				4 PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN	**Penggunaan data konsolidasi bersih**	**50%**	**50%**	**Tidak ada**	**Tidak ada**	
					Jumlah Inovasi Pelayanan Adminduk	**100%**	**100%**	**Tidak ada**	**Tidak ada**	
					Cakupan Penyediaan Hak Akses kependudukan	**50%**	**50%**	**Tidak ada**	**Tidak ada**	

No	Urusan Pemerintahan	Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tinjut Rekom DPRD
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
				1 Penyusunan Profil Kependudukan	**Penyediaan hak akses OPD**	**50%**	**50%**	**Tidak ada**	**Tidak ada**	
				1 Penyediaan Data Kependudukan Kabupaten/Kota	Penyediaan hak akses OPD	50%	50%	Tidak ada	Tidak ada	
				2 Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang lain	Jumlah Penyediaan Data Kependudukan Online	2 Macam	2 Macam	Tidak ada	Tidak ada	
7	**Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana**	**Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana**		**1 PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK**	**Total Fertility Rate (TFR)**	**1.86%**	**1.72% (101%)**	**Tidak ada**	**Tidak ada**	
				1 Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk	**Persentase sinkronisasi kebijakan pemerintah daerah dengan propinsi dalam rangka pengendalian penduduk**	**70%**	**70%**	**Tidak ada**	**Tidak ada**	
				1 Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Kabupaten/Kota	Tersedianya Buku GDPK	1 buku	1 buku	- Penyusunan dan pemanfaatan GDPK Berhubungan dengan RPJMD daerah maka perlu dibutuhkan koordinasi dengan Pemerintah daerah dan OPD- OPD terkait dan lintas sektoral - Belum semua OPD – OPD Memahami tentang GDPK dan Pemanfaatanya dan mensikronkan dengan program 2 di masing2 dinas	- Melakukan advokasi dan Koordinasi dengan pemerintah daerah (walikota) terkait dengan maksud dan tujuan penyusunan dan pemanfaatan GDPK bersama dengan pihak ke 3 karena penyusunan ini berhubungan dengan RPJMD - Mengadakan rapat Kordinasi (FGD) dengan OPD2 terkait dan lintas sektoral ,lintas program dengan Data 2 yang akan digunakan dalam penyusunan GDPK Kota Mojokerto oleh pihak ke 3 bersama dengan dinas Kesehatan PP KB	
				2 Penyediaan dan Pengembangan Materi Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal sesuai Isu Lokal Kabupaten/Kota	Buku Materi SSK yang Tersedia	4 jenis buku	4 jenis buku	- Belum semua sekolah mendapatkan buku tentang Kependudukan SSK (Sekolah Siaga Kependudukan) dalam mengisi masa	- Penggandaan buku 2 SSK dianggarkan secara bertahab disesuaikan dengan anggaran dan kegiatan yang diadakan kedepanya	

No	Urusan Pemerintahan	Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan				Indikator	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tinjut Rekom DPRD
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)				(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
											demografi saat ini - Dukungan dari pemerintah dan dinas terkait sangat dibutuhkan	- Melakukan koordinasi dan advokasi dengan pemerintah daerah dan OPD2 terkait	
						3	Advokasi, Sosialisasi dan Fasilitasi Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SD/MI dan SLTP/MTS, Jalur Nonformal dan Informal	Jumlah SMP dan SD yang mendapat sosialisasi tentang sekolah siaga kependudukan	40 sekolah	40 sekolah	- Belum semua sekolah mendapatkan buku tentang Kependudukan SSK (Sekolah Siaga Kependudukan) dalam mengisi masa demografi saat ini - Dukungan dari pemerintah dan dinas terkait sangat dibutuhkan	Melakukan koordinasi dan advokasi dengan pemerintah daerah dan OPD2 terkait	
						4	Implementasi Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal dan Nonformal	Jumlah Sekolah Siaga Kependudukan Yang Terbentuk	2 sekolah	2 sekolah	- Pembentukan dari SSK di sekolah membutuhkan Komitmen dan dukungan dari kepala sekolah dan Para Guru dan siswa karena perlu adanya Kepengurusan dalam SSK - Sarana dan prasarana di sekolah yang mendukung terbentuknya SSK di Sekolah terutama ruangan untuk kegiatan SSK	- Melakukan koordinasi dan advokasi kepada dinas Pendidikan dan sekolah yang akan dibentuk SSK - Mengadakan kegiatan pembentukan SSK dengan mengundang dinas pendidikan , Kepala sekolah, guru , guru bk , dan siswa anggaran APBD - Bekerja sama dengan BKKBN Provinsi dalam Kegiatan pembentukan SSK - Adanya surat penunjukan terbentuknya SSK dari Dinas Kesehatan PP KB - Pembinaan , Monitoring dan evaluasi Pada SSK yang terbentuk	
						5	Pelaksanaan Sarasehan Hasil Pemutakhiran Data Keluarga	Jumlah KK yang didata	15.000 KK	35.151 KK (234%)	- Pendataan Keluarga memakai domisili bukan berdasarkan KTP - Pendataan keluarga. Tidak 100 % KK atau penduduk terdata karena KK kota Mojokerto ada yang	- Pendataan tetap dilakukan serentak mulai tanggal 1 april samapai dengan tanggal 31 Mei 2021 yang dilakukan oleh kader pendata - Melakukan saresehan kemutakhiran hasil Data Keluarga (pendataan Keluarga) dan	

No	Urusan Pemerintahan	Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tinjut Rekom DPRD
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
								bekerja atau tinggal di luar kota. - Belum semua lintas sektoral dan lintas program memanfaatkan hasil pendataan tersebut	Pemanfaatanya di masyarakat, Kelurahan , Kecamatan dan OPD 2 yang terkait dengan Kependudukan	
				2 Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	**Persentase pelaksanaan pemetaan dan pendataan keluarga**	**70%**	**70%**	**Tidak ada**	**Tidak ada**	
				1 Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga	Jumlah frekuensi rapat pendataan keluarga yang dilaksanakan	5 kali	4 kali	- Masyarakat dan lintas sektoral belum semua mendukung kegiatan pelaksanaan pendataan keluarga - Dalam Pelaksanaan Pendataan Keluarga masih Perlu pendampingan RT / RW	- Mengadakan Sosialisasi Pendataan Keluaraga kepada OPD 2 terkait dan lintas program dan lintas sektoral agar pendataan keluarga berjalan lancar dan tidak ada hambatan - Membuat surat permohonan kepada wali kota agar mengeluargak SE terkait dengan pelaksanaan pendataan keluarga yang ditujukan kepada camat dan kelurahan	
				2 PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	**Cakupan Peserta KB Aktif**	**70.56%**	**116%**	**Tidak ada**	**Tidak ada**	
				1 Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB sesuai Kearifan Budaya Lokal	**Jumlah Advokasi dan KIE KKBPK yang dilaksanakan**	**6 kegiatan**	**6 kegiatan**	**Tidak ada**	**Tidak ada**	
				1 Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program KKBPK sesuai Kearifan Budaya Lokal	Pemenang Lomba sesuai dengan kriteria Lomba IMP dan KB Lestari	6 pasangan KB Lestari 6 Orang Kader IMP Terbaik	6 pasangan KB Lestari 6 Orang Kader IMP Terbaik	- Terbatasnya jumlah pasangan yang menggunakan alat kontrasepsi mkjp dalam kurung waktu 15 ke atas. Pemakaian kotrasepsi selama jangka waktu 15 ke atas - Sedikit dikarenakan adanya persyaratan minimal menjadi kader selama 5 tahun	Kegiatan tetap dilaksanakan walaupun tidak sesuai dengan syarat dan ketentuan yang ada	

No	Urusan Pemerintahan	Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tinjut Rekom DPRD
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
				2 Penyediaan dan Distribusi Sarana KIE Program KKBPK	Jumlah Leaflet dan Banner yang dibuat dan terdistribusi	5096 lembar	5096 lembar	Tidak ada	Tidak ada	
				3 Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan KKBPK	Tersedianya sarpras di balai pkb	80%	80%	Kegiatan tidak sesuai dengan kebutuhan	Tetap melaksanakan kegiatan yang disesuakan dengan kebutuhan sasaran	
				2 Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)	**Persentase Peran PKB dan IMP dalam pelaksanaan pelayanan KB**	**78%**	**78%**	**Adanya pandemic Covid shg KIE yg dilaksanakan baik secara perorangan maupun kelompok tdk bisa dilakukan secara maksimal**	- **Dibeberapa kesempatan dilakukan penguatan kepada PKB dan IMP secara getok tular.** - **Dilakukan KIE melalui youtube chanel IPeKB**	
				1 Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	Persentase Jumlah Kader IMP yang Berperan dalam Pelaksanaan Program KKBPK (Pelayanan KB)	43%	32%	Wawasan dan Kompetensi kader IMP tidak sama sehingga menyebabkan capaian kinerja di masng-masih wilayah binaan tidak sama	- Melakukan monitoring dan evaluasi capaian kinerja kader IMP - Melakukan pembinaan secara rutin kepada kader IMP terkait dengan peran dan fungsi dari kader IMP	
					Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	75%	80%	Tidak ada	Tidak ada	
				3 Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	**Jumlah Bulan Pengelolaan Alat dan Obat Kontrasepsi dalam mendukung pelaksanaan pelayanan KB**	**12 bulan**	**12 bulan**	**Tidak ada**	**Tidak ada**	
				1 Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan	Jumlah alokoan dan sarana prasarana yang disediakan	12 kali	9 kali	- Kegiatan tidak sesuai dengan kebutuhan - Databese kurang lengkap dan di awal perencanaan petugas tidak menganalisa kebutuhan	Tetap melaksanakan kegiatan yang disesuakan dengan kebutuhan sasaran	
				2 Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	Prosentase Peningkatan Peserta KB MKJP	12%	1%	Kegiatan tidak sesuai dengan kebutuhan sasaran	Mengubah menu anggaran yang disesuaikan dengan kebutuhan sasaran	
					Peningkatan Peserta KB MKJP	150 akseptor peserta KB baru MKJP	184 akseptor peserta KB baru MKJP	Tidak ada	Tidak ada	

No	Urusan Pemerintahan	Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tinjut Rekom DPRD
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
				3 Penyediaan Dukungan Ayoman Komplikasi Berat dan Kegagalan Penggunaan MKJP	Jumlah Akseptor KB MKJP yang Mendapat Anyoman Komplikasi Berat dan Kegagalan	12 akseptor	1 akseptor	Kegiatan tidak sesuai dengan kebutuhan sasaran	Mengubah menu anggaran yang disesuaikan dengan kebutuhan sasaran	
				4 Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB	Jumlah sarana di balai penyuluh KB	8 paket	2 paket	Perencanaan di awal tidak sesuai dengan kebutuhan Balai	Merubah kegiatan yang disesuaikan dengan kebutuhan Balai yang semula berupa Smart TV dan paket Satelit diubah menjadi Printer All In One	
				4 Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	**Jumlah Organisasi Masyarakat atau Mitra kerja Terkait yang berperan dalam pelaksanaan pelayanan dan pembinaan kesertaan ber KB di Kota Mojokerto**	**18 kelurahan**	**18 kelurahan**	**Tidak ada**	**Tidak ada**	
				1 Pelaksanaan dan Pengelolaan Program KKBPK di Kampung KB	Rasio petugas Pembantu Pembina KB Desa (PPKBD) setiap desa/kelurahan	100%	100%	Lokus Kampung KB percontohan tidak sesuai dengan syarat dan ketentuan yang ditentukan oleh BKKBN Pusat	Mengalihkan Lokpus Kampung KB percontohan	
				2 Pembinaan Terpadu Kampung KB	Persentase Perangkat Daerah (Dinas/Badan) yang berperan aktif dalam pembangunan Daerah melalui Kampung KB	100%	95%	Adanya refocusing anggaran sehingga mengakibatkan kegiatan tidak maksimal	Kegiatan tetap dilaksanakan sesuai dengan anggaran yang tersedia	
				3 PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	**Persentase anggota kelompok kegiatan dalam kesertaan KB**	**70 %**	**70%**	**Tidak ada**	**Tidak ada**	
				1 Pelaksanaan Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	**Jumlah poktan yang berperan dalam pelaksanaan pembangunan keluarga**	**5 poktan**	**5 poktan**	**Tidak ada**	**Tidak ada**	
				1 Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/ UPPKS)	Jumlah Pengurus dan Pembina PIK - R yang Mendapat Pembekalan	180 orang	50 orang	Perubahan pagu anggaran (Pergeseran /recofusing) berkaitan dengan kegiatan percepatan penanganan covid 19	Penyesuaian target kegiatan dan pagu anggaran kegiatan serta frekwensi pelaksanan kegiatan	
				2 Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS,	Prosentase Kader TRIBINA (BKB, BKR, BKL) yang Mendapat Pelatihan	80%	80%	- Perubahan pagu anggaran (Pergeseran /recofusing) berkaitan dengan kegiatan	- Penyesuaian target kegiatan dan pagu anggaran kegiatan serta frekwensi pelaksanan kegiatan	

No	Urusan Pemerintahan	Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tinjut Rekom DPRD
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
				PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/ UPPKS)				percepatan penanganan covid 19 - Kurangnya pemahaman kader pendamping Tri Bina (BKB,BKL, BKR) terhadap Modul-modul pendampingan	- Perlunya pembinaan secara berkelanjutan guna peningkatan pengetahuan dan ketrampilan dalam pelaksanaan pendampingan keluarga Balita, Lansia dan remaja	
				3 Penyediaan Biaya Operasional bagi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/ UPPKS)	Prosentase Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga Yang Mendapat Dukungan Operasional	80%	112%	Tidak ada	Tidak ada	
8	**Perhubungan**	**Dinas Perhubungan**	**Meningkatkan Infrastruktur Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)**	**1 PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)**	**Persentase Pemenuhan fasilitas perlengkapan jalan**	**93,13%**	**95,09%**	**Tidak ada**	**Tidak ada**	
					Persentase Ruas jalan dengan tingkat layanan jalan minimal "C" pada jam sibuk	**92,86%**	**92,86%**	**Tidak ada**	**Tidak ada**	
					Rasio panjang jalan per jumlah kendaraan	**0,0014 Rasio**	**0,0014 Rasio**	**Tidak ada**	**Tidak ada**	
					Persentase penurunan angka pelanggaran pengguna jalan	**30,00%**	**35,18%**	**Tidak ada**	**Tidak ada**	
					Persentase penurunan angka pelanggaran angkutan jalan	**30,00%**	**35,08%**	**Tidak ada**	**Tidak ada**	
					Persentase Kendaraan Bermotor Wajib Uji (KBWU) yang melakukan uji kelaikan kendaraan bermotor	**80,00%**	**86,66%**	**Tidak ada**	**Tidak ada**	
					Load Faktor Angkutan Sekolah Gratis	**100,00%**	**69,02%**	**Kondisi pandemi covid-19, sekolah libur selama 5 bulan (januari, februari, maret, juli, agustus) sehingga pelayanan berhenti**	**Pelayanan ASG menyesuaikan jadwal dinas pendidikan, sehingga Dishub selalu koordinasi dengan dinas pendidikan**	
					Persentase kepemilikan KIR angkutan umum	**20,00%**	**17,48%**	**- Tidak bisa mendeteksi kendaraan yang mutasi ke daerah**	**- Akan dilakukan Penyusunan database angkutan orang dan**	

No	Urusan Pemerintahan	Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tinjut Rekom DPRD
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
								lain tanpa rekomendasi - **Banyak kendaraan dengan status domisili Kota Mojokerto tetapi beroperasi di Luar Kota Mojokerto**	**barang di Kota Mojokerto** - **Akan dilakukan pemutakhiran data KBWU dengan cara koordinasi dengan Kepolisian** - **Dilakukan penertiban angkutan umum gabungan bersama POLRESTA secara berkala**	
					Persentase layanan angkutan darat	**5,00%**	**7,23%**	**Tidak ada**	**Tidak ada**	
					Rasio ijin trayek	**0,0003 Rasio**	**0,0003 Rasio**	**Tidak ada**	**Tidak ada**	
				1 Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	**Jumlah kegiatan perencanaan dan koordinasi di bidang LLAJ yang dilaksanakan**	**20 kegiatan**	**20 kegiatan**	**Tidak ada**	**Tidak ada**	
				1 Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen perencanaan lalu lintas yang disusun	3 dokumen	3 dokumen	Tidak ada	Tidak ada	
				2 Pengendalian Pelaksanaan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	Jumlah koordinasi dan evaluasi lalu lintas yang dilaksanakan	12 kali	15 kali	Tidak ada	Tidak ada	
				2 Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	**Jumlah eksisting sarana dan prasarana perlengkapan jalan terpasang**	**5.236 titik**	**5.176 titik**	**Harga satuan di lapangan (HPS) lebih tingggi daripada harga satuan di SIPD, sehingga anggaran hanya bisa mencukupi untuk pemasangan 39 unit PJU**	**Sisa PJU (41 unit) akan diusulkan dalam mekanisme Perubahan Anggaran Tahun 2022**	
				1 Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah titik yang terpasang Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas (APILL)	3 titik	3 titik	Tidak ada	Tidak ada	
					Jumlah titik yang terpasang cermin tikungan	26 titik	26 titik	Tidak ada	Tidak ada	
					Jumlah titik yang terpasang penerangan jalan umum (PJU)	80 titik	39 titik	Harga satuan di lapangan (HPS) lebih tingggi daripada harga satuan di SIPD,	Sisa PJU (41 unit) akan diusulkan dalam mekanisme Perubahan Anggaran Tahun 2022	

No	Urusan Pemerintahan	Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tinjut Rekom DPRD
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
								sehingga anggaran hanya bisa mencukupi untuk pemasangan 39 unit PJU		
					Pemasangan Rambu-rambu	32,00	34,00	Tidak ada	Tidak ada	
				2 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan	Jumlah sarana dan prasarana angkutan jalan	25,00	25,00	Tidak ada	Tidak ada	
					Jumlah sarana dan prasarana angkutan jalan	1 unit	1 unit	Tidak ada	Tidak ada	
				3 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	Jumlah titik fasilitas perlengkapan jalan yang dipelihara	50 titik	50 titik	Tidak ada	Tidak ada	
					Persentase fasilitas pelengkapan jalan yang berfungsi	84,49%	84,49%	Tidak ada	Tidak ada	
				3 Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	**Jumlah kegiatan pengendalian dan operasi LLAJ**	**368 kali**	**368 kali**	**Tidak ada**	**Tidak ada**	
				1 Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah penertiban LLAJ yang dilaksanakan	24 kali	24 kali	Tidak ada	Tidak ada	
					Jumlah pengawasan LLAJ yang dilaksanakan	332 kali	332 kali	Tidak ada	Tidak ada	
					Jumlah titik penertiban LLAJ	132 titik.bln	132 titik.bln	Tidak ada	Tidak ada	
					Jumlah titik pengawasan LLAJ	201 titik	201 titik	Tidak ada	Tidak ada	
				4 Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir	**Jumlah titik pelayanan parkir yang tertib**	**1.152 titik.bln**	**1.152 titik.bln**	**Tidak ada**	**Tidak ada**	
				1 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah petugas parkir (jukir) di tepi jalan umum	1.728 orang.bln	1.728 orang.bln	Tidak ada	Tidak ada	
					Jumlah titik pelayanan parkir di tepi jalan umum	1.152 titik.bln	1.152 titik.bln	Tidak ada	Tidak ada	
				5 Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	**Jumlah angkutan orang/barang yang diberi pelayanan administrasi/ pelayanan pengujian kendaraaan bermotor**	**3.987 kendaraan**	**3.735 kendaraan**	- **Tidak bisa mendeteksi kendaraan yang mutasi ke daerah lain tanpa rekomendasi** - **Banyak kendaraan dengan status**	- **Akan dilakukan Penyusunan database angkutan orang dan barang di Kota Mojokerto** - **Akan dilakukan pemutakhiran data KBWU dengan cara**	

No	Urusan Pemerintahan	Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tinjut Rekom DPRD
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
								domisili Kota Mojokerto tetapi beroperasi di Luar Kota Mojokerto	**koordinasi dengan Kepolisian** - **Dilakukan penertiban angkutan umum gabungan bersama POLRESTA secara berkala**	
				1 Registrasi Kendaraan Wajib Uji Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah angkutan orang/barang yang diuji	3.987 kendaraan	3.735 kendaraan	Kondisi pandemi covid-19, sekolah libur selama 5 bulan (januari, februari, maret, juli, agustus) sehingga pelayanan berhenti	menyesuaikan jadwal dinas pendidikan, sehingga Dishub selalu koordinasi dengan Dinas Pendidikan	
					Jumlah angkutan orang/barang yang diuji	1.111 kendaraan	1.006 kendaraan	Tidak ada	Tidak ada	
				2 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah angkutan orang/barang yang diuji	15 unit	15 unit	Tidak ada	Tidak ada	
				6 Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	**Jumlah seat pelayanan Angkutan Sekolah Gratis**	**62.100 seat**	**45.015 seat**	**Tidak ada**	**Tidak ada**	
				1 Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Layanan angkutan sekolah gratis	6.100 kali	4.857 kali	Tidak ada	Tidak ada	
					Jumlah arus penumpang angkutan umum	1.800.647 penumpang	2.786.128 penumpang	Tidak ada	Tidak ada	
					Jumlah orang/barang melalui dermaga/bandara/ terminal per tahun	1.800.647 orang	2.786.128 orang	Tidak ada	Tidak ada	
					Jumlah orang/barang melalui dermaga/bandara/ terminal per tahun	1.800.647 orang	2.786.128 orang	Tidak ada	Tidak ada	
9	**Komunikasi dan Informatika**	**Dinas Komunikasi dan Informatika**	**Peningkatan Kualitas Pelayanan Infromasi Kepada Masyarakat**	**1 PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK**	**Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)**	**92**	**87,63**	**Adanya pandemi Covid-19 pelayanan informasi secara langsung/ offline dibatasi sehingga pelayanan kepada masyarakat kurang maksimal**	**Meningkatkan pelayanan informasi kepada masyarakat melalui media online**	
				1 Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota	**Persentase Pelayanan Informasi dan Komunikasi Publik**	**100%**	**95,25%**	**Adanya renovasi Gedung Gajahmada, sehingga pelayan informasi dan komunikasi yang**	**Meningkatkan pelayanan informasi kepada masyarakat baik secara kualitas (sarana prasarana) maupun**	

No	Urusan Pemerintahan	Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan				Indikator	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tinjut Rekom DPRD
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)				(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
											menggunakan sarana dan prasarana Tecelenter Palapa selama tahun 2021 kurang maksimal	**secara kuantitas (waktu pelayanan)**	
						1	Perumusan Kebijakan Teknis Bidang Informasi dan Komunikasi Publik	Jumlah Pengaduan yang ditindak lanjuti	250 pengaduan	700 pengaduan	Tidak ada	Tidak ada	
								Jumlah Perangkat daerah yang membentuk PPID	28 unit kerja	28 unit kerja	Tidak ada	Tidak ada	
						2	Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	Jumlah Diseminasi Informasi Publik	365 hari	365 hari	Tidak ada	Tidak ada	
						3	Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Jumlah kegiatan Pemerintah Kota Mojkerto yang dipublikasikan melalui media massa	365 hari	365 hari	Tidak ada	Tidak ada	
						4	Pelayanan Informasi Publik	Jumlah Kegiatan dialog Pemerintah Kota Mojokerto dengan masyarakat	10 kali	5 kali	Tidak ada	Tidak ada	
						5	Layanan Hubungan Media	Jumlah Fasilitasi komunikasi digital yang dilayani	365 hari	365 hari	Tidak ada	Tidak ada	
						6	Kemitraan Dengan Pemangku Kepentingan	Jumlah Kegiatan KIM yang difasilitasi	6 kali	6 kali	Tidak ada	Tidak ada	
								Jumlah pengguna layanan telecenter yang difasilitasi	6.000 pengguna	5.248 pengguna	Tidak ada	Tidak ada	
						7	Manajemen Komunikasi Krisis	Jumlah pelayanan komunikasi dan informasi dalam kondisi krisis	12 laporan	12 laporan	Tidak ada	Tidak ada	
						8	Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik	Jumlah pegawai yang mengikuti diklat dalam bidang komunikasi publik	10 orang	10 orang	Tidak ada	Tidak ada	
						9	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunikasi	Jumlah Kerjasama dengan pengelola media sosial	12 laporan	12 laporan	Tidak ada	Tidak ada	
						10	Penyediaan / Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota	Jumlah Alat kerja pendukung komunikasi dan informasi yang tersedia	1 paket	1 paket	Tidak ada	Tidak ada	
				2	**PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA**			**Indeks SPBE**	**3,4**	**2,92**	**Masih terdapat beberapa unsur / komponen yang kurang memenuhi kriteria penilaian SPBE**	**Optimalisasi komponen yang dinilai kurang maksimal dalam mendukung program SPBE**	

No	Urusan Pemerintahan	Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tinjut Rekom DPRD
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
				1 Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota	**Persentase Ketersediaan Layanan TIK**	**100%**	**88,49%**	**Tidak ada**	**Tidak ada**	
				1 Sinkronisasi Pengelolaan Rencana Induk dan Anggaran Pemerintahan Berbasis Elektronik	Jumlah dokumen Tata Kelola SPBE / Manajemen SPBE	1 dokumen	1 dokumen	Tidak ada	Tidak ada	
				2 Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah	Jumlah Kapasitas Server yang berfungsi dengan Baik	10 TB	10 TB	Tidak ada	Tidak ada	
				3 Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik	Jumlah aplikasi Pemereintah Daerah dan Perangkat Daerah yang difasilitasi	12 aplikasi	12 aplikasi	Tidak ada	Tidak ada	
				4 Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Kabupaten/ Kota Cerdas	Jumlah ketersediaan titik hotspot internet untuk masyarakat dan jaringan internet untuk semua OPD	220 titik	220 titik	Tidak ada	Tidak ada	
10	**Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah**	**Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan**	**Peningkatan Kesehatan Koperasi**	**1 PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI**	**Persentase koperasi yang melaksanakan ketentuan perundang-undangan**	**73%**	**73%**	**Tidak ada**	**Tidak ada**	
				1 Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota	**Persentase SDM koperasi, LKM yang mengikuti pelatihan dan koperasi yang difasilitasi permasalahan hukumnya**	**78%**	**78%**	**Masih ada koperasi yang masuk kategori Dalam Pengawasan**	**Perlu dilakukan pendampingan kelembagaan dan managemen keuangan koperasi**	
				1 Pemeriksaan Kepatuhan Koperasi terhadap Peraturan Perundang-Undangan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah SDM koperasi, LKM yang mengikuti pelatihan dan koperasi yang difasilitasi permasalahan hukumnya	300 orang	300 orang	LKM masih ragu ragu untuk menjadi Koperasi berBadan Hukum	Perlu ada fasilitasi pembiayaan bagi LKM untuk menjadi Koperasi berBadan Hukum	
			Penguatan Kelembagaan Koperasi	**2 PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN**	**Persentase peningkatan omzet koperasi**	**17,5%**	**17,5%**	**Kegiatan telah terlaksana dengan baik**		
				1 Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	**Persentase SDM koperasi yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi , Fasilitas Pendirian Badan Hukum Koperasi**	**70%**	**70%**	**Kegiatan dilaksanakan dengan baik**		
				1 Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan	Jumlah SDM koperasi yang mengikuti pelatihan	300 orang	265 orang	- Materi pelatihan yang sudah diberikan	- Diperlukan pelatihan lanjutan dan	

No	Urusan Pemerintahan	Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tinjut Rekom DPRD
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
				Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	tata kelola manajemen koperasi			kepada peserta banyak yang belum diimplementasikan di koperasi masing-masing - Peserta diklat sertifikasi kompetensi banyak yang tidak mengikuti uji kompetensi karena ada biaya tambahan	pendampingan agar implementasi hasil pelatihan benar-benar diterapkan di masing-masing koperasi - Memberikan pemahaman kepada peserta bahwa uji kompetensi adalah wajib karena sebagai salah satu persyaratan koperasi untuk mendapatkan NIB	
			Peningkatan Kapasitas Usaha Mikro	**2 Pendidikan dan pelatihan SDM Usaha Mikro dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase usaha mikro yang implementasi hasil pelatihan**	**10%**	**10%**	**Tidak ada**	**Tidak ada**	
				1 Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Usaha Mikro serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Usaha Mikro	Jumlah usaha mikro yang mendapat pelatihan	221 orang	221 orang	Tidak ada	Tidak ada	
			Peningkatan Kapasitas Usaha Koperasi	**3 PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI**	**Persentase peningkatan omzet usaha koperasi**	**17,5%**	**17,5%**	**Tidak ada**	**Tidak ada**	
				1 Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota	**Persentase koperasi yang difasilitasi pengembangan usaha dan pemasaran koperasi**	**65%**	**65%**	**Tidak ada**	**Tidak ada**	
				1 Pemberdayaan Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah koperasi yang difasilitasi pengembangan usaha dan pemasaran koperasi	90 orang	90 orang	Tidak ada	Tidak ada	
					Jumlah SDM koperasi yang mendapat Pelatihan Ketrampilan	60 orang	60 orang	Tidak ada	Tidak ada	
			Peningkatan Kapasitas Usaha Mikro	**4 PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM**	**Pertumbuhan Usaha Mikro**	**10%**	**29,28%**	**- SDM pelaku usaha mikro yang masih rendah - Pelaku usaha mikro kurang bisa memahami kebutuhan konsumen - Kurangnya diversifikasi produk**	**Dilaksanakannya pelatihan dan pendampingan bagi pelaku usaha yang berkelanjutan**	

No	Urusan Pemerintahan	Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tinjut Rekom DPRD
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
								usaha mikro - **Biaya tenaga kerja dan bahan baku yang tinggi** - **Penguasaan teknologi informasi masih rendah**		
				1 Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil	**Jumlah usaha mikro yang mendapat pelatihan kewirausahaan dan ketrampilan**	**160 orang**	**304 orang**	**Tidak ada**	**Tidak ada**	
				1 Fasilitasi Usaha Mikro Menjadi Usaha Kecil dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi	Jumlah usaha mikro yang difasilitasi pengembangan produksinya	2.466 orang	1.903 orang	- Banyak masyarakat yang masih beranggapan setiap pertemuan/ pelatihan akan diberikan uang saku - Adanya perubahan data kependudukan - Kebanyakan ibu-ibu mundur menjadi peserta inkubasi karena mempunyai anak kecil yang tidak bisa ditinggal - Peserta yang mengikuti berhenti di tengah-tengah jadwal pelatihan/ inkubasi karena sudah mendapat pekerjaan, atau ada yang sakit	Mencari peserta pengganti	
				5 PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	**Persentase peningkatan omzet UMKM**	**15%**	**17%**	- **Penguasaan teknologi informasi masih rendah** - **Harga produk UMKM yang tidak terjangkau**	**Memaksimalkan kegiatan promosi baik melalui *e-commerce* maupun offline yang efektif dan tepat sasaran**	
				1 Penyelenggaraan Promosi Dagang melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang terdapat pada 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	**Jumlah promosi dagang yang di ikuti**	**90%**	**90%**	**Tidak ada**	**Tidak ada**	

No	Urusan Pemerintahan	Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tinjut Rekom DPRD
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
				1 Pameran Dagang Lokal	Jumlah pameran lokal yang diselenggarakan	4 kali	9 kali	Tidak ada	Tidak ada	
11	Penanaman Modal	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kota Mojokerto	Meningkatnya Pertumbuhan Investasi	**1 PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL**	**Jumlah Dokumen Kebijakan Penanaman Modal**	**2 Dokumen**	**2 Dokumen**	**Tidak ada**	**Tidak ada**	
				1 Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	**Jumlah Dokumen informasi potensi investasi**	**2 Dokumen**	**2 Dokumen**	**Tidak ada**	**Tidak ada**	
				1 Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten / Kota	Jumlah Dokumen informasi potensi investasi	2 Dokumen	2 Dokumen	Tidak ada	Tidak ada	
				2 PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	**Persentase Peningkatan Jumlah Investor**	**2.000%**	**2.640%**	**Tidak ada**	**Tidak ada**	
				1 Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	**Persentase peningkatan jumlah investor**	**2.000%**	**2.640%***) data realisasi sampai dengan TW 3	**Tidak ada**	**Tidak ada**	
				1 Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal	Jumlah kebijakan perizinan dan non perizinan	1 Dokumen	1 Dokumen	Tidak ada	Tidak ada	
				2 Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah pelaksanaan pameran yang diikuti	2 Kegiatan	2 Kegiatan	Tidak ada	Tidak ada	
				3 PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	**IKM**	**83**	**82,04**	**Tidak ada**	**Tidak ada**	
				1 Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	**Persentase pelayanan perizinan yang selesai tepat waktu**	**90%**	**90%**	**Tidak ada**	**Tidak ada**	
					Persentase kasus pengaduan yang diselesaikan sesuai SOP	**90%**	**90%**	**Tidak ada**	**Tidak ada**	
				1 Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah aplikasi perizinan yang dikembangkan	1 Aplikasi	1 Aplikasi	Tidak ada	Tidak ada	
				2 Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal	Jumlah pemohon yang diproses	274 Objek Izin	274 Objek Izin	Tidak ada	Tidak ada	
				3 Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat Terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan	Jumlah konsultasi perizinan dan non perizinan penanaman modal	40 Konsultasi	40 Konsultasi	Tidak ada	Tidak ada	

No	Urusan Pemerintahan	Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tinjut Rekom DPRD
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
				4 PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	**Jumlah Nilai Realisasi Penanaman Modal yang Terpantau**	**360 M**	**335 M***)data Triwulan III 2021	**Tidak ada**	**Tidak ada**	
				1 Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	**Jumlah perusahaan yang mendapatkan pengawasan pelaksanaan penanaman modal**	**50 Perusahaan**	**224 Perusahaan**	**Tidak ada**	**Tidak ada**	
				1 Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah perusahaan yang diberikan Asistensi Pelaporan LKPM	100 perusahaan	176 perusahaan	Tidak ada	Tidak ada	
				2 Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah Masyarakat dan Pengusaha Yang Mendapat Pemahaman dan asistensi tentang Penanaman Modal	250 masyarakat/ pengusaha	222 masyarakat/ pengusaha	Tidak ada	Tidak ada	
					Jumlah Masyarakat dan Pengusaha Yang Mendapat Pemahaman tentang Peraturan di Bidang Perizinan	250 peserta	224 peserta	Tidak ada	Tidak ada	
				3 Koordinasi dan sinkronisasi pengawasan pelaksanaan penanaman modal	Jumlah laporan monev perusahaan	3 Laporan	3 Laporan	Tidak ada	Tidak ada	
					Jumlah perusahaan yang dimonev	50 Perusahaan	50 perusahaan	Tidak ada	Tidak ada	
				5 PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	**PERSENTASE KETERSEDIAAN DATA DAN INFORMASI PERIZINAN DAN NON PEIZINAN**	**100%**	**100%**	**Tidak ada**	**Tidak ada**	
				1 Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	**Jumlah permintaan data dan informasi yang terpenuhi**	**12 Data**	**12 Data**	**Tidak ada**	**Tidak ada**	
				1 Pengolahan, penyajian dan pemanfaatan data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah data dan informasi perizinan dan non perizinan yang diolah	15.000 Lembar	15.000 Lembar	Tidak ada	Tidak ada	
12	**Kepemudaan dan Olahraga**	**Dinas Kepemudaan,**		**1 PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN**	**Persentase OKP yang aktif**	**75%**	**83%**	**Pelaksanaan fasilitasi kepemudaan selain menyesuaikan usulan**	**Melaksanaan koordinasi yang proaktif dengan masyarakat/ organisasi**	

No	Urusan Pemerintahan	Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tinjut Rekom DPRD
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
		Olahraga dan Pariwisata		1 Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota	Jumlah kegiatan kepemudaan yang diikuti / diselenggarakan	7 Kegiatan	7 Kegiatan	**proposal dari masyarakat, juga menjadi kurang optimal dikarenakan kondisi pandemi Covid-19 sehingga dilakukan penyesuaian**	**kepemudaan/ pihak-pihak terkait**	
				2 Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah kegiatan pemuda yang diikuti/diselenggarakan	1 Kegiatan	1 Kegiatan			
				2 PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	**Cakupan pembinaan olahraga**	**88%**	**89%**	Terdapat perubahan jadwal berupa penundaan hingga pembatalan jadwal kejuaraan Olahraga karena adanya Pandemi Covid, sehingga kegiatan yang sudah direncanakan tidak dapat terlaksana	Tetap dilakukan pembinaan/ latihan untuk persiapan Pekan Olahraga Provinsi Tahun 2022	
				1 Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah kejuaraan olahraga yang diikuti/diselenggarakan	6 Kegiatan	3 Kegiatan			
				2 Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga	Jumlah pelatih bersetifikat	40 Pelatih	40 Pelatih			
				3 Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi	Jumlah Sarana dan Prasarana olah raga yang dipelihara/dibangun	7 Lokasi	7 Lokasi			
13	**Statistik**	**Dinas Komunikasi dan Informatika**	**Peningkatan Kualitas Pelayanan Infromasi Kepada Masyarakat**	**1 PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL**	**Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)**	**92**	**87,63**	**Tidak ada**	**Tidak ada**	
				1 Penyelenggaraan Statistik Sektoral Di Lingkup Daerah Kabupaten / Kota	**Persenetase ketersediaan data statistic sesuai kebutuhan**	**90%**	**90%**	**Tidak ada**	**Tidak ada**	
				1 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	Jumlah dokumen data statistic yang dihimpun	3 dokumen	3 dokumen	Tidak ada	Tidak ada	
14	**Persandian**	**Dinas Komunikasi dan Informatika**	**Pengembangan Sistem Pemerintahan Berbasis lektronik (SPBE)**	**1 PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI**	**Indeks SPBE**	**3,4**	**2,92**	**Tidak ada**	**Tidak ada**	
				1 Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota	**Persentase pengamanan informasi dan jaringan**	**85%**	**85%**	**Tidak ada**	**Tidak ada**	
				1 Pelaksanaan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi	Persentase Analisa System informasi pada perangkat daerah	100%	100%	Tidak ada	Tidak ada	

No	Urusan Pemerintahan	Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tinjut Rekom DPRD
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
				Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota						
				2 Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	Jumlah Monitoring dan evaluasi implementasi keamanan informasi pada perangkat daerah	35 kali / OPD	35 kali / OPD	Tidak ada	Tidak ada	
15	**Kebudayaan**	**Dinas Pendidikan dan Kebudayaan**		**1 PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN**	**Presentase even/kegiatan pelestarian budaya**	**4 kegiatan**	**4 kegiatan**	**Tidak ada**	**Tidak ada**	
					Persentase Cagar Budaya yang dilestarikan	**12 unit**	**12 unit**	**Tidak ada**	**Tidak ada**	
				1 Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	**Jumlah cagar budaya yang lestari**	**12 unit**	**12 unit**	**Tidak ada**	**Tidak ada**	
				1 Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Seni Budaya yang aktif	55 group	55 group	Tidak ada	Tidak ada	
				1 Perlindungan, pengembangan, pemanfaatan objek pemajuan kebudayaan	Jumlah cagar budaya yang lestari	12 unit	12 unit	Tidak ada	Tidak ada	
				1 Perlindungan, pengembangan, pemanfaatan objek pemajuan tradisi budaya	Jumlah kegiatan seni budaya yang diikuti	4 kegiatan	4 kegiatan	Tidak ada	Tidak ada	
16	**Perpustakaan**	**Dinas Perpustakaan dan Kearsipan**	**1. Peningkatan jumlah pengunjung perpustakaan; 2. Peningkatan jumlah koleksi buku yang tersedia di perpustakaan; 3. Peningkatan pelestarian koleksi nasional dan naskah kuno**	**1 PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN**						
				1 Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pengelolaan perpustakaan yang dilaksanakan sesuai standar	100%	100%	Tidak ada	Tidak ada	
				2 Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah rata-rata pengunjung perpustakaan per tahun	40.000 orang	38.785 orang	Tidak ada	Tidak ada	
				1 PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO						
				1 Pelestarian Naskah Kuno Milik Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah naskah kuno yang diselamatkan dan dilestarikan dengan baik	1 Dokumen	1 Dokumen	Tidak ada	Tidak ada	
17	**Kearsipan**	**Dinas Perpustakaan dan Kearsipan**	**1. Peningkatan kapabilitas pengelolaan arsip oleh**	**1 PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP**						
				1 Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah instansi yang diawasi	58 lembaga	58 lembaga	Tidak ada	Tidak ada	

No	Urusan Pemerintahan	Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan			Indikator	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tinjut Rekom DPRD
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)			(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
			Perangkat Daerah / penyelenggara kearsipan; **2. Peningkatan jumlah dan kualitas SDM pengelola kearsipan;** **3. Peningkatan pelayanan informasi kearsipan; dan** **4. Penyediaan dan penetapan izin penggunaan arsip.**		2	Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kabupaten/Kota	Persentase arsip yang terselamatkan dan dikelola dengan baik	100%	90,17%	Tidak ada	Tidak ada	
					3	Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten/Kota	Persentase pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional tingkat Kab/Kota yang dilaksanakan dengan baik	100%	100%	Tidak ada	Tidak ada	
				2	**PROGRAM PERIZINAN PENGGUNAAN ARSIP**							
					1	Pelayanan Izin Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup di Kabupaten/Kota	Jumlah naskah sumber arsip yang disusun dan diterbitkan	3 Buah	3 Buah	Tidak ada	Tidak ada	

3.3.3 Pelaksanaan Urusan Pilihan

Tabel 3.13
Capaian Pelaksanaan Program dan Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pilihan

No	Urusan Pemerintahan	Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tinjut Rekom DPRD
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
1	Kelautan dan Perikanan	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	Peningkatan produksi dan produktivitas komoditas pertanian, perikanan budidaya, dan peternakan	1 PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Persentase peningkatan produksi ikan	103 %	61 %	- Target tidak tercapai, karena Masa pandemi covid 19 - Cuaca ekstrim sehingga berpengaruh pada kesehatan ikan - Harga pakan yang mahal - Masih dalam proses pembenihan dan pembesaran	- Memberikan motivasi kepada Pembudidaya ikan untuk melaksanakan budidaya ikan - Memberikan tindakan perawatan dan pengobatan terhadap ikan yang kurang sehat - Mengupayakan untuk membuat pakan mandiri - Melakukan pendampingan pemberdayaan budidaya ikan selama proses pembenihan dan pembesaran ikan	
					Persentase peningkatan jumlah anggota Pokdakan	3 %	15 %	Target tercapai, karena Peningkatan jumlah anggota pokdakan ada program pemberdayaan bidang perikanan	- Mempersiapkan petugas pendamping pemberdayaan bidang perikanan - Memberikan pendampingan pemberdayaan budidaya perikanan kepada masyarakat	
				1 Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil	Persentase Pemberdayaan Pembudidaya Ikan Air Tawar	90%	90%	Target tercapai, walaupun masih masa pandemi covid 19	- Melakukan monitoring dan evaluasi pemberdayaan pembudidaya ikan - Melakukan rapat/ pertemuan pokdakan - Melakukan pelatihan pembuatan pakan mandiri - Melakukan pelatihan budidaya lobster - Melakukan pelatihan	

No	Urusan Pemerintahan	Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tinjut Rekom DPRD
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
									penguatan kelembagaan - **Memberikan bantuan benih ikan kepada masyarakat**	
				1 Pengembangan kapasitas pembudi daya ikan kecil	Jumlah POKDAKAN yang dilatih dalam berbudidaya ikan air tawar	40 Org	121 orang	Target tercapai karena ada program inkubasi wirausaha bidang perikanan	- Melakukan pelatihan budidaya ikan air tawar - Memberikan pendampingan pemberdayaan budidaya ikan air tawar (lele dan nila)	
				2 Pemberian pendampingan, kemudahan akses ilmu pengetahuan, teknologi dan informasi, serta penyelenggaraan pendidikan pelatihan	Jumlah benih ikan yang ditebar di sungai	50.000 Ekor	11.000 ekor	- Target tidak tercapai, karena ikan yang ditebar harus ikan endemik (ikan asli sungai) - Belum tersedia benih ikan endemik (ikan asli sungai)	- Mengupayakan ikan endemik dengan berkoordinasi dengan instansi terkait (baik pemerintah propinsi maupun pemerintah pusat) - Melakukan pembenihan/ pemijahan benih ikan endemik (ikan asli sungai)	
				2 PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	**Persentase kasus penyakit hewan yang ditangani**	**80%**	**80%**	**Target tercapai, walaupun di masa pandemi covid karena penyakit hewan harus segera diatasi**	- **Identifikasi ternak yang terkena penyakit** - **Melakukan diagnosa untuk menentukan tindakan yang akan dilakukan** - **Monitoring dan evaluasi terhadap ternak** - **Melakukan komunikasi, informasi dan edukasi terkait pemeliharaan, perawatan dan pengobatan hewan ternak**	
					Persentase peningkatan produksi daging dari 8 jenis	**103 %**	**113,85%**	**Target tercapai melebihi target tahunan**	- **Melakukan komunikasi, informasi dan edukasi kepada peternak, pembinaan dan pelayanan kesehatan hewan**	

No	Urusan Pemerintahan	Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tinjut Rekom DPRD
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
									- **Melakukan pengawasan dan pengendalian pemotongan sapi betina di Rumah Potong Hewan** - **Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pemeliharaan dan perawatan hewan ternak**	
				1 Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam Daerah Kabupaten/Kota	**Persentase pelayanan jasa medik veteriner**	**90%**	**90%**	**Target tercapai.**	**Mengusulkan penambahan tenaga Medik dan Paramedik veteriner agar pelayanan dapat berjalan dengan prima**	
					Jumlah produksi daging dari 8 jenis	**2.231.103 kg**	**2.540.332 kg**	**Target tercapai melebihi target tahunan**	- **Melakukan komunikasi, informasi dan edukasi kepada peternak, pembinaan dan pelayanan kesehatan hewan** - **Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pemeliharaan dan perawatan hewan ternak**	
				1 Pengendalian dan penanggulangan penyakit hewan dan Zoonosis	Jumlah Kegiatan pelatihan budidaya ternak	40 Org	70 org	Target melebihi target yang ditetapkan, karena ada program inkubasi wirausaha bidang peternakan	- Melakukan pendataan jumlah anggota KUBE - Mengadakan pelatihan budidaya peternakan ayam petelur dan ayam buras - Melakukan komunikasi, informasi dan edukasi terkait pemberdayaan inkubasi wirausaha bidang peternakan ayam petelur dan ayam buras - Memberikan pendampingan program inkubasi wirausaha bidang peternakan ayam	

No	Urusan Pemerintahan	Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tinjut Rekom DPRD
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
									petelur dan ayam buras	
					Jumlah pelayanan Vaksinasi yang dilaksanakan	80 Dosis	80 dosis	Tareget tercapai, karena jumlah dosis yang disediakan sesuai dengan jumlah hewan yang divaksin	- Melakukan pendataan terhadap hewan peliharaan yang belum di vaksin - Memberikan informasi dan edukasi terhadap pemilik hewan peliharaan untuk dilakukan vaksinasi - Mengusulkan penambahan anggaran untuk pembelian vaksin - Melakukan komunikasi, informasi dan edukasi kepada pemilik hewan agar melakukan vaksinasi hewan miliknya	
					Jumlah pengadaan obat-obatan dan alat kesehatan yang dilaksanakan	2 Paket	2 pkt	Target tercapai	Optimalisasi kegiatan kesehatan hewan dilakukan dengan identifikasi kebutuhan obat-obatan dan alat kesehatan yang diperlukan untuk perawatan dan pengobatan hewan ternak	
					Jumlah pelayanan di UPT Puskeswan yang dilaksanakan	120 Kali	151 Kali	Target tercapai melebihi target tahunan	- Melakukan monitoring dan evaluasi kepada para peternak/hewan peliharaan - Memberikan informasi kepada masyarakat terkait pelayanan kesehatan di UPT Puskeswan dengan tidak dipungut biaya	
				2 Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner	**Persentase penerapan dan pengawasan persyaratan teknik kesehatan masyarakat veterine**	**90%**	**90%**	**Target tercapai**	- **Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap perawatan dan pemeliharaan ternak** - **Memberikan pemahaman terhadap penanganan dan**	

No	Urusan Pemerintahan	Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tinjut Rekom DPRD
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
									pengelolaan kandang yang baik - **Memberikan pemahaman terhadap perlakuan hewan ternak** - **Memberikan motivasi dalam melakukan perawatan dan pengobatan hewan ternak yang sakit** - **Mengusulkan untuk formasi tenaga medik veteriner**	
				1 Pendampingan Unit Usaha Hewan dan Produk Hewan	Jumlah pelatihan budidaya ternak unggas	40 Peserta	70 peserta	Target tercapai karena program inkubasi wirausaha bidang ternak unggas	- Melakukan pelatihan budidaya ayam petelur dan ayam buras bagi kelompok KUBE - Memberikan motivasi kepada kelompok untuk mendukung dan bekerja sama dalam mengelola bantuan ternak ayam - Memberikan informasi dan edukasi terkait pembagian tugas anggota kelompok KUBE	
2	**Pariwisata**	**Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata**		**1 PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA**	**Jumlah kontribusi jasa usaha pariwsata**	**Rp. 10.000.000. 000**	**Rp. 11.399.791. 228**	Promosi Pariwisata melalui pelaksanaan even menjadi tidak optimal dikarenakan Pandemi Covid-19 yang masih berlangsung	Pelaksanaan even yang belum optimal pelaksanaannya tetap direncanakan untuk dilaksanakan pada tahun 2022 dengan menyesuaikan situasi dan kondisi	
				1 Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah promosi pariwisata	4 Jenis	4 Jenis			
				2 PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	**Persentase SDM pariwsata dan ekonomi kreatif yang bina**	**70%**	**500%**	**Tidak ada**	**Tidak ada**	
				1 Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	Jumlah pelatihan SDM pariwisata	2 Pelatihan	2 Pelatihan	Tidak ada	Tidak ada	
3	**Pertanian**	**Dinas Ketahanan Pangan dan**	**Peningkatan produksi dan produktivitas**	**1 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN**	**Persentase kelompok tani yang mendapatkan sarana pertanian**	**90%**	**100 %**	**Tidak ada**	**Tidak ada**	

No	Urusan Pemerintahan	Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tinjut Rekom DPRD
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
		Pertanian	**komoditas pertanian**	**1 Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian**	**Jumlah Petani yang mendapatkan sarana pertanian**	**25 Poktan**	**25 Poktan**	**Tidak ada**	**Tidak ada**	
				1 Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	Jumlah bibit yang ditanam dan dirawat	4.000 Pohon Jeruk Siam Madu	3.982 Pohon Jeruk Siam Madu	Perencanaan DPA awal menggunakan satuan hektar hal ini berbeda dengan realitas di lapang yang menggunakan satuan titik (lubang tanam).	Terdapat variasi jarak tanam pada penanaman bibit jeruk dengan kisaran 4x4 m dan 5x5 m. Hal ini menyesuaikan dengan kondisi di lapangan.	
				2 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	**Persentase prasarana yang digunakan**	**90%**	**100%**	**Tidak ada**	**Tidak ada**	
				1 Pengembangan Prasarana Pertanian	**Jumlah Prasarana yang diguakan**	**15 Unit**	**16 Unit**	**Tidak ada**	**Tidak ada**	
				1 Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian lainnya	Jumlah Pertemuan yang diselenggarakan	8 Kali	8 Kali	Tidak ada	Tidak ada	
				2 Pembangunan Prasarana Pertanian	**Jumlah Prasarana yang terbangun**					
				1 Pembangunan, Rehabilitasi dan pemeliharaan jaringan irigasi usaha tani	Jumlah terbangunnya jaringan irigasi usaha tani	8 unit	7 unit	Poktan Kel. Balongsari keberatan dengan sewa lahan aset yang terlalu tinggi, sehingga berpengaruh terhadap realisasi pembangunan irigasi air tanah dangkal.	Mengajukan permohonan keringanan harga sewa lahan aset DKPP memfasilitasi pertemuan antara BPKPD, Camat, Lurah dengan poktan terkait dengan harga sewa lahan aset.	
				2 Pembangunan, Rehabilitasi dan pemeliharaan jalan usaha tani	Jumlah terbangunnya jalan usaha tani	1 paket	1 paket	Tidak ada	Tidak ada	
				3 Pembangunan, Rehabilitasi dan pemeliharaan DAM parit	Jumlah terbangunnya DAM parit	3 paket	3 paket	Tidak ada	Tidak ada	
				4 Pembangunan, Rehabilitasi dan pemeliharaan pintu air	Jumlah terbangunnya pintu air	5 unit	5 unit	Tidak ada	Tidak ada	
4	**Energi dan Sumber Daya Mineral**	**Sekretariat Daerah (Bagian Perekonomian)**	**Terlaksananya program/ kegiatan OPD yang mengacu pada kebijakan perekonomian daerah**	**1 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase Kegiatan Sosialisasi di Bidang Cukai yang terlaksana**	**100 %**	**100 %**	**Tidak ada**	**Tidak ada**	
				1 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	**Persentase kegiatan sosialisasi (iklan layanan masyarakat & rapat koordinasi) cukai yang terlaksana**	**100 %**	**100 %**	**Tidak ada**	**Tidak ada**	
				1 Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah masyarakat yang mengerti ketentuan di bidang cukai	180 orang	180 orang	Tidak ada	Tidak ada	

No	Urusan Pemerintahan	Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tinjut Rekom DPRD
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
5	Perdagangan	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan		**1 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN**	**Persentase pembangunan sarana distribusi perdagangan dan pembinaan terhadap pengelola sarana distribusi perdagangan**	**100%**	**75%**	**Tidak terlaksananya Pembangunan Skywalk dan Lanscape Pasar Ketidur**	**Mengadakan lelang di tahun berikutnya**	
				1 Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	**Prosentase pembangunan sarana dan prasarana pasar**	**100%**	**75%**	**Tidak terlaksananya Pembangunan Skywalk dan Lanscape Pasar Ketidur**	**Mengadakan lelang di tahun berikutnya**	
				1 Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah prasarana perdagangan yang dibangun/ renovasi	4 unit	6 unit	Tidak ada	Tidak ada	
				2 Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah peserta sosialisasi Transaksi Digital	125 pedagang	125 pedagang	Tidak ada	Tidak ada	
				2 Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya	**Persentase pengelola sarana distribusi perdagangan yang di bina**	**85%**	**85%**	**Tidak ada**	**Tidak ada**	
				1 Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah pengelola sarana distribusi yang dibina	1 lembaga	1 lembaga	Tidak ada	Tidak ada	
					Jumlah pasar yang ditertibkan	7 pasar	7 pasar	Tidak ada	Tidak ada	
				2 PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG	**Persentase ketersediaan dan stabilitas harga bahan pokok**	**100%**	**100%**	**Tidak ada**	**Tidak ada**	
				1 Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Kab/Kota	**Prosentase ketersediaan barang kebutuhan pokok dan barang penting yang dipantau**	**100%**	**100%**	**Tidak ada**	**Tidak ada**	
				1 Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang	Jumlah pasar dan toko modern yang dimonitoring	5 toko modern	5 toko modern	Tidak ada	Tidak ada	
				1 Pengendalian Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	Jumlah pasar dan toko modern yang dimonitoring	5 toko modern	5 toko modern	Tidak ada	Tidak ada	
				2 Pengendalian Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di	**Prosentase bahan pokok yang dimonitoring stabilisasi harganya**	**80%**	**80%**	**Tidak ada**	**Tidak ada**	

No	Urusan Pemerintahan	Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tinjut Rekom DPRD
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
				Tingkat Agen dan Pasar Rakyat						
				1 Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota	Jumlah penyelenggaraan operasi pasar	2 kali	8 kali	Tidak ada	Tidak ada	
					Jumlah penyelenggaraan Pasar Murah	1 kali	7 kali	Tidak ada	Tidak ada	
				3 PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	**Persentase peningkatan omzet UMKM**	**15%**	**15%**	**Tidak ada**	**Tidak ada**	
				1 Penyelenggaraan Promosi Dagang melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang terdapat pada 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	**Jumlah promosi dagang yang di ikuti**	**90%**	**90%**	**Tidak ada**	**Tidak ada**	
				1 Misi Dagang Bagi Produk Ekspor Unggulan	Jumlah UMKM yang difasilitasi mengikuti misi dagang	10 orang	10 orang	Tidak ada	Tidak ada	
				2 Pembinaan Pelaku Usaha Ekspor	Jumlah peserta pembinaan/ pelatihan perdagangan	50 orang	50 orang	Tidak ada	Tidak ada	
				4 PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	**Persentase ketaatan pelaku usaha dalam tertib niaga**	**100%**	**100%**	**Tidak ada**	**Tidak ada**	
				1 Pelaksanaan Metrologi Legal berupa Tera, Tera Ulang dan Pengawasan	**Jumalah Pelaksanaan Operasional tera/tera ulang alat UTTP**	**100%**	**100%**	**Tidak ada**	**Tidak ada**	
				1 Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang	Jumlah pelaksanaan operasional tera/tera ulang alat UTTP	3 lokasi	3 lokasi	Tidak ada	Tidak ada	
					Jumlah dokumen perencanaan Gedung Metrologi	1 dokumen	1 dokumen	Tidak ada	Tidak ada	
				2 Pengawasan/ Penyuluhan Metrologi Legal	Jumlah kalibrasi alat metrologi	1 kali	1 kali	Tidak ada	Tidak ada	
					Jumlah peserta sosialisasi metrologi	150 orang	150 orang	Tidak ada	Tidak ada	
				5 PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	**Persentase penyediaan informasi data perdagangan**	**80%**	**80%**	**Tidak ada**	**Tidak ada**	
				1 Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	**Persentase penyediaan informasi data perdagangan**	**80%**	**80%**	**Tidak ada**	**Tidak ada**	
				1 Peningkatan Sistem dan Jaringan Informasi Perdagangan	Up dating data perdagangan	1 dokumen	1 dokumen	Tidak ada	Tidak ada	

No	Urusan Pemerintahan	Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tinjut Rekom DPRD
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
6	Perindustrian	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan		**1 PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI**	**Persentase peningkatan omzet penjualan para IKM Kota Mojokerto**	**10%**	**8%**	**Tahun 2021 kondisi pandemi Covid-19 dan PPKM masih berlaku sehingga pelaku usaha IKM belum bisa maksimal dalam menjalankan usahanya**	**Tetap melakukan pembinaan, pendampingan, monev pelaku usaha IKM agar dapat berproduksi secara optimal**	
				1 Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	**Persentase peningkatan produksi IKM**	**90%**	**85%**	**Tidak tercapainya target jumlah peserta inkubasi wirausaha**	**Melaksanakan inkubasi wirausaha bidang lainnya di tahun selanjutnya**	
				1 Koordinasi, Sinkronisasi, dan pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	Jumlah peserta yang mendapat pelatihan inkubasi wirausaha	2.970 orang	436 orang	- Masyarakat yang terdata sudah memiliki pekerjaan - Minat masyarakat yang minim dengan mindset masyarakat yang masih beranggapan setiap pertemuan/ pelatihan akan diberikan uang saku - Peserta yang mengikuti berhenti di tengah-tengah jadwal pelatihan/ inkubasi karena merasa belum mendapat keuntungan/ manfaat yang diberikan	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	
					Tersusunnya kajian KIHT di Kota Mojokerto	1 dokumen	1 dokumen	Tidak ada	Tidak ada	
				2 Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	Jumlah peserta pelatihan peningkatan kemampuan	2.329 orang	763 orang	- Minat masyarakat yang minim dengan mindset masyarakat yang masih beranggapan setiap pertemuan/ pelatihan akan diberikan uang saku - Peserta yang mengikuti berhenti di tengah-tengah jadwal pelatihan/ inkubasi karena merasa belum mendapat	- Memberikan edukasi kepada masyarakat tentang inkubasi wirausaha dan hasil inkubasi - Memberikan inspirasi kepada masyarakat tentang keberhasilan wirausaha	

No	Urusan Pemerintahan	Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tinjut Rekom DPRD
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
								keuntungan/ manfaat yang diberikan		
				2 PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI KABUPATEN/KOTA	**Persentase IKM yang telah menerapkan standarisasi produk**	**80%**	**80%**	**Tidak ada**	**Tidak ada**	
				1 Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota	**Persentase IKM yang telah menerapkan standarisasi produk**	**80%**	**80%**	**Tidak ada**	**Tidak ada**	
				1 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Perizinan di Bidang Industri Dalam Lingkup IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/ Kota	Jumlah IKM difasiltasi HAKI	30 IKM	43 IKM	Tidak ada	Tidak ada	
				2 Sosialisasi Standardisasi Industri	Persentase peningkatan jumlah pelaku usaha yang memperoleh pemahaman tentang standardisasi industri	50 pelaku usaha	50 pelaku usaha	Tidak ada	Tidak ada	
				3 Sosialisasi HKI		43 IKM	43 IKM	Jumlah IKM kepengurusan halal tercapai seluruhnya, namun terdapat regulasi tambahan sehingga proses penerbitan sertifikat berlanjut di awal tahun 2022	Berkoordinasi dengan Kementerian Agama Pusat, Kota dan Kabupaten	
				4 Monev dan Pembinaan Industri	Persentase bertambahnya jumlah pelaku industri yang melaporkan data industri dalam aplikasi SIINas (Sistem Informasi Industri Nasional) dan melaksanakan kewajiban sebagai pelaku industri	150 pelaku industri	150 pelaku industri	Beberapa pelaku usaha belum memahami SIINas	Melaksanakan FGD input data ke SIINas di Tahun 2022	
				3 PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	**Persentase IKM yang difasilitasi dalam e-commerce**	**83%**	**83%**	**Tidak ada**	**Tidak ada**	
				1 Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI	**Persentase penyediaan informasi industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI**	**83%**	**83%**	**Tidak ada**	**Tidak ada**	

No	Urusan Pemerintahan	Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tinjut Rekom DPRD
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
				dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota	**Kewenangan Kabupaten/ Kota**					
				1 Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	Jumlah peserta koordinasi sinkronisasi NSPK Perindustrian dan SIINas	50 orang	25 orang	Kurangnya pemahaman SIINas	Mencari koneksi yang lebih paham SIINas	
				2 Diseminasi, Publikasi Data Informasi dan Analisa Industri Kabupaten/Kota melalui SIINas	Jumlah data yang dimuktahirkan	1 dokumen	1 dokumen	Terbatasnya jumlah serveyor pendataan	Melanjutkan kegiatan pendataan pada tahun 2022	
				4 PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	**Persentase peningkatan produktivitas tenaga kerja**	**80%**	**80%**	**Tidak ada**	**Tidak ada**	
				1 Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	**Persentase tenaga kerja yang difasilitasi melalui pelatihan**	**80%**	**80%**	**Tidak ada**	**Tidak ada**	
				1 Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	Jumlah buruh pabrik rokok yang mengikuti pelatihan inkubasi wirausaha	115 orang	50 orang	Minat buruh pabrik rokok yang minim untuk mengikuti pelatihan batik	Memberikan pilihan minat pelatihan lebih banyak selain pelatihan batik sesuai dengan wirausaha yang diminati	
				5 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	**Persentase masyarakat yang difasilitasi sosialisasi informasi**	**80%**	**80%**	**Tidak ada**	**Tidak ada**	
				1 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	**Persentase sosialisasi informasi tentang cukai ke masyarakat**	**80 %**	**80%**	**Tidak ada**	**Tidak ada**	
				1 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah peserta yang mengikuti sosialisasi ketentuan di bidang cukai hasil tembakau	715 orang	715 orang	Tidak ada	Tidak ada	

3.3.4 Pelaksanaan Fungsi Pendukung Urusan Pemerintahan

Tabel 3.14
Capaian Pelaksanaan Program dan Kegiatan Fungsi Pendukung Urusan Pemerintahan

No	Urusan Pemerintahan	Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tinjut Rekom DPRD
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
1	Sekretariat Daerah	Sekretariat Daerah (Bagian Pemerintahan)	Peningkatan akuntabilitas dan pelaayanan perangkat daerah	**1 PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT**	**Persentase dokumen LPPD dan LKPJ yang disusun tepat waktu**	**100%**	**100%**	**Tidak ada**	**Tidak ada**	
					Persentase kerjasama antar pemerintah, lembaga pemerintah dan Non pemerintah yang difasilitasi	**100%**	**100%**	**Tidak ada**	**Tidak ada**	
					Indeks Profil Kelurahan Tingkat Kota	**0,74**	**0,74**	**Tidak ada**	**Tidak ada**	
				1 Administrasi Tata Pemerintahan	**Persentase Dokumen Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan (LPPD, LKPJ dan SPM yang disusun tepat waktu)**	**100%**	**100%**	**Tidak ada**	**Tidak ada**	
				1 Fasilitasai Pelaksanaan Otonomi Daerah	Jumlah dokumen laporan penyelenggaraan pemerintahan (LPPD, LKPJ dan SPM) yang disusun	3 dokumen	3 dokumen	Tidak ada	Tidak ada	
				2 Penataan Administrasi Pemerintahan	Jumlah profil kelurahan yang disusun	1 dokumen	1 dokumen		Juara I Lomba Swadaya Gotong Royong Masyarakat Tingkat Provinsi Jawa Timur	
				3 Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	Jumlah nama rupa bumi yang dibakukan	100 nama rupa bumi	125 nama rupa bumi	Tidak ada	Tidak ada	
				2 Fasilitasi Kerjasama Daerah	**Persentase KSB yang ditindaklanjuti dengan PKS**	**75%**	**88%**	**Tidak ada**	**Tidak ada**	
				1 Fasilitasi Kerjasama Dalam Negeri	Jumlah KSB yang disusun	10 KSB	18 KSB	Tidak ada	Tidak ada	
		Sekretariat Daerah (Bagian Kesejahteraan Rakyat)		**1 PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT**	**Prosentase Kegiatan Kesejahteraan Rakyat**	**100%**	**91,53%**		**- Penerapan sanksi sebagaimana tercantum pada NPHD BAB VI pasal 5 (sanksi)**	
				1 Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	**Jumlah Fasilitasi Forum keagamaan yang di fasilitasi**	**8 Kegiatan**	**8 kegiatan**	**Tidak ada**	**Tidak ada**	

No	Urusan Pemerintahan	Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tinjut Rekom DPRD
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
				1 Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Sosial	Jumlah proposal hibah yang diverifikasi secara benar dan tepat waktu	26 Proposal	25 Proposal	Usulan Permohonan hibah melebihi batas tanggal Pengajuan	Dihimbau kepada calon pengusul hibah untuk membuat pengajuan tepat waktu	
				2 Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Masyarakat	jumlah kegiatan keagamaan yang di fasilitasi	15 Kegiatan	15 Kegiatan	Pembatasan Peserta Kegiatan karena Pandemi Covid-19		
		Sekretariat Daerah (Bagian Hukum)	**Peningkatan produk hukum yang diselesaikan tepat waktu**	**1 PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT**	**Persentase Produk Hukum Daerah yang diimplementasikan**	**100%**	**113%**	**Tidak ada**	**Tidak ada**	
			Peningkatan capaian penanganan perkara/permasalahan hukum		**Prosentase Penanganan Permasalahan Hukum yang difasilitasi**	**100%**	**183%**	**Belum optimalnya kesadaran hukum aparatur dan masyarakat sehingga memunculkan permasalahan hukum baru baik yang litigasi maupun non litigasi**	**Melakukan koordinasi secara intens kepada pihak-pihak yang berpekara dan memberikan pendampingan serta bantuan hukum atas perkara/permasalahan hukum yang terjadi**	
				1 Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	**Persentase Fasilitasi dan Koordinasi Hukum yang dilaksankan**	**100%**	**113%**	**Tidak ada**	**Tidak ada**	
				1 Fasilitasi Bantuan Hukum	Jumlah perkara / permasalahan hukum yang terselesaikan secara litigasi dan non litigasi	3 perkara	4 perkara	Terbatasnya personil yang mempunyai kualifikasi beracara di pengadilan	Melakukan koordinasi dengan pihak kejaksaaan dalam menangani permasalahan hukum yang terjadi di Pemerintah Kota Mojokerto	
						50 pertimbangan	77 pertimbangan	Tidak ada	Tidak ada	
				2 Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah	Jumlah Raperda yang ditetapkan menjadi perda	8 perda	8 perda	Tidak ada	Tidak ada	
					Jumlah Perwali yang ditetapkan	54 Perwali	77 Perwali	Tidak ada	Tidak ada	
					Jumlah Kepwali yang ditetapkan	366 kepwali	398 kepwali	Tidak ada	Tidak ada	
				3 Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengeloaan Informasi Hukum	Jumlah produk hukum yang diunggah dalam JDIH	62 prokum	85 prokum	Pelaksanaan digitalisasi produk hukum daerah yang belum optimal	Melakukan updating aplikasi JDIH yang berkesinambungan dan berkelanjutan karena aplikasi JDIH merupakan salah satu sarana dalam mempublikasikan produk hukum daerah yang telah ditetapkan kepada	

No	Urusan Pemerintahan	Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tinjut Rekom DPRD
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
									masyarakat/khalayak umum	
		Sekretariat Daerah (Bagian Umum)		**1 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase Sarana Prasarana Perangkat Daerah (Sekretariat Daerah) secara cukup dan dengan kualitas baik**	**95%**	**92%**	**Tidak ada**	**Tidak ada**	
				1 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	**Persentase Administrasi keuangan perangkat daerah yang terpenuhi**	**100%**	**89,28%**	**Pada Sub Kegiatan Penyediaan Gai dan Tunjangan Anggaran disediakan lengkap yaitu Staf, Kabag, Asisten (3 orang) dan Staf Ahli (3 orang) sedangkan pejabat yang menduduki definitive tidak terpenuhi**	**Merealisasikan gaji dan tunjangan sesuai dengan kebutuhan**	
				1 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah transaksi gaji dan tunjangan Asn yang dibayar	12 transaksi	12 transaksi	Tidak ada	Tidak ada	
				2 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah transaksi honor pengelolaan keuangan yang dibayarkan	12 transaksi	12 transaksi	Tidak ada	Tidak ada	
					Jumlah perjalanan dinas luar daerah	300 kali	355 kali	Tidak ada	Tidak ada	
				3 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah dokumen Laporan Keuangan Akhir Tahun yang disusun	1 laporan	1 laporan	Tidak ada	Tidak ada	
				2 Administrasi Umum Perangkat Daerah	**Persentase administrasi umum Perangkat Daerah yang terpenuhi**	**100%**	**93,7%**	**Untuk Output Kegiatan sudah sesuai namun spesifikasi teknis dilapangan lebih rendah dari perencanaan awal sehingga terdapat efisiensi anggaran**	**Pelaksanaan Kegiatan disesuaikan dengan Perencanaan Awal**	
				1 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	4 paket	4 paket	Tidak ada	Tidak ada	
				2 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket ATK yang disediakan	1 paket	1 paket	Tidak ada	Tidak ada	

No	Urusan Pemerintahan	Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tinjut Rekom DPRD
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
				3 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	1 paket	1 paket	Tidak ada	Tidak ada	
				4 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	1 paket	1 paket	Tidak ada	Tidak ada	
				5 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah paket bahan bacaan yang disediakan	3 paket	3 paket	Tidak ada	Tidak ada	
				6 Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah kunjungan tamu yang difasilitasi	1 paket	1 paket	Tidak ada	Tidak ada	
				7 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah rapat koordinasi SKPD yang diselenggarakan	300 kali	300 kali	Tidak ada	Tidak ada	
				2 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	**Persentase Administrasi Kepegawaian yang terpenuhi**	**100%**	**75,74%**	**Tidak ada**	**Tidak ada**	
				1 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pakaian Dinas Yang Disediakan	500 potong	500 potong	Tidak ada	Tidak ada	
				2 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Yang Mengikuti Diklat	30 orang	30 orang	Tidak ada	Tidak ada	
				3 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	**Persentase Barang Milik Daerah yang disediakan**	**100%**	**93%**	**Terdapat efisiensi anggaran pada pembelian Genset, Alat Pendingin dan Belanja modal alat kantor.**	**Pelaksanaan Kegiatan disesuaikan dengan Perencanaan Awal**	
				1 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	1 Unit	1 Unit	Tidak ada	Tidak ada	
				2 Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	5 Paket	5 Paket	Tidak ada	Tidak ada	
				3 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin kantor yang disediakan	1 Paket	1 Paket	Tidak ada	Tidak ada	
				4 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Persentase Barang Milik Daerah yang dipelihara**	**100%**	**96%**	**Tidak ada**	**Tidak ada**	
				1 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan	Jumlah BBM kendaraan dinas yang disediakan	18292 liter	57840 liter	Tidak ada	Tidak ada	
					Jumlah Servis kendaraan dinas	75 kali	75 kali	Tidak ada	Tidak ada	

No	Urusan Pemerintahan	Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tinjut Rekom DPRD
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
				Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah transaksi pajak kendaraan dinas yang dibayarkan	12 transaksi	12 transaksi	Tidak ada	Tidak ada	
				2 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin kantor yang dipelihara	50 unit	50 unit	Tidak ada	Tidak ada	
				3 Pemeliharaan /Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah paket pemeliharaan /rehabilitasi gedung kantor	3 paket	3 paket	Tidak ada	Tidak ada	
				4 Pemeliharaan /Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah paket pemeliharaan sarpras gedung kantor atau bangunan lainnya	5 paket	5 paket	Tidak ada	Tidak ada	
				5 Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	**Persentase administrasi keuangan dan operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang terpenuhi**	**100%**	**97%**	**Perencanaan dan Penganggaran sudah sesuai sedangkan untuk anggaran yang belum terserap adalah sisa anggaran dari 14 uraian belanja**	**Penganggaran akan disesuaikan dengan kebutuhan Kepala Daerah**	
				1 Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah transaksi Gaji dan Tunjangan KDH dan Wakil KDH	12 transaksi	12 transaksi	Tidak ada	Tidak ada	
				2 Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Pakaian Dinas dan atribut kelengkapan KDH dan Wakil KDH yang disediakan	2 potong	2 potong	Tidak ada	Tidak ada	
				3 Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Dana Operasional KDH/Wa KDH yang disediakan	12 transaksi	12 transaksi	Tidak ada	Tidak ada	
				6 Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	**Persentase administrasi keuangan dan operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang terpenuhi**	**100%**	**90%**	**Tidak ada**	**Tidak ada**	
				1 Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	Jumlah kebutuhan rumah tangga KDH dan Wakil KDH yang difasilitasi	12 transaksi	12 transaksi	Tidak ada	Tidak ada	
				7 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	**Persentase dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah yang tersusun**	**100%**	**13%**	**Untuk Anggaran Mamin ikut pada Kegiatan Fasilitasi Kunjungan Tamu sehingga penyerapan anggaran sedikit sedangkan dokumen Perencanaan dan**	**Anggaran Mamin Rapat untuk tahun 2022 tidak dianggarkan lagi pada Kegiatan Perencanaan namun dibebankan pada Kegiatan Fasilitasi Kunjungan Tamu**	

No	Urusan Pemerintahan	Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tinjut Rekom DPRD
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
								Evaluasi telah diselesaikan 100%		
				1 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah yang disusun	4 dokumen	4 dokumen	Tidak ada	Tidak ada	
				2 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA SKPD	1 dokumen	1 dokumen	Tidak ada	Tidak ada	
				3 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah dokumen Perubahan RKA SKPD	1 dokumen	1 dokumen	Tidak ada	Tidak ada	
				4 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA SKPD	1 dokumen	1 dokumen	Tidak ada	Tidak ada	
				5 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA SKPD	1 dokumen	1 dokumen	Tidak ada	Tidak ada	
				6 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Capaian Laporan Kinerja SKPD	4 dokumen	4 dokumen	Tidak ada	Tidak ada	
		Sekretariat Daerah (Bagian Perekonomian)		**1 PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN**	**Persentase Perekonomian dan Pembangunan yang terpenuhi**	**100%**	**100%**	**Tidak ada**	**Tidak ada**	
				1 Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	**Persentase kebijakan perekonomian yang dilaksanakan**	**100%**	**100%**	**Tidak ada**	**Tidak ada**	
				1 Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	Jumlah Data Monevlap BUMD	1 Dokumen	1 Dokumen	Tidak ada	Tidak ada	
					Jumlah Dokumen Kebijakan BUMD	3 Kebijakan	3 Kebijakan	Tidak ada	Tidak ada	
					Jumlah masyarakat mengerti informasi promosi BUMD	150 orang	150 orang	Tidak ada	Tidak ada	
				2 Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	Jumlah Kebijakan Tim Pengendalian Inflasi Daerah	4 Kebijakan	4 Kebijakan	Tidak ada	Tidak ada	
				3 Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro kecil	Jumlah Data Monevlap Realisasi Akses Permodalan	1 Dokumen	1 Dokumen	Tidak ada	Tidak ada	
					Jumlah Dokumen Kebijakan Pengembangan Perekonomian	3 Kebijakan	3 Kebijakan	Tidak ada	Tidak ada	
					Jumlah masyarakat mengetahui informasi kebijakan pengembangan perekonomian (Askes	150 orang	150 orang	Tidak ada	Tidak ada	

No	Urusan Pemerintahan	Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tinjut Rekom DPRD
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
					Permodalan, Ekonomi Kreatif, LKM, UMKM)					
				2 Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam	**Persentase jumlah kebijakan SDA yang dipenuhi**	**100%**		**Tidak ada**	**Tidak ada**	
				1 Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air	Jumlah Data Monevlap Hemat Energi	1 Dokumen	1 Dokumen	Tidak ada	Tidak ada	
					Jumlah Dokumen Kebijakan ESDM	1 Kebijakan	1 Kebijakan	Tidak ada	Tidak ada	
					Jumlah juara SMP yang dikategorikan gedung hemat energi	3 juara	-	Terkendala Pembatasan Sosial Pandemi Covid-19 sehingga kegiatan belum bisa dilaksanakan dikarenakan siswa sekolah secara daring (online)	Melihat perkembangan pandemi covid-19	
					Jumlah masyarakat mengerti informasi jaringan gas bumi	300 orang	272 orang	Beberapa undangan/ peserta rapat tidak bisa meninggalkan aktivitas harian (pekerjaan)	Mengganti dengan peserta lain dengan sasaran yang sama	
				2 Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan	Jumlah Data Monevlap Hemat Energi dan kebijakan ESDM	2 Dokumen	2 Dokumen	Tidak ada	Tidak ada	
		Sekretariat Daerah (Bagian Pengadaan Barang dan Jasa)		**1 PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN**	**Persentase Pengadaan Barang dan Jasa yang diproses secara tender**	**100%**	**100%**	**Tidak ada**	**Tidak ada**	
				1 Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	**Persentase Perwali Petunjuk Teknis Pelaksanaan dan Pengendalian Kegiatan yang ditetapkan**	**100%**	**100%**	**Tidak ada**	**Tidak ada**	
				1 Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	Jumlah Perwali Petunjuk Teknis Pelaksanaan dan Pengendalian Kegiatan yang ditetapkan	1 PERWALI	1 PERWALI	Tidak ada	Tidak ada	
					Jumlah Perwali Petunjuk Teknis Pelaksanaan dan Pengendalian Kegiatan yang ditetapkan	1 perwali	1 perwali	Tidak ada	Tidak ada	
				2 Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	**Persentase Pengadaan Barang dan Jasa yang diproses secara tender**	**100%**	**100%**	**Tidak ada**	**Tidak ada**	

No	Urusan Pemerintahan	Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tinjut Rekom DPRD
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
				1 Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Pengadaan Barang dan Jasa yang diproses secara tender	92 paket	94 paket	Tidak ada	Tidak ada	
				2 Pengelolaan Layanan Pengadaan secara Elektronik	Jumlah Layanan Pengadaan secara elektronik yang dilaksanakan	170 layanan	184 layanan	Tidak ada	Tidak ada	
					Jumlah pengadaan barang jasa yang dilakukan secara elektronik	1100 paket	1226 paket	Adakalanya terjadi kerusakan Aplikasi Sistem Pengadaan Barang/Jasa secara elektronik	Koordinasi dengan LKPP dan LPSE untuk menangani aplikasi tersebut dan menambah jumlah Sistem Informasi PBJ (SPSE dan Amel)	
				3 Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah layanan pendampingan / konsultasi pengadaan barang / jasa	6 layanan	6 layanan	Tidak ada	Tidak ada	
		Sekretariat Daerah (Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan)		**1 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase sarana dan prasarana Sekretariat Daerah dalam kondisi baik**	**90%**	**96,69%**	**Tidak ada**	**Tidak ada**	
				1 Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	**Presentase Pelayanan Protokol dan Komunikasi Pimpinan Daerah**	**100%**	**117%**	**Tidak ada**	**Tidak ada**	
				1 Fasilitasi Keprotokolan	Jumlah kegiatan pimpinan daerah yang difasilitasi protokol	700 kegiatan	807 kegiatan	Tidak ada	Tidak ada	
				2 Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	Jumlah materi/bahan komunikasi pimpinan daerah yang disediakan	300 materi	372 kegiatan	Tidak ada	Tidak ada	
				3 Pendokumentasian Tugas Pimpinan	Jumlah kegiatan pimpinan daerah yang didokumentasikan	700 kegiatan	785 kegiatan	Tidak ada	Tidak ada	
		Sekretariat Daerah (Bagian Organisasi)		**1 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase penunjang urusan pemerintahan daerah yang terpenuhi**	**100%**	**100%**	**Tidak ada**	**Tidak ada**	
				1 Penataan Organisasi	**Persentase OPD yang tepat ukuran *(rightsizing)***	**100%**	**60,98%**	**- Adanya kebijakan terkait Penyederhanaan Struktur Organisasi (PSO) dan Penyetaraan Jabatan (PJ) sehingga kegiatan yang lain**	**- Menyelesaikan dahulu penyetaraan jabatan tahun 2021 baru tahun 2022 dilakukan penyusunan anjab - Menunggu sampai pandemic covid 19**	

No	Urusan Pemerintahan	Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan				Indikator	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tinjut Rekom DPRD
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)				(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
											tidak dapat terlaksana secara maksimal **- Rencana BIMTEK KELEMBAGAAN offline berubah menjadi online** **- Tidak mengikuti pameran pelayanan publik** **- Dana anggaran narasumber untuk tingkat nasional dan provinsi tidak terserap karena hanya bisa lolos sampai finalis kategori/tahap administrasi** **- Tidak ada kunjungan lapangan untuk SAKIP dan RB** **- Rencana BIMTEK SAKIP RB offline berubah menjadi online** **- Penyusunan LKJIP tidak jadi dilaksanakan oleh pihak ke-3**	**aman yang dinyatakan aman oleh pemerintah** **- Pameran pealyanan publik tergantung dari biro organisasi Surabaya, jadi jika dari biro organisasi tidak mengadakan dari bag organisasi juga tidak bida mengikuti acara tersebut** **- Akan merekrut honorarium non pns untuk tahun kedepannya** **- Akan melakukan kunjungan jika dari atasan sudah mengijinkan** **- Akan melaksanakan bimten untuk tahun berikutnya jika sudah ada persetujuan dari atasan** **- Dikarenakan kebijakan walikota tidak memperbolehkan untuk menggunakan jasa pihak ketiga**	
						1	Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Jumlah Laporan Anjab dan ABK, Evjab dan SKJ	25 Dokumen	25 Dokumen	Tidak ada	Tidak ada	
						2	Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Jumlah Pelayanan Publik yang mengikuti kompetisi inovasi	2 Proposal	2 Proposal	Tidak ada	Tidak ada	
								Jumlah Dokumen Tata Laksana	6 Dokumen	6 Dokumen	Tidak ada	Tidak ada	
						3	Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	jumlah rapat koordinasi pelaksanaan RB yang dilaksanakan	4 Kali	4 Kali	Tidak ada	Tidak ada	
						4	Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	jumlah pelayanan publik yang dievaluasi	3 PD	3 PD	Tidak ada	Tidak ada	

No	Urusan Pemerintahan	Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan				Indikator	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tinjut Rekom DPRD
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)				(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
						5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah LKJiP PD yang disusun tepat waktu dan sesuai aturan	25 PD	25 PD			
2	**Sekretariat DPRD**	**Sekretariat DPRD**	**Mengoptimalkan peningkatan sumber daya manusia Sekretariat DPRD dengan pendidikan dan pelatihan fungsional sesuai dengan tugas dan fungsinya**	**1**			**PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD**	**Persentase Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD yang terpenuhi**	**100%**	**97%**	**Dari 6 kegiatan yang ada, ada 2 kegiatan yg tidak memenuhi target yaitu kegiatan Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD dan kegiatan Peningkatan Kapasitas DPRD. Penyebabnya telah dijelaskan pada kolom masing2 kegiatan tsb.**	**Dijadwalkan ulang pada tahun mendatang**	
					1		**Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD**	**Persentase Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD yang difasiltasi**	**100%**	**67%**	**Dari 3 subkegiatan ada 1 subkegiatan yaitu Penyusunan Tata Tertib DPRD yang tidak dapat terlaksana, sehingga capaian rendah. Sub kegiatan tersebut tidak terlaksana karena pada tahun 2021 belum diperlukan adanya perubahan Tata Tertib DPRD**	**Dijadwalkan ulang pada tahun mendatang**	
						1	Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	Jumlah Pembahasan Rancangan Perda yang difasilitasi	4 kali	4 kali	Tidak ada	Tidak ada	
						2	Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan dan/atau Naskah Akademik	Jumlah Penyusunan Penjelasan/Keterangan dan/atau Naskah Akademik Raperda inisiatif DPRD yang difasilitasi	3 kali	3 kali	Tidak ada	Tidak ada	
						3	Penyusunan Tata Tertib DPRD	Jumlah Penyusunan Tata Tertib DPRD yang difasilitasi sesuai kebutuhan	1 kali	0 kali	Pada tahun 2021 belum diperlukan adanya perubahan Tata Tertib DPRD	Dijadwalkan ulang pada tahun mendatang	
					2		**Pembahasan Kebijakan Anggaran**	**Persentase Pembahasan Kebijakan Anggaran yang difasilitasi**	**100%**	**100%**	**Tidak ada**	**Tidak ada**	
						1	Pembahasan KUA dan PPAS	Jumlah Pembahasan KUA dan PPAS yang difasilitasi sesuai jadwal	1 kali	1 kali	Tidak ada	Tidak ada	

No	Urusan Pemerintahan	Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan				Indikator	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tinjut Rekom DPRD
(1)	(2)	(3)	(4)				(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
						2	Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang difasilitasi sesuai jadwal	1 kali	1 kali	Tidak ada	Tidak ada	
						3	Pembahasan APBD	Jumlah Pembahasan APBD yang difasilitasi sesuai jadwal	1 kali	1 kali	Tidak ada	Tidak ada	
						4	Pembahasan APBD Perubahan	umlah pembahasan APBD Perubahan yang difasilitasi sesuai jadwal	1 kali	1 kali	Tidak ada	Tidak ada	
						5	Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	Jumlah Pembahasan Pertanggungjawaban APBD yang difasilitasi sesuai jadwal	1 kali	1 kali	Tidak ada	Tidak ada	
					3		**Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan**	**Presentase Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan yang difasilitasi**	**100%**	**132%**	**Tidak ada**	**Tidak ada**	
						1	Pengawasan Urusan Pemerintahan bidang Pemerintahan dan Hukum	Jumlah Pengawasan Urusan Pemerintahan bidang Pemerintahan dan Hukum yang difasilitasi sesuai kebutuhan	8 kali	11 kali	Tidak ada	Tidak ada	
						2	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	Jumlah Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur yang difasilitasi sesuai kebutuhan	8 kali	13 kali	Tidak ada	Tidak ada	
						3	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	Jumlah Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat yang difasilitasi sesuai kebutuhan	8 kali	10 kali	Tidak ada	Tidak ada	
						4	Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah	Jumlah Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah yang difasilitasi sesuai jadwal	1 kali	1 kali	Tidak ada	Tidak ada	
					4		**Peningkatan Kapasitas DPRD**	**Persentase Peningkatan Kapasitas DPRD yang difasilitasi**	**100%**	**82%**	**Dari 3 subkegiatan ada 1 subkegiatan yaitu Bimbingan Teknis DPRD yang tidak dapat memenuhi target, sehingga capaian rendah. Subkegiatan tersebut tidak memenuhi target karena Bimtek Anggota DPRD yang**	**Dijadwalkan ulang pada tahun mendatang**	

No	Urusan Pemerintahan	Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tinjut Rekom DPRD
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
								dianggarkan 2X per-anggota, namun hanya beberapa anggota saja yang memanfaatkan fasilitas tersebut sesuai undangan yang diperoleh.		
				1 Bimbingan Teknis DPRD	Jumlah peserta bimbingan teknis DPRD yang difasilitasi sesuai kebutuhan	50 orang	23 orang	Dalam Perencanan Bimtek Anggota DPRD 2X per-anggota, namun hanya beberapa anggota saja yang memanfaatkan fasilitas tersebut sesuai undangan yang diperoleh	Dijadwalkan ulang pada tahun mendatang	
				2 Publikasi dan Dokumentasi Dewan	Jumlah transaksi Publikasi dan Dokumentasi Dewan yang dibayarkan	12 transaksi	12 transaksi	Tidak ada	Tidak ada	
				3 Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi	Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi	12 transaksi	12 transaksi	Tidak ada	Tidak ada	
				5 Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	**Persentase Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat yang difasilitasi**	**100%**	**100%**	**Tidak ada**	**Tidak ada**	
				1 Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD	Jumlah Pokok-Pokok Pikiran DPRD yang dapat disampaikan tepat waktu	1 dokumen	1 dokumen	Tidak ada	Tidak ada	
				2 Pelaksanaan Reses	Jumlah kegiatan reses yang difasilitasi	3 kali	3 kali	Tidak ada	Tidak ada	
				6 Fasilitasi Tugas DPRD	**Jumlah Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD yang dapat difasilitasi**	**100%**	**100%**	**Tidak ada**	**Tidak ada**	
				1 Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	Jumlah Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD yang dapat difasilitasi	59 kali	59 kali	Tidak ada	Tidak ada	

3.3.5 Pelaksanaan Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan

Tabel 3.15
Capaian Pelaksanaan Program dan Kegiatan Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan

No	Urusan Pemerintahan	Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tinjut Rekom DPRD
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
1	Perencanaan	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan	- Fasilitasi penyusunan Renstra dan Renja PD - Peningkatan Pengolahan Data dan Informasi Pembangunan Daerah - Peningkatan Pelaksanaan Kebijakan Perencanaan dan Penganggaran - Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Capaian Program	**1 PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH**	**Persentase dokumen perencanaan yang disusun tepat waktu**	**100%**	**100%**	**Tidak ada**	**Tidak ada**	
					Persentase ketersediaan data pembangunan	**100%**	**100%**	**Tidak ada**	**Tidak ada**	
					Persentase perangkat daerah yang tertib pelaporan kegiatan	**100%**	**100%**	**Tidak ada**	**Tidak ada**	
				1 Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	**Jumlah dokumen perencanaan dan pendanaan yang disusun**	**5 Dok**	**5 Dok**	**Tidak ada**	**Tidak ada**	
				1 Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	Jumlah Berita Acara hasil Musrenbang RKPD yang disepakati	2 Dok	2 Dok	Tidak ada	Tidak ada	
				2 Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen perencanaan pembangunan daerah yang disusun	3 Dok	3 Dok	Tidak ada	Tidak ada	
				2 Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	**Persentase ketersediaan data pembangunan**	**100%**	**100%**	**Tidak ada**	**Tidak ada**	
				1 Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Data Perencanaan Pembangunan	1 Dok	1 Dok	Tidak ada	Tidak ada	
					Jumlah data perencanaan pembangunan secara spasial	1 data layer	1 data layer	Tidak ada	Tidak ada	
				3 Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	**Persentase Perangkat Daerah yang tertib pelaporan kegiatan**	**100%**	**100%**	**Tidak ada**	**Tidak ada**	
				1 Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen laporan hasil monev, dana DAK dan dana APBN lainnya	1 Dok	1 Dok	Tidak ada	Tidak ada	

No	Urusan Pemerintahan	Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tinjut Rekom DPRD
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
				2 Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Jumlah perangkat daerah yang dimonitoring dan evaluasi capaian kinerja	32 PD	32 PD	Tidak ada	Tidak ada	
				2 PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	**Persentase indikator program perangkat daerah mitra Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia yang tercapai**	**90%**	**94%**	**Tidak ada**	**Tidak ada**	
					Persentase indikator program perangkat daerah mitra Bidang Perekonomian dan SDA yang tercapai	**90%**	**100%**	**Tidak ada**	**Tidak ada**	
					Persentase indikator program perangkat daerah mitra Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan yang tercapai	**90%**	**96%**	**Tidak ada**	**Tidak ada**	
				1 Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	**Persentase Dokumen Monitoring dan Evaluasi Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia yang disusun**	**100%**	**100%**	**Tidak ada**	**Tidak ada**	
					Persentase Laporan Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia yang disusun	**100%**	**100%**	**Tidak ada**	**Tidak ada**	
				1 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Laporan Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Bidang Pemerintahan	12 laporan	12 laporan	Tidak ada	Tidak ada	
				2 Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah dokumen monitoring bidang pemerintahan	1 Dok	1 Dok	Tidak ada	Tidak ada	
				3 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan	Jumlah Laporan Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Bidang Pembangunan Manusia	14 laporan	14 laporan	Tidak ada	Tidak ada	

No	Urusan Pemerintahan	Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tinjut Rekom DPRD
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
				Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)						
				4 Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah dokumen monitoring dan evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan bidang pembangunan manusia	2 Dok	2 Dok	Tidak ada	Tidak ada	
				2 Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	**Persentase dokumen perencanaan dan laporan monev bidang perekonomian dan SDA yang disusun**	**100%**	**100%**	**Tidak ada**	**Tidak ada**	
				1 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah dokumen perencanaan bidang perekonomian yang disusun	2 Dok	2 Dok	Tidak ada	Tidak ada	
				2 Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah laporan monitoring dan evaluasi bidang perekonomian	4 laporan	4 laporan	Tidak ada	Tidak ada	
				3 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah dokumen perencanaan bidang sumber daya alam yang disusun	5 Dok	5 Dok	Tidak ada	Tidak ada	
				4 Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Jumlah laporan monitoring dan evaluasi bidang SDA	2 laporan	2 laporan	Tidak ada	Tidak ada	
				3 Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	**Persentase dokumen perencanaan dan laporan monev bidang infrastruktur yang disusun**	**100%**	**100%**	**Tidak ada**	**Tidak ada**	
				1 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah dokumen perencanaan bidang infrastruktur yang disusun	4 Dok	4 Dok	Tidak ada	Tidak ada	
				2 Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan	Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Bidang Infrastruktur	4 laporan	4 laporan	Tidak ada	Tidak ada	

No	Urusan Pemerintahan	Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tinjut Rekom DPRD
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
				Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur						
2	Keuangan	Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah	Intensifikasi pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah dengan perkuat basis data dan potensi pajak daerah	**1 PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH**	**Persentase Pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah**	**11%**	**10.50%**	**Pemberlakuan PPKM berpengaruh thd kegiatan yang dilakukan khususnya dalam kegiatan yg bersifat mengumpulkan Wajib Pajak**	**Membatasi peserta kegiatan**	
				1 Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	**Prosentase Realisasi Pajak Daerah**	**100%**	**93.90%**	**Pemberlakuan PPKM berpengaruh thd kegiatan yang dilakukan khususnya dalam kegiatan yg bersifat mengumpulkan Wajib Pajak**	**Membatasi peserta kegiatan**	
				1 Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah	Monitoring dan Evaluasi Pendapatan Daerah	5 Jenis	4 Jenis	Terdapat mata anggaran belanja yang tidak sesuai dengan kebutuhan belanja	Menyesuaikan belanja sesuai dengan kebutuhan, sehingga terdapat sisa lebih anggaran	
				2 Monitoring dan evaluasi pendapatan daerah	Jumlah monev pendapatan daerah	5 Jenis Obyek	5 Jenis Obyek Pajak	Tidak ada	Tidak ada	
				3 Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	Jumlah Potensi Pajak Daerah yang Disusun	1 Laporan	1 Laporan	Tidak ada	Tidak ada	
				4 Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Presentase Piutang Pajak Daerah Tertagih	10%	10.26%	Tidak ada	Tidak ada	
				5 Pengolahan, Pemeliharaan dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Jumlah Kecamatan yang dilakukan Update data Obyek Pajak	1 Kecamatan	1 kecamatan	Tidak ada	Tidak ada	
			Meningkatnya kemandirian keuangan Daerah	1 **PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH**	**Opini BPK terhadap laporan keuangan**	**WTP**	**-** Belum diumumkan	**Tidak ada**	**Tidak ada**	
				1 Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	**Persentase dokumen rencana anggaran daerah yang disusun tepat waktu**	**100%**	**100%**	**Tidak ada**	**Tidak ada**	
				1 Koordinasi dan Penyusunan KUA Dan PPAS	Jumlah dokumen KUA dan PPAS yang disusun dan tepat waktu	2 dokumen	2 dokumen	Tidak ada	Tidak ada	
				2 Koordinasi Dan Penyusunan Perubahan KUA Dan Perubahan PPAS	Jumlah dokumen perubahan KUA dan perubahan PPAS yang disusun tepat waktu	2 dokumen	2 dokumen	Tidak ada	Tidak ada	

No	Urusan Pemerintahan	Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan		Indikator	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tinjut Rekom DPRD
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
				3	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah Tentang APBD Dan Peraturan Kepala Daerah Tentang Penjabaran APBD	Jumlah dokumen Perda APBD dan Perwali penjabaran APBD yang disusun dan tepat waktu	2 dokumen	2 dokumen	Tidak ada	Tidak ada	
				4	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah Tentang Perubahan APBD Dan Peraturan Kepala Daerah Tentang Penjabaran Perubahan APBD	Jumlah dokumen Perda Perubahan APBD dan Perwali penjabaran Perubahan APBD yang disusun dan tepat waktu	2 dokumen	2 dokumen	Tidak ada	Tidak ada	
			Terwujudnya Akuntabilitas Keuangan dan Aset Daerah	**2**	**Kegiatan Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah**	**Persentase pelayanan pengelolaan perbendaharaan daerah**	**100%**	**100%**	**Tidak ada**	**Tidak ada**	
				1	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	Jumlah OPD yang dilakukan monev pengelolaan kas dan laporan keuangan daerah	35 OPD	35 OPD	Tidak ada	Tidak ada	
				2	Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan Atas SP2D dengan Instansi Terkait	Jumlah SP2D yang diproses sesuai SOP	7.500 SP2D	12.448 SP2D	Tidak ada	Tidak ada	
				3	Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	Jumlah juknis pengelolaan keuangan daerah dan kebijakan akuntansi yang disusun	1 Dokumen	1 Dokumen	Tidak ada	Tidak ada	
				4	Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Peserta Bimbingan teknis paket regulasi pengelolaan keuangan daerah	225 orang	225 orang	Tidak ada	Tidak ada	
				3	**Koordinasi Dan Pelaksanaan Akuntansi Dan Pelaporan Keungan Daerah**	**Persentase laporan keuangan OPD yang disusun tepat waktu dan sesuai SAP**	**100%**	**100%**	**Tidak ada**	**Tidak ada**	
				1	Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban	Jumlah OPD yang melaksanakan rekonsiliasi data sistem informasi pengelolaan keuangan daerah	35 OPD	35 OPD	Tidak ada	Tidak ada	
				2	Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban	Jumlah dokumen laporan keterangan	7 Jenis	7 Jenis	Tidak ada	Tidak ada	

No	Urusan Pemerintahan	Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan				Indikator	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tinjut Rekom DPRD
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)				(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
							Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	pertanggungjawaban yang disusun					
			Terwujudnya Akuntabilitas Keuangan dan Aset Daerah	**1**	**PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH**			**Persentase aset daerah yang dikelola dengan baik**	**90%**	**99,327%**	**Tidak ada**	**Tidak ada**	
					1	**Pengelolaan Barang Milik Daerah**		**Persentase barang milik daerah yang dikelola**	**90%**	**99,327%**	**Tidak ada**	**Tidak ada**	
						1	Pengamanan Barang Milik Daerah	Jumlah aset tanah yang tersertifikat	100 sertifikat	123 sertifikat	Kegiatan tidak terlaksana karena narasumber berhalangan hadir - pemeliharaan R2 masuk rusak berat tidak boleh diperbaiki	Melakukan koordinasi lebih lanjut	
						2	Penilaian Barang Milik Daerah	Jumlah aset yang direvaluasi	4 jenis	5 jenis	Ada satu kegiatan penilaian yg belum terlaksana dikarenakan perlu verifikasi ke OPD	Melakukan koordinasi lebih lanjut	
						3	Penyusunan Standar Harga	Jumlah dokumen satuan standar harga yang disusun	3 dokumen	3 dokumen	Proses sosialisasi tidak bisa dilakukan secara offline	Dilakukan sosialisasi secara online	
						4	Penyusunan perencanaan kebutuhan milik daerah	jumlah rencana kebutuhan barang milik daerah yang disusun	63 laporan	74 Laporan	Ada kegiatan yang tidak dilakukan secara offline	Koordinasi kegiatan secara online	
								Jumlah laporan penatausahaan barang milik daerah	12 laporan	12 Laporan	Tidak ada	Tidak ada	
						5	Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah	Jumlah data aset daerah yang di update	5 data	4 data	Tidak ada	Tidak ada	
								Jumlah laporan pelaksanaan pemanfaatan barang milik daerah	12 laporan	12 Laporan	Tidak ada	Tidak ada	
3	**Kepegawaian**	**Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia**	**- Penyusunan Formasi Kebutuhan dan Rekruitmen** **- Pelaksanaan Uji dan Pemetaan Kompetensi Aparatur** **- Mutasi, Rotasi, dan Promosi Aparatur berdasarkan hasil Pemetaan Kompetensi**	**1**	**PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH**			**Indeks Penerapan Sistem Merit**	**Baik**	**Baik**	**Tidak ada**	**Tidak ada**	
					1	Mutasi dan Promosi ASN		jumlah Aparatur yang mengalami Rotasi, Mutasi, Kenaikan Pangkat	150 orang	321 orang	Tidak ada	Tidak ada	
					2	Pengembangan Kompetensi ASN		Presentase Aparatur yang telah dilakukan Pemetaan Kompetensi	20%	14%	Belum seluruh ASN dilakukan uji kompetensi, hanya untuk pejabat struktural dikarenakan keterbatasan anggaran	Melakukan uji Kompetensi kepada ASN yang belum dilakukan penilaian dan pemetaan kompetensi	
					3	Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN		Jumlah ASN pensiun yang diproses dan usulan	300 orang	300 orang	Tidak terlaksananya proses seleksi PPPK dikarenakan proses	Lebih cermat dalam menyusun anggaran.	

No	Urusan Pemerintahan	Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan			Indikator	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tinjut Rekom DPRD
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)			(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
			- **Layanan Kepegawaian berbasis IT** - **Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Aparatur** - **Pengukuran Kinerja berbasis IT** - **Monitoring dan Evaluasi data kehadiran**				Formasi ASN yang diajukan			seleksi di ambil alih oleh Provinsi. BKPSDM hanya melaksanakan proses seleksi CPNS pada Tahun 2021.		
					4	Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Rata-rata nilai kinerja aparatur	90	86,72	Banyak PNS yang belum memahami secara menyeluruh aplikasi E Kinerja pada aspek penilaian perilaku yang sudah menerapkan penilaian Perilaku 360'	Memberikan pendampingan kepada seluruh OPD dalam mengisi SKP dan memberikan sosialisasi terkait SKP berdasarkan ketentuan Permenpan Nomor 8 Tahun 2021	
4	**Pendidikan dan Pelatihan**	**Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia**		**2**	**PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA**		**Persentase PNS yang mengikuti kegiatan pengembangan kompetensi minimal 20 JP dalam satu tahun**	**9.54%**	**28,95%**	**Tidak ada**	**Tidak ada**	
					1	Pengembangan Kompetensi Teknis	Persentase Pendidikan dan Pelatihan Teknis yang dilaksanakan sesuai rencana	100%	100%	Tidak ada	Tidak ada	
					2	Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	Persentase PNS yang mendapatkan sertifikat pengembangan kompetensi manajerial dan fungsional	100%	100%	Tidak ada	Tidak ada	
5	**Penelitian dan Pengembangan**	**Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan**	- **Peningkatan Publikasi Hasil Penelitian, Kajian dan Inovasi Daerah** - **Pemanfaatan dan Pengoptimalan Teknologi**	**1**	**PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN**		**Persentase hasil Penelitian yang ditindaklanjuti dengan Kebijakan**	**100%**	**100%**	**Tidak ada**	**Tidak ada**	
					1	**Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan**	**Jumlah Dokumen Updating data Penelitian/Kajian**	**1 Dok**	**1 Dok**	**Tidak ada**	**Tidak ada**	
							Persentase hasil Penelitian yang ditindaklanjuti	**100%**	**100%**	**Tidak ada**	**Tidak ada**	
						1 Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Otonomi Daerah	Jumlah Dokumen Penelitian Bidang Penyelenggaraan Otonomi Daerah yang disusun	1 Dok	1 Dok	- SOP Penelitian belum berjalan secara optimal - Kesulitan dalam memenuhi kebutuhan data penelitian	- Memenuhi semua kelengkapan berkas administrasi tepat waktu - Melakukan koordinasi secara intens dengan pihak penyedia jasa konsultansi - Menyusun jadwal rapat koordinasi dengan penyedia dan PD	

No	Urusan Pemerintahan	Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tinjut Rekom DPRD
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
									terkait - Membuat surat pengantar dan menyusun jadwal survey ke PD terkait	
				2 Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan Umum	Jumlah Dokumen Penelitian Bidang Pemerintahan Umum yang disusun	4 Dok	4 Dok	- SOP Penelitian belum berjalan secara optimal - Kesulitan dalam memenuhi kebutuhan data penelitian	- Memenuhi semua kelengkapan berkas administrasi tepat waktu - Melakukan koordinasi secara intens dengan pihak penyedia jasa konsultansi - Menyusun jadwal rapat koordinasi dengan penyedia dan PD terkait - Membuat surat pengantar dan menyusun jadwal survey ke PD terkait	
				3 Pengelolaan Data Kelitbangan dan Peraturan	Jumlah Dokumen Updating data Penelitian/Kajian	1 Dok	1 Dok	- Tidak semua usulan sesuai dengan prioritas pembangunan - Sebagian besar usulan tidak sesuai kriteria dan seharusnya masuk dalam musrenbang	- Menginformasikan prioritas pembangunan daerah melalui surat - Mengadakan rapat koordinasi dengan PD, Kelurahan, LPM dan akademisi untuk mengevaluasi usulan penelitian	
				2 Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	**Persentase Hasil Penelitian yang ditindaklanjuti**	**100%**	**100%**	**Tidak ada**	**Tidak ada**	
				1 Penelitian dan Pengembangan Pekerjaan Umum	Jumlah Dokumen Penelitian Bidang Pekerjaan Umum yang disusun	7 Dok	7 Dok	- SOP Penelitian belum berjalan secara optimal - Kesulitan dalam memenuhi kebutuhan data penelitian	- Memenuhi semua kelengkapan berkas administrasi tepat waktu - Melakukan koordinasi secara intens dengan pihak penyedia jasa konsultansi - Menyusun jadwal rapat koordinasi dengan penyedia dan PD terkait - Membuat surat pengantar dan menyusun jadwal survey ke PD terkait	

No	Urusan Pemerintahan	Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tinjut Rekom DPRD
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
				3 Pengembangan Inovasi dan Teknologi	**Persentase Hasil Penelitian/Kajian yang di diseminasikan**	**100%**	**100%**	**Tidak ada**	**Tidak ada**	
				1 Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan	Jumlah Judul Penelitian/Kajian yang di Diseminasikan	9 Jenis	9 Jenis	Peserta yang hadir tidak tepat sasaran (bukan merupakan pejabat yang berwenang dibidangnya)	Melakukan koordinasi dengan perangkat daerah terkait dalam penentuan peserta diseminasi	

3.3.6 Pelaksanaan Unsur Kewilayahan

Tabel 3.16
Capaian Pelaksanaan Program dan Kegiatan Unsur Kewilayahan

No	Urusan Pemerintahan	Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tinjut Rekom DPRD
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
1	Kecamatan	Kecamatan Prajuritkulon	Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam Pembangunan	**1 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Persentase Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan (LKK) Aktif**	**100%**	**100%**	**Tidak ada**	**Tidak ada**	
					Pertumbuhan Swadaya Masyarakat	**8,50%**	**8,60%**	**Tidak ada**	**Tidak ada**	
					Persentase Kelurahan dengan Kategori cepat berkembang	**83,3%**	**83,3%**	**Tidak ada**	**Tidak ada**	
				1 Pemberdayaan Kelurahan	**Persentase kegiatan pemberdayaan kelurahan yang dilaksanakan**	**100%**		**Tidak ada**	**Tidak ada**	
				1 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Dokumen Musrenbang yang disusun	1 dokumen	1 dokumen	Tidak ada	Tidak ada	
				2 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah bulan kegiatan organisasi perempuan yang terfasilitasi Jumlah Festival dan Peringatan Hari Besar Nasional yang diikuti dan diselenggarakan Jumlah kegiatan pemberdayaan Masyarakat yang dilaksanakan Jumlah lembaga dan organisasi masyarakat kelurahanyang terfasilitasi	12 bulan 6 kegiatan 19 kegiatan 50 kegiatan	12 bulan 6 kegiatan 19 kegiatan 50 kegiatan	Tidak ada	Tidak ada	
				3 Evaluasi Kelurahan	Jumlah Lomba – Lomba Kelurahan yang dilaksanakan	3 kegiatan	2 kegiatan	Lomba kasih setia ditiadakan		
				2 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	**Persentase koordinasi kegiatan ketentraman dan ketertiban umum yang dilaksanakan**	**100%**	**100%**	**Tidak ada**	**Tidak ada**	

No	Urusan Pemerintahan	Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tinjut Rekom DPRD
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
				1 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	**Presentase Koordinasi Ketenraman dan Ketertiban yang dilaksanakan**	**100%**	**100%**	**Tidak ada**	**Tidak ada**	
				1 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban yang dilaksanakan	12 bulan	12 bulan	Tidak ada	Tidak ada	
		Kecamatan Magersari		**1 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Persentase Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan (LKK) aktif**	**98,5%**	**98,5%**	**Tidak ada**	**Tidak ada**	
					Pertumbuhan swadaya masyarakat	**5%**	**8%**	**Tidak ada**	**Tidak ada**	
					Kelurahan dengan kategori sangat berkembang	**100%**	**100%**	**Tidak ada**	**Tidak ada**	
				1 Pemberdayaan Masyarakat	**Persentase Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan yang dilaksanakan**	**100%**	**100%**	**Tidak ada**	**Tidak ada**	
				1 Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Dokumen Musrenbang RKPD yang disusun	7 Dokumen	7 Dokumen	Tidak ada	Tidak ada	
				2 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Festival dan PHBN yang diikuti dan diselenggarakan	5 Kegiatan	3 Kegiatan	Kegiatan PHBN yang ada di Kecamatan mengikuti kegiatan PHBN yang diselenggarakan oleh Kota. Dikarenakan adanya PPKM maka beberapa kegiatan PHBN tidak dilaksanakan	Berkoordinasi dengan pihak penyelenggara kegiatan terkait semua kegiatan PHBN	
					Jumlah Kegiatan Organisasi Perempuan yang Fasilitasi	16 Kegiatan	14 Kegiatan	Ada kegiatan PKK yang tidak dilaksanakan setiap bulan dikarenakan ada PPKM	Tahun 2022 dilaksanakan secara rutin dengan memperhatikan prokes	
					Jumlah Kegiatan Organisasi masyarakat kelurahan yang terfasilitasi	10 Kegiatan	9 Kegiatan	Kegiatan verifikasi uang duka dilaksanakan hanya 1 kali saja dari rencana yang semula 3 kali karena pengajuan uang duka tahun 2021	Verifikasi pada tahun 2022 dilaksanakan setiap ada pengajuan uang duka	

No	Urusan Pemerintahan	Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tinjut Rekom DPRD
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
								dilaksanakan 1 kali pada akhir tahun dikarenakan uang duka tersedia waktu PAK		
					Jumlah Kelompok Usaha Bersama (KUBE) yang difasilitasi	125 Kelompok	125 Kelompok			
					Jumlah dokumen Kader Motivator yang honorariumnya dibayar tepat waktu (laporan)	72 laporan	72 laporan			
					Jumlah HIBAH yang diterima masyarakat (orang/Lembaga)	18 lembaga	18 lembaga			
					Jumlah kegiatan LPM yang difasilitasi kegiatannya	36 kegiatan	36 kegiatan			
					Jumlah jenis kegiatan bidang Kesehatan dan penanganan Covid19 yang dilaksanakan	35 Kegiatan	35 Kegiatan			
					Jumlah keluarga yang menerima santunan uang duka	269 keluarga	269 keluarga			
					Jumlah posyandu balita dan lansia yang menerima bantuan sarana dan prasarana	10 posyandu	0	Karena adanya refocusing dan rasionalisasi anggaran		
					Jumlah laporan pengelola kegiatan yang honornya dibayarkan tepat waktu	72 laporan	72 Laporan			
					Jumlah laporan bantuan sosial yang diserahkan ke masyarakat biopori dan timbangan bak sampah	12 laporan	0	Karena adanya refocusing dan rasionalisasi anggaran		
				3 Evaluasi Kelurahan	Jumlah Lomba - Lomba Kelurahan yang dilaksanakan	2 lomba	1 lomba	Karena adanya pandemi covid19, sehingga untuk pelaksanaan lomba yang direncanakan pada bulan Maret 2021 tidak dapat terlaksana	Melakukan verifikasi data yang sudah diisi oleh Kelurahan di aplikasi Epdeskel dan melakukan pemeringkatan. Untuk skor tertinggi dikirim sebagai peserta lomba Kelurahan tingkat Kota	
				2 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	**Persentase Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum yang dilaksanakan**	**100%**	**100%**	**Tidak ada**	**Tidak ada**	
				1 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan	**Persentase Koordinasi Penyelenggaraan**	**100%**	**100%**	**Tidak ada**	**Tidak ada**	

No	Urusan Pemerintahan	Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tinjut Rekom DPRD
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
				Ketentraman dan Ketertiban Umum	**Ketentraman dan Ketertiban Umum yang dilaksanakan**					
				1 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Koordinasi Pengendalian Ketentraman dan Ketertiban Umum yang dilaksanakan	12 Kegiatan	12 Kegiatan	Tidak ada	Tidak ada	
				2 Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Sosialisasi dengan tokoh Agama dan tokoh masyarakat yang dilaksanakan	6 Kegiatan	4 Kegiatan	Karena adanya pandemi covid19 ada kegiatan yang tidak terlaksana karena apabila tetap dilaksanakan memungkinkan kerumunan	Melakukan kegiatan monitoring dan evaluasi terkait dengan kegiatan harmonisasi hubungan dengan tokoh agama dan tokoh masyarakat di masing – masing kelurahan	
		Kecamatan Kranggan	**Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan**	**1 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Persentase Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan (LKK) aktif**	**100%**	**100%**	**Tidak ada**	**Tidak ada**	
					Pertumbuhan swadaya masyarakat	**5%**	**5,2%**	**Tidak ada**	**Tidak ada**	
					Kelurahan dengan kategori sangat berkembang	**75%**	**100%**	**Tidak ada**	**Tidak ada**	
				1 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	**Persentase kegiatan pemberdayaan kelurahan yang dilaksanakan**	**100%**	**100%**	**Tidak ada**	**Tidak ada**	
				1 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Dokumen Musrenbang yang disusun	7 Dokumen	7 Dokumen	Tidak ada	Tidak ada	
				2 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Festival dan PBHN yang diikuti dan diselenggarakan	12 Kegiatan	20 Kegiatan	Tidak ada	Tidak ada	
					Jumlah kegiatan organisasi masyarakat kelurahan yang difasilitasi	12 Kegiatan	18 Kegiatan	Tidak ada	Tidak ada	
					Jumlah kegiatan organisasi perempuan yang difasilitasi	12 Kegiatan	19 Kegiatan	Tidak ada	Tidak ada	
				3 Evaluasi Kelurahan	Jumlah lomba yang diadakan	2 lomba	2 lomba	Tidak ada	Tidak ada	

No	Urusan Pemerintahan	Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tinjut Rekom DPRD
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
				2 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	**Persentase koordinasi penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum yang dilaksanakan**	**100%**	**100%**	**Tidak ada**	**Tidak ada**	
				1 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	**Persentase Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang telah dilaksanakan**	**100%**	**100%**	**Tidak ada**	**Tidak ada**	
				1 SInergitas dengan kepolisian NKRI, TNI,dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah kegiatan Sinergitas dengan Kepolisian NKRI, TNI, dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	12 kegiatan	12 kegiatan	Tidak ada	Tidak ada	
				2 Harmonisasi Hubungan Dengan Toko Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah kegiatan Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat yang telah dilaksanakan	12 Kegiatan	12 Kegiatan	Tidak ada	Tidak ada	

3.3.7 Pelaksanaan Unsur Pemerintahan Umum

Tabel 3.17
Capaian Pelaksanaan Program dan Kegiatan Urusan Pemerintahan Umum

No	Urusan Pemerintahan	Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tinjut Rekom DPRD
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
1	**Kesatuan Bangsa dan Politik**	**Badan Kesatuan Bangsa dan Politik**		**1 PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN**	**Prosentase masyarakat yang mengikuti pendidikan wawasan kebangsaan dan pembinaan ideologi**	**4,9%**	**4,41%**	**- Karena adanya pandemi covid 19 maka ada beberapa kegiatan yang tidak terlaksana**	**- Beberapa kegiatan dilaksanakan secara virtual**	
				1 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	**Jumlah pembinaan ideologi dan pendidikan wawasan kebangsaan**	**49 kali**	**34 kali**	**Tidak ada**	**Tidak ada**	
				1 Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan bangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah perusahaan swasta yang dibina wawasan kebangsaan	1 kali	1 kali	Tidak ada	Tidak ada	
					Jumlah peserta bela negara. cerdas dan revolusi mental	4 kali	4 kali	Tidak ada	Tidak ada	
					Jumlah peserta pendidikan wawasan kebangsaan	13 kali	7 kali	Tidak ada	Tidak ada	
					Jumlah upacara rutin, hari besar nasional, HUT Kemerdekaan RI, hari jadi Kota yang diselenggarakan sesuai SOP	14 kali	12 kali	Tidak ada	Tidak ada	
					Jumlah Rakor DP dan pengurus, FPK, sosialisasi Pembauran kebangsaan	11 kali	10 kali	Tidak ada	Tidak ada	
				2 PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	**Prosentase LSM/ Ormas/ Parpol yang aktif**	**68,55%**	**68,55%**	Belum optimalnya realisasi kegiatan Fokus Group Discussion (FGD) Peningkatan berdemokrasi (2 kegiatan) dikarenakan terkendala sinkronisasi kegiatan di akhir tahun anggaran	Perencanaan kegiatan akan dilakukan evaluasi untuk diprioritaskan realisasinya maksimal pada triwulan ketiga	
				1 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan	**Jumlah pemantauan perkembangan politik,**	**35 kali**	**35 kali**	**Tidak ada**	**Tidak ada**	

No	Urusan Pemerintahan	Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tinjut Rekom DPRD
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
				Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	**verifikasi bantuan keuangan Parpol dan Parpol yang dibina**					
				1 Pelaksanaan Kebijakan Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik Di Daerah	Jumlah laporan pemantauan perkembangan politik, verifikasi bantuan keuangan Parpol	4 laporan	4 laporan	Tidak ada	Tidak ada	
					Jumlah Parpol yang terdaftar dan yang dibina	9 Parpol	9 Parpol	Tidak ada	Tidak ada	
					Jumlah peserta pendidikan politik masyarakat	10 kali	10 kali	Tidak ada	Tidak ada	
				3 PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	**Persentase LSM/Ormas yang aktif**	**68,55%**	**68,55%**	**Tidak ada**	**Tidak ada**	
				1 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	**Jumlah LSM/Ormas yang dibina dan dimonitoring**	**4 kali**	**50 kali**	**Tidak ada**	**Tidak ada**	
				1 Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah LSM/Ormas yang mengikuti forum diskusi antar Ormas	100 orang	100 orang	Tidak ada	Tidak ada	
					Jumlah LSM/Ormas yang berpartisipapasi dalam jamboree	100 orang	100 orang	Tidak ada	Tidak ada	
					Jumlah Parpol/ LSM/ Ormas yang dibina	200 Ormas	200 Ormas	Tidak ada	Tidak ada	
				4 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	**Persentase konflik SARA yang ditangani**	**100%**	**100%**	- Belum optimalnya realisasi kegiatan Fokus Group Discussion (FGD) Peningkatan Berdemokrasi (2 kegiatan) dikarenakan terkendala sinkronisasi kegiatan	- Perencanaan kegiatan akan dilakukan evaluasi untuk diprioritaskan realisasinya maksimal pada triwulan ketiga	

No	Urusan Pemerintahan	Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tinjut Rekom DPRD
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
								di akhir tahun anggaran		
				1 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan	**Jumlah pelaksanaan pekerjaan bidang ketahanan ekonomi, sosial dan budaya**	**23 kali**	**23 kali**	**Tidak ada**	**Tidak ada**	
				1 Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Rakor FKUB	10 kali	10 kali	Tidak ada	Tidak ada	
					Jumlah konflik SARA yang ditangani	8 kali	8 kali	Tidak ada	Tidak ada	
					Jumlah Rakor Tim Instruksi Hari Besar Keagamaan	5 kali	5 kali	Tidak ada	Tidak ada	
				5 PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	**Persentase konflik Ipoleksosbud yang ditangani**	**100%**	92,86%	- Menurut Peraturan Perundang-undangan, masyarakat diperbolehkan menyampaikan pendapat didepan umum - Mediasi yang dilakukan Bakesbangpol belum menghasilkan kesepakatan sehingga terjadi demo /unjuk rasa	- Rapat koordinasi yang difasilitasi oleh Bakesbangpol dalam rangka upaya mediasi dan mencegah adanya demo yang akan dilakukan agar tidak sampai anarkis - Bakesbangpol kedepan akan melakukan komunikasi yang lebih itensif agar terjadi kesepakatan guna mencegah terjadinya demo/ unjuk rasa, sehingga keamanan dan ketertiban wilayah Kota Mojokerto tetap kondusif dan stabilitas politik di daerah tetap terjaga	
				1 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	**Jumlah pelaksanaan pemantapan kewaspadaan nasional dan penanganan konflik social**	**60 kali**	**60 kali**	**Tidak ada**	**Tidak ada**	
				1 Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing,	Jumlah pembinaan FKDM dan ketahanan bangsa	10 kali	10 kali	Tidak ada	Tidak ada	
					Jumlah pembinaan wilayah	12 kali	12 kali	Tidak ada	Tidak ada	

No	Urusan Pemerintahan	Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tinjut Rekom DPRD
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
				Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah pelatihan Intelijen I dan II	2 kali	2 kali	Tidak ada	Tidak ada	
					Jumlah Rakor Tim PKS	10 kali	10 kali	Tidak ada	Tidak ada	
				2 Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Silaturahmi Forkopimda,Tim Pora,Tim Verifikasi Hubah dan Hibah	46 kali	46 kali	Tidak ada	Tidak ada	

3.4 KEBIJAKAN STRATEGIS YANG DITETAPKAN

Hasil penyelenggaraan urusan pemerintahan pada Pemerintah Kota Mojokerto tidak terlepas dari kebijakan strategis yang ditetapkan. Pada prinsipnya kebijakan strategis yang ditetapkan memiliki dampak secara luas terhadap masyarakat serta ditetapkan melalui peraturan perundang-undangan yang berlaku. Laporan tentang kebijakan strategis yang ditetapkan oleh Walikota Mojokerto pada tahun 2021, dapat dilihat sebagaimana tabel di bawah ini.

Tabel 3. 18 Kebijakan Strategis Pemerintah Kota Mojokerto Tahun 2021

No	Kebijakan Srategis	Dasar Hukum	Tujuan/Masalah Yang Diselesaikan
1	Peningkatan Upaya Pengelolaan Sampah	Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 1 Tahun 2021Tentang Pengelolaan Sampah	Meningkatkan kesehatan masyarakat dan kualitas lingkungan serta menjadikan sampah sebagai sumber daya.
2	Bahwa Kota Mojokerto sebagai kota perdagangan, jasa dan bisnis memiliki potensi perekonomian yang perlu dioptimalisasikan menjadi produk unggulan yang menciptakan nilai tambah melalui pengembangan Ekonomi Kreatif dan Kewirausahaan untuk memajukan kesejahteraan umum sebagaimana diamanatkan oleh Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945	Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 4 Tahun 2021 tentang Ekonomi Kreatif dan Kewirausahaan	- Mendorong daya saing produk barang atau jasa agar memiliki nilai tambah sesuai dengan perkembangan kebudayaan, teknologi, kreativitas, inovasi daerah, dan perubahan lingkungan perekonomian global. - Meningkatkan kesejahteraan warga masyarakat Kota Mojokerto dan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah; - Menciptakan ekosistem Ekonomi Kreatif dan Kewirausahaan di Kota Mojokerto; - Menciptakan peluang dan memperluas lapangan pekerjaan yang berpihak pada nilai seni dan budaya serta sumber daya ekonomi lokal; - Mengoptimalkan potensi Pelaku Ekonomi Kreatif menjadi Wirausaha Kreatif; - Melindungi hasil kreativitas Pelaku Ekonomi Kreatif; - Mengarusutamakan Ekonomi Kreatif dan

			Kewirausahaan dalam Rencana Pembangunan Daerah; - Menumbuhkembangkan semangat Ekonomi Kreatif dan Kewirausahaan yang inovatif dalam rangka membangun perekonomian Kota Mojokerto berdasarkan demokrasi ekonomi yang berkeadilan; - Memberikan dasar hukum Pengembangan Ekonomi Kreatif dalam rangka mencapai perlindungan yang efektif dan efisien berdasarkan kepastian hukum dan keadilan; dan - Meningkatkan partisipasi masyarakat dan Pelaku Ekonomi Kreatif dalam Pengembangan Ekonomi Kreatif.
3	Menghadapi masalah kemiskinan dan kerawanan pangan dengan pemenuhan hak dan kebutuhan pangan bagi Keluarga Penerima Manfaat	Perwali Nomor 3 Tahun 20021 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Pangan Non Tunai Kota Mojokerto	Mengurangi beban pengeluaran para Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dalam memenuhi kebutuhan pangan
4	Pengurangan atas ketetapan Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan	Perwali Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pemberian Pengurangan atas Ketetapan Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan Tahun 2021	Meringankan beban hidup wajib pajak pada masa pandemi Covid-19
5	Menunjang pelaksanaan Program Jaring Pengaman Sosial di Kota Mojokerto	Perwali Nomor 9 Tahun 2021 tentang Petunjuk Pelaksanaan Bantuan Sosial untuk Penanganan Corona Virus Disease 2019 di Kota Mojokerto Tahun 2021	Memudahkan proses penyaluran bantuan sosial Covid-19 dari pemerintah baik berupa uang maupun sembako untuk penduduk miskin atau tidak mampu atau terdampak atau rentan terdampak akibat pandemi Covid-19
6	Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat Kota Mojokerto	Perwali Nomor 10 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 7 Tahun 2018 tentang Kawasan Tanpa Rokok	Memberikan perlindungan bagi masyarakat dari dampak rokok yang dapat membahayakan kesehatan manusia, memberikan jaminan perolehan lingkungan udara

			yang bersih dan sehat bagi masyarakat, mengurangi angka kesakitan dan kematian akibat rokok dan paparan asapnya serta mencegah dan menekan angka perokok pemula di Kota
7	Transparansi dan akuntabilitas pengelolaan kegiatan pembangunan sarana dan prasarana di kelurahan dan pemberdayaan masyarakat yang tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggungjawab	Perwali Nomor 12 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Mengatur pelaksanaan kegiatan pembangunan sarana dan prasarana Kelurahan untuk membiayai pelayanan sosial dasar yang berdampak langsung pada meningkatnya kualitas hidup masyarakat
8	Pemulihan ekonomi di Kota Mojokerto, sebagai akibat dari pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19)	Peraturan Walikota Nomor 14 Tahun 2021 sebagaimana diubah melalui Peraturan Walikota Nomor 67 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Program Inkubasi Wirausaha Pemberdayaan Masyarakat Terdampak *Corona Virus Disease* 2019	- Terwujudnya proses pelaksanaan Program Inkubasi Wirausaha Pemberdayaan Masyarakat Terdampak COVID-19 di Kota Mojokerto sesuai dengan Peraturan perundang-undangan - Perubahan kebutuhan dan kualifikasi syarat calon tenaga pendamping serta tambahan tahapan proses kegiatan Inkubasi Wirausaha
9	Dalam rangka memberikan kepastian hukum dalam penyelenggaraan Sanitasi Berbasis Partisipasi Masyarakat yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Mojokerto	Peraturan Walikota Nomor 24 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Sanitasi Berbasis Partisipasi Masyarakat yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Mojokerto	Pemberian bantuan dalam pelaksanaan kegiatan Sanitasi Berbasis Partisipasi Masyarakat yang bersumber dari APBD Kota Mojokerto dapat dilaksanakan dengan tertib, efektif, transparan dan akuntabel
10	Memberikan kepastian hukum dalam penyelenggaraan Bantuan Rumah Swadaya yang bersumber dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Mojokerto	Peraturan Walikota Nomor 25 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Bantuan Rumah Swadaya yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Mojokerto	Pemberian bantuan dalam pelaksanaan BRS di Kota dapat dilaksanakan dengan tertib, efektif, transparan dan akuntabel serta memberi petunjuk tata cara pelaksanaan, penyaluran, pencairan dan pengelolaan

			keuangan dalam pemberian BRS
11	Menekan penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID- 19) yang telah menimbulkan korban jiwa dan kerugian material yang lebih besar, dan telah berimplikasi pada aspek sosial, ekonomi, dan kesejahteraan masyarakat	Peraturan Walikota Nomor 39 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) di Kota Mojokerto	- Mengurangi transmisi/ penularan COVID-19 - Menurunkan angka kesakitan dan kematian akibat COVID-19 - Mencapai kekebalan kelompok di masyarakat *(herd immunity);* dan - Melindungi masyarakat dari COVID-19 agar tetap produktif secara sosial dan ekonomi
12	Penguatan aksebilitas terhadap pelayanan sosial dasar, fasilitas pelayanan publik, dan jaminan kesejahteraan sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial	Perwali No. 43 Tahun 2021 tentang Perubahan Peraturan Walikota No. 78 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Mojokerto No. 1 Tahun 2016 tentang tanggung jawab sosial perusahaan	Pelayanan CSR Bantuan Sosial bagi masyarakat terdampak Covid-19 dari Perusahaan
13	Melaksanakan penentuan Keluarga Penerima Manfaat (KPM) penerima Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) Kota Mojokerto secara obyektif dan pembaharuan data KPM penerima BPNT Kota Mojokerto secara periodik	Peraturan Walikota Nomor 44 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Petunjuk Teknis Bantuan Pangan Non Tunai Kota Mojokerto Tahun 2021	Terwujudnya pelaksanaan penentuan Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang obyektif dan *update*
14	Pedoman Tatanan Normal Baru pada kondisi Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19)	Peraturan Walikota Nomor 62 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Walikota Nomor 47 Tahun 2020 tentang Pedoman Tatanan Normal Baru pada Kondisi Pandemi Corona Virus Disease 2019 di Kota Mojokerto	Menyempurnakan ketentuan dan meningkatkan kesadaran masyarakat untuk turut mencegah dan menanggulangi penyebaran *Corona Virus Disease* 2019 (COVID- 19)
15	Pembinaan lingkungan sosial untuk mendukung bidang kesejahteraan masyarakat melalui pemberian bantuan berupa bantuan	Peraturan Walikota Nomor 63 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyaluran Bantuan Langsung Tunai kepada Buruh Pabrik Rokok dari Dana Bagi Hasil Cukai	Buruh pabrik rokok bisa menikmati kesejahteraan yang lebih dari hasil cukai dan hasil tembakau

	langsung tunai kepada buruh pabrik rokok	dan Hasil Tembakau Kota Mojokerto	
16	Mewujudkan sumber daya manusia (SDM) berkualitas memalui peningkatan akses dan kualitas pendidikan dan pelayanan kesehatan	Peraturan Walikota Nomor 69 Tahun 2021 tentang Pemberian Beasiswa Pendidikan Tinggi Bagi Mahasiswa berprestasi	Membantu meringankan beban biaya bagi mahasiswa warga Kota Mojokerto saat menempuh pendidikan di Perguruan Tinggi Negeri Non Kedinasan
17	Mengurangi risiko sosial yang timbul akibat meninggalnya warga Kota Mojokerto	Peraturan Walikota Nomor 74 Tahun 2021 tentang Pemberian Bantuan Sosial Berupa Santunan Uang Duka kepada Warga Kota Mojokerto yang Meninggal Dunia	Meringankan beban keluarga atau ahli waris yang ditinggalkan
18	Menjamin perlakuan yang sama di hadapan hukum bagi orang miskin di Kota Mojokerto	Peraturan Walikota Nomor 75 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Nomor 100 Tahun 2019 Tentang Pedoman Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Bantuan Hukum Untuk Masyarakat Miskin	Memberikan bantuan hukum kepada warga negara yang merupakan upaya untuk memenuhi sekaligus sebagai implementasi negara hukum yang mengakui dan melindungi serta menjamin hak asasi warga negara akan kebutuhan akses terhadap keadilan dan kesamaan di hadapan hukum
19	Meningkatnya kualitas dan akses kesehatan	Surat Edaran Satgas Covid 19 Kota Mojokerto Nomor: 443.33/911/417.508/2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Darurat Covid 19 di Kota Mojokerto	Optimalisasi pengendalian penyebaran Covid 19
20	Meningkatnya status derajat kesehatan dengan pendekatan keluarga untuk golongan umur dan mengikuti siklus hidup manusia	Keputusan Walikota Nomor 188.45/312/417.101.3/2021 tentang Penetapan Prioritas Lokasi Khusus Kelurahan Stunting di Kota Mojokerto Tahun 2022	Percepatan penurunan stunting
21	Meningkatnya kualitas dan akses kesehatan	Keputusan Walikota Nomor 188.45/148/417.101.3/2021 tentang Tim Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Makanan Olahan dan Impor Kota Mojokerto	Penertiban peredaran makanan olahan dan impor di Kota Mojokerto
22	Meningkatnya kualitas dan akses kesehatan	Keputusan Walikota Nomor 188.45/158/417.101.3/2021 tentang Kelompok Kerja Kampung Keluarga Berkualitas Kota Mojokerto	Meningkatnya koordinasi, sinergitas dan sinkronisasi Program Kampung Keluarga Berkualitas (Kampung KB) di Kota Mojokerto

23	Meningkatnya kualitas dan akses kesehatan	Keputusan Walikota Nomor 188.45/75/417.101.3/2021 tentang Pelaksana Kegiatan Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga, Program Pemberdayaan dan Peningkatan eluarga Sejahtera pada Dinas Kesehatan, Pegendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Mojokerto Tahun 2021	Mendukung pengembangan ketahanan dan kesejahteraan keluarga
24	Penertiban angkutan umum dan penertiban parkir	Surat Keputusan Walikota Mojokerto No: 188.45/14/417.101.3/2021 tentang Tim Penertiban Angkutan Umum dan Penertiban Parkir Kota Mojokerto Tahun 2021	Menurunkan jumlah pelanggaran dan kecelakaan lalu lintas di Kota Mojokerto dengan cara pembinaan dan penegakan hukum pelanggaran lalu lintas angkutan jalan
25	Penertiban angkutan umum dan penertiban parkir	Surat Keputusan Walikota Mojokerto No: 188.45/317/417.101.3/2021 tentang Perubahan atas Keputusan Walikota Mojokerto No: 188.45/14/417.101.3/2021 tentang Tim Penertiban Angkutan Umum dan Penertiban Parkir Kota Mojokerto Tahun 2021	Menambah jumlah kegiatan penertiban sampai dnegan bulan desember dalam rangka menurunkan jumlah pelanggaran dan kecelakaan lalu lintas di Kota Mojokerto dengan cara pembinaan dan penegakan hukum pelanggaran lalu lintas angkutan jalan
26	Pengamanan dan Pengawalan Walikota Mojokerto	Surat Keputusan Walikota Mojokerto No: 188.45/293/ 417.101.3/2021 tentang Tim Pengamanan Kegiatan Insidentil Skala Besar Pemerintah Kota Mojokerto Tahun 2021	Meningkatkan keamanan dan ketertiban kegiatan-kegiatan Pemerintah Kota Mojokerto
27	Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kota Mojokerto	Surat Keputusan Walikota Mojokerto No: 188.45/37/417.101.3/2021 tentang Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kota Mojokerto Tahun 2021	- Menciptakan ketertiban dan kelancaran lalu lintas dan angkutan jalan di Kota Mojokerto - Melaksanakan Perda Kota Mojokerto nomor 2 tahun 2013 tentang penyelenggaraan LLAJ yang mengamanatkan pembentukan Forum Lalu Lintas dan Angkutan jalan

3.5 TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD TAHUN ANGGARAN SEBELUMNYA

Sebagai bentuk tindak lanjut terhadap rekomendasi DPRD yang diberikan pada Tahun Anggaran 2020, maka langkah-langkah yang telah dilakukan oleh Pemerintah Kota Mojokerto pada tahun 2021 dapat dilaporkan sebagaimana tabel di bawah ini.

Tabel 3. 19 Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD Kota Mojokerto Tahun 2020

No	Rekomendasi	Tindak Lanjut	Tujuan/Masalah Yang Diselesaikan	Perangkat Daerah
1	***Bidang Pemerintahan dan Hukum***			
	a. Dalam penyusunan dokumen LKPJ hendaknya jangan semata-mata hanya untuk memenuhi ketentuan formal dan normatif saja, tetapi hendaknya data-data disajikan secara lengkap dan jelas dan juga dapat dipertanggungjawabkan keakuratan dan kevalidannya, sehingga Pemerintah Kota bisa lebih focus untuk mencari solusi terkait permasalahan yang terjadi.	Rekomendasi diperhatikan. Penyusunan LKPJ setiap tahun terus dilakukan perbaikan dengan berusaha menyampaikan data secara lengkap dan jelas serta *update*. Keakuratan data yang disampaikan pada LKPJ merupakan informasi yang benar berdasarkan bukti-bukti fakta yang memadai, serta dapat dipertanggungjawabkan. Validitas data yang disajikan pada LKPJ Kepala Daerah dapat dipertanggungjawabkan, karana data yang disajikan bersumber dari BPS, survey hasil kerjasama dengan PTN, dan Perangkat Daerah pelaksana urusan pemerintahan	Laporan yang disampaikan oleh pemerintah daerah kepada DPRD yang memuat hasil penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menyangkut laporan pertanggungjawaban kinerja dilaksanakan oleh pemerintah daerah selama 1 (satu) tahun anggaran, memiliki data dan informasi yang lengkap, update, akurat dan valid	Bagian Pemerintahan Setda
	b. Perlu penguatan dalam pembuatan dokumen perencanaan dan penganggaran baik di tingkat Pemerintah Kota Mojokerto maupun di tingkat organisasi perangkat daerah, sehingga apa yang telah direncanakan	Penyusunan dokumen perencanaan dan penganggaran tahunan, baik di tingkat Pemerintah Kota Mojokerto maupun di tingkat Perangkat Daerah telah melalui beberapa tahapan, salah satunya adalah penyelenggaraan forum Musrenbang secara berjenjang. Mulai dari tingkat Kelurahan, Kecamatan dan Kota, termasuk menyelenggarakan forum Perangkat Daerah.	Penyusunan dokumen perencanaan dan penganggaran dilakukan melalui tahapan dan mekanisme yang seharusnya, dan diharapkan aspirasi/kebutuhan masya-	Bappedalitbang

No	Rekomendasi	Tindak Lanjut	Tujuan/Masalah Yang Diselesaikan	Perangkat Daerah
	merupakan kebutuhan masyarakat yang dapat direalisasikan	Pelaksanaan Musrenbang bertujuan untuk menjaring aspirasi/kebutuhan masyarakat. Untuk selanjutnya ditetapkan usulan prioritas yang akan dimasukkan dalam rencana kerja Perangkat Daerah sesuai dengan kemampuan pendanaan APBD. Mekanisme perencanaan dan penganggaran Pemerintah Kota Mojokerto Tahun 2021 telah menggunakan aplikasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD)	rakat dapat terealisasi lebih maksimal.	
	c. Terkait dengan bantuan hukum bagi masyarakat miskin, sampai dengan saat ini realisasinya belum nampak, padahal Pemerintah Kota Mojokerto sudah mempunyai peraturan daerah terkait bantuan hukum tersebut. Selain itu, tindak lanjut dari peraturan daerah tersebut (perwali) hendaknya segera diterbitkan.	Sesuai hasil konsultasi dengan Biro Hukum Pemprov Jawa Timur, akan dilakukan Revisi atas Peraturan Walikota Mojokerto Nomor 100 Tahun 2019, yang pada intinya dengan adanya perubahan dimaksud akan lebih memudahkan proses percairan dana bantuan dimaksud dan akan disosialisasikan pada LBH yang ada di Kota Mojokerto	- Bahwa Bagian Hukum sudah menerbitkan Peraturan Walikota Mojokerto No. 100 Tahun 2019 tentang Pedoman pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Bantuan Hukum untuk Warga Miskin yang akan direvisi - Telah dianggarkan Bantuan Hukum bagi Warga Miskin mulai 2019, tetapi tidak ada pengajuan pencairan dari LBH yang membantu warga miskin. Untuk tahun 2021 dianggarkan Rp. 20.000.000,-, bila dirasakan kurang, bisa	Bagian Hukum Setda

No	Rekomendasi	Tindak Lanjut	Tujuan/Masalah Yang Diselesaikan	Perangkat Daerah
			ditambahkan saat P-APBD	
	d. Terkait visi dan misi Walikota, terdapat 7 misi yang dari beberapa misi tersebut banyak yang tidak terwujud di tahun 2020, termasuk mewujudkan ketertiban dan supremasi hukum dan HAM. Anggaran supremasi hukum dan HAM sangat minim, sehingga pencapaiannya menjadi rendah. Juga misi mewujudkan pemerintahan yang bersih, yang dalam implementasinya terjadi banyak carut marut manajerial sehingga banyak sekali program yang sifatnya langsung ke masyarakat yang tidak terlaksana.	Walaupun anggaran supermasi hukum dan HAM minim namun demikian sesuai misi 2 dengan tujuan sasaran meningkatnya ketaatan masyarakat terhadap Peraturan Daerah. Indikatornya: Persentase pelanggaran Perda yang terselesaikan dari tahun 2020 dibanding dengan 2019 terjadi peningkatan realisasi capaian dari 82,66 % menjadi 87,62 %	Tujuan misi ke 2 sudah terselesaikan	Satpol PP
	e. Akses masyarakat dalam pembangunan sebenarnya sudah diatur dalam Perwali, dengan pengalokasian anggaran dana kelurahan. Namun kenyataannya pada saat terjadi pandemi covid-19 banyak anggaran dana kelurahan yang terkena refocusing dan realokasi anggaran yang menyebabkan akses masyarakat dalam pembangunan menjadi	Akses masyarakat dalam pembangunan sudah terakomodir dalam pelaksanaan musrenbang mulai dari tingkat kelurahan sampai tingkat kota. *Refocusing* dan realokasi anggaran tidak berpengaruh terhadap akses masyarakat karena anggaran yang ada dikelurahan difokuskan kepada 3 hal 1. Untuk bidang kesehatan 2. Untuk pemulihan dampak ekonomi 3. Jaring pengaman sosial Dimana 3 hal tersebut sasarannya langsung kepada masyarakat.	Kegiatan dana Kelurahan yang tidak terkena refocussing tetap bisa dilaksanakan dengan tetap melibatkan LPM sebagai mitra kerja Kelurahan	

No	Rekomendasi	Tindak Lanjut	Tujuan/Masalah Yang Diselesaikan	Perangkat Daerah
	terbatas. Justru dalam realisasi anggaran dana kelurahan ini banyak melibatkan mitra kerja/rekanan tanpa melibatkan masyarakat lokal.	Sedangkan anggaran dana kelurahan sesuai dengan perwali Nomor 32 Tahun 2020, disebutkan bahwa kegiatan pembangunan sarana dan prasarana kelurahan dan pemberdayaan masyarakat di kelurahan dilaksanakan dengan mekanisme swakelola tipe 3 atau tipe 4 namun realita di lapangan ada beberapa kendala antara lain : ketidaksiapan Pokmas, Ormas, banyaknya volume pekerjaan, kompetensi pengadaan tidak dimiliki Pokmas/Ormas. Sehingga pengadaan tersebut dilaksanakan dengan swakelola tipe 1		
2	***Bidang Perekonomian dan Perdagangan***			
	a. Dalam rangka peningkatan peran dan fungsi PKL sebagai penggerak perekonomian rakyat, Pemerintah Kota perlu membina dan memberdayakan PKL sebagai pelaku usaha yang kreatif sebagai salah upaya penanganan dampak pandemi covid-19 di bidang perekonomian rakyat	- Saat ini sedang disusun perwali tentang penataan PKL, untuk mengatur dan membina PKL, yang diharapkan PKL di Kota Mojokerto dapat lebih tertib - Mengupayakan kegiatan-kegiatan bazar serta pasar murah untuk menampung PKL dalam berusaha. Kegiatan ini berlangsung pada waktu-waktu tertentu seperti pada saat PHBN dan hari libur.	- Dengan penetapan lokasi lokasi yang diperbolehkan untuk PKL diharapkan agar PKL lebih tertata dan terkontrol serta dapat meningkatkan pendapatan asli daerah melalui retribusi PKL - Dengan kegiatan bazaar, pasar murah pada hari besar dan hari libur akan dapat meningkatkan omzet dari pedagang kecil maupun PKL. sehingga meningkatkan kesejahteraan bagi PKL	
	b. Lemahnya tata kelola pasar, kurangnya koordinasi dan monitoring menjadi penyebab	Saat ini sedang disusun perwali tentang petunjuk teknis pungutan retribusi dan perwali pelaksanaan e-retribusi dan kemudian disusun draf PKS dengan BRI untuk e-retribusi	Untuk mengurangi kebocoran retribusi pasar dan pengelolaan pasar lebih baik	DISKOPUKMPERINDAG

No	Rekomendasi	Tindak Lanjut	Tujuan/Masalah Yang Diselesaikan	Perangkat Daerah
	banyak terjadinya kebocoran retribusi pasar. Oleh karena itu, kedepan diharapkan adanya penguatan dalam hal pengelolaan pasar, mulai dari segi koordinasi sampai ke tingkat monitoring/evaluasi.			
	c. Pemerintah Kota Mojokerto perlu mengoptimalkan program pemberantasan barang kena cukai illegal, mengingat program ini belum terlaksana dengan baik, bahkan secara serapan anggaran hanya sebesar 0,37%, perlu dilakukan koordinasi yang intensif dengan Bea Cukai dalam penangannya, karena secara regulasi telah diatur jelas dalam Undang-undang Cukai. Selain itu, strategi dalam pemberantasan barang kena cukai ilegal perlu diperkuat.	Program Pemberantasan Barang Kena Cukai Ilegal pada tahun 2020 dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kota Mojokerto. Untuk optimalisasi dan efektifitas anggaran serta berdasarkan hasil asistensi dari Biro Perekonimian Setda Provinsi Jatim, maka mulai tahun 2021 kegiatan pemberantasan barang kena cukai ilegal akan dilaksanakan oleh Bagian Perekonomian dan SDA Setda Kota Mojokerto. Strategi yag dilakukan untuk pemberantasan barang kena cukai ilegal, melalui: - Pengumpulan informasi peredaran barang kena cukai ilegal; dan - Operasi bersama pemberantasan barang kena cukai ilegal yang bekerjasama dan koordinasi dengan Aparat Bea Cukai dan Aparat Penegak Hukum.	Kota Mojokerto bebas peredaran barang cukai ilegal	DISKOPUKMPERINDAG
3	***Bidang Ketenagakerjaan***			
	a. Pemerintah Kota melalui Dinas yang membidangi ketenagakerjaan perlu membentuk atau bekerjasama dengan Balai Latihan Kerja/BLK di Kota Mojokerto yang terintegrasi	Pemerintah Kota Mojokerto tidak perlu membentuk BLK karena selama ini sudah bekerjasama dengan UPT BLK yang dimiliki oleh Disnakertrans Provinsi Jawa Timur.	- Untuk Efektifitas dan efisiensi penyelenggaraan pelatihan pekerjaan - Meningkatkan ketrampilan bagi pencari	DPMPTSPNAKER

No	Rekomendasi	Tindak Lanjut	Tujuan/Masalah Yang Diselesaikan	Perangkat Daerah
	dengan inkubator wirausaha guna meningkatkan kapabilitas, kompetensi, dan daya saing tenaga kerja.		kerja (Pengangguran) untuk meningkatkan kapabilitas, kompetensi dan daya saing bagi tenaga kerja baik yang memasuki dunia kerja maupun berwirausaha.	
	b. Terkait dengan banyaknya tenaga kerja yang di PHK akibat pandemi COVID-19, Pemerintah Kota Mojokerto perlu melakukan optimalisasi terhadap pelayanan penempatan kerja bagi masyarakat yang terdampak PHK akibat Pandemi dan meningkatkan inovasi dalam peningkatan kualitas dan kuantitas pelatihan kerja yang adaptif terhadap perubahan di era digital dan mengedepankan inovasi kreatifitas.	Tindak lanjut yang telah dilakukan adalah mengoptimalkan fungsi Bursa Kerja Khusus (BKK) di Sekolah Kejuruan serta kerjasama dengan perusahaan dalam rangka penempatan tenaga kerja. Selain itu mendorong pelatihan kerja termasuk lembaga pelatihan kerja swasta yang sudah ada atau baru agar melakukan pelatihan kerja yang berbasis kompetensi terutama di sektor digital, yang difassilitasi melalui program kementerian kominfo salah satunya adalah digital enterprenur akademi.	Menciptakan lapangan kerja baru dan mengurangi tingkat pengangguran	DPMPTSPNAKER
4	***Bidang Pertanahan***			
	a. Pemerintah Kota melalui BPKPD melaksanakan sensus aset daerah terhadap Barang Milik Daerah agar kepemilikan dan nilai kekayaannya dapat diketahui dengan mudah.	Dalam Permendagri No 19 Tahun 2016 istilah yang dipakai adalah inventarisasi/sensus. Pemerintah Kota Mojokerto telah melaksanakan inventarisasi terhadap barang milik daerah. Berdasarkan hasil inventarisasi, Pemerintah Kota Mojokerto memiliki asset tanah sebanyak 952 bidang, dengan rincian 805 bidang sudah bersertifikat dan 147 bidang belum bersertifikat. Terhadap 147 bidang tanah yang belum bersertifikat, saat ini 15	Terpenuhinya pengamanan fisik dan hukum atas tanah aset Pemerintah Kota Mojokerto	BPKPD

No	Rekomendasi	Tindak Lanjut	Tujuan/Masalah Yang Diselesaikan	Perangkat Daerah
		bidang dalam proses pensertifikatan, sedangkan sisanya sebanyak 132 akan diproses kemudian secara bertahap.		
	b. Pemerintah Kota bekerjasama dengan BPN mensosialisasikan regulasi pertanahan dan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) yang merupakan proses pendaftaran tanah untuk pertama kali	Dilakukan koordinasi dan kerjasama dengan BPN untuk melakukan sosialisasi regulasi Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) baik kepada masyarakat maupun pihak aparat di tingkat kelurahan.	Program PTSL dapat bermanfaat bagi : - Sebagai pemilik tanah, dengan adanya PTSL ini diuntungkan karena warga ada kepastian status tanah miliknya - Disisi Pemerintah Kota, PTSL ini mempermudah dalam melakukan penataan kota	BPKPD
5	***Bidang Lingkungan Hidup***			
	a. Pemerintah Kota melalui Dinas Lingkungan Hidup mensosialisasikan regulasi di bidang lingkungan hidup kepada masyarakat dan pelaku usaha, agar masyarakat dan pelaku usaha mempunyai kesadaran terhadap hak dan kewajibannya atas kelestarian lingkungan hidup.	Rekomendasi diperhatikan, DLH sudah mengaanggarkan dan melaksanakan sosialisasi pembinaan pentaatan lingkungan hidup kepada pelaku usaha dan masyarakat dengan narasumber dari Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jatim di tahun 2020 dan dilanjutkan pada tahun 2021 .	Meningkatkan ketaatan di bidang lingkungan hidup oleh pelaku usaha dan masyarakat	DLH
	b. Pemerintah Kota melalui Dinas Lingkungan Hidup membina dan memberdayakan Bank Sampah dan mengadopsi konsep Asuransi Sampah sebagai salah satu	Setiap tahun DLH melakukan pelatihan pengelolaan sampah bagi bank sampah unit dan melakukan optimalisasi pembinaan pemberdayaan bank sampah sedangkan untuk pengkajian konsep asuransi sampah dilakukan pada tahun 2022	Pengurangan dan pengelolaan sampah untuk mencapai target yang tercantum pada Jakstrada	DLH

No	Rekomendasi	Tindak Lanjut	Tujuan/Masalah Yang Diselesaikan	Perangkat Daerah
	inovasi dalam pengelolaan sampah.			
	c. Pemerintah Kota perlu membangun komitmen untuk pemenuhan RTH sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan tanpa menimbulkan benturan kepentingan dengan masyarakat.	Pada revisi RTRW pemenuhan RTH diupayakan akan dipenuhi sesuai dengan peraturan yg berlaku. Dalam proses penyusunan revisi RTRW dilakukan beberapa strategi pemenuhan RTH yg akan dipenuhi oleh calon kawasan perumahan baru sebesar 20% dan kawasan peruntukkan industri sebesar 20% menjadi RTH.berupa taman yang punya fungsi sosial, ekonomi, lingkungan hidup di wilayah Kota Mojokerto yang nantinya akan diserahkan ke Pemerintah Kota Mojokerto sebagai RTH Publik.	- Terpenuhinya RTH sesuai Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku. - Meminimalisir lahan privat menjadi RTH sehingga masalah dengan warga dapat ditekan	DLH
	d. Terkait dengan TPA Randegan, DPRD menghimbau agar Pemerintah Kota segera menyelesaikan permasalahan tanah yang ada di TPA dengan pihak ketiga, dan selain itu, pagar yang ada di lokasi TPA saat ini masih belum cukup tinggi, sehingga masih menimbulkan gangguan bagi masyarakat sekitar, oleh karena itu, pemerintah kota diharapkan sesegera mungkin untuk meninggikan pagar TPA tersebut.	- Pelaksanaan perluasan tanah untuk TPA melalui Ruislagh dengan pihak ke 3 yang sampai saat ini sudah dalam tahap kajian HBU *(Highest and Best use)* - Pagar akan dilakukan rehab pada tahun 2022	Meningkatkan daya tampung TPA	DLH
	e. Minimnya perawatan dan pemeliharaan serta kurangnya petugas jaga di TPS, sehingga banyak terjadi kerusakan di wilayah TPS tersebut, mulai dari	Mengoptimalkan SDM yang ada dan mengusulkan penambahan formasi pengganti pegawai yang pensiun. Tahun 2021 sudah mengganggarkan pemelihraan dan penggantian terhadap aset yang ada TPS	Memberikan rasa nyaman pada lingkungan kerja TPS	DLH

No	Rekomendasi	Tindak Lanjut	Tujuan/Masalah Yang Diselesaikan	Perangkat Daerah
	pagar, gembok, pintu gerbang dan lain-lain, bahkan juga cukup sering terjadi kehilangan aset yang ada di TPS tersebut.			
6	***Bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu***			
	Pemerintah Kota melalui Dinas Penanaman Modal PTSP dan Naker perlu menyusun Rencana Induk Penanaman Modal Kota Mojokerto sehingga dapat memudahkan investor yang berminat menanamkan modal di Kota Mojokerto untuk mendapatkan informasi yang diperlukan	Penyusunan Rencana Induk Penanaman Modal Kota Mojokerto akan dilaksanakan pada Tahun 2022	Memudahkan Investor untuk menanamkan modalnya di Kota Mojokerto, sehingga dapat meningkatkan perekonomian daerah	DPMPTSPNAKER
7	***Bidang Pengawasan***			
	a. Inspektorat perlu untuk meningkatkan kapasitas SDM dengan menggandeng Perguruan Tinggi, BPK dan BPKP.	Kami menyadari bahwa tidak hanya kualitas SDM yang kurang, tetapi juga kuantitasnya. Berdasarkan analisis beban kerja dan sesuai dengan Surat Kepala BPKP Nomor S-481/K/JF/2020 tgl 8 April 2020 perihal rekomendasi kebutuhan JFA (Jabatan Fungsional Auditor) pada Inspektorat Kota Mojokerto, diperlukan JFA sebanyak 40 orang. Yang tersedia saat ini baru 15 orang, sehingga masih kurang 25 orang. Dengan SDM terbatas tentu beban kerja SDM yang ada menjadi berat yang berisiko terhadap pelaksanaan pengawasan dan output/hasil pengawasan. Sesuai amanat Permendagri 23 Tahun 2020 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah tahun 2021, Inspektorat Kota Mojokerto telah melaksanakan kegiatan sesuai dengan Program Kerja	meningkatnya kapasitas SDM APIP	Inspektorat

No	Rekomendasi	Tindak Lanjut	Tujuan/Masalah Yang Diselesaikan	Perangkat Daerah
		Pengawasn Tahunan(PKPT) berbasis risiko, termasuk kegiatan reviu dokumen perencanaan dan laporan-laporan pemerintahan daerah. Upaya peningkatan kualitas/kompetensi SDM telah dilakukan melalui: - Pelatihan di Kantor Sendiri/*in house training* dengan narasumber internal antar Auditor. - Pendidikan dan pelatihan bekerjasama dengan Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pengawasan BPKP dan BPK - Mewajibkan semua auditor untuk selalu mempelajari referensi terkait dengan materi pengawasan dan harus dilaporkan sebagai kinerja di e-kinerja		
	b. Inspektorat perlu aktif dalam pengawasan dan reviu terkait produk-produk perencanaan dan laporan Pemerintah Daerah	Inspektorat telah melakukan kegiatan : - Reviu rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD) dan rencana strategis perangkat daerah (Renstra PD) dengan sasaran menjaga konsistensi rencana pembangunan jangka panjang (RPJP) dengan RPJMD serta meyakinkan penyusunan RPJMD dan Renstra PD telah sesuai dengan kaidah perencanaan; - Reviu dokumen perencanaan pembangunan dan anggaran daerah tahunan (RKPD, Renja PD, KUA, PPAS, dan RKA SKPD termasuk perubahannya) dengan sasaran menjaga konsistensi RPJMD dengan dokumen perencanaan pembangunan daerah, menjaga konsistensi dokumen perencanaan daerah dengan dokumen penganggaran daerah serta meyakinkan penyusunan dokumen perencanaan pembangunan dan anggaran daerah tahunan telah sesuai dengan kaidah perencanaan;	Agar kualitas dokumen perencanaan lebih baik dan laporan tepat waktu	Inspektorat

No	Rekomendasi	Tindak Lanjut	Tujuan/Masalah Yang Diselesaikan	Perangkat Daerah
		- Reviu laporan keuangan pemerintah daerah dengan sasaran memberikan keyakinan secara terbatas bahwa tidak ada modifikasi material yang dilakukan dan laporan keuangan telah disajikan berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai dan sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan; - Reviu laporan kinerja dengan sasaran memberikan keyakinan secara terbatas bahwa laporan kinerja telah menyajikan informasi kinerja yang andal, akurat dan berkualitas; - Reviu laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah (LPPD) dengan sasaran memberikan keyakinan mengenai akurasi, keandalan, dan keabsahan informasi kinerja dalam LPPD; Kegiatan pengawasan tersebut tentu tidak dapat dilakukan untuk semua Program/Kegiatan, namun dipilih terhadap program/kegiatan/OPD tertentu yang berisiko/prioritas sesuai hasil analisis risiko sebagaimana Peraturan Walikota Nomor 39 Tahun 2017.		
8	***Bidang Kepegawaian***			
	a. Masih ada jabatan yang tidak ada pejabatnya yang diisi oleh pelaksana tugas (Plt). Sebagaimana ketentuan yang diatur dalam Surat Edaran Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor : 2/SE/VII/2019 tentang Kewenangan Pelaksana Harian dan Pelaksana Tugas Dalam	Bahwa Pengisian Jabatan kosong melalui Plt. telah diupayakan selaras dengan Surat Edaran Kepala BKN dengan mempertimbangkan rencana strategis, kebutuhan, situasi dan kondisi Pemerintah Kota Mojokerto.	Melakukan Evaluasi secara berkala terhadap kebutuhan pengisian Jabatan kosong.	BKPSDM

No	Rekomendasi	Tindak Lanjut	Tujuan/Masalah Yang Diselesaikan	Perangkat Daerah
	Aspek Kepegawian tertanggal 30 Juli 2019, pada huruf b angka 11 disebutkan bahwa Pegawai Negeri Sipil yang ditunjuk sebagai Pelaksana Tugas melaksanakan tugasnya untuk paling lama 3 (tiga) bulan dan dapat diperpanjang paling lama 3 (tiga) bulan. Hendaknya Walikota memperhatikan dan mempedomani ketentuan dalam surat edaran dimaksud terkait dengan pelaksana tugas yang saat ini masih ada di lingkungan Pemerintah Kota Mojokerto.			
	b. Pemerintah Kota melalui Bagian Organisasi dan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia hendaknya melaksanakan inventarisasi kebutuhan pegawai melalui skema *Human Capital Development Plan* (HCDP) sebagai dasar pelaksanaan rekrutmen ASN Kota Mojokerto.	Saat ini sedang dilakukan penyusunan anjab dan ABK sesuai SOTK Baru untuk mengetahui jumlah kebutuhan pegawai, dari jumlah kebutuhan pegawai tersebut disusun formasi kebutuhannya, selanjutnya diusulkan formasinya kepada pemerintah pusat untuk mendapatkan persetujuan untuk dilakukan rekruitment sesuai mekanisme dan aturan yang berlaku. Sedangkan skema *Human Capital Development Plan* (HCDP) digunakan sebagai dasar untuk pengembangan kompetensi SDM aparatur termasuk pengembangan karir ASN	Dengan disusunnya formasi kebutuhan pegawai tersebut dijadikan dasar untuk pelaksanaan rekruitment ASN	BKPSDM
9	***Bidang Fisik / Infrastruktur***			

No	Rekomendasi	Tindak Lanjut	Tujuan/Masalah Yang Diselesaikan	Perangkat Daerah
	a. Perlu strategi secara komprehensif terkait penyediaan sarana dan prasarana air minum bagi masyarakat, terutama kualitas air dan pelayanan yang dihasilkan oleh PDAM.	Dalam rangka peningkatan pelayanan kepada masyarakat khususnya di bidang penyediaan air bersih Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman bekerja sama dengan PDAM telah berupaya untuk terus meningkatkan kualitas pasokan air kepada pelanggan. PDAM secara berkala juga telah memeriksa mutu airnya ke Balai Besar Teknik Kesehatan Lingkungan dan Pengendalian Penyakit (BBTKLPP) Surabaya. Pembangunan jaringan instalasi air minum yang tiap tahun dilakukan, selanjutnya jaringan tersebut dimanfaatkan oleh PDAM	Kedepannya Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman bersama dengan PDAM juga berupaya untuk melakukan optimalisasi pada Instalasi Pengolah Air (IPA) yang berlokasi di Kelurahan Wates. Optimalisasi IPA bertujuan untuk mengurangi tingkat kekeruhan air baku dengan cara pembuatan pra sedimentasi atau bak pengendap.	DPUPRPERAKIM
	b. Pemerintah Kota Mojokerto melalui Dinas PUPR PKP hendaknya membuat strategi penanganan banjir atau genangan air di Kota Mojokerto secara menyeluruh dan komprehensif, sehingga penanganan banjir tidak terkesan dilakukan secara parsial saja.	Pemerintah Kota Mojokerto tahun 2019 dan 2020 melalui BAPPEDA LITBANG telah menyusun dokumen "Kajian Drainase Untuk Penanganan Genangan dan Banjir di Wilayah Kota Mojokerto" Untuk menangani banjir atau genangan air, Pemerintah Kota Mojokerto telah melakukan langkah-langkah sebagai berikut: - DPUPRPRKP akan melaksanakan Saran yang ada di Kajian Strategi Penanganan Genangan dan Banjir tersebut diatas. - Perihal Penangan Banjir yang terkesan parsial saja, sebenarnya tidak, DPUPRPRKP pada waktu pelaksanaan Musrenbang (Tingkat Kecamatan, Kelurahan, Maupun	Kota Mojokerto bebas banjir atau genangan air	BAPPEDALITBANG/ DPUPRPERAKIM

No	Rekomendasi	Tindak Lanjut	Tujuan/Masalah Yang Diselesaikan	Perangkat Daerah
		Kota), selalu mengingatkan pada masyarakat agar mengoptimalkan saluran air yang ada di lingkungan masing-masing. - Meskipun pembagian saluran air di laksanakan secara parsial (pada masing-masing lingkungan) tetapi pada waktu perncanaan pembangunan, DPUPRPRKP selalu mengacu pada "Kajian Drainase Untuk Penanganan Genangan dan Banjir di Wilayah Kota Mojokerto" tersebut. Sehingga meskipun pembangunannya dilaksanakan secara parsial, tetapi nantinya saluran air tersebut tetap bisa terintegrasi dengan baik - Memang idealnya pembangunan saluran air itu dilaksanakan secara menyeluruh dan terintegrasi sehingga bisa menyelesaikan permasalahan adanya Genangan atau banjir yang ada di Kota Mojokerto, tetapi kembali lagi ke kemampuan keuangan daerah yang dimiliki oleh Kota Mojokerto		
	c. Perlu pengintegrasian pokok pokok pikiran DPRD dalam musrenbang.	Pengintegrasian pokok-pokok pikiran DPRD sudah dilaksanakan dalam musrenbang dengan melakukan verifikasi pada waktu musrenbang Kecamatan.	Tidak akan terjadi usulan yang sama dalam musrenbang	BAPPEDALITBANG
	d. Terkait Ambruknya plafon gedung GMSC di tahun 2021, menimbulkan pertanyaan besar di kalangan masyarakat, lebih-lebih di kalangan DPRD, kejadian tersebut apakah disebabkan oleh lemahnya perencanaan atau hal lain, karena kami menemukan bahwa di tahun 2020 terdapat	Faktor yang menyebabkan runtuhnya Plafon GMSC, yaitu : - Perencanaan di tahun 2014 dan tahap pelaksanaan tahun 2016, dengan merubah pekerjaan bangunan yang semula 2 lantai menjadi 3 lantai. - Ada pengurangan pekerjaan arsitektur, dan dilanjutkan di tahun 2017. Untuk pekerjaan Arsitektural dan ME, dengan membuat kebijakan salah satu sistem dari AC tidak terpasang, di akhir tahun 2017 sistem AC tersebut belum berfungsi.	Meningkatnya pelayanan publik yang lebih Mudah, Lancar, Rapi, Tertib dan Disiplin.	DPUPRPERAKIM

No	Rekomendasi	Tindak Lanjut	Tujuan/Masalah Yang Diselesaikan	Perangkat Daerah
	proyek pekerjaan konstruksi dengan anggaran sejumlah Rp. 1,7 Milyar yaitu terkait perubahan lay out GMSC. Kami khawatir perencanaan program perubahan *layout* GMSC tersebut tidak memperhatikan *layout* GMSC yang sebelumnya. Jika memang hal itu menjadi penyebabnya, maka DPRD menekankan agar jangan terulang lagi kejadian tersebut di tahun mendatang.	- Pada tahun 2019 ada tambahan perkerjaan untuk menghidupkan sistem AC yang belum berfungsi(tidak terpasang). - Kemudian tahun 2020, dilakukan perubahan *layout* gedung oleh DPMPTSP. Untuk kedepannya akan kami lakukan kajian setiap pemasangan sistem ME agar dilakukan secara sistematis, agar pekerjaan tidak terjadi overlap antara pekerjaan yang satu dengan yang lain		
	e. Pada tahun 2014, menteri keuangan telah mengeluarkan surat edaran Nomor : S-841/MK.02/2014 terkait moratorium pembangunan gedung atau kantor kementerian/lembaga. Moratorium tersebut bertujuan untuk mengefisiensi anggaran sehingga bisa dialihkan untuk program kegiatan yang bermanfaat bagi masyarakat. Namun pada tahun 2020, Pemerintah Kota Mojokerto malah melasakanakan pembangunan 3 (tiga) proyek besar, yaitu,	Pemerintah Kota Mojokerto dalam melaksanakan pembangunan 3 bangunan tersebut telah sesuai dengan beberapa ketentuan, sebagai berikut : - Yang dimaksud Surat Edaran Menteri keuangan tersebut adalah pembangunan gedung baru, sedangkan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Mojokerto adalah pembangunan dalam bentuk renovasi bangunan yang telah ada, bahkan dalam ketentuan Permenkeu dimaksud masih diperkenankan melakukan pembangunan gedung baru utk gedung pelayanan publik - Berdasarkan Permen PUPR Nomor 22/PRT/M/2018 bahwa perawatan bangunan dapat dilakukan dan digolongkan dalam tingkat kerusakannya, untuk renovasi bangunan-bangunan tersebut merupakan perawatan bangunan untuk tingkat kerusakan berat yaitu dengan tingkat kerusakan mencapai lebih dari 65%.	Untuk memenuhi kebutuhan sarana dan prasarana publik yang memadai.	DPUPRPERA KIM

No	Rekomendasi	Tindak Lanjut	Tujuan/Masalah Yang Diselesaikan	Perangkat Daerah
	pembangunan kolam renang sekar sari, pembangunan gedung graha wijaja, dan rehab rumah rakyat. Di sisi lain, di tahun 2020, terjadi wabah nasional yaitu Covid-19 yang membutuhkan adanya efisiensi anggaran untuk penanganan pandemi tersebut	- Bahwa kegiatan pembangunan gedung" dimaksud dilaksanakan berrdasarkan APBD Tahun 2020 yang merupakan keputusan penganggaran bersama antara Pemerintah Kota Mojokerto dengan DPRD Kota Mojokerto.		
10	***Bidang Keuangan***			
	a. Secara umum pengelolaan keuangan daerah pada Tahun Anggaran 2020 terdapat kendala teknis sehingga diperlukan kerjasama dan koordinasi yang baik antara semua stake holder Pemerintah Kota Mojokerto guna mengatasinya.	Dalam Pengelolaan Keuangan Daerah kendala-kendala teknis telah dapat diatasi dengan berpedoman pada regulasi atau kebijakan dari Pemerintah Pusat serta bersinergi dengan seluruh stakeholder.	Agar pengelolaan keuangan daerah dapat terlaksana secara optimal dan sesuai dengan regulasi yang berlaku.	BPKPD
	b. Diperlukan optimalisasi tatakelola BUMD Kota Mojokerto sehingga keberadaan BUMD dapat memberikan kontribusi terhadap peningkatan PAD secara signifikan.	Bagian Perekonomian selaku pembina BUMD telah melaksanakan peningkatan fungsi pembinaan dan pengawasan melalui kerjasama dengan pihak ketiga yang berkompeten dalam bidang pengelolaan BUMD, guna melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala serta langkah percepatan terhadap penerapan *Good Corporate Governance* (Tata Kelola Perusahaan Yang Baik)	Menginvetarisir dan mengklasifikasi permasalahan terhadap tata kelola BUMD untuk selanjutnya dilakukan langkah - langkah perbaikan secara bertahap dan menyeluruh sehingga mampu meningkatkan kinerja BUMD untuk dapat memperoleh laba yang sudah ditargetkan serta	BPKPD

No	Rekomendasi	Tindak Lanjut	Tujuan/Masalah Yang Diselesaikan	Perangkat Daerah
			memberikan kontribusi bagi PAD Kota Mojokerto	
	c. Perlu peningkatan kapasitas SDM pengelola keuangan daerah dengan mengadakan Bimtek untuk penyusunan perencanaan dan anggaran dalam SIPD.	Akan dilakukan bimtek penyusunan perencanaan dan anggaran dalam SIPD. Berkoordinasi secara aktif dengan Kementerian Dalam Negeri.	Meningkatnya kapasitas SDM pengelolaan keuangan daerah melalui aplikasi SIPD	BPKPD
	d. Perlu dilakukan koordinasi dengan PLN terkait potensi pajak penerangan jalan sehingga diketahui berapa potensi pajaknya agar penetapan target tidak meleset.	Telah dilakukan koordinasi dengan PLN terkait potensi PPJ. Dari data yang ada dapat kami sampaikan data target dan realisasi penerimaan potensi pajak pada penerangan Jalan pada tahun 2019 dan 2020 sebagai berikut : Target 2019 sebesar Rp12.700.000.000 dengan Realisasi sebesar Rp13.024.315.148, sehingga prosentasenya 102,55%. Sedangkan untuk 2020 target sebesar Rp12.800.000.000 dengan Realisasi sebesar Rp12.777.206.108 sehingga prosentasenya 99,82%.	Tercapainya realisasi PPJ secara optimal	BPKPD
	e. Perlu dilakukan perluasan *tax base* pajak dan retribusi daerah agar potensi pajak semakin meningkat dan penetapan target pajak daerah maupun retribusi daerah dapat meningkat.	- Dilakukan pemutakhiran *tax base*, sehingga potensi dan realisasi penerimaan pajak dan retribusi daerah dapat tercapai. - Dilakukan kegiatan pemutakhiran data obyek pajak untuk meningkatkan basis data pajak daerah, dengan memanfaatkan teknologi informasi (Simpatda, BPHTB Online)	Meningkatnya penetapan target pajak daerah maupun retribusi daerah.	BPKPD
	f. Perlu dilakukan proyeksi potensi pajak daerah dan proyeksi penetapan target agar blueprint peningkatan penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah dapat terukur dan terarah.	Bahwa dalam penyusunan proyeksi potensi pajak daerah dan proyeksi penetapan target pajak daerah selama ini menggunakan asumsi-asumsi dengan memperhatikan : - Regulasi terkait pengenaan pajak daerah dan retribusi daerah; - Capaian realisasi pajak daerah 5 tahun terakhir;	Tercapai peningkatan penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah dapat terukur dan terarah.	BPKPD

No	Rekomendasi	Tindak Lanjut	Tujuan/Masalah Yang Diselesaikan	Perangkat Daerah
		- Kenaikan UMR Kota Mojokerto karena berpengaruh terhadap daya beli Masyarakat Kota Mojokerto		
	g. Perlu mengkaji ulang Peraturan Daerah terkait Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang ramah terhadap investasi.	Tidak perlu mengkaji ulang Peraturan Daerah terkait Pajak Daerah dan Retribusi Daerah karena untuk mendukung iklim investasi, Pemerintah Pusat telah menerbitkan Undang-Undang nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja, dimana dalam Undang-Undang tersebut telah merubah sebagian Undang-undang nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD) sebagai dasar pemungutan PDRD yang bersifat *Close List* (Pemerintah Daerah dilarang memungut PDRD selain yang ada dalam UU 28/2009). Bahwa Peraturan Daerah Kota Mojokerto nomor 14 tahun 2019 tentang Pajak Daerah telah mengacu pada UU 28/2009 tentang PDRD.	Perda terkait pajak daerah dan retribusi daerah telah mendukung iklim investasi.	BPKPD
	h. Perlu dibentuk tim pengelola investasi dan menetapkan penasihat investasi Pemkot serta perlu dibentuk rencana induk investasi.	Rekomendasi diperhatikan dan menjadi pertimbangan untuk membentuk tim pengelola investasi dan menetapkan penasihat investasi. Sedangkan untuk Rencana Induk Investasi telah diakomodir dalam peraturam Walikota No. 85 Tahun 2016 tentang Rencana Umum Penanaman Modal dan pada tahun 2022 telah diusulkan untuk dilakukan review mengingat bahwa telah terjadi perubahan RPJMD.	Meningkatkan investasi di Kota Mojokerto	DPMPTSPNAKER
	i. Perlu dilakukan pemanfaatan informasi geospasial untuk optimalisasi pajak dan retribusi daerah, terutama Pajak Bumi dan Bangunan.	Bahwa Pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) di Kota Mojokerto pada tahun 2013 telah memanfaatkan Sistem Informasi Geografis, namun masih bersifat *desktop layer* dan belum menggunakan peta citra satelit. Diharapkan pada tahun kedepan peta PBB-P2 dan obyek pajak daerah lainnya dapat terintegrasi dengan memanfaatkan informasi geografis berbasis citra peta satelit, sehingga didapatkan data obyek pajak daerah yang handal..	Pemanfaatan informasi geospasial diharapkan dapat mengoptimalkan capaian pajak dan retribusi daerah.	BPKPD

No	Rekomendasi	Tindak Lanjut	Tujuan/Masalah Yang Diselesaikan	Perangkat Daerah
	j. Sebagai salah satu upaya peningkatan Pendapatan Asli Daerah adalah dengan pemasangan Tapping Box di setiap Restoran di Kota Mojokerto. Namun sampai dengan saat ini, program tersebut belum terlaksana.	- Bahwa pada tahun 2020 Pemerintah Kota Mojokerto telah bekerjasama dengan Bank Jatim, sebagai upaya peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) khususnya Pajak Daerah, dimana dalam kerjasama tersebut BANK JATIM menyediakan alat perekam data transaksi/*Tapping Box* untuk Wajib Pajak Daerah yang bersifat *Self Asessment* khususnya Pajak Hotel, Pajak Parkir, dan Pajak Restoran. - Pemasangan alat *Tapping Box* telah dilakukan pada bulan November 2020 sejumlah 70 buah, dengan rincian WP Hiburan 12 alat, WP Parkir 4 alat, WP Hotel 10 alat dan WP Restoran 44 alat. - Untuk tahun 2021 akan dilakukan pemasangan alat serupa sejumlah 30 alat dengan tetap bekerjasama dengan BANK JATIM selaku penyedia peralatan Tapping Box..	- Sebagai bentuk edukasi kepada konsumen/masyarakat untuk ikut berpartisipasi dalam memperhatikan dan mengawasi pungutan Pajak Daerah yang dilakukan oleh Wajib Pajak Daerah/ pengusaha; - Meningkatkan kepatuhan WP terhadap pelaporan pajak daerah	BPKPD
	k. Terkait dengan anggaran Belanja Tidak Terduga (BTT) sebesar 128 Milyar Rupiah sebagai hasil dari refocusing dan realokasi anggaran dalam rangka penanganan pandemi covid 19, namun kenyataanya secara riil hanya terserap sebesar 40 Milyar Rupiah. Kami menganggap penggunaan dana BTT sebesar 40 Milyar Rupiah itu menyisakan banyak program kegiatan yang tidak bisa terlaksana sebagai	- Pelaksanaan *refocusing* dan realokasi anggaran merupakan kebijakan Pemerintah Pusat dalam rangka penanganan pandemic Covid-19 yaitu sebesar 35% dari belanja barang dan jasa serta belanja modal. Sehingga alokasi anggaran BTT untuk penanganan Covid-19 sebesar Rp128.472.935.612,81 dengan rencana kebutuhan belanja (RKB) sebesar Rp78.510.920.764,00 (berdasarkan RKB OPD pengampu yang menangani Covid-19). - Dari anggaran/RKB sebesar Rp78.510.920.764,00 terealisasi Rp42.825.997.945,46 atau 54,55%, namun demikian Pemerintah Kota Mojokerto telah berhasil melaksanakan upaya pencegahan dan penanganan Covid-19 melalui bidang kesehatan, bidang pemulihan ekonomi	Pelaksanaan *refocusing* dan realokasi anggaran merupakan kebijakan Pemerintah Pusat dalam rangka penanganan pandemi Covid-19 yaitu sebesar 35% dari belanja barang dan jasa serta belanja modal.	BPKPD

No	Rekomendasi	Tindak Lanjut	Tujuan/Masalah Yang Diselesaikan	Perangkat Daerah
	akibat refocusing dan realokasi anggaran.	serta jaring pengaman sosial di lingkungan Pemerintah Kota Mojokerto		
	l. Terdapat SILPA sebesar 187 Milyar Rupiah dari total APBD Tahun Anggaran 2020, besarnya SILPA ini menunjukkan bahwa program yang dicanangkan tersebut kurang perhitungan atau perencanaannya kurang matang sehingga tidak dapat diimplementasikan. Selain itu, sesuai dengan ketentuan yang berlaku bahwa SILPA yang ada dalam APBD maksimal 15 % dari total APBD, SILPA ini sudah melebihi ketentuan dimaksud.	Besarnya SiLPA ini sebagian besar berasal dari sisa alokasi BTT untuk penanganan Covid-19 (alokasi anggaran BTT Rp128.472.935.612,81 sedangkan realisasi BTT adalah sebesar Rp 42.825.997.945,46).	Penganggaran SiLPA telah disesuaikan dengan regulasi dan aturan yang berlaku.	BPKPD
	m. Dampak dari keadaan huruf k dan l banyak belanja modal yang tidak terserap yang berarti perencanaannya kurang baik karena tidak dapat direalisasikan.	Perencanaan penganggaran telah dilakukan dengan baik, namun di TA 2020 terjadi pandemi bencana non alam (covid-19) di seluruh dunia sehingga dilakukan *refocusing* dan realokasi anggaran sesuai dengan regulasi yang diterbitkan oleh Pemerintah Pusat	Perencanaan penganggaran Pemerintah Kota Mojokerto telah mengacu kepada regulasi dan ketentuan yang berlaku.	BPKPD
	n. Terhadap Target Pajak Daerah dan Retribusi daerah yang tidak mencapai target atau yang sudah mencapai target, kami menganggap adanya kelemahan manajerial dari pimpinan perangkat daerah pemungut atau kepala daerah. Hal ini perlu	Berdasarkan data yang ada pada Laporan Pertanggungjawaban APBD Tahun 2020 pendapatan Pajak Daerah terealisasi 115,69% dan Pendapatan Restribusi Daerah terealisasi sebesari 117,53%	Capaian perolehan pajak dan retribusi daerah yang optimal	BPKPD

No	Rekomendasi	Tindak Lanjut	Tujuan/Masalah Yang Diselesaikan	Perangkat Daerah
	menjadi perhatian di tahun 2021 agar perolehan pajak daerah dan retribusi daerah bisa optimal sesuai dengan target yang telah ditetapkan dengan memperhatikan potensi yang ada di Kota Mojokerto serta daya dukung keakurasian data			
11	***Bidang Pendidikan dan Kebudayaan***			
	a. Belum terlihat penyesuaian pelayanan pendidikan di era pandemi dan pasca pandemi baik dari sisi manajemen pendidikan dan penguatan sarana prasarana pendidikan dengan memanfaatkan teknologi informasi	Dalam meningkatan sarana prasana pendidikan dengan memanfaatkan teknologi informasi lembaga lembaga di naungan Dinas Pendidikan sudah meningkatkan *bandwith* internet yang dikelola menggunakan dana BOS. Sedangkan inovasi pembelajaran yang dilakukan selama Pandemi adalah : - Pemberian Paket Data / Kuota Internet Gratis bagi siswa SD/SMP - Lomba Video Pembelajaran Daring bagi siswa SD/SMP dan para guru SD/SMP	Dilaksanakannya peningkatan bandwith untuk menunjang pelayanan pendidikan	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	b. Strategi penguatan kompetensi tenaga pendidik yang bersertifikat perlu dipertajam.	Peningkatan kompetensi guru melalui kegiatan Diklat / Bintek / Pelatihan secara terus menerus dan berkesinambungan baik secara mandiri oleh guru dengan menggunakan dana seritifikasi guru secara personal maupun dana dari Pemerintah Kota melalui Dinas P dan K sehingga upaya peningkatan kompetensi guru akan dapat terealisasikan. UKG dan PPG yang merupakan syarat untuk mendapatkan sertifikasi adalah kewenangan Kemendikbud namun kami senantiasa berkoordinasi untuk meningkatkan kompetensi Guru.	Tahun 2020 Diklat / Bintek / Pelatihan secara luring yang diselenggarakan oleh Dinas P dan K tidak dilaksanakan karena adanya refocusing anggaran, sedangkan moda pelatihan secara daring tetap berjalan	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

<table>
<tr><th>No</th><th>Rekomendasi</th><th>Tindak Lanjut</th><th>Tujuan/Masalah Yang Diselesaikan</th><th>Perangkat Daerah</th></tr>
<tr>
<td></td>
<td>c. Penguatan kompetensi tenaga pendidik baik di jenjang Diknas maupun jenjang PAUD & PNF memiliki anggaran yang besar namun capaiannya rendah. Seperti penguatan kompetensi tenaga pendidik jenjang PAUD & TNF dengan realisasi anggaran sebesar Rp 3,1 Milyar namun realisasi jumlah pendidik yang bersertifikat profesi 0 (nol). Alasannya adanya refocusing, namun dalam realisasi anggaran muncul angka 3,1 Milyar rupiah.</td>
<td>Kegiatan Penguatan Kompetensi Tenaga Pendidik Jenjang PAUD dan PNF memiliki beberapa sub kegiatan, antara lain sebagai berikut:
<table>
<tr><th>Sub Kegiatan</th><th>Indikator Keluaran</th><th>Realisasi</th></tr>
<tr><td>1. Sinkronisasi dan validasi data tunjangan profesi pendidik</td><td>1. Jumlah Pendidik yang Bersertifikat Profesi adalah 72 Orang</td><td>1. Tidak terealisasi</td></tr>
<tr><td>2. Pelaksanaan Uji Kompetensi bagi Pendidik Jenjang PAUD (Seleksi Guru Berprestasi)</td><td>2. Jumlah Peserta Guru Berprestasi sebanyak 64 orang</td><td>2. Terealisasi 75%</td></tr>
<tr><td>3. Pelatihan Bagi Pendidik untuk Memenuhi Standar Kompetensi</td><td>3. Jumlah Peserta Pelatihan pembelajaran bagi pendidik 500 orang</td><td>3. Terealisasi 50%</td></tr>
<tr><td>4. Kegiatan PPG</td><td>4. Jumlah pendidik yang lulus UKG 23%</td><td>4. Terealisasi dengan dana pusat</td></tr>
<tr><td>5. Pengembangan Penilaian Angka Kredit bagi tenaga pendidik PAUD</td><td>5. Jumlah pendidik yang mampu menyusun DUPAK 20 orang</td><td>5. Tidak Terealisasi</td></tr>
<tr><td>6. Honorarium GTT PTT</td><td>6. Jumlah pendidik yang terdata secara valid 150 orang</td><td>6. Terealisasi</td></tr>
</table>
Realisasi anggaran sebesar 3,1 Milyar rupiah pada Kegiatan Penguatan Kompetensi Tenaga Pendidik jenjang PAUD dan PNF digunakan untuk kegiatan:</td>
<td>Meningkatnya akses dan kualitas pendidikan</td>
<td></td>
</tr>
</table>

No	Rekomendasi	Tindak Lanjut	Tujuan/Masalah Yang Diselesaikan	Perangkat Daerah
		- Honorarium GTT PTT - Pelatihan Peningkatan Kompetensi Bagi Pendidik - Seleksi Guru Berprestasi Jumlah pendidik bersertifikat profesi pada tahun 2020 adalah 0 (nol) dikarenakan pada Kegiatan PPG Tahun 2019 yang dilaksanakan oleh Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan, peserta untuk jenjang PAUD dinyatakan tidak ada yang lulus, sehingga pada tahun 2020 pendidik jenjang PAUD tidak ada yang menerima sertifikat profesi. Jumlah pendidik bersertifikat profesi jenjang PAUD sampai dengan tahun 2020 adalah sebanyak 171 orang.		
	d. Pada era pandemi, pilihan pembelajaran dengan memanfaatkan Teknologi Informasi menjadi alternatif solusi, hal ini perlu didukung dengan anggaran peningkatan teknologi informasi dalam proses pembelajaran di sekolah.	Pada era pandemi saat ini pembelajaran siswa di Kota Mojokerto dilaksanakan secara daring, pembelajaran daring tersebut telah dianggarkan dengan bantuan paket kuota internet dari Pemerintah Kota Mojokerto dan Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan untuk diberikan kepada siswa dan guru untuk peningkatan teknologi informasi dalam proses pembelajaran di sekolah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan memberikan BIMTEK / Pelatihan bagi guru untuk pembuatan media pembelajaran berbasis TIK agar guru lebih kreatif dalam kegiatan belajar mengajar baik secara daring maupun luring	Untuk memenuhi hak seluruh penduduk mendapatkan layanan pendidikan dasar sembilan tahun berkualitas	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	e. Pemkot hendaknya segera meningkatkan kesejahteraan GTT/PTT dengan menaikkan honorariumnya atau disetarakan dengan UMR Kota Mojokerto.	Pada Tahun 2020 Honorarium GTT/PTT di sekolah negeri adalah sebesar Rp1.500.000 /per bulan sedangkan pada tahun 2021 direncanakan adanya kenaikan Honorarium GTT/PTT sebesar Rp1.750.000,- Pada Tahun 2021 telah terealisasikan kenaikan Honorarium GTT/PTT dari semula tahun 2020 sebesar Rp1.500.000,-	Meningkatkan profesionalisme, kualitas, dan akuntabilitas guru dan tenaga kependidikan	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

No	Rekomendasi	Tindak Lanjut	Tujuan/Masalah Yang Diselesaikan	Perangkat Daerah
		menjadi Rp1.750.000,- sesuai dengan Peraturan Walikota Mojokerto Nomor 2 Tahun 2021 tentang Pemberian Honorarium Peningkatan Mutu Pendidikan Guru dan Tenaga Kependidikan Non PNS pada Pendidikan Anak Usia Dini Non Formal, Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama. Selain itu GTT/PTT mendapat honor yang syah dari dana BOS sebesar Rp300.000 untuk GTT/PTT SD dan tambahan Rp400.000 untuk GTT/PTT untuk SMP.		
12	***Bidang Kesehatan***			
	a. Dengan adanya *refocusing* anggaran akibat Pandemi Covid-19 yang dialihkan untuk peningkatan layanan kesehatan agar masyarakat mendapatkan layanan kesehatan lebih baik. Namun hampir semua capaian anggaran dan kinerja tidak mencapai target. Justru beberapa program penting seperti penanganan wabah, capainnya sangat rendah.	- Dari 12 indikator SPM yang sudah mencapai target 100% sebanyak 4 indikator, sedangkan yang mencapai target lebih dari 80% sampai dengan kurang dari 100% sebanyak 6 indikator, dan yang mencapai target kurang dari 80% sebanyak 2 indikator - Sedangkan upaya penanganan wabah yang tidak tercapai adalah kegiatan imunisasi pada balita, dengan realisasi 83% dari target 93% Hal ini di karenakan masa pandemi yang menyebabkan kendala mobilisasi warga untuk datang ke fasilitas pelayanan kesehatan. Upaya Tindak lanjut dengan peningkatan layanan yang di sesuaikan dengan adaptasi kebiasaan baru. Pada tahun 2021 upaya penanganan wabah untuk covid 19 pada kegiatan vaksinasi covid 19 pada tahap I dan II tercapai 97.7% (peringkat 4 di Propinsi Jatim dan peringkat ke 16 nasional) untuk vaksinasi lansia.	Peningkatan capaian kinerja	DKP2KB

No	Rekomendasi	Tindak Lanjut	Tujuan/Masalah Yang Diselesaikan	Perangkat Daerah
		Realisasi capaian anggaran sebesar 89,7% dengan capaian kinerja pada IKU (Indikator Kinerja Utama) secara rata-rata lebih dari 100% maka dapat di artikan bahwa pelaksanaan kinerja menggunakan dana yang effisien.		
	b. Program peningkatan mutu dan layanan kesehatan secara ketercapaian anggaran maupun kinerja belum memenuhi target. Perencanaan dan proses manajerial layanan kesehatan yang matang sepertinya menjadi kendala dari ketidaktercapaian kinerja tersebut.	- Dengan dikeluarkanya SE Menteri Keuangan No. SE- 6 /MK.02/2020 tentang *Refocusing* anggaran Kementrian/Lembaga dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid 19) maka merubah perencanaan anggaran di Dinas Kesehatan akan tetapi bukan menjadi penyebab ketidaktercapaian pada beberapa kinerja. Sedangkan tidak tercapaian kinerja di sebabkan karena pandemi covid - Upaya tindak lanjut yang di lakukan berupa penyesuaian perencanaan anggaran dan pelaksanaan kegiatan program dengan adaptasi kegiatan baru di masa pandemi.	Peningkatan capaian kinerja dan anggaran	DKP2KB
	c. Diperlukan adanya optimalisasi tata Kelola RSUD dan mendorong semua Puskesmas di Kota Mojokerto menerapkan pola BLUD untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan memperluas cakupan pelayanan tidak hanya meliputi wilayah Kota Mojokerto akan tetapi juga dapat dimanfaatkan bagi warga masyarakat diluar Kota Mojokerto.	Dalam rangka memperluas cakupan layanan, RSUD Wahidin Sudiro Husodo telah melakukan: - Akses Jejaring Kamar Bersalin dan Puskesmas PONED (JABERNED) untuk Kasus Maternal/Perinatal di Kabupaten Mojokerto - Pembentukan tim pemasaran - Pemasaran melalui sosial media baik Facebook maupun IG, Radio dan Media Cetak tentang Pelayanan Kesehatan di RSUD (CATHLAB, ESWL, Poli Tumbuh Kembang Anak, Poli Bedah Plastik/Estetika). - Aktif berkegiatan di moment-moment yang berkaitan dengan hari-hari peringatan.	Meningkatnya kunjungan pasien (anak, dewasa, bayi dan ibu) khususnya kasus emerging dan kasus kematian serta kasus kecacatan dapat diturunkan di RSUD dr. Wahidin Sudiro Husodo. Serta meningkatkan aksebilitas dan kualitas Pelayanan Kesehatan kepada masyarakat.	RSUD dr. Wahidin Sudiro Husodo

No	Rekomendasi	Tindak Lanjut	Tujuan/Masalah Yang Diselesaikan	Perangkat Daerah
		Sedangkan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, Dinas KEsehatan Kota Mojokerto telah melakukan langkah-langkah sebagai berikut: - Dari sisi pelayanan dilakukan melalui elektronik yakni pengiriman notifikasi WA kunjungan secara otomatis melalui GAYATRI ke pasien (dalam dan luar Kota Mojokerto) supaya berkunjung ke Puskesmas sesuai jadwal yang telah ditetapkan - Puskesmas yang belum BLUD adalah Puskesmas Kranggan, perencanaan BLUD Puskesmas Kranggan dianggarkan tahun 2022 melalui PAK, sedangkan proses persyaratan administrative akan dimulai sejak awal tahun 2022 - Tahun 2021 anggaran banyak digunakan untuk penanganan Covid 19 dan persiapan-persiapan akreditasi Puskesmas Kranggan.		
	d. Perlunya peningkatan pelayanan yang ada di RSUD terutama masalah keamanan, kebersihan dan kenyamanan, karena masih banyaknya keluhan dari masyarakat terkait hal tersebut.	Untuk meningkatkan mutu layanan, RSUD Wahidin Sudiro Husodo, telah melakukan langkah-langkah sebagai berikut: a. Keamanan - Dilakukan pembinaan rutin Petugas Keamanan RSUD oleh Polres Kota Mojokerto. - Petugas Keamanan melakukan *Controlling* yang terjadwal dan membuat laporan evaluasi hasil kegiatan b. Optimalisasi Pemantauan keamanan didalam dan diluar gedung dengan memaksimalkan CCTV c. Kebersihan - Dilakukan pembinaan rutin keamanan oleh Pimpinan dan Pihak Ketiga,	Memberikan rasa aman, nyaman serta lingkungan yang bersih bagi masyarakat yang berkunjung ke RSUD	RSUD dr. Wahidin Sudiro Husodo

No	Rekomendasi	Tindak Lanjut	Tujuan/Masalah Yang Diselesaikan	Perangkat Daerah
		- Penambahan tenaga Kebersihan dari Pihak Ketiga untuk area yang telah ditetapkan. - Meningkatkan kualitas SDM dari petugas kebersihan internal dengan memberikan pelatihan oleh narasumber dari Luar Rumah Sakit. d. Kenyamanan - Dilakukan Zonasi area Covid-19 dan Non Covid-19 - Dilakukan pelatihan service exelent bagi petugas pelayanan RSUD		
	e. Perlunya peremajaan fasilitas medis serta sarana dan prasarana penunjang pelayanan kesehatan yang ada di RSUD dan Puskesmas.	Terkait dengan peremajaan fasilitas medis dan sarana prasarana kesehatan, RSUD selalu melakukan identifikasi fasilitas medis serta sarana dan prasarana penunjang pelayanan kesehatan yang membutuhkan penggantian, pemeliharaan dan kalibrasi. Sedangkan peremajaan fasilitas medis dan sarana prasarana penunjang kesehatan di Puskesmas telah dilakukan beberapa hal sebagai berikut: - Pengajuan kebutuhan sarpras, alkes Puskesmas dilakukan secara rutin setiap tahun - Untuk fasilitas medis serta sarpras penunjang pelayanan kesehatan tercatat di Aplikasi ASPAK dan jika ditemukan adanya kesenjangan/ Gap antara data ASPAK dengan kebutuhan sarpras dan alkes sesuai standar Puskesmas maka kebutuhan sarpras dan alkes Puskesmas bisa mengajukan usulan ke DKPPKB	Menjamin Mutu dan Fasilitas layanan Kesehatan yang tersedia di RSUD layak di operasionalkan. Serta pemenuhan sarana prasarana untuk pelayanan kesehatan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan oleh Kemenkes	RSUD dr. Wahidin Sudiro Husodo
	f. Masyarakat perlu didorong untuk selalu meningkatkan pelaksanaan protokol Kesehatan meliputi:	Untuk meningkatkan protokol kesehatan, Pemerintah Kota Mojokerto telah melakukan langkah-langkah sebagai berikut: a. Penyediaan tempat cuci tangan :	Menangulangi penyebaran pandemi covid-19	DKP2KB

No	Rekomendasi	Tindak Lanjut	Tujuan/Masalah Yang Diselesaikan	Perangkat Daerah
	1. Penyediaan tempat cuci tangan; 2. Penyediaan masker medis; 3. Pemeriksaan suhu tubuh; 4. Penyemprotan desinfektan secara berkala; 5. Pemasangan SOP protokol Kesehatan. 6. Penerapan perilaku hidup bersih dan sehat/PHBS.	- Pembentukan RW Cuci Tangan Pakai Sabun dimana setiap rumah harus menyediakan sarana Cuci Tangan Pakai Sabun secara swadaya untuk meningkatkan peran masyarakat - Koordinasi lintas sektor terkait pengadaan sarana prasarana CTPS di tempat umum di kelurahan dan perkantoran baik swasta maupun pemerintah b. Penyediaan masker medis Telah dibagikan sebanyak 78.580 masker kain dari Kementerian Kesehatan untuk ketua RT/RW, kader motivator, ASN, guru, santri pondok pesantren dan masyarakat. c. Pemeriksaan suhu tubuh Telah dibagikan sejumlah alat pemeriksaan suhu tubuh ke semua kelurahan yang bisa digunakan untuk kegiatan posyandu dan sebagainya d. Penyemprotan disinfektan secara berkala Penyemprotan desinfektan dilakukan secara berkala oleh kelurahan untuk rumah penderita covid 19 e. Pemasangan SOP Protokol Kesehatan - Pembagian poster, leaflet, banner berisi anjuran dan cara Protokol kesehatan di TTU dan masing-masing RT - Menyediakan media kampanye lewat flasdisk yang diputar di tempat-tempat ibadah di Kota Mojokerto terkait pelaksanaan Protokol Kesehatan - Menyebarkan informasi protokol kesehatan melalui media sosial (facebook, IG) dan media elektronik /radio) f. Penerapan PHBS		

No	Rekomendasi	Tindak Lanjut	Tujuan/Masalah Yang Diselesaikan	Perangkat Daerah
		- PSN tetap dilaksanakan oleh kader motivator dengan menerapkan protokol Kesehatan - Posyandu balita dilaksanakan sesuai zonasi dan menerapkan protokol kesehatan		
	g. Biaya rapid Antigen bagi masyarakat kota agar di fasilitasi oleh Pemerintah Kota Mojokerto secara gratis. Karena saat ini masih banyak dijumpai Rapid Antigen yang berbayar.	Terima kasih atas rekomendasinya a. Selama ini Pemerintah Kota Mojokerto sudah menerapkan pemeriksaan Antigen gratis bagi : - Ibu Hamil - Peserta UTBK / SNMPTN - Pondok Pesantren - Untuk kegiatan Tracing - Untuk kedinasan - Pasien RSUD yang akan melaksanakan tindakan operasi b. Untuk Pelaksanaan Rapid Antigen Gratis untuk kegiatan skreening lainnya akan dibuat PERWALI c. Rapid Antigen yang berasal dari Dinkes Provinsi Jatim hanya untuk keperluan tracing	Rapid Antigen untuk keperluan skreening bagi masyarakat kota terfasilitasi oleh Pemerintah	DKP2KB
	h. Banyaknya keluhan dari Tenaga Kesehatan dikarenakan tunjangan penanganan Covid-19 belum diterimakan/belum cair. Oleh karena itu, Pemerintah Kota Mojokerto diharapkan untuk bisa mendorong Pemerintah Pusat untuk segera mencairkan tunjangan tersebut.	Rekomendasi diperhatikan - Insentif Nakes tahun 2020 penanganan Covid 19 belum bisa dicairkan karena masih menunggu kebijakan Kemenkes - Memerlukan waktu untuk melakukan verifikasi berkas pertanggung jawaban kegiatan - Namun Terhadap insentif tenaga kesehatan yang menangani covid-19 telah dialokasikan dalam DPA Dinas Kesehatan dan RSUD melalui Peraturan Walikota Mojokerto No.20 Tahun 2021 tentang Perubahan Peraturan	Pembayaran insentif tenaga kesehatan berpedoman pada regulasi dan ketentuan yang berlaku	DKP2KB

No	Rekomendasi	Tindak Lanjut	Tujuan/Masalah Yang Diselesaikan	Perangkat Daerah
		Walikota Mojokerto No. 120 Tahun 2020 tentang Penjabaran APBD TA 2021		
13	***Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana***			
	a. Agar Pemerintah Kota Mojokerto mempertahankan Kota Layak Anak dan perlu melakukan akselerasi agar Kota Mojokerto menjadi Kota Layak Anak.	Dalam rangka mempertahankan predikat Kota Layak Anak, Pemerintah Kota Mojokerto akan melakukan beberapa hal sebagai berikut: - Optimalisasi Rapat Koordinasi dan hasil Tim Gugus Tugas KLA Masa bakti 2021 - 2023; - Tim Gugus Tugas KLA akan melaksanakan pemenuhan Hak dan Perlindungan Khusus Anak - Lembaga Masyarakat dan Dunia Usaha akan ikut berperan dalam upaya percepatan KLA di Kota Mojokerto	Mewujudkan Pengarusutamaan Hak-hak Anak (PUHA) dan mewujudkan keluarga sehat, sejahtera dan mandiri	DSP3A
	b. Pemerintah Kota Mojokerto perlu melakukan akselerasi Perencanaan Pembangunan Responsif Gender dan memperkuat serta membina forum anak.	Akselerasi Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender di Kota Mojokerto dilakukan melalui: - Optimalisasi kinerja Tim Driver Pengarusutamaan Gender. Tim Driver PUG paham dan melaksanakan tugas dan fungsi serta peran OPD dalam Tim Driver PUG - Melakukan Pembinaan Forum Anak di Tingkat Kota sampai Kelurahan. Forum Anak mampu menjalankan perannya sebagai Pelopor dan Pelapor (2P)	Memberikan manfaat yang adil bagi kesejahteraan laki-laki dan perempuan, termasuk anak laki laki dan anak perempuan dari penggunaan belanja/ pengeluaran pembangunan	
	c. Tidak optimalnya Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Anak dan Perempuan mulai dari sektor/tingkat Kelurahan hingga Pemerintah Kota, padahal sudah ada Perwali yang mengaturnya, mengapa belum di maksimalkan atau di jalankan padahal masih	Untuk mengoptimalkan Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Anak dan Perempuan, Pemerintah Kota Mojokerto akan melakukan rencana aksi sebagai berikut: - Meningkatan koordinasi dengan Instansi terkait yang tergabung dalam anggota P2TP2A; - Menyediakan fasilitas Ruang Khusus untuk konseling bagi korban kekerasan;	Menurunnya kasus kekerasan di kota Mojokerto dan meningkatnya cakupan pelayanan pendampingan korban kekerasan	DSP3A

No	Rekomendasi	Tindak Lanjut	Tujuan/Masalah Yang Diselesaikan	Perangkat Daerah
	dijumpai banyaknya kekerasan terhadap perempuan, anak dan human trafficking	- Menambah jejaring dengan melibatkan masyarakat dalam perlindungan perempuan dan anak		
14	***Bidang Sosial***			
	a. Pada program bina pemberdayaan PMKS dan PSKS, kegiatan yang dilakukan dengan memperkuat pembinaan dan fasilitasi KUBE. Perlu dijelaskan juga bagaimana strategi dan pencapaian pemberdayaan PMKS dan PSKS non kelompok.	- Pelaksanaan strategi pemberdayaan PMKS non kelompok yaitu dengan penyelenggaraan pemantapan serta pendampingan pada masing - masing anggota KUBE Fakir Miskin dalam pelaksanaan usaha ekonomi produktifnya, sedangkan untuk PSKS non kelompok yaitu dengan pelatihan serta pendampingan anggota PSKS guna meningkatkan kemampuan dan keterampilannya - Pencapaian hasil KUBE Fakir Miskin non kelompok yang telah mendapatkan pemantapan dan pendampingan dalam melaksanakan usaha ekonomi produktifnya telah mendapatkan hasil panen yang bisa dinikmati oleh masing-masing anggota KUBE, sedangkan untuk PSKS non kelompok dengan adanya pelatihan serta pendampingan anggota PSKS maka telah meningkatkan kinerja anggota PSKS dalam rangka pendampingan dan pembinaan kepada PMKS.	Penjabaran strategi dan pencapaian pemberdayaan PMKS dan PSKS non Kelompok yang lebih detail pada Program bina pemberdayaan PMKS dan PSKS pada laporan pelaksanaan kinerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan Dan Anak.	DSP3A
	b. Perlu dibentuk aplikasi bansos Kota Mojokerto, karena fakta di lapangan masih banyak warga yang belum tercover oleh bantuan sosial terutama bantuan PKH, banyak warga yang belum mendapatkan bantuan tersebut.	Rekomendasi diterima, pengembangan aplikasi cek bansos Kota Mojokerto akan diadakan dalam waktu dekat	Adanya aplikasi berbasis online/internet untuk data dan pengecekkan penerima bantuan sosial secara ‘’one klik	DSP3A
15	***Bidang Perumahan dan Permukiman***			

No	Rekomendasi	Tindak Lanjut	Tujuan/Masalah Yang Diselesaikan	Perangkat Daerah
	a. Perlu ditingkatkan lagi pelaksanaan program bedah rumah, mengingat masih dalam kondisi pandemi covid-19. PUPRPKP	Pada tahun anggaran 2021 Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman telah mendapat alokasi anggaran untuk kegiatan bedah rumah sebesar Rp2.800.000.000,- anggaran tersebut berasal dari Dana Alokasi Umum (DAU) sebesar Rp1.000.000.000,- dan dari Dana Alokasi Khusus (DAK) sebesar Rp1.800.000.000,-. Adapun rincian penggunaannya untuk masing-masing penerima bantuan akan mendapat bantuan untuk pembelian material sebesar Rp17.500.000,- dan untuk ongkos tukang sebesar Rp2.500.000,-	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman akan terus berupaya untuk meningkatkan kuantitas dan kualitas kegiatan bedah rumah sehingga kedepan semua warga Kota Mojokerto memperoleh tempat tinggal yang layak huni.	DPUPRPERAKIM
	b. Perlunya memaksimalkan peran CSR untuk mendukung program bantuan rumah swadaya.	Pemerintah Kota Mojokerto terus berupaya memaksimalkan CSR dalam pelaksanaan program pembangunan. Untuk itu, Tanggal 12 April 2021 telah dikukuhkan Forum Komunikasi Tanggung Jawab Sosial Perusahaan / CSR. Forum Komunikasi TSP/CSR Bertujuan memaksimalkan peran CSR untuk mendukung program-program Pemerintah Daerah, salah satunya program bedah rumah tidak layak huni dan bantuan pemasangan listrik bagi Rumah Tangga Miskin.	Terwujudnya sinergitas pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial dengan Program Pemerintah Daerah	BAPPEDALITBANG
	c. Optimaslisasi tata kelola prasarana, sarana dan utilitas umum (PSU) perumahan dan kawasan permukiman agar menjadi bagian dari aset Pemerintah Kota Mojokerto yang diperkuat melalui pembentukan perda penyerahan PSU perumahan dan permukiman. Bila	Pemerintah Kota Mojokerto melalui Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman pada tahun anggaran 2020 telah berhasil melaksanakan proses serah terima asset prasarana, sarana dan utilitas umum (PSU) sebanyak 3 (tiga) perumahan. Pada tahun 2021 Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman merencanakan akan melaksanakan serah terima PSU sebanyak 12 (dua belas) perumahan dan diharapkan pihak pengembang juga bisa pro	Seluruh penyerahan PSU perumahan dari pihak pengembang yang sudah memenuhi syarat akan dicatat sebagai aset milik Pemerintah Kota Mojokerto.	DPUPRPERAKIM

No	Rekomendasi	Tindak Lanjut	Tujuan/Masalah Yang Diselesaikan	Perangkat Daerah
	perlu bekerjasama dengan KPK untuk optimalisasi target penyerahan PSU dari pengembang ke Pemerintah Kota. BPKPD perlu mencatat penerimaan aset PSU.	aktif untuk segera menyerahkan PSUnya ke Pemerintah Kota Mojokerto. Selanjutnya BPKPD (Bidang Aset) akan mencatat perolehan PSU sebagai aset milik Pemerintah Kota Mojokerto berdasarkan Berita Acara Serah Terima dari pengembang dengan Dinas PUPRPKP. Atas PSU dari pihak pengembang yang sudah memenuhi syarat (*clear and clean)*, akan dilakukan proses pensertifikatan aset tanah menjadi milik Pemerintah Kota Mojokerto.		
16	***Bidang Ekonomi kreatif dan kewirausahaan***			
	Dalam rangka peningkatan ekonomi kreatif dan kewirausahaan perlu dilakukan sosialisasi Perda Ekonomi Kreatif dan Kewirausahaan, Perda CSR, Perda RPIK dan RIPPAR Kota Mojokerto. Membina kegiatan UMKM berbasis digital, mengoptimalkan Forum CSR. Menyusun Kajian Potensi CSR, Rencana Induk Ekonomi Kreatif dan menyediakan inkubator wirausaha di Kota Mojokerto.	Terimakasih atas rekomendasi yang telah diberikan. Atas rekomendasi tersebut, Pemerintah Kota Mojokerto telah dan akan melakukan kegiatan-kegiatan sebagai berikut: a. Sosialisasi Ekonomi kreatif belum dilaksanakan karena Raperdanya masih dalam proses b. Sosialisasi Perda dan Perwali CSR akan dilakukan kepada perusahaan dan BUMN/BUMD pada tahun 2022 c. Mengoptimalkan Forum CSR dengan melakukan pengukuhan pada tanggal 12 April 2021 dan mengadakan pertemuan rutin setiap 3 bulan sekali d. Penyusunan kajian potensi CSR akan direncanakan dan dianggarkan pada tahun 2022 e. Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Industri Kota Mojokerto Tahun 2018 sd 2038 ditetapkan tanggal 8 Juli 2019. Perda RPIK akan disosialisasikam secara internak kepada PD terkait dan para pelaku Industri di Kota Mojokerto. f. Pembinaan UMKM berbasis digital sudah dilaksanakan dan sudah pada tahap sosialisasi aplikasi (Meeber). Selain itu,	- Tujuan Penyusunan RPIK ini adalah sebagai pedoman bagi pemerintah Daerah dan pelaku industri dalam menentukan arah pembangunan industri di Kota Mojokerto - Mempersiapkan pelaku usaha UMKM agar kapasitasnya produksi dan pemasaran lebih meningkat - Pemasaran produk UMKM semakin luas jangkauannya - Agar pelaku UMKM bisa menjadi vendor pengadaan barang dan jasa	DISKOPUKMPERINDAG

<table>
<tr><th>No</th><th>Rekomendasi</th><th>Tindak Lanjut</th><th>Tujuan/Masalah Yang Diselesaikan</th><th>Perangkat Daerah</th></tr>
<tr><td></td><td></td><td>pembinaan kegiatan UMKM berbasis digital telah dilakukan melalui :
- Pelatihan untuk meningkatkan SDM UMKM melalui pembinaan da pendampingan digitalisasi bagi UMKM
- Perluasan akses pasar, meliputi:
1) Stand PPUKM di Sunrise Mall
2) Produk UMKM masuk ke pasar modern (alfamart, indomaret dan toko swalayan lainnya)
3) Bekerja sama dengan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) (BeLa Pengadaan/Bhinneka.com, e-katalog jatim dan BEJO Jatim)
4) Menggencarkan gerakan BBI (bangga Buatan Indonesia)
g. Pada Tahun 2021 akan dilaksanakan Inkubasi Wirausaha terhadao 6.303 KK yang telah di data peminatan terhadap penerima Bansos.
h. Telah di siapkan tenaga pendamping dari UMKM untuk mendampingi inkubasi wirausahan selama 6 bulan</td><td>pemerintah
- Menghimbau instansi pemerintah/BUMD/swasta di Kota Mojokerto untuk memakai produk UMKM
- Agar penerima bansos menjadi wirausaha baru yang mandiri sehingga tidak lagi tergantung dari bansos dari Pemerintah</td><td></td></tr>
<tr><td>17</td><td colspan="4">Capaian Indikator Makro Ekonomi</td></tr>
<tr><td></td><td>a. Capaian IPM Kota Mojokerto tahun 2020 sebesar 78,04, Angka tersebut apabila dimasukkan dalam kriteria UNDP termasuk dalam kelompok IPM “Tinggi” (70≤IPM<80). Secara status ketercapaian IPM, Kota Mojokerto menempati posisi 7 di Jawa timur. Sedangkan dari sisi kecepatan</td><td>Untuk melengkapi data capaian IPM Kota Mojokerto tahun 2020, berikut ini disajikan data IPM beserta komponen pendukungya tahun 2016 – 2020 sebagaimana tabeL dibawah ini.
IPM Kota Mojokerto, Jawa Timur dan Nasional Tahun 2015 – 2020
<table><tr><th>Uraian</th><th>2016</th><th>2017</th><th>2018</th><th>2019</th><th>2020</th></tr><tr><td>Kota Mojokerto</td><td>76,38</td><td>76,77</td><td>77,14</td><td>77,96</td><td>78,04</td></tr></table></td><td>IPM merupakan indikator penting untuk mengukur keberhasilan dalam upaya membangun kualitas hidup manusia (masyarakat/ penduduk). Selain itu, IPM dapat menentukan peringkat atau level pembangunan suatu wilayah/negara</td><td></td></tr>
</table>

<table>
<tr><th>No</th><th>Rekomendasi</th><th>Tindak Lanjut</th><th>Tujuan/Masalah Yang Diselesaikan</th><th>Perangkat Daerah</th></tr>
<tr><td></td><td>IPM yang diukur dari pertumbuhan IPM tahun 2019 ke tahun 2020 masih dibawah rata-rata pertumbuhan IPM di Jawa Timur yang sebesar 26,81%. Secara kuadran IPM, Kota Mojokerto berada di kuadran II yang berarti IPM termasuk kelompok tinggi dan memiliki kecepatan pertumbuhan IPM yang rendah atau di bawah rata-rata. Hal ini memerlukan upaya keras dari pemerintah Kota Mojokerto untuk terus memperhatikan kemajuan pembangunan manusia di wilayah Kota Mojokerto. Pada dokumen LKPJ perlu ditampilkan tiga aspek esensial pembentuk IPM agar dapat terlihat pertumbuhan dari masing-masing aspeknya.</td><td>
<table>
<tr><td>Jawa Timur</td><td>69,74</td><td>70,27</td><td>70,77</td><td>71,5</td><td>71,71</td></tr>
<tr><td>Nasional</td><td>70,18</td><td>70,81</td><td>71,39</td><td>71,92</td><td>71,94</td></tr>
</table>
Pertumbuhan IPM Kota Mojokerto, Jawa Timur dan Nasional Tahun 2015 – 2020 (%)
<table>
<tr><th>Uraian</th><th>2016</th><th>2017</th><th>2018</th><th>2019</th><th>2020</th></tr>
<tr><td>Kota Mojokerto</td><td>1,11</td><td>0,51</td><td>0,48</td><td>1,06</td><td>0,10</td></tr>
<tr><td>Jawa Timur</td><td>1,15</td><td>0,76</td><td>0,71</td><td>1,03</td><td>0,29</td></tr>
<tr><td>Nasional</td><td>0,91</td><td>0,90</td><td>0,82</td><td>0,74</td><td>0,03</td></tr>
</table>
Perubahan IPM Kota Mojokerto, Jawa Timur dan Nasional Tahun 2015 – 2020
<table>
<tr><th>Uraian</th><th>2016</th><th>2017</th><th>2018</th><th>2019</th><th>2020</th></tr>
<tr><td>Kota Mojokerto</td><td>0,84</td><td>0,39</td><td>0,37</td><td>0,82</td><td>0,08</td></tr>
<tr><td>Jawa Timur</td><td>0,79</td><td>0,53</td><td>0,5</td><td>0,73</td><td>0,21</td></tr>
<tr><td>Nasional</td><td>0,63</td><td>0,63</td><td>0,58</td><td>0,53</td><td>0,02</td></tr>
</table>
Komponen IPM Kota Mojokerto Tahun 2016 - 2020
<table>
<tr><th>Uraian</th><th>2016</th><th>2017</th><th>2018</th><th>2019</th><th>2020</th></tr>
<tr><td>Indeks Pendidikan</td><td>0,714</td><td>0,716</td><td>0,717</td><td>0,726</td><td>0,731</td></tr>
<tr><td>Indeks Kesehatan</td><td>0,812</td><td>0,813</td><td>0,816</td><td>0,819</td><td>0,82</td></tr>
<tr><td>Indeks PPP</td><td>0,768</td><td>0,777</td><td>0,785</td><td>0,797</td><td>0,793</td></tr>
</table>
Pertumbuhan Komponen IPM Kota Mojokerto Tahun 2016 - 2020 (%)
<table>
<tr><th>Uraian</th><th>2016</th><th>2017</th><th>2018</th><th>2019</th><th>2020</th></tr>
<tr><td>Indeks Pendidikan</td><td>1,85</td><td>0,28</td><td>0,14</td><td>1,26</td><td>0,69</td></tr>
</table>
</td><td></td><td></td></tr>
</table>

<table>
<tr><th>No</th><th>Rekomendasi</th><th>Tindak Lanjut</th><th>Tujuan/Masalah Yang Diselesaikan</th><th>Perangkat Daerah</th></tr>
<tr><td></td><td></td><td>
<table>
<tr><td>Indeks Kesehatan</td><td>0,12</td><td>0,12</td><td>0,37</td><td>0,37</td><td>0,12</td></tr>
<tr><td>Indeks PPP</td><td>1,28</td><td>1,12</td><td>1,07</td><td>1,50</td><td>-0,50</td></tr>
</table>
Perubahan Komponen IPM Kota Mojokerto
Tahun 2016 - 2020
<table>
<tr><th>Uraian</th><th>2016</th><th>2017</th><th>2018</th><th>2019</th><th>2020</th></tr>
<tr><td>Indeks Pendidikan</td><td>0,013</td><td>0,002</td><td>0,001</td><td>0,009</td><td>0,005</td></tr>
<tr><td>Indeks Kesehatan</td><td>0,001</td><td>0,001</td><td>0,003</td><td>0,003</td><td>0,001</td></tr>
<tr><td>Indeks PPP</td><td>0,010</td><td>0,009</td><td>0,008</td><td>0,012</td><td>-0,004</td></tr>
</table>
Data di atas menunjukkan bahwa IPM Kota Mojokerto setiap tahunnya selalu mengalami peningkatan. Untuk kontribusi masing-masing komponen pembentuk IPM yang terdiri dari Indeks Pendidikan dan Indeks Kesehatan selama lima tahun terakhir terus mengalami pertumbuhan dan perubahan yang positif. Sedangkan Indeks PPP tahun-tahun sebelumnya mengalami pertumbuhan dan perubahan yang positif, hanya tahun 2020 mengalami pertumbuhan dan perubahan yang negatif. Pertumbuhan dan perubahan negatif ini disebabkan adanya kebijakan secara nasional yang menerapkan pembatasan sosial akibat adanya pandemi covid-19</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td></td><td>b. Angka kemiskinan Kota mojokerto pada 2020 mengalami peningkatan dari 5,15% pada 2019, menjadi 6,24% pada 2020 (meningkat 1,46 ribu jiwa dalam setahun). Memang, tahun 2020, angka</td><td>Angka Kemiskinan Kota Mojokerto meningkat menjadi 6,24 persen di Tahun 2020. Antara lain penyebabnya adalah adanya Pandemi Covid-19 yang mulai menyerang secara masif awal tahun 2020, tepatnya mulai bulan Maret 2020. Dampak pandemi ini luar biasa terhadap aktivitas masyarakat yang tentunya berimbas kepada kondisi perekonomian Kota Mojokerto sepanjang tahun 2020 hingga sekarang.</td><td>Membantu memahami permasalahan kemiskinan Kota Mojokerto dan dengan begitu dapat diambil kebijakan serta program yang tepat, terarah, dan konverhensif untuk</td><td>DSP3A</td></tr>
</table>

No	Rekomendasi	Tindak Lanjut	Tujuan/Masalah Yang Diselesaikan	Perangkat Daerah
	kemiskinan hampir di seluruh kabupatan/kota di Indonesia mengalami peningkatan karena Pandemi Covid-19 yang disebabkan lesunya aktivitas ekonomi. Namun, perlu diingat bahwa penyebab penambahan angka kemiskinan tersebut harus diidentifikasi lebih lanjut, apakah karena pemutusan hubungan kerja (PHK) dari sektor formal, atukah minimnya daya beli masyarakat, sehingga pelaku sektor informal mengalami kesulitan dalam memperoleh penghasilan, atau karena penyebab lainnya. Dalam dokumen LKPJ belum terlihat identifikasi penyebab naiknya angka kemiskinan tersebut. Hal ini berguna dalam skenario kebijakan dalam penanggulangan kemiskinan.	Hal ini terbukti dengan banyaknya indikator makro ekonomi dan sosial lainnya yang menurun drastis, bahkan terkontraksi hingga tumbuh minus. Beberapa indikator tersebut saling terkait dan jelas menunjukan koherensi satu indikator dengan indikator lainnya. - Pertumbuhan ekonomi Kota Mojokerto tahun 2020 terkontraksi hingga -3,69 persen. Hal ini jelas memperlihatkan bahwa aktivitas perekonomian Kota Mojokerto menurun drastis selama pandemi Covid-19. Semua aktivitas sektor/lapangan usaha utama penunjang perekonomian Kota Mojokerto mengalami penurunan, sehingga PDRB per kapita penduduk juga menurun selama 2020. - Karena hampir semua kegiatan ekonomi terdampak serangan Covid-19, akibatnya banyak pekerja yang dirumahkan baik seterusnya maupun sementara, akibatnya Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) meningkat dari 2,65 persen tahun 2019 menjadi 6.74 persen di tahun 2020 - Rasio penduduk yang bekerja di Kota Mojokerto juga menurun signifikan dari 97,37 persen tahun 2019 menjadi 93,26 persen di tahun 2020. - Akibat pemutusan kerja atau pengurangan jam kerja menyebabkan pendapatan yang diterima penduduk Kota Mojokerto ikut menurun, sehingga berdampak pada angka Indeks pengeluaran per kapita penduduk Kota Mojokerto yang menurun dari 0,80 persen di tahun 2019 menjadi 0,79 persen pada tahun 2020. - Dilihat dari rata-rata kalori per kapita Sehari yang dikonsumsi penduduk Kota Mojokerto yaitu sebesar	penanganan kemiskinan Kota Mojokerto di masa mendatang	

No	Rekomendasi	Tindak Lanjut	Tujuan/Masalah Yang Diselesaikan	Perangkat Daerah
		1.913,31 kalori, dimana jumlah konsumsi kalori penduduk Kota Mojokerto masih lebih rendah dibandingkan daerah perkotaan lainnya di Jawa Timur (Sedangkan pengukuran angka kemiskinan mensyaratkan minimal konsumsi 2.100 kalori per kapita Sehari). Sementara untuk rata-rata konsumsi protein per kapita Sehari penduduk Kota Mojokerto sebesar 59,29. Kondisinya juga sama yaitu masih di bawah rata-rata penduduk perkotaan lain di Jawa Timur.		
	c. Tingkat pengangguran terbuka mengalami peningkatan, ke depan perlu dirumuskan strategi dalam menurunkan tingkat pengangguran terbuka melalui pelatihan dan sejenisnya.	Upaya yang dilakukan untuk menurunkan tingkat pengangguran terbuka: - Peningkatan pelaksanaan pelatihan yang dilakukan bidang tenaga kerja maupun melalui UPT BLK Mojokerto Disnakertrans Provinsi Jawa Timur dan juga Pelatihan di program Prakerja. - Sosialisasi ke Bursa Kerja Khusus (SMK) terkait informasi lowongan kerja - Penyebarluasan info lowongan kerja melalui media sosial bidang Tenaga Kerja.	Meningkatkan ketrampilan bagi pencari kerja (pengangguran) untuk meningkatkan kapabilitas, kompetensi, dan daya saing bagi tenaga kerja baik yang memasuki dunia kerja maupun berwirausaha. Masalah yang diselesaikan: Pelaksanaan Pelatihan baik di Bidang Tenaga Kerja, UPT BLK maupun program prakerja, Sosialsisasi di BKK (SMK) dan Penyebarluasan info lowongan kerja melalui media sosial Tenaga Kerja.	DPMPTSPNAKER
	d. Laju pertumbuhan ekonomi Kota Mojokerto mengalami konstraksi sebesar -3,69%. Beberapa kontributor sektoral dari PDRB	Skenario kebijakan Pemerintah Daerah dalam percepatan pemulihan atau pertumbuhan ekonomi: a. Melakukan realokasi dan *refocusing* anggran untuk digunakan dalam rangka penanganan Covid-19. Terutama	Pemulihan ekonomi masyarakat akibat pandemi Covid-19	DISKOPUKMPERINDAG

No	Rekomendasi	Tindak Lanjut	Tujuan/Masalah Yang Diselesaikan	Perangkat Daerah
	mengalami pelambatan, yang terparah adalah Jasa Lainnya (-14,50%), Perdagangan Besar dan Eceran sebesar -9,20 persen; Penyediaan akomodasi dan Makan Minum sebesar -8,16 persen; Jasa Perusahaan sebesar -7,24 persen; Transportasi dan Pergudangan sebesar -6,43 persen; Konstruksi sebesar -6,26 persen; dan Industri pengolahan yang terkontraksi hingga -3,55 persen. Pemerintah Kota Mojokerto perlu melakukan skenario kebijakan dan penguatan fokus program dan kegiatan untuk menumbuhkan lagi kontribusi PDRB sektoral terhadap pertumbuhan ekonomi Kota Mojokerto yang telah mengalami konstraksi yang cukup dalam ini akibat Pandemi Covid-19. Perlu dilakukan penguatan program dan dukungan politik anggaran terhadap sektor-sektor yang mengalami pendalaman konstraksi.	untuk kesehatan, perlindungan sosial, dan mendongkarak ekonomi daerah; b. Masyarakat dan pelaku usaha termasuk UMKM juga mempunyai peran yang strategis dalam mempercepat pemulihan ekonomi. Untuk itu, intrervensi program dan kegiatan telah dan akan dilakukan oleh Pemerintah Kota Mojokerto, Provinsi, dan Pusat, yaitu: - Pelatihan untuk meningkatkan SDM UMKM melalui pembinaan da pendampingan; - Perluasan akses pasar, baik secara online maupun offline; - Fasilitasi program pembiayaan melalui KUR, Dana Bergulir, bantuan wira usaha pemula, Program PUSYAR, dll.		

No	Rekomendasi	Tindak Lanjut	Tujuan/Masalah Yang Diselesaikan	Perangkat Daerah
	e. Dilihat dari Gini rasio, Kota Mojokerto merupakan wilayah yang memiliki ketimpangan sedang yaitu sebesar 0,355. Jika dibandingkan dengan provinsi Jawa Timur dan Indonesia, masih di bawah angka Provinsi Jawa Timur dan Indonesia. Namun, bila dibandingkan dengan Wilayah Gerbangkertosusila, Kota Mojokerto Gini Rasionya tertinggi. Perlu dilakukan formulasi ataupun studi lebih lanjut bagaimana menangani ketimpangan antar wilayah tersebut, sehingga kebijakan ke depan dapat mengurangi ketimpangan antar wilayah.	Rekomendasi diperhatikan, namun demikian untuk menurunkan ketimpangan pendapatan (Gini Ratio), Pemerintah Kota Mojokerto telah dan akan melakukan kebijakan sebagai berikut; 1. Menuntaskan program wajib belajar 12 tahun melalui peningkatan akses dan kualitas pendidikan; 2. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat melalui peningkatan pelayanan dasar publik di tingkat lokal (air bersih, sanitasi, gizi, pengetahuan ibu, dan pelayanan kesehatan) 3. Menurunkan kemiskinan melalui program: pengurangan beban penduduk miskin, subsidi tepat sasaran; dan program-program bantuan sosial lainnya; 4. Memberikan peluang pekerjaan, melalui: peningkatan keahlian dan sertifikasi, program padat karya, membuka peluang investasi, dan mengembangkan sektor pariwisata; 5. Menguatkan ekonomi kerakyatan dengan cara pemberdayaan UMKM, melalui: penciptaan iklim usaha yang kondusif; akses permodalan; pengembangan kemitraan; pelatihan; mengembangkan promosi; dan pembangunan pasar tradisional.	Mengurangi ketimpangan pendapatan atau meningkatkan pemerataan pendapatan masyarakat.	BAPPEDALITBANG
	f. Penurunan dimensi Toleransi turun sebesar 4,45 yakni dari nilai indeks 80,08 pada tahun 2019 menjadi 76,63 di tahun 2020 dalam Indeks Kesalehan Sosial perlu disampaikan apa penyebabnya, karena Kota Mojokerto menggaungkan sebagai kota yang toleran, karena	Dimensi Toleransi terdiri atas 3 indikator utama yakni (1) menghargai perbedaan nilai-nilai kehidupan, (2) tidak memaksakan nilai, dan (3) tidak menghina atau merusak nilai yang berbeda. Data hasil survei IKS Mojokerto tahun 2020 khususnya terkait dimensi Toleransi, diperoleh karakteristik sebagai berikut: - Ketiga indikator dalam dimensi Toleransi mengalami penurunan di seluruh kecamatan: Kranggan, Prajurit Kulon dan Magersari.	Dimensi Toleransi merupakan modal sosial penting untuk terciptanya keharmonisan kehidupan bermasyarakat; akan tetapi tantangan terhadap dimensi toleransi juga senantiasa berkembang baik secara kuantitas mau pun kualitas,	DISKOMINFO, BAPPEDALITBANG, BAKESBANGPOL

No	Rekomendasi	Tindak Lanjut	Tujuan/Masalah Yang Diselesaikan	Perangkat Daerah
	penurunan dimensi toleransi bukan disebabkan oleh berkurangnya aktivitas masyarakat untuk berkerumun. Jika dilihat dari jumlah konflik SARA pada tahun 2020 adalah 0 (nol).	- Dimensi Toleransi lebih rendah untuk responden: perempuan, usia kurang dari 30 tahun, status pekerjaan wirausaha. - Penurunan tertinggi untuk indikator "tidak memaksakan nilai". Berdasarkan hasil data survei tersebut dapat disimpulkan bahwa responden cenderung untuk 'memaksakan nilai' kepada pihak lain, khususnya di kalangan perempuan usia di bawah 30 tahun dan status pekerjaan wirausaha. Hal ini dapat disebabkan oleh beberapa faktor baik internal terkait pemahaman keagamaan yang bisa mengarah ke arah intoleransi; maupun faktor ekternal kondisi atau kejadian di masyarakat, daerah, nasional mau pun global yang dipandang kebebasan dapat memunculkan persoalan-persoalan tertentu. Oleh karena itu, diperlukan tindak lanjut berupa upaya edukasi, literasi dan penguatan kelembagaan sebagai berikut: - Memperkuat program-program FKUB (Forum Komunikasi Umat Beragama) Kota Mojokerto untuk melakukan ceramah atau kegiatan guna meningkatkan kesadaran akan arti pentingnya toleransi dalam kehidupan bermasyarakat, khususnya untuk kalangan perempuan usia di bawah 30 tahun dapat ditindaklanjuti pada program Kegiatan Bagian Kesra dan Bakesbangpol. - Penguatan kurikulum pendidikan anak sekolah baik tingkat PAUD, SD, SMP mau pun SMA untuk peningkatan wawasan kebangsaan dan toleransi; sebagai upaya literasi untuk menangkal perkembangan paham-paham intoleransi baik yang ada di berbagai media sosial (on line) mau pun yang dikembangkan secara khusus oleh pihak-pihak	yakni berkembangnya paham-paham intoleransi. Di masa pandemi Covid 19 yang masih terus berlangsung, dengan adanya pembatasan sosial, di satu sisi menangkal persebaran virus/ pandemi Covid 19, tetapi di sisi lain menyebabkan menurunnya interaksi antar warga. Orang-orang cenderung lebih dekat dengan berbagai media sosial yang ada. Di sisi lain, media sosial sangat rawan sebagai media penyebaran paham-paham yang bersifat intoleransi. Oleh karena itu diperlukan upaya edukasi dan literasi, khususnya untuk sasaran responden yang berdasarkan survei IKS Mojokerto tahun 2020 menunjukkan penurunan dalam dimensi toleransi, yakni di kalangan perempuan, usia di bawah 30 tahun, serta berstatus wirausaha.	

No	Rekomendasi	Tindak Lanjut	Tujuan/Masalah Yang Diselesaikan	Perangkat Daerah
		tertentu yang tidak bertanggungjawab. Bisa ditindaklanjuti program dan kegiatan pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Mojokerto - Pembentukan dan atau penguatan kapasitas kelembagaan "Ikatan Wanita Pengusaha" Kota Mojokerto.dapat ditindaklanjuti Pada Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kota Mojokerto		
	g. Indeks reformasi birokrasi Kota Mojokerto selama dua tahun terakhir memperoleh nilai dengan kategori "B". Artinya, memiliki predikat "cukup baik" dengan penjelasan bahwa penerapan reformasi birokrasi bersifat formalitas dan secara substansi belum mampu mendorong perbaikan kinerja organisasi. Dari 8 area perubahan Reformasi Birokrasi, perlu dipertajam area mana saja yang secara evaluasi mandiri masih belum optimal untuk diterapkan dan perlu mendorong program-program reformasi birokrasi dalam quick wins sehingga terjadi percepatan perbaikan kinerja organisasi.	Dalam rangka meningkatkan kualitas tata kelola birokrasi serta menumbuhkan budaya integritas, kinerja, dan melayani di lingkungan Pemerintah Kota Mojokerto, terdapat beberapa hal yang dilakukan yaitu : - Melakukan penguatan dan penajaman program reformasi birokrasi pada tingkat Pemerintah Kota yang dituangkan dalam Perwali Nomor 52 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Mojokerto serta sedang disusun rencana kerja pada level perangkat daerah agar fokus pada upaya-upaya konkret yang akan dilakukan dalam mewujudkan tata kelola pemerintah yang bersih dan akuntabel, efisien dan efektif, serta pelayanan publik yang berkualitas; - Telah disusun Perwali Nomor 76 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembangunan Agen Perubahan di Lingkugan Pemerintah Kota Mojokerto, selanjutnya akan dibentuk Agen Perubahan Di Tingkat Pemerintah Kota Mojokerto dan pada semua Perangkat Daerah untuk mengoptimalkan peran agen perubahan dalam menciptakan budaya kinerja yang cepat,adaptif, dan dinamis. di samping itu, perubahan yang ingin diwujudkan oleh agen perubahan	Peningkatan nilai indeks RB Kota Mojokerto	BAGIAN ORGANISASI SETDA

<table>
<tr><th>No</th><th>Rekomendasi</th><th>Tindak Lanjut</th><th>Tujuan/Masalah Yang Diselesaikan</th><th>Perangkat Daerah</th></tr>
<tr><td></td><td></td><td>agar disesuaikan dengan karakter layanan utama di masing-masing unit kerja;
- Sedang dilakukan upaya penyederhanaan struktur organisasi perangkat daerah sebagai tindak lanjut Surat Edaran Menteri PANRB Nomor 382 s.d 393 Tahun 2019 tentang Langkah Strategis dan Konkret Penyederhanaan Birokrasi dan Peraturan Menteri PANRB Nomor 28 Tahun 2019 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi ke dalam Jabatan Fungsional serta beberapa Surat Menteri Dalam Negeri terkait Penyederhanaan Birokrasi, Penyederhaan birokrasi ini dimaksudkan untuk mewujudkan birokrasi yang dinamis dan profesional dalam upaya peningkatan efektifitas dan efisiensi guna mendukung kinerja pelayanan pemerintah kepada publik</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td></td><td>h. Indeks infrastrukur belum dijelaskan secara rinci, sehingga belum diketahui angka capaian tersebut diperoleh dari mana.</td><td>Indeks Infrastruktur komponennya terdiri dari:
a. Indeks Infrastruktur Pekerjaan Umum;
b. Indeks Infrastruktur Dasar Permukiman;
c. Indeks Infrastruktur Lalu LIntas dan Angkutan Jalan; dan
d. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)
Adapun capaian Indeks Infrastruktur mulai tahun 2018 - 2021, dapat disajikan sebagaimana tabel di bawah ini.
<table><tr><th rowspan="2">Indikator</th><th colspan="3">Tahun</th></tr><tr><th>2018</th><th>2019</th><th>2020</th></tr><tr><td>Indeks Infrastruktur Pekerjaan Umum</td><td>75</td><td>77,93</td><td>85,56</td></tr><tr><td>Indeks Infrastruktur Dasar Pemukiman</td><td>74</td><td>94,61</td><td>95,96</td></tr><tr><td>IKLH</td><td>63,02</td><td>65,24</td><td>74,02</td></tr></table></td><td>Untuk mengetahui kemajuan atau capaian kinerja penyediaan infrastruktur untuk mendukung pembangunan ekonomi dengan memperhatikan lingkungan hidup</td><td></td></tr>
</table>

<table>
<tr><th>No</th><th>Rekomendasi</th><th>Tindak Lanjut</th><th>Tujuan/Masalah Yang Diselesaikan</th><th>Perangkat Daerah</th></tr>
<tr><td></td><td></td><td><table>
<tr><td>Indeks Infrastruktur Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)</td><td>59,52</td><td>87,32</td><td>91,6</td></tr>
<tr><td>Indeks Infrastruktur</td><td>69,21</td><td>82,87</td><td>87,88</td></tr>
</table></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td></td><td>i. Perlu diperjelas, ketika nilai IPM mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2019, namun dilihat dari indeks pendidikan dan indeks PPP (Purchasing Power Parity/kemampuan daya beli) tidak sesuai target, hanya indeks kesehatan yang mencapai target. Padahal ketiga aspek itu adalah pembentuk dari IPM. Perlu dicari sumber permasalahan yang menyebabkan hal tersebut terjadi</td><td>Jawaban sesuai dengan nomor 17 a</td><td></td><td>BAPPEDALITBANG</td></tr>
<tr><td></td><td>j. Target IKU pelanggaran Perda yang terselesaikan terlalu rendah, selain itu, perlu keseriusan dalam mewujudkan WBK/WBBM sebagai bagian dari reformasi birokrasi di Kota Mojokerto.</td><td>Rekomendasi diperhatikan dan akan ditindaklanjuti dengan penyesuaian target IKU pelanggaran Perda sesuai capaian tahun 2019. Selanjutnya target tahun 2021 s/d 2023 akan disesuaikan dan dimasukan pada perubahan RPJMD tahun 2018 – 2023
Tahun 2021 untuk mewujudkan WBK/WBBM dilakukan langkah – langkah :
- Adanya komitmen dari kepala PD
- Asistensi ZI (Zona Integritas) menuju WBK kepada PD yang diusulkan (Kec. Prajuritkulon, Dishub, PKM Blooto, dan PKM Gedongan)
- Asistensi ZI (Zona Integritas) menuju WBBM kepada PD yang diusulkan yakni PKM Wates
- Evaluasi dan Monitoring</td><td>Terwujudnya indikator kinerja yang SMART (Spesific, Meausarabel, Achieveable, Realistic, Timebound) serta yerwujudnya WBK/WBBM</td><td>SATPOL PP</td></tr>
</table>

No	Rekomendasi	Tindak Lanjut	Tujuan/Masalah Yang Diselesaikan	Perangkat Daerah
	k. Perlu ada penjelasan strategi kebijakan dalam rangka mendongkrak pertumbuhan PDRB sektor Industri, Perdagangan, Pariwisata, sektor lainnya yang mengalami konstraksi.	Strategi kebijakan yang diambil oleh Pemerintah Kota Mojokerto untuk menumbuhkan sektor ekonomi dilakukan melalui: a. PDRB memiliki peran penting dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi suatu daerah, dimana semakin tinggi PDRB maka dapat dikatakan bahwa pertumbuhan ekonominya juga tinggi. Untuk itu Pemerintah Kota berupaya meningkatkan PDRB-nya khususnya sektor industri yang memilki prospek potensial untuk dikembangkan. Berbagai pelatihan telah dilakukan untuk menumbuh kembangkan sektor industri di Kota Mojokerto, diantaranya: - Pelatihan Jahit Upper Sepatu 3in1 - Pelatihan Jajanan Tradisional Pelatihan Jahit APD dan Masker - Pelatihan Membuat Hand Sanitiser dab Hand Soap - Pelatihan Bordir Aplikasi - Pelatihan Leather Craft - Pelatihan Batik Tehnik Sibori - Pelatihan Teknik Ecoprint - Pelatihan Cor Aluminium / Kuningan - Pelatihan Anyaman Bambu - Pelatihan HandyCraft, dll c. Saat ini juga sedang dilakukan kajian untuk menggali peluang kemungkinan adanya KIHT (Kawasan Industri Hasil Tembakau) d. Fasilitasi kepada Pelaku UMKM dalam bentuk fasilitasi program pembiayaan KUR dan Dana Bergulir dari Provinsi Jawa Timur. Selain itu, pada tahun 2021 ada program bantuan wirausaha pemula dari Kementerian Koperaai.	a. Sektor industri merupakan penyerap tenaga kerja terbesar sehingga semakin banyak industri yang berkembang di Kota Mojokerto, semakin banyak tenaga kerja yang terserap. b. Agar industri tembakau di Kota Mojokerto terfokus dalam satu Kawasan (wilayah) c. Untuk memantau perkembangannya agar dapat diketahui kendala dan upaya yang diperlukan untuk memberikan stimulus dan pembinaan di bidang industri dan perdagangan d. Dengan adanya pusat perdagangan baru maka akan meningkatkan jumlah pedagang yang ada di kota mojokerto sehingga berpengaruh terhadap kenaikan PDRB Sektor Perdagangan	DISKOPUKMPERINDAG

<table>
<tr><th>No</th><th>Rekomendasi</th><th>Tindak Lanjut</th><th>Tujuan/Masalah Yang Diselesaikan</th><th>Perangkat Daerah</th></tr>
<tr><td></td><td></td><td>e. Fasiltasi pemasaran melalui offline (stand produk uggulan di Surise Mall). Selain itu, untuk pemasara online difasilitasi melalui pemasara produk dengakerjasama dega Bhineka.Com.
f. Sektor Perdagangan
Telah diupayakan dengan membangun beberapa Pasar baru dengan tujuan mencipatakan pusat perdagangan baru yang lebih merata diwilayah Mojokerto.Pasar tersebut antara lain : Pasar Prapanca, Pasar Benteng Pancasila, dan Rest Area Gunung Gedangan</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td></td><td>l. Perlu ada penjelasan kinerja anggaran (capaian target dan realisasi) dalam mendukung capaian program dan kegiatan pada pelaksanaan Urusan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar, pelaksanaan Urusan Wajib yang Tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar, Pelaksanaan Urusan Pilihan, Pelaksanaan urusan pendukung, Pelaksanaan urusan Penunjang, Pelaksanaan Urusan pengawasan, Pelaksanaan Urusan Kewilayahan, Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Umum. BPKPD</td><td>Kinerja anggaran (target dan realisasi) pelaksanaan program kegiatan dan kegiatan secara ringkas berdasarkan urusan dan unsur penyelenggaraan pemerintahan di Kota Mojokerto, dapat disajikan sebagaimana tabel di bawah ini.
<table>
<tr><th>No</th><th>Urusan Wajib Pelayanan Dasar</th><th>Pagu (Rp)</th><th>Realisasi (Rp)</th><th>Capaian (%)</th></tr>
<tr><td>1.</td><td>Dinas Pendidikan</td><td>61.772.363.934</td><td>54.599.718.213</td><td>88,39</td></tr>
<tr><td>2.</td><td>Dinas Kesehatan</td><td>62.171.122.784</td><td>53.900.689.438</td><td>86,70</td></tr>
<tr><td>3.</td><td>RSU Dr. Wahidin Sudiro Husodo</td><td>133.626.713.000</td><td>117.576.217.565</td><td>87,99</td></tr>
<tr><td>4.</td><td>Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang</td><td>55.043.561.550</td><td>50.012.952.164</td><td>90,86</td></tr>
<tr><td>5.</td><td>Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman</td><td>17.063.433.599</td><td>15.711.742.262</td><td>92,08</td></tr>
<tr><td>6.</td><td>Satuan Polisi Pamong Praja</td><td>7.333.953.600</td><td>6.816.105.385</td><td>92,94</td></tr>
<tr><td>7.</td><td>Dinas Sosial</td><td>3.127.113.890</td><td>2.700.473.793</td><td>86,36</td></tr>
<tr><td colspan="2">Jumlah</td><td>340.138.262.357</td><td>301.317.898.820</td><td>88.59</td></tr>
</table></td><td>Sebagai referensi dalam melakukan evaluasi untuk perencanaan penganggaran yang akan datang agar kenerja anggaran optimal.</td><td></td></tr>
</table>

No	Rekomendasi	Tindak Lanjut	Tujuan/Masalah Yang Diselesaikan	Perangkat Daerah

No	Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)
1.	Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	2.468.403.061	2.155.815.851	87,34
2.	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	1.044.155.740	937.431.236	89.78
3.	Dinas Lingkungan Hidup	13.829.806.472	13.054.166.643	94,39
4.	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	1.843.312.293	1.669.070.711	90,55
5.	Dinas Perhubungan	5.650.521.082	5.500.568.683	97,35
6.	Dinas Komunikasi dan Informatika	4.437.419.263	4.289.814.922	96,67
7.	Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Tenaga Kerja	2.432.246.550	2.333.293.310	95,93
8.	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	5.992.132.548	5.245.806.821	87,54
9.	Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata	1.807.341.800	1737.062.597	96.11
10.	Dinas Perpustakaan dan Arsip	1.713.690.225	1.705.020.604	99,49
Jumlah		**41.219.029.034**	**38.628.051.378**	**93.71**

<table>
<tr><th>No</th><th>Rekomendasi</th><th>Tindak Lanjut</th><th>Tujuan/Masalah Yang Diselesaikan</th><th>Perangkat Daerah</th></tr>
<tr><td></td><td></td><td>
<table>
<tr><th>No</th><th>Urusan Pilihan</th><th>Pagu (Rp)</th><th>Realisasi (Rp)</th><th>Capaian (%)</th></tr>
<tr><td>1.</td><td>Dinas Perindustrian dan Perdagangan</td><td>12.132.989.684</td><td>11.070.653.512</td><td>91,24</td></tr>
<tr><td>2.</td><td>Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata</td><td>398.838.050</td><td>304.149.050</td><td>76,26</td></tr>
<tr><td>3.</td><td>Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian</td><td>468.244.637</td><td>454.274.593</td><td>97.02</td></tr>
<tr><td>4.</td><td>Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata</td><td>398.838.050</td><td>304.149.050</td><td>76,26</td></tr>
<tr><td></td><td>Jumlah</td><td>13.398.910.421</td><td>12.133.226.205</td><td>90.55</td></tr>
</table>
<table>
<tr><th>No</th><th>Unsur Pendukung</th><th>Pagu (Rp)</th><th>Realisasi (Rp)</th><th>Capaian (%)</th></tr>
<tr><td>1.</td><td>Sekretariat Daerah</td><td>20.564.433.344,5</td><td>20.071.586.782</td><td>97,60</td></tr>
<tr><td>2.</td><td>Sekretariat DPRD</td><td>18.851.484.050</td><td>16.328.867.434</td><td>86,62</td></tr>
<tr><td></td><td>Jumlah</td><td>39.415.917.394</td><td>20.071.586.782</td><td>50.92</td></tr>
</table>
<table>
<tr><th>No</th><th>Unsur Kewilayahan</th><th>Pagu (Rp)</th><th>Realisasi (Rp)</th><th>Capaian (%)</th></tr>
<tr><td>1.</td><td>Kecamatan Prajurit Kulon</td><td>16.264.174.446</td><td>13.030.419.264</td><td>80,12</td></tr>
<tr><td>2.</td><td>Kecamatan Magersari</td><td>12.845.891.263</td><td>10.828.371.336</td><td>84,29</td></tr>
<tr><td>3.</td><td>Kecamatan Kranggan</td><td>6.335.366.820</td><td>5.986.303.444</td><td>94,49</td></tr>
<tr><td></td><td>Jumlah</td><td>35.445.432.529</td><td>29.845.094.044</td><td>84.20</td></tr>
</table>
</td><td></td><td></td></tr>
</table>

<table>
<tr><th>No</th><th>Rekomendasi</th><th>Tindak Lanjut</th><th>Tujuan/Masalah Yang Diselesaikan</th><th>Perangkat Daerah</th></tr>
<tr><td></td><td></td><td>
<table>
<tr><th>No</th><th>Unsur Pengawasan</th><th>Pagu (Rp)</th><th>Realisasi (Rp)</th><th>Capaian (%)</th></tr>
<tr><td>1.</td><td>Inspektorat</td><td>1.660.660.000</td><td>1.623.528.808</td><td>97,76</td></tr>
</table>
<table>
<tr><th>No</th><th>Unsur Penunjang</th><th>Pagu (Rp)</th><th>Realisasi (Rp)</th><th>Capaian (%)</th></tr>
<tr><td>1.</td><td>Badan Perencanaan Pembangunan</td><td>4.520.425.391</td><td>4.426.505.909</td><td>97,92</td></tr>
<tr><td>2.</td><td>Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan Dan Ase</td><td>15.244.189.652</td><td>13.906.221.633</td><td>91,22</td></tr>
<tr><td>3.</td><td>Badan Kepegawaian</td><td>5.597.477.838</td><td>5.499.228.929</td><td>98,24</td></tr>
<tr><td>4.</td><td>Badan Penelitian Dan Pengembangan</td><td>1.422.182.431</td><td>1.373.699.261</td><td>96,5909</td></tr>
<tr><td></td><td>Jumlah</td><td>26.784.275.312</td><td>25.205.655.732</td><td>94.11</td></tr>
</table>
</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td></td><td>m. Refocusing dan realokasi Anggaran sepertinya menjadi permasalahan umum dan utama dalam pelaksanaan aktivitas pencapaian target kinerja program dan kegiatan. Diperlukan inovasi dari Pemerintah Kota Mojokerto dalam melakukan pelayanan publik dan aktivitas pencapaian kinerja dengan memanfaatkan Teknologi Informasi, sehingga persoalan keterbatasan anggaran dan juga penerapan protokol kesehatan di masa pandemi dapat teratasi</td><td>Pemerintah Kota Mojokerto akan melakukan inovasi terkait pelayanan dan aktivitas pencapaian kinerja dengan menggunakan TI melalui :
- Terkait BANSOS - Aplikasi bantuan dan cek bantuan sosial
- TELECENTER DARING
- Penerapan TTE pada aplikasi Perijinan Online
- Penambahan Titik Hotspot di kelurahan dan OPD
- Aplikasi Antrian MPP GMSC secara online</td><td>Pelayanan informasi Bansos yang akuntable dan dapat diandalkan. Pelatihan kepada pelajar dan masyarakat secara daring untuk peningkatan kapabilitas SDM di masa pandemi.
Output Produk Perijinan lebih akuntable dan keandalan legalitas melalui sertifikat elektronik. Peningkatan coverage area hotspot untuk masyarakat yang lebih luas selama pandemi dari 150 titik</td><td>DSP3A</td></tr>
</table>

No	Rekomendasi	Tindak Lanjut	Tujuan/Masalah Yang Diselesaikan	Perangkat Daerah
			- 200 titik untuk peningkatan akses informasi kepada masyarakat. Peningkatan kemudahan proses mendaftar dan memantau antrian di MPP GMSC sehingga mengurangi terjadi kerumunan selama pandemi.	

3.6 INOVASI DAN PENGHARGAAN DAERAH

Penyelenggaraan Pemerintahan Kota Mojokerto Tahun 2021 telah menorehkan prestasi yang membanggakan. Sinergi dan kolaborasi bersama akademisi, pelaku usaha, masyarakat, pemerintah pusat maupun media telah mewujudkan Pemerintah Kota Mojokerto dianugerahi berbagai penghargaan. Berbagai prestasi dan penghargaan berhasil ditorehkan dalam berbagai bidang pembangunan dan memperoleh pengakuan pada level nasional. Adapun penghargaan dan prestasi yang telah dicapai pada periode tahun 2021 dimaksud diuraikan pada Tabel 3.20.

Tabel 3. 20 Penghargaan/Prestasi Pemerintah Kota Mojokerto Tahun 2021

No.	Nama Penghargaan/Prestasi	Pemberi Penghargaan	Penerima Penghargaan
1	Penghargaan Harmony Award 2020	Kementerian Agama	Walikota Mojokerto (Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Mojokerto)
2	Anugrah Kebudayaan Persatuan Wartawan Indonesia Pusat 2021	Persatuan Wartawan Indonesia (PWI)	Walikota Mojokerto
3	Unit Penyelenggara Pelayanan Publik Kategori Sangat Baik Tahun 2020	Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi	Walikota Mojokerto (Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Mojokerto)
4	Unit Penyelenggara Pelayanan Publik Kategori Sangat Baik	Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi	Walikota Mojokerto (Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja dan Kota Mojokerto)
5	Merdeka Award dengan predikat sebagai Daerah Dengan Program Inspiratif Bagi UMKM Di Masa Pandemi	Merdeka.com bekerja sama dengan Kantor Staf Presiden; Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi; Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah; serta Kementerian Komunikasi dan Informatika	Walikota Mojokerto (Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kota Mojokerto)
6	Penghargaan Perencanaan Pembangunan Daerah Terbaik III Kategori di Provinsi Jawa Timur	Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/ Badan Perencanaan Pembangunan Nasional	Walikota Mojokerto (Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan)
7	Opini Wajar Tanpa Pengecualian	Badan Pemeriksa Keuangan	Walikota Mojokerto (Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah)
8	Penghargaan Kabupaten/Kota Layak Anak	Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Walikota Mojokerto
9	Penghargaan terbaik NIK (Nomor Induk Koperasi)	Provinsi Jawa Timur	Walikota Mojokerto (Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah,

No.	Nama Penghargaan/Prestasi	Pemberi Penghargaan	Penerima Penghargaan
			Perindustrian dan Perdagangan Kota Mojokerto)
10	Penghargaan Anugerah Parahita Ekapraya Tahun 2020 Kategori Madya	Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Walikota Mojokerto (Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak)
11	Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) 5 kali berturut-turut	Kementerian Keuangan	Walikota Mojokerto (Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah)
12	Implementasi Satu Data Indonesia	Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Timur	Walikota Mojokerto (Dinas Komunikasi dan Informatika)
13	Penghargaan Anugerah Parahita Ekapraya (APE) 2021 dengan Kategori Madya (pengembang)	Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Walikota Mojokerto (Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak)
14	Penghargaan Kepala Daerah Inofativ (KDI) 2021 dengan Kategori Ekonomi	Koran SINDO dan SINDOnews yang tergabung dalam MNC Portal Indonesia	Walikota Mojokerto (Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kota Mojokerto)
15	Penghargaan Jatim Covid-19 Heroes dengan Kategori Capaian Vaksinasi Tertinggi	Harian Surya	Walikota Mojokerto (Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana)
16	Penganugerahan Keterbukaan Informasi Publik (KI Awards) 2021 sebagai Badan Publik Informatif dengan Kategori A	Komisi Informasi Provinsi Jawa Timur	Walikota Mojokerto (Dinas Komunikasi dan Informatika)
17	Anugerah Inovasi Daerah dan Teknologi atau Inotek Award Provinsi Jawa Timur Tahun 2021 dalam Kategori Kepala Daerah Pembina Inovasi Terbaik	Badan Penelitian dan Pengembangan Provinsi Jawa Timur	Walikota Mojokerto (Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan)
18	Anugerah Meritokrasi Kategori Baik	Komisi Aparatur Sipil Negara	Walikota Mojokerto (Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia)
19	Penghargaan sebagai Pemerintah Daerah dengan Predikat Terbaik dalam Penanganan COVID-19 Tahun 2021	Provinsi Jawa Timur	Walikota Mojokerto (Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana)
20	Penghargaan sebagai Partisipan dalam Penerbitan dan Pembagian NIB Bagi Pelaku Usaha Menengah Kecil Perseorangan	Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM)	Walikota Mojokerto (Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kota Mojokerto)
21	Penganugerahan Innovative Government Award (IGA) Tahun 2021 dengan Predikat Terinovatif	Kementerian Dalam Negeri	Walikota Mojokerto (Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan)